



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6380) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
6. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
7. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Pasal 2

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah Tahun 2025-2029 merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan jangka waktu RPJMD.
- (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. program prioritas pembangunan yang tercantum

- dalam RPJMD untuk dipercepat target programnya;
- b. hasil koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan;
- c. isu strategis yang berkembang;
- d. kebijakan nasional; dan
- e. ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 3

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Gambaran Umum dan Kondisi Riset dan Inovasi di Daerah;
 - c. Bab III : Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah;
 - d. Bab IV : Analisis Kesenjangan Kebijakan Berbasis Bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah
 - e. Bab V : Strategi Riset dan Inovasi di Daerah
 - f. Bab VI : Peta Jalan Riset dan Inovasi di Daerah
 - h. Bab VII : Penutup
- (2) Ketentuan mengenai rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah.
- (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*); dan
 - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
- (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada kepala perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 19 Januari 2026
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 19 Januari 2026
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.

SONI HARISON

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2026 NOMOR 1





BAPPELITBANGDA
KOTA BANJAR



RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN IPTEK DAERAH (RIPJPID) 2025 - 2029

PEMERINTAH KOTA BANJAR

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iiii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	8
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Kerangka Teoritis	11
1.4.1 Kebijakan Publik.....	11
1.4.2 Perencanaan Pembangunan	14
1.4.3 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	18
1.4.4 Produk Hukum Daerah.....	28
1.5 Metode	32
1.5.1 Teknik Pengumpulan Data	33
1.6 Sasaran	34
1.7 Keterkaitan RIPJPID dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	35
1.8 Sistematika Kajian.....	37
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH	41
2.1 Gambaran Umum Daerah.....	41
2.2 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Saat Ini Pada PUD dan Permasalahan Utama Daerah yang Diusulkan	70
BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH	146
BAB IV ANALISIS KESENJANGAN.....	257

BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH.....	344
5.1 Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.....	344
5.2 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.....	350
BAB VI PETA JALAN KAJIAN KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH	358
BAB VII PENUTUP.....	504
7.1 Kesimpulan	504
7.2 Rekomendasi.....	505
DAFTAR PUSTAKA.....	507

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Tujuan Kebijakan Publik.....	12
Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Banjar Per Kecamatan Tahun 2024	43
Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Banjar Tahun 2023-2024	45
Tabel 2. 3 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banjar Tahun 2024	46
Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banjar Tahun 2024.....	47
Tabel 2. 5 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kota Banjar Tahun 2022- 2024	50
Tabel 2. 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Banjar (Persen) Tahun 2023-2024	51
Tabel 2. 7 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Banjar Tahun 2024.....	51
Tabel 2. 8 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Banjar Tahun 2024.....	53
Tabel 2. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Banjar (Persen) Tahun 2023-2024	54
Tabel 2. 10 Nilai PDRB Kota Banjar Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2022-2024.....	55
Tabel 2. 11 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Banjar Tahun 2022-2024	57
Tabel 2. 12 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Ribu Rupiah) Tahun 2023-2024	59
Tabel 2. 13 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Banjar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024.....	61
Tabel 2. 14 Indikator Kemiskinan Kota Banjar Tahun 2021-2024	62
Tabel 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten Kota Tahun 2022-2024	63

Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjar dan Komponen Pembentuknya Tahun 2022-2024.....	64
Tabel 2. 17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Banjar Tahun 2022-2024	65
Tabel 2. 18 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Banjar Tahun 2022-2024	71
Tabel 2. 19 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Banjar Dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	72
Tabel 2. 20 Selisih Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Banjar Dengan Provinsi Jawa Barat dan Skor Nasional Tahun 2022-2024	73
Tabel 2. 21 Perkembangan Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Banjar Tahun 2022-2024.....	74
Tabel 2. 22 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin di Kota Banjar Tahun 2019-2023	78
Tabel 2. 23 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.....	85
Tabel 3. 1 Skor dan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022.....	149
Tabel 3. 2 Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah .	149
Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan Antara Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan.....	258
Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Produk Unggulan Daerah.....	345
Tabel 5. 2 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah	351
Tabel 6. 1 Sub Elemen Ekosistem RID	358

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Arsitektur Dokumen Rencana Pembangunan Daerah	22
Gambar 1. 2 Konsep Perencanaan Pembangunan di Indonesia	23
Gambar 1. 3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	27
Gambar 1. 4 Dokumen Rencana Perangkat Daerah	28
Gambar 1. 5 Keterkaitan RIPJPID dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya	36
Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Banjar	42
Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Kota Banjar (Ribuan) Tahun 2024	48
Gambar 2. 3 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Banjar Tahun 2021-2022	80

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses yang bersifat multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, orientasi masyarakat, serta kelembagaan nasional, di samping tetap mengupayakan percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan disparitas pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Melalui pembangunan, setiap negara berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya secara menyeluruh dan berkelanjutan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, politik, maupun lingkungan hidup. Indonesia pun menempatkan pembangunan sebagai agenda utama dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan nasional di Indonesia bukanlah sekadar rangkaian proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat saja, melainkan merupakan hasil dari proses pembangunan yang berlangsung di berbagai daerah. Pembangunan daerah direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan nyata di daerah tersebut, sehingga menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Dalam pembangunan daerah, sering terjadi ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Ketimpangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti adanya daerah yang kaya akan potensi sumber daya tetapi tidak mampu mengelolanya dengan baik. Di sisi lain, terdapat daerah yang memiliki keterbatasan potensi sumber daya sehingga pemerintah daerah kesulitan merumuskan strategi

pembangunan yang efektif. Selain itu, ketidakmerataan infrastruktur juga menjadi salah satu penghambat utama dalam pembangunan daerah.

Berbagai tantangan dalam pembangunan daerah, seperti ketimpangan pengelolaan sumber daya, keterbatasan potensi wilayah, dan ketidakmerataan infrastruktur menuntut adanya pendekatan yang lebih strategis dan berbasis data dalam perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, riset dan inovasi memainkan peran penting sebagai landasan dalam menghadirkan solusi yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan serta sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Riset dan inovasi memungkinkan pemerintah daerah secara sistematis mengeksplorasi dan menciptakan pengetahuan, teknologi, maupun produk yang mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat sekaligus menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada.

Riset menjadi penggerak utama dalam kemajuan berbagai sektor karena membuka peluang untuk penemuan baru, pengembangan teknologi, dan pemecahan masalah yang kompleks. Dengan riset yang mendalam, pemerintah daerah dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap wilayahnya, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi masyarakat, serta merancang solusi inovatif yang relevan. Inovasi yang lahir dari proses riset ini kemudian membawa dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, hingga kesehatan. Menurut Hopkins dan Honer (2004) sebagaimana dikutip oleh Agus (2024)¹, riset merupakan proses sistematis untuk mengajukan dan menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah melalui pengumpulan data, analisis, serta

¹ Agus F. H. (2024). Optimalisasi Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah di Kota Tasikmalaya. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(6). 945.

interpretasi hasil dalam memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap suatu fenomena. Sementara itu, inovasi dipahami sebagai gagasan baru yang diterapkan untuk menciptakan atau menyempurnakan produk, proses, maupun layanan (Robbins, 1994 dalam Agus, 2024)².

Melalui kombinasi riset dan inovasi, daerah dapat merumuskan solusi yang lebih baik untuk mengatasi berbagai tantangan lokal sekaligus meningkatkan daya saing wilayahnya. Penerapan riset dan inovasi dalam pembangunan daerah sangat penting karena dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan, memecahkan masalah-masalah lokal secara efektif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat wilayah tersebut.

Dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, Pasal 5 menetapkan bahwa penyelenggaraan riset di daerah mencakup berbagai aktivitas seperti penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Selanjutnya, Pasal 6 menjelaskan bahwa penelitian diarahkan untuk mendukung lima tujuan utama, yaitu:

- a) peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b) perbaikan tata kelola pemerintahan daerah;
- c) pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d) peningkatan daya saing daerah; dan
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, pengembangan dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Adapun pengkajian, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu: (a) pengujian; (b) pengembangan teknologi; (c) rancang bangun; dan (d) pengoperasian. Tahapan

² *Ibid.*

terakhir adalah penerapan, yang dilaksanakan untuk mendorong inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah. Kegiatan penerapan ini mencakup: (a) alih teknologi; (b) intermediasi teknologi; (c) difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (d) komersialisasi teknologi.

Agar riset dan inovasi dapat diimplementasikan secara efektif, maka diperlukan dokumen strategis yang mampu memberikan arah jelas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat daerah. Oleh karena itu, penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah merupakan langkah strategis yang tidak dapat diabaikan. Dokumen ini berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta teknologi di tingkat daerah secara sistemik, komprehensif, dan partisipatif. Selain itu, dokumen ini juga memuat peran penting ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya riset dan inovasi dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Melihat urgensi tersebut, Pemerintah Kota Banjar melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) memandang perlu untuk menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi kebijakan berbasis riset dan inovasi, serta menjawab tantangan pembangunan yang spesifik sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan geografis Kota Banjar.

Pelaksanaan riset dan inovasi oleh Bappelitbangda Kota Banjar selain memerlukan adanya sinkronisasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia, juga memerlukan sinkronisasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pihak lembaga penelitian perguruan tinggi. Hal ini diperlukan untuk tercapainya pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kota

Banjar yang dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat di daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Banjar sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota menjadi penyelenggara fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang dilakukan secara terintegrasi di daerah. Hal ini diperlukan agar riset dan inovasi yang dilakukan bersifat menyeluruh dalam mengelola sumber daya ekonomi daerah.

Proses penyusunan Rencana Induk Dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi oleh Bappelitbangda Kota Banjar Tahun 2025-2029 dilakukan melalui kegiatan rapat, diskusi, mengundang para ahli, melakukan konsultasi dengan mitra dan lembaga, melakukan *Forum Group Discussion* (FGD) serta kegiatan lainnya. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan partisipasi atau keterlibatan masyarakat luas dalam kegiatan riset dan inovasi di Bappelitbangda Kota Banjar.

Peran serta atau keterlibatan masyarakat mutlak diperlukan dalam penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi baik secara individu maupun kelompok terutama terkait dengan data, gagasan, ide atau informasi baik secara langsung maupun tertulis agar kebijakan yang akan dilakukan sejalan dengan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kondisi demografi Kota Banjar yang didominasi oleh penduduk usia produktif menjadi modal penting dalam memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,6 pada tahun 2024, Kota Banjar menempati peringkat

ke-12 dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat sehingga mencerminkan kualitas sumber daya manusia yang cukup baik. Ditambah lagi dengan posisi strategis Kota Banjar sebagai perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadikannya pusat perdagangan dan transportasi regional yang mendukung pengembangan berbagai produk lokal seperti batik khas Banjar, kerajinan anyaman, serta makanan olahan yang juga menjadi daya tarik wisata kuliner.

Kota Banjar juga memiliki lahan produktif yang mendukung sektor pertanian seperti padi, palawija, dan hortikultura. Dari berbagai produk lokal yang ada, tiga komoditas utama yang menjadi produk unggulan daerah adalah rambutan Sibatulawang, pepaya kalifornia, dan belimbing madu. Ketiga produk ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi sekaligus menjadi identitas khas Kota Banjar. Selain memperkuat ekonomi lokal, produk unggulan tersebut juga membuka peluang ekspor ke berbagai daerah di Indonesia bahkan ke pasar internasional.

Di sisi lain, Kota Banjar juga menghadapi berbagai tantangan pembangunan yang cukup kompleks. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memahami arti strategis sebuah inovasi sehingga banyak potensi inovasi yang belum tergarap secara optimal untuk mendorong pembangunan daerah. Selain itu, budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik cenderung menghambat terciptanya iklim kerja yang dinamis dan partisipatif sehingga inovasi sulit tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan. Kepemimpinan di lingkungan pemerintahan Kota Banjar juga masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi sehingga dukungan dan keberanian mengambil risiko terbatas dan menimbulkan proses inovasi berjalan lambat dan kurang efektif.

Masalah komunikasi dan koordinasi antar stakeholder juga menjadi hambatan yang signifikan karena minimnya sinergi antar instansi pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat mengakibatkan program inovasi kurang terintegrasi dan kurang mendapat dukungan luas. Belum adanya bimbingan teknis (bimtek) inovasi di lingkup pemerintah Kota Banjar menambah kesenjangan kapasitas aparatur dalam memahami dan mengelola proses inovasi. Keterbatasan anggaran inovasi juga menjadi kendala serius karena dana yang tersedia belum memadai untuk mendukung riset, pengembangan teknologi, dan implementasi program inovatif yang berdampak luas. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan inovasi masih rendah yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya inovasi dalam meningkatkan kualitas hidup dan pelayanan publik. Hal ini diperparah dengan keterbatasan sarana komunikasi yang menghambat penyebaran informasi dan edukasi inovasi secara merata ke seluruh lapisan masyarakat terutama di wilayah-wilayah yang lebih terpencil.

Tantangan-tantangan tersebut saling berkaitan dan membutuhkan pendekatan terpadu agar Kota Banjar dapat membangun ekosistem riset dan inovasi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sehingga penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Banjar Tahun 2025-2029 menjadi langkah strategis dalam membangun ekosistem riset yang kuat, mendorong inovasi lokal, dan memastikan pembangunan daerah berjalan secara berkelanjutan. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi instrumen kunci dalam mendukung visi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Kota Banjar, serta memperkuat posisi daerah dalam menghadapi tantangan masa depan. Dengan adanya Rencana

Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah, Pemerintah Kota Banjar akan memiliki acuan strategis yang dapat memastikan arah pembangunan berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi.

Pentingnya penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah Kota Banjar Tahun 2025-2029 dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi daerah yang masih menghadapi berbagai tantangan. Melalui dokumen ini, diharapkan arah pembangunan Kota Banjar ke depan dapat lebih terarah, adaptif terhadap perubahan, serta mampu menjawab tantangan lokal dengan solusi berbasis data dan ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah menjadi instrumen penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis inovasi. Dokumen ini juga mendukung pencapaian visi pembangunan Kota Banjar jangka panjang hingga tahun 2029. Dengan adanya RIPJPID, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat lebih terarah, terukur, dan mampu menciptakan inovasi yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Banjar secara berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
- 10) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 7 tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- 11) Peraturan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;
- 12) Peraturan Walikota Banjar Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- 13) Peraturan Walikota Banjar Nomor 33 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
- 14) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 15) Peraturan Walikota Banjar Nomor 69 Tahun 2024 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025;
- 16) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjar Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Banjar Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan gambaran tentang arahan riset dan inovasi di Kota Banjar dalam mendukung pembangunan daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Banjar Tahun 2025-2029 adalah

1. Untuk memberikan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra dan RPJMD) sebagai bagian yang tidak terpisahkan yang disusun berdasarkan program prioritas pembangunan untuk mempercepat capaian target programnya serta mampu mengakomodir kebutuhan riset dan inovasi dalam lingkup Pemerintah Kota Banjar;
2. Untuk menyelaraskan agenda riset dan inovasi di Kota Banjar agar terbangun keterpaduan, keberlanjutan, serta ketepatan

sasaran dalam merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah.

3. Sebagai panduan untuk melaksanakan kegiatan riset dan inovasi di Kota Banjar;

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai melalui penyusunan dokumen ini meliputi:

- A. Menggambarkan kondisi umum dan kondisi riset serta inovasi di Kota Banjar;
- B. Mengidentifikasi tantangan dan peluang riset dan inovasi di Kota Banjar;
- C. Menganalisis kesenjangan yang ada di Kota Banjar;
- D. Merumuskan strategi untuk memperkuat dan meningkatkan ekosistem riset dan inovasi Kota Banjar;
- E. Menyusun peta jalan kajian kebijakan riset dan inovasi di Kota Banjar;
- F. Merumuskan program indikatif yang sesuai dengan hasil riset di Kota Banjar.

1.4 Kerangka Teoritis

1.4.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dapat diperluas lagi pemaknaannya menjadi “Kebijakan Publik”. Meminjam penjelasan yang disampaikan Widodo (2021:10), untuk mendefinisikan kebijakan publik kita dapat mengkategorikan definisi kebijakan publik berdasarkan dua pendekatan, yaitu definisi kebijakan publik yang didasarkan kepada maksud dan tujuan dari kebijakan publik serta definisi kebijakan publik yang didasarkan kepada dampak dari kebijakan publik.

Pertama, definisi kebijakan publik yang menekankan kepada maksud dan tujuan kebijakan publik dapat kita sandarkan kepada

definisi yang dirumuskan Thomas R. Dye dalam bukunya “*Understanding Public Policy*” (2013:3), yaitu “*public policy is whatever government choose to do or not to do*”. Kedua, definisi kebijakan publik yang menekankan dampak dari kebijakan publik kita dapat meminjam definisi yang disampaikan oleh Richard Simeon dalam Widodo (2021:11) “*what government actually do and why*”.

Selain kedua definisi tersebut yang dirumuskan oleh Dye dan Simeon tersebut, kita juga dapat menggunakan definisi yang disampaikan oleh Inu Kencana dalam Afdhal (2015:30-31), yaitu:

“Kebijakan publik merupakan semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur inovasi dan pembuka terjadinya suatu kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.”

Lebih lanjut, Maddison & Deniss (2009:4) menguraikan bahwa dalam melihat kebijakan publik, kita dapat menggunakan dua pendekatan. Pertama, kebijakan publik sebagai “*authoritative choice*” dimana dalam pendekatan ini, proses kebijakan publik dijalankan secara vertikal dan hierarkis. Kedua, kebijakan publik sebagai “*structured interaction*” dimana dalam pendekatan ini, proses kebijakan publik berjalan secara horizontal dan berupaya untuk menghasilkan kebijakan yang kompromis dan mengakomodir banyak kepentingan.

Supaya lebih mudah memahami penjelasannya, Riant Nugroho menggambarkan tujuan kebijakan publik dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Tujuan Kebijakan Publik

Berdasarkan Sumberdaya	Membagi (distributif, alokatif)		Menyerap (Absortif)
------------------------	--	--	-------------------------------

Berdasarkan Sifat	Meregulasi (mengatur, membatasi)	VERSUS	Menderegulasi (Membebaskan)
Berdasarkan Jenis	Menggerakkan (dinamisasi)		Menjaga (Stabilisasi)
Berdasarkan Kekuatan	Memperkuat masyarakat/pasar (deregulatif)		Memperkuat negara (regulatif)

Sumber: *Public Policy* (Riant Nugroho, 2017:171)

Dalam kebijakan publik juga terdapat elemen-elemen yang menjadi ruh dari kebijakan publik. Anderson dalam Islamy sebagaimana yang dituliskan oleh Widodo (2021:14) bahwa elemen kebijakan publik mencakup beberapa hal, yaitu:

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan.
- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu).
- e. Kebijakan publik (positif) selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kompleksitas dalam substansi studi kebijakan publik perlu menjadi fokus utama bagi para aktor kebijakan agar dapat mencapai tujuan-tujuan kebijakan publik sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Variabel-variabel dalam kebijakan publik mulai dari *policy demands*, *policy needs*, *policy problems*, hingga *policy goals* adalah serangkaian faktor yang tidak boleh terlewatkan dalam membentuk sebuah kebijakan publik.

1.4.2 Perencanaan Pembangunan

A. Pengertian Perencanaan

Perencanaan menurut Abe adalah susunan (rumusan) sistematis mengenai langkah-langkah mengenai langkah (tindakan-tindakan) yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang saksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.³

Diana Conyers dan Hills dalam bukunya *An Introduction to Development Planning in the Third World* mendefinisikan perencanaan sebagai proses yang kontinu dan terdiri dari keputusan atau pilihan dari berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang.⁴

Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki.⁵ Jika berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan, yaitu (1) Politik; (2) teknokratik; (3) partisipatif; (4) atas-bawah (*top-down*); (5) bawah-atas (*bottom-up*).

Penyusunan dalam suatu perencanaan cenderung terdapat organisasi yang terlibat, dokumen yang digunakan dalam perencanaan, dukungan sumber daya untuk mencapai kegiatan yang telah direncanakan serta tujuan yang akan dicapai. Organisasi

³ Alexander Abe, *Perencanaan Daerah Partisipatif* (Solo: Pondok Edukasi, 2002)

⁴ Diana Conyers, *An Introduction to Development Planning in the Third World* (Chichester: John Wiley and Sons, 1984)

⁵ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Fahima Diah Anisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis SDGs* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 2.

yang terlibat dalam perencanaan biasanya meliputi organisasi yang melaksanakan kegiatan, organisasi yang bertugas khusus dalam perencanaan, kelompok sasaran yang akan dituju dalam pelaksanaan rencana, organisasi yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya, dan pimpinan organisasi.

Pada setiap proses penyusunan perencanaan perlu adanya pencatatan serta dokumentasi. Isi dari dokumentasi tersebut setidaknya memuat nama kegiatan, tujuan yang akan dicapai dari kegiatan tersebut yang meliputi indikator kinerja dan target kinerja, kelompok sasaran, penanggung jawab kegiatan, dan penggunaan sumber daya. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang dapat diimplementasikan dengan realistis serta didukung dengan ketersediaan sumber daya baik sumber dana, sumber daya manusia, sumber daya material, dan sumber daya peralatan. Perlu adanya skala prioritas untuk mempermudah proses seleksi implementasi rencana karena keterbatasan sumber daya.

B. Manfaat Perencanaan

Perencanaan merupakan pekerjaan yang menyangkut wilayah publik berupa komitmen para pemangku kepentingan yang terlibat sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan dan dirasakan manfaatnya. Adapun beberapa manfaat perencanaan sebagai berikut.⁶

1. Sebagai informasi keputusan yang tepat untuk dilakukan Perencanaan memberikan acuan dalam mempertimbangkan perihal apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya.
2. Sebagai panduan kegiatan dan *monitoring* Perencanaan menyediakan acuan tertulis yang dapat digunakan untuk pelaksanaan program.

⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Fahima Diah Anisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis SDGs* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 6.

3. Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap usul/saran penyempurnaan yang “baru”
Selama pelaksanaan program, sering kali adanya sesuatu hal yang mendorong perlunya revisi penyempurnaan perancangan program.
4. Sebagai rantai koordinasi
Perencanaan mencegah terciptanya kesalahpahaman tentang tujuan akhir dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan baik yang dirasakan maupun yang tidak dirasakan.
5. Sebagai dasar *monitoring* dan evaluasi
Perencanaan dapat memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan harus dicapai dengan perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi.
6. Sebagai rantai koordinasi
Perencanaan dapat membantu perkembangan kepemimpinan, yaitu dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat dan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.
7. Sebagai inventarisasi kebutuhan
Perencanaan mencegah adanya kesalahpahaman tentang tujuan akhir, serta mengembangkan kebutuhan-kebutuhan baik yang dirasakan atau tidak dirasakan.
8. Sebagai alat untuk mencocokkan perencanaan, pelaksanaan, hasil atau perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan.
Perencanaan menghindarkan adanya pemborosan sumber daya serta merangsang konsep efisiensi dan menjamin kelayakan yang dilakukan di dalam masyarakat.

C. Pengertian Pembangunan

Konsep pembangunan berkaitan erat dengan konteks kajian suatu perubahan. Pembangunan diartikan sebagai bentuk perubahan yang bersifat direncanakan. Untuk mewujudkan suatu harapan perlu adanya suatu perencanaan sehingga pembangunan perlu secara terencana agar lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang.

Pembangunan diartikan sebagai proses perubahan mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertanahan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya

(Alexander, 1994)⁷. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan. Kemudian, Ganjar Kartasasmita memberikan pengertian lebih sederhana, yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.⁸

Jika dilihat secara umum, pembangunan diartikan sebagai suatu proses perencanaan yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan untuk membuat perubahan sebagai proses peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Terdapat lima ide pokok dari pembangunan, yaitu sebagai berikut.⁹

1. Pembangunan adalah suatu proses. Hal ini mempunyai makna bahwa pembangunan merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari berbagai tahapan.
2. Pembangunan merupakan upaya secara sadar ditetapkan sebagai suatu hal yang akan dilaksanakan.
3. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka sedang maupun jangka pendek, merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal-hal yang akan dilakukan di masa mendatang.
4. Pembangunan berkaitan dengan perubahan dan pertumbuhan. Hal tersebut berarti adanya peningkatan kemampuan suatu bangsa harus bersikap antisipatif dalam menghadapi tuntutan situasi yang berbeda dari waktu ke waktu.
5. Pembangunan mengarah kepada modernisasi atau pembaruan. Modernisasi mempunyai cara hidup baru yang lebih baik dari sebelumnya sehingga memunculkan cara pikir rasional, dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel, dan bersifat multidimensional.

⁷ Subandi, *Ekonomi Pembangunan* (Jakarta: Alfabeta, 2011), hlm. 9-11.

⁸ Ganjar Kartasasmita, *Administrasi Pembangunan (Perkembangan Pemikiran dan Praktiknya di Indonesia)* (Jakarta: LP3ES, 1997).

⁹ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Fahima Diah Anisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis SDGs* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 30-31.

1.4.3 Perencanaan Pembangunan Daerah

A. Pengertian Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan perencanaan pembangunan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan dalam undang-undang tersebut diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.¹⁰

Definisi tersebut kemudian diikuti oleh Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan saat ini seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berlaku pula Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun definisi mengenai perencanaan pembangunan menurut Moeljarto Tjokrowinoto yang memberikan makna perencanaan pembangunan sebagai konsep yang menyangkut dua hal, yaitu *pertama*, sebagai suatu proses perumusan rencana pembangunan; dan *kedua*, sebagai substansi perencanaan

¹⁰ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

pembangunan itu sendiri.¹¹ Proses perumusan rencana pembangunan berkaitan dengan aktivitas bagaimana sebuah perencanaan pembangunan disusun, kapan, dan siapa saja pihak-pihak yang terlibat. Kemudian, substansi perencanaan pembangunan berkaitan dengan isi rencana pembangunan yang telah disusun, permasalahan pokok serta isu-isu strategis.

Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah mengartikan perencanaan pembangunan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu serangkaian kegiatan atau aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik (material) maupun nonfisik (mental spiritual), dalam rangka mencapai tujuan yang baik.¹² Maka dari itu, konteks daerah digunakan perencanaan pembangunan daerah yang diartikan sebagai suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada tetapi harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetapi berpegang teguh pada asas prioritas.

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan yang penting dan kritis dalam suatu proses pembangunan sehingga pada proses ini perlu dilakukan secara komprehensif dengan didukung oleh data-data statistik yang memadai. Hal tersebut dikarenakan suatu perencanaan pembangunan akan menentukan arah pembangunan

¹¹ Moeljarto Tjokrowinoto, *Politik Pembangunan, Sebuah Konsep, Arah dan Strategi* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993), hlm. 92.

¹² Riyadi dan Deddy Supriadi Bratakusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 7.

daerah kedepan sehingga perlu dirumuskan tujuan serta sasaran yang akan dicapai kurun waktu ke depan.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang dimaksud dengan pembangunan daerah adalah usaha sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya. Kemudian, perencanaan pembangunan daerah diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.¹³

Dalam proses penyusunan perencanaan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan sesuai dengan prinsip-prinsip yang meliputi :¹⁴

1. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
2. Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
3. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
4. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah nasional.

Adapun penunjang perencanaan pembangunan yang berkelanjutan di daerah, terdapat Rencana Pembangunan Jangka

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

¹⁴ Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan pembangunan daerah dalam jangka panjang (20 Tahun). Pada saat pemilihan kepada daerah yang disertai pemaparan konsep visi dan misi calon kepala daerah, konsep tersebut akan menjadi acuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selama jangka waktu 5 tahun. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa RPJMD ini merupakan visi dan misi kepala daerah yang terpilih. Pada saat itu, dalam perencanaan pembangunan menggunakan pendekatan politik. Keberadaan dari RPJPD ini menjadi jembatan untuk menjaga sinergisitas perencanaan pembangunan di daerah apabila terjadi pergantian kepada daerah setiap 5 tahun agar tidak terjadi perombakan orientasi pembangunan secara frontal mengingat setiap kepala daerah memiliki visi misi yang berbeda ditambah adanya kepentingan partai politik pendukung.

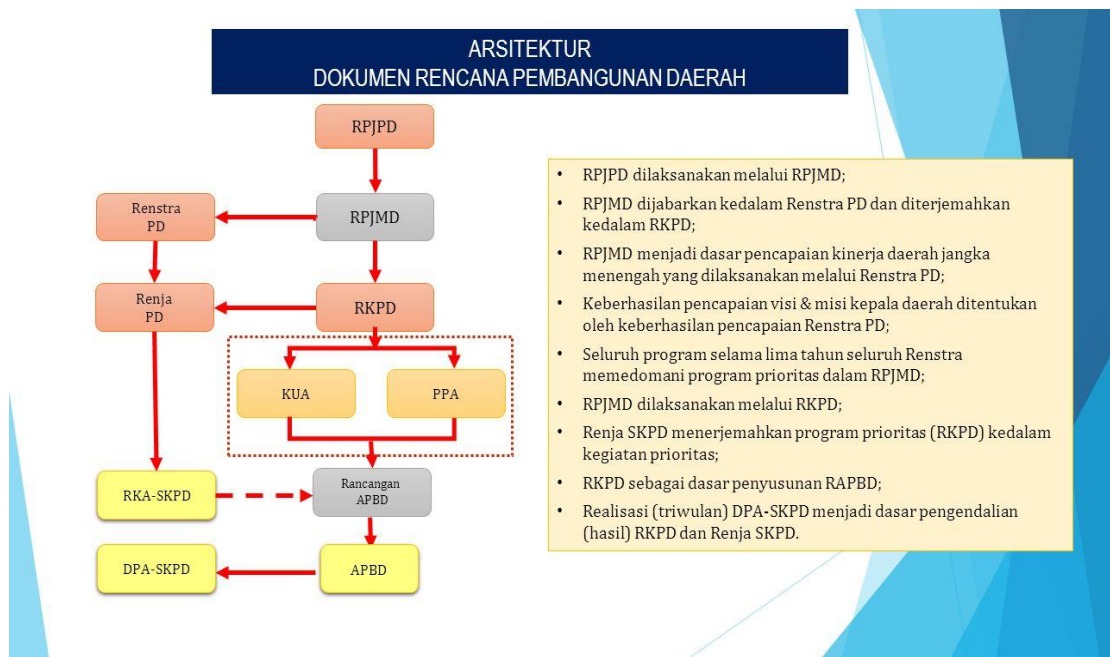
B. Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan berdasarkan jangka waktunya dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dibagi menjadi tiga, yaitu Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan. RPJP merupakan rencana pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun dan RPJM untuk jangka waktu 5 tahun.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 15, RPJP daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJPN. Kemudian, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepada daerah terpilih yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan

program kewilayahan yang disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Di sisi lain, terdapat RKPD yang merupakan perencanaan tahunan daerah adalah penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.



Gambar 1. 1 Arsitektur Dokumen Rencana Pembangunan Daerah

Source : google.com

Pada perencanaan pembangunan daerah di Indonesia merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sehingga pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari rencana pembangunan nasional. Sebab, dalam perencanaan pembangunan daerah tetap berpatok

The diagram illustrates the Regional Planning (RP) process flow, organized into three main horizontal sections: National (Pemerintah Pusat), Provincial/District (Pemerintah Daerah), and the timeline at the bottom.

Top Section (Pemerintah Pusat - National Level):

- Left Column (Pink background):**
 - RPJP Nasional** (National Master Plan) leads to **RPJM Nasional** (National Medium-Term Development Plan) via *Pedoman* (Guideline).
 - RPJM Nasional** leads to **Renstra KL** (National Strategic Plan for the Capital City) via *Pedoman* and *Bahan* (Material).
 - RPJM Nasional** leads to **RKP** (National Regional Development Plan) via *Dijabarkan* (Disseminated).
- Right Column (Purple background):**
 - Renja - KL** (National Regional Development Plan for the Capital City) leads to **RKA - KL** (National Regional Development Plan for the Capital City) via *Pedoman*.
 - RKA - KL** leads to **Rincian APBN** (Detailed National Budget) via *Pedoman*.
 - RKP** leads to **RAPBN** (National Regional Development Plan for the Capital City) via *Pedoman*.
 - RAPBN** leads to **APBN** (National Budget) via *Pedoman*.

Middle Section (Pemerintah Daerah - Provincial/District Level):

- Left Column (Green background):**
 - RPJP Daerah** (Provincial/District Master Plan) leads to **RPJM Daerah** (Provincial/District Medium-Term Development Plan) via *Pedoman*.
 - RPJM Daerah** leads to **Renstra SKPD** (Provincial/District Strategic Plan for the Capital City) via *Pedoman* and *Bahan*.
 - RPJM Daerah** leads to **RKP Daerah** (Provincial/District Regional Development Plan) via *Dijabarkan*.
- Right Column (Blue background):**
 - Renja - SKPD** (Provincial/District Regional Development Plan for the Capital City) leads to **RKA - SKPD** (Provincial/District Regional Development Plan for the Capital City) via *Pedoman*.
 - RKA - SKPD** leads to **Rincian APBD** (Detailed Provincial/District Budget) via *Pedoman*.
 - RKP Daerah** leads to **RAPBD** (Provincial/District Regional Development Plan for the Capital City) via *Pedoman*.
 - RAPBD** leads to **APBD** (Provincial/District Budget) via *Pedoman*.

Bottom Section (Timeline):

- UU SPPN** (Law on Regional Planning) covers the period from the start to the middle of the process.
- UU KN** (Law on Capital City Planning) covers the period from the middle to the end of the process.

Interactions and Labels:

- Vertical Interactions:**
 - RPJP Nasional** to **RPJP Daerah**: *Diacu* (Referenced).
 - RPJM Nasional** to **RPJM Daerah**: *Diperhatikan* (Noticed).
 - RKP** to **RKP Daerah**: *Diserasikan Melalui Musrenbang* (Disseminated through Musrenbang).
- Internal Labels:**
 - Renstra KL** to **Renja - KL**: *Pedoman* and *Diacu*.
 - Renja - KL** to **RKA - KL**: *Pedoman*.
 - RKA - KL** to **Rincian APBN**: *Pedoman*.
 - Renstra SKPD** to **Renja - SKPD**: *Pedoman* and *Diacu*.
 - Renja - SKPD** to **RKA - SKPD**: *Pedoman*.
 - RKA - SKPD** to **Rincian APBD**: *Pedoman*.

Sources : google.com

Pertama, pendekatan politik. Pendekatan ini berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat. Sebelum dipilih oleh rakyat, calon kepala daerah merumuskan visi dan misinya sebagai janji yang akan dilaksanakan jika terpilih sebagai kepala daerah. Visi misi tersebut akan dijabarkan dalam RPJMD untuk jangka waktu lima tahun selama kepada daerah memimpin daerah. Akan tetapi, pada

23

pelaksanaannya tetap mengacu kepada RPJPD dan memperhatikan RPJPN.

Kedua, pendekatan teknokratik. Pendekatan ini berkaitan erat dengan profesionalisme dan keahlian dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rencana pembangunan ini perlu mempertimbangkan berbagai aspek serta keahlian sehingga hasil yang diperoleh bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh daerah secara komprehensif.

Ketiga, pendekatan partisipatif. Pendekatan ini melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Masyarakat dilibatkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan mulai dari tingkat bawah (desa/kelurahan). Partisipasi masyarakat ini juga merupakan wujud dari transparansi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Keempat, pendekatan atas-bawah (*top-bottom*). Pendekatan ini melibatkan Bappeda sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan kegiatan ini merumuskan rancangan awal masukan dari rancangan strategis PD. Rancangan awal ini akan dibahas dalam Musrenbang.

Kelima, pendekatan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan ini dilakukan mulai dari pengusulan program atau proyek dari tingkat bawah (desa/kelurahan) oleh masyarakat. Penyelenggaraan Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan ini dimaksudkan sebagai wahana dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

C. Jenis Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari (1) perencanaan makro; (2) perencanaan sektoral; (3) perencanaan regional; (4) perencanaan mikro.¹⁶

Pertama, perencanaan pembangunan makro. Perencanaan pembangunan ini cakupannya skala makro atau menyeluruh. Analisis yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan ini melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitan antara perencanaan sektoral dan regional.

Kedua, perencanaan pembangunan sektoral. Perencanaan ini dilakukan berdasarkan sektor-sektor tertentu. Sektor dalam hal ini adalah kumpulan kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya.

Ketiga, perencanaan pembangunan regional. Perencanaan pembangunan ini menitikberatkan pada lokasi dimana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berbeda-beda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Keterpaduan perlu dilakukan dengan melakukan sinkronisasi antara RPJMN dengan RPJMD baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menghasilkan pertumbuhan yang optimal.

Keempat, perencanaan pembangunan mikro. Perencanaan pembangunan ini berskala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik mikro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-

¹⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, Fahima Diah Anisa, *Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis SDGs* (Depok: Rajawali Pres, 2020), hlm. 52.

kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya.

C. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Prinsip dan Proses

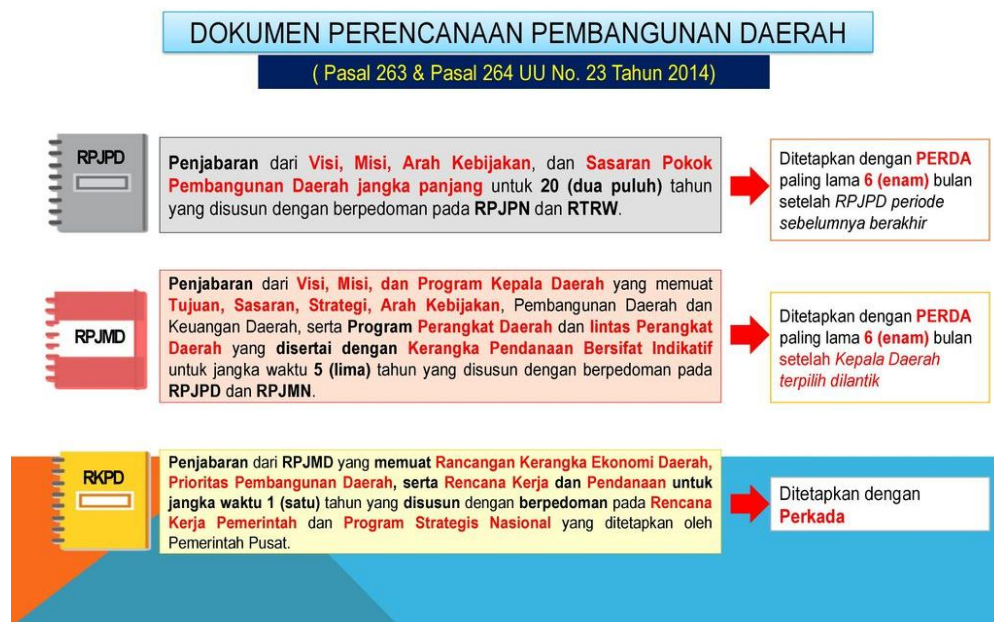
Secara prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, telah tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomol 86 Tahun 2017 Pasal 5-8 yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Sementara itu, untuk perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada substansi, proses penyusunannya menggunakan pendekatan sebagai berikut.¹⁷

1. Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
2. Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
3. Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

b. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

¹⁷ Pasal 9-10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Perencanaan Pembangunan Daerah telah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dilakukan terhadap Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat Daerah.¹⁸ Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Daerah (RKPD).¹⁹



Gambar 1. 3 Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Gambar 1. 3

Sources : google.com

Sementara itu, Rencana Perangkat Daerah terdiri dari Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).²⁰ Perencanaan strategis didefinisikan sebagai suatu

¹⁸ Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

¹⁹ Pasal 12.

²⁰ Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.



Gambar 1. 4 Dokumen Rencana Perangkat Daerah

Sources : google.com

1.4.4 Produk Hukum Daerah

Pasal 28 Ayat (2) Peraturan BRIN No. 5 Tahun 2023 menyebutkan bahwa Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan **peraturan kepala daerah**. Apa itu Peraturan Kepala Daerah? Peraturan Kepala Daerah merupakan salah satu dari beberapa produk hukum daerah sebagaimana akan diuraikan di bawah ini.

Sebagaimana halnya dengan proses legislatif di tingkat Pusat, maka di tingkat Daerah juga berlangsung proses penyusunan peraturan perundang-undangan oleh Kepala Daerah dan DPRD. Landasan hukumnya adalah Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, yang menyebutkan " *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*".

Untuk merealisasikan ketentuan Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ini telah ditetapkan berturut-turut Undang-undang (organik) yang mengatur lebih lanjut perihal pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah di Indonesia dan secara lebih khusus lagi mengatur tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan di daerah, baik yang berbentuk Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

A. Proses Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, maka ketentuan tentang landasan hukum perundang-undangan di tingkat Daerah dapat ditemukan dalam beberapa pasal dalam Undang-undang ini, yaitu :

1. Peraturan Daerah

Landasan hukum Peraturan Daerah (Perda) dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi : "*Kepala Daerah menetapkan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.* "

Berdasarkan sumber wewenangny fungsi Peraturan Daerah meliputi dua hal yaitu : fungsi yang bersifat atribusi berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan fungsi yang bersifat delegasi dari Peraturan Pemerintah atau Presiden

Sedangkan berdasarkan penafsiran *gramatikal* dari pasal-pasal dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, maka fungsi Peraturan Daerah akan meliputi :

- a. menyelenggarakan otonomi daerah

- b. sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- c. menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum
- d. menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah lain
- e. menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- f. memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar
- g. memuat ancaman pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah
- h. mengatur penunjukkan pejabat yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

2. Peraturan Kepala Daerah

Landasan hukum Peraturan Kepala Daerah dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut : "*Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah*".

Fungsi Peraturan Kepala Daerah adalah menyelenggarakan pengaturan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan dan tugas-tugas pemerintahan.

Fungsi Keputusan Kepala Daerah merupakan fungsi delegasi

dari Peraturan Daerahnya atau dari suatu Peraturan Pemerintah atau Presiden.

3. Instruksi Gubernur dan Bupati/Walikota

Di samping Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dikenal bentuk (jenis) perundang-undangan seperti Instruksi Gubernur dan Instruksi Bupati atau Walikota. Meskipun dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 jenis perundang-undangan ini tidak dikenal namun keberadaannya diterima dalam praktek ketatanegaraan di Daerah.

B. Proses Penyusunan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah merupakan pemberian kewenangan (atribusi) untuk mengatur daerahnya sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun demikian pembentukan suatu Peraturan Daerah ini dapat juga merupakan pelimpahan wewenang (delegasi) dari suatu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Prof. Bagir Manan menggunakan istilah peraturan perundang-undangan di daerah yang diartikan sebagai peraturan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau salah satu unsur Pemerintah Daerah yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan di tingkat daerah secara umum terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu :

- a. Peraturan Daerah : dibuat oleh Kepala Daerah bersama-sama dengan DPRD.
- b. Peraturan Kepala Daerah : dibuat oleh Kepala Daerah saja.
- c. Peraturan DPRD : dibuat oleh DPRD saja, misalnya berupa Peraturan Tata Tertib DPRD.

C. Proses Penyusunan Peraturan Kepala Daerah

Keputusan Kepala Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan tingkat Daerah yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan Kepala Daerah bersifat : Mengatur (*reguleren*) : artinya sebagai *general norm*, artinya berlaku dan mengikat secara umum, tidak mengatur perorangan. Berbeda dengan Keputusan Kepala Daerah yang bersifat Menetapkan (*beschikkingen*) : bersifat sebagai *individual norm*, artinya berlaku khusus bagi individu tertentu. Misalnya tentang pengangkatan seseorang sebagai pejabat Pemerintah Daerah. Mengenai bagaimana proses penyusunan Peraturan Kepala Daerah harus dilihat ketentuan yang khusus mengenai ini yaitu dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Namun dapat dikemukakan bahwa Rancangan Peraturan Kepala Daerah, umumnya disiapkan oleh Biro Hukum Pemerintahan Daerah.

1.5 Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Strauss dan Corbin dalam Afrizal (2016:12), menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif sebagai “jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk

hitungan lainnya”. Selain itu, kita juga dapat meminjam definisi penelitian kualitatif yang disebutkan oleh Hadari & Martini dalam “Instrumen Penelitian Bidang Sosial” (2006:209):

“Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoretis maupun praktis.”

Selain itu, kita juga dapat meminjam definisi penelitian kualitatif yang disebutkan oleh Hadari & Martini dalam “Instrumen Penelitian Bidang Sosial” (2006:209):

“Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau proses menjangkau informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoretis maupun praktis.”

1.5.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua skema pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2012) yang menyatakan bahwa pengumpulan data kualitatif dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural setting*), dengan sumber data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik pengumpulan data yang mencakup observasi partisipan serta (*participant observation*), wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi (Sugiyono, 2012: 63). Berikut adalah skema pengumpulan data yang digunakan peneliti:

1. Studi Kepustakaan

Dalam skema studi kepustakaan, peneliti menekankan proses pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap

literatur-literatur yang relevan secara teoritis dan empiris, baik dalam bentuk buku, jurnal akademik, artikel, peraturan perundangan, arsip pemerintah maupun dokumen resmi yang berkaitan yaitu dokumen RPJPD, RPJMD, RPD dll.

2. Studi Lapangan

Dalam skema studi lapangan, peneliti melibatkan diri secara langsung sebagai sebuah instrumen penelitian untuk memperoleh data primer melalui *focus group discusion* (FGD) dengan informan yang berkaitan..

- a. Observasi. Menurut Kartono dalam Mulyadi *et al* (2019:211), tujuan observasi adalah untuk memahami ciri dan keluasan yang signifikan dari hubungan interaksi antar manusia dalam fenomena kehidupan sosial yang kompleks.
- b. *Focus Group Discusion*: Diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dari suatu grup untuk membahas suatu masalah tertentu dalam suasana informal serta dilaksanakan dengan panduan seorang moderator. Terdapat tiga komponen utama dalam kegiatan FGD, yakni diskusi (bukan kegiatan wawancara atau obrolan), kelompok (bukan individual), serta terfokus (bukan dilakukan secara bebas). Tujuan umum FGD adalah menyamakan setiap persepsi atas suatu isu ataupun topik tertentu, yang pada akhirnya akan melahirkan kesepakatan dan juga pengertian baru terkait isu tersebut. Manfaat FGD yaitu memperoleh data kualitatif bermutu dalam waktu singkat, menciptakan ide untuk penelitian yang lebih mendalam, *cross-check* data dari metode lain, hingga mengidentifikasi dan menggali informasi dari kelompok tertentu.

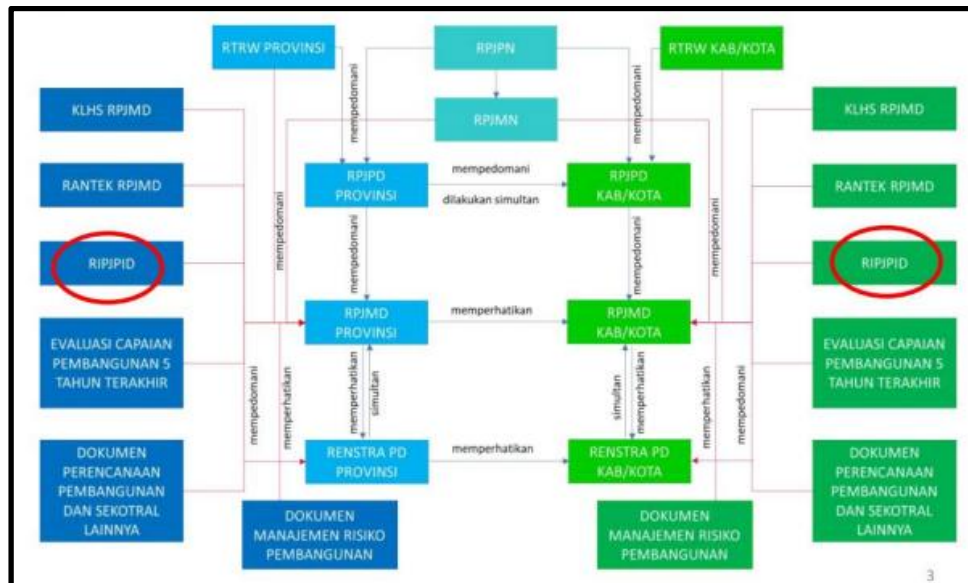
1.6 Sasaran

Sasaran Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kota Banjar Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan arah pelaksanaan program riset dan inovasi dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

1.7 Keterkaitan RIPJPID dengan Dokumen Perencanaan Lain

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan di setiap daerah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi penting untuk menjadi solusi dari tantangan-tantangan tersebut. Dengan demikian, penyusunan Dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Iptek Daerah (RIPJPID) menjadi salah satu upaya strategis dalam memperkuat inovasi di tingkat daerah.

Dokumen RIPJPID merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif yang memberikan arah pelaksanaan program riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, kualitas kebijakan berbasis bukti, ekosistem riset dan inovasi serta daya saing daerah. Keterkaitan RIPJPID dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 1. 5 Keterkaitan RIPJPID dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa RIPJPID (Rencana Induk dan Peta Jalan Penajaman IPTEK Daerah) memiliki keterkaitan yang strategis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya. Dokumen ini berperan sebagai acuan penting dalam penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. RIPJPID menjadi referensi utama dalam melakukan evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir dan memberikan dasar teknis bagi kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) serta dokumen teknokratik lainnya yang mendukung penyusunan rantai RPJMD. Selain itu, RIPJPID turut memperkuat dokumen manajemen risiko pembangunan dan dokumen sektoral yang berkaitan, sehingga arah prioritas pembangunan daerah dapat lebih terfokus pada pengembangan riset, inovasi, dan penguatan IPTEK. Dengan demikian, RIPJPID memastikan integrasi yang terkoordinasi antara perencanaan pembangunan dan

pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan daerah secara komprehensif dan berkelanjutan.

1.8 Sistematika Kajian

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB 1 : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET
DAN INOVASI DI DAERAH

BAB III : TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN
INOVASI DI DAERAH

BAB IV : ANALISIS KESENJANGAN

BAB V : STRATEGI KAJIAN KEBIJAKAN RISET DAN
INOVASI DI DAERAH

BAB VI : PETA JALAN KAJIAN KEBIJAKAN RISET DAN
INOVASI DI DAERAH

BAB VII : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Berikut uraian singkat setiap bagian:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, dasar hukum, tujuan dan sasaran.

. Latar Belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan perlunya riset dan inovasi dalam pembangunan suatu daerah. Menjelaskan riset dan inovasi daerah sebagai penghela utama dalam menyusun kebijakan dan

penyelenggaraan pembangunan daerah dan proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan harus berbasis hasil riset . Latar belakang berisi pernyataan tentang alasan atau urgensi pentingnya menyusun dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bappelitbangda Kota Banjar Tahun 2025-2045 sebagai landasan penyusunan dokumen teknokratis RPJMD.

B. Dasar Hukum

Bagian ini memuat tentang peraturan perundang-undangan yang melandasi atau terkait dengan penyusunan rencana induk dan peta jalan riset dan inovasi daerah . Tujuan dari pencantuman dasar hukum ini adalah agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksi.

Dasar hukum memuat antara lain tentang :

1. Peraturan perundangan tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan teknologi
2. Peraturan perundangan tentang kewenangan penyusunan Rencana Induk dan Peta jalan Riset dan Inovasi Daerah.
3. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi daerah.
4. Peraturan perundangan tentang Perencanaan Pembangunan Daerah .
5. Peraturan lain yang berkaitan dengan Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Riset dan Inovasi Daerah.

C. Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan kajian ini memuat hasil yang ingin dicapai dalam dokumen ini yaitu tujuan dari

rencana induk dan peta jalan riset dan inovasi daerah dalam konteks pembangunan prioritas yang telah ditentukan .

Sedangkan sasaran menggambarkan tindakan atau kegiatan yang terlibat dalam mencapai tujuan . Sasaran berisi pernyataan yang akan dicapai dengan adanya rencana induk, berisi sasaran jangka pendek sesuai dengan tujuan jangka pendek dan sasaran jangka menengah sesuai dengan tujuan jangka menengah.

BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DAERAH:

Bab ini memuat gambaran umum daerah meliputi aspek geografi, kependudukan, ketenagakerjaan, kesejahteraan masyarakat dan produk unggulan daerah. Gambaran kondisi riset dan inovasi di Kota Banjar meliputi kemampuan melakukan kajian untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, usulan prioritas pembangunan lima tahun ke depan, kondisi ekosistem riset.

BAB III TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERAH:

Bab ini memuat tantangan dan peluang yang penting dan sangat menentukan dalam pemanfaatan riset dan inovasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang.

BAB IV ANALISIS KESENJANGAN:

Bab ini berisi Gambaran bagaimana kesenjangan yang ada antara kondisi awal ekosistem riset dan inovasi di Kota Banjar, baik tentang produk-produk unggulan daerah maupun permasalahan-permasalahan daerah dibandingkan dengan kondisi akhir yang diharapkan.

BAB V STRATEGI KAJIAN KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH:

Bab ini berisi strategi pengembangan produk unggulan daerah dan/atau penyelesaian permasalahan prioritas daerah melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di daerah. Ekosistem Riset dan Inovasi terdiri atas enam elemen yaitu : (1). Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi daerah (2). Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi (3) Kemitraan riset dan inovasi (4) Budaya riset dan inovasi (5) Keterpaduan riset dan inovasi di daerah (6) Penyelarasan dengan perkembangan global.

BAB VI PETA JALAN KAJIAN KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH:

Bab ini berisi tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam pengembangan produk-produk unggulan dan permasalahan-permasalahan pokok daerah selama lima tahun.

BAB VII PROGRAM INDIKATIF

Bab ini merupakan uraian rencana program yang dilakukan setiap tahun. Pada bab ini dijelaskan program apa yang dilaksanakan setiap tahun untuk mencapai kondisi akhir seperti yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat sumber referensi yang dipergunakan, baik buku, jurnal, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber lainnya.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

2.1 Gambaran Umum Daerah

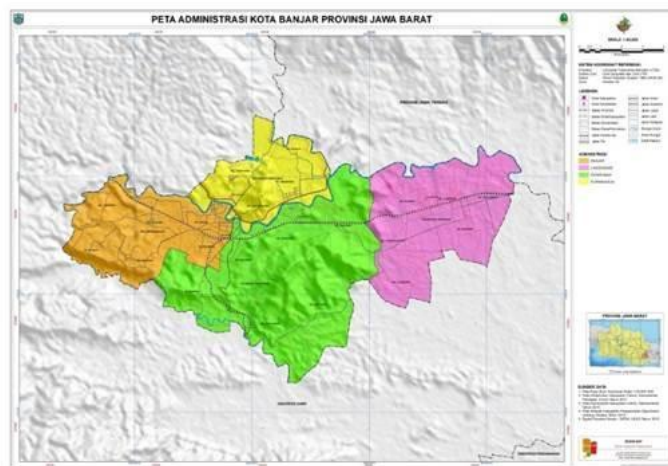
Kota Banjar atau yang dikenal dengan julukan Banjar Patroman, “*Bajar Pataruman*”, merupakan salah satu daerah di bawah naungan wilayah administratif Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pendirian Kota Banjar diresmikan pada tanggal 21 Februari 2003 pasca diresmikannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat pada tanggal 11 November 2002 oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI. Dikukuhkannya Kota Banjar sebagai daerah otonom yang relatif baru melalui payung hukum tersebut semakin memperkuat kewenangan otonomi pemerintah daerah Kota Banjar yang sebelumnya telah diprakarsai melalui Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis tanggal 9 Maret 2001 No. 188.4/KEP/DPRD-10/2001 tentang Persetujuan Peningkatan Status Kota Administratif Banjar dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 14 Juni 2001 No. 135/Kep.DPRD-27/2001 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap Peningkatan Status Kota Administratif Banjar menjadi Daerah Otonom.

A. Aspek Geografi

Kota Banjar terletak di wilayah timur Provinsi Jawa Barat tepatnya berada pada titik koordinat 108°.26 – 108°.40' Bujur Timur 7°.19 – 7°.26' Lintang Selatan, dengan total luas wilayah

menjangkau 131,97 km². Adapun daerah yang bersinggungan dengan batas wilayah Kota Banjar terbagi menjadi sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Kecamatan Cisaga, Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat, serta Kecamatan Dayeuhluhur dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- Sebelah Barat: Kecamatan Cimaragas dan Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.
- Sebelah Timur: Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Kecamatan Wanareja Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah.
- Sebelah Selatan: Kecamatan Lakbok dan Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Banjar

Sumber: Peta Tematik Indo, 2016²¹

Kota Banjar terdiri dari 4 kecamatan yaitu Kecamatan Purwaha di utara, Kecamatan Banjar di barat, Kecamatan Pataruman di selatan, dan Kecamatan Langensari di timur yang

²¹ Peta Administrasi Kota Banjar. (2016). <https://petatematikindo.wordpress.com/tag/kota-banjar/>.

secara keseluruhan menaungi sebanyak 25 desa/kelurahan, 297 RW, dan 1.146 RT. Dari segi luas wilayah, Kecamatan Pataruman menduduki posisi sebagai kecamatan terluas dengan cakupan wilayah seluas 54,12 km² atau sekitar 41,72 persen dari total luas Kota Banjar. Kemudian disusul oleh Kecamatan Langensari dengan luas wilayah 32,23 km² Kecamatan Banjar seluas 26,16 km² dan Kecamatan Purwaharja seluas 17,21 km².

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kota Banjar Per Kecamatan Tahun 2024

Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Persentase Terhadap Luas Wilayah
Banjar	26,16	20,16
Purwaharja	17,21	13,26
Pataruman	54,12	41,72
Langensari	32,23	24,85
Banjar	129,71	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025²²

Kota Banjar merupakan salah satu daerah dengan iklim tropis yang berdiri di atas ketinggian antara 20 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sebagian besar wilayah Kota Banjar berada pada ketinggian kurang dari 100 mdpl yaitu mencapai 87,10 persen dan sisanya sebesar 12,90 persen berada di ketinggian 100-500 mdpl yakni diantaranya adalah Kecamatan Pataruman dengan luas 11,83 km² atau sekitar 21,89 persen dari total luas wilayahnya. Sedangkan kecamatan yang seluruh permukaan wilayahnya berada pada ketinggian kurang dari 25

²² Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan di Kota Banjar, 2024. <https://banjarkota.bps.go.id/id/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWIRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kecamatan-di-kota-banjar--2023.html>.

mdpl adalah Kecamatan Langensari yang menjadikannya sebagai wilayah basis pertanian. Keberagaman lanskap ini mengklasifikasikan Kota Banjar di bagian utara, selatan dan barat sebagai wilayah berbukit yang pada bagian tengahnya terbelah oleh Sungai Citanduy, sedang di bagian pinggiran kota merupakan kawasan pertanian.

Secara klimatologis, suhu udara rata-rata di Kota Banjar berkisar antara 26,30°C hingga 30,60°C, dengan suhu terendah terjadi pada bulan Februari dan suhu tertinggi pada bulan Oktober. Curah hujan di Kota Banjar pada tahun 2024 tergolong cukup tinggi, dengan rata-rata mencapai 178,16 mm dan jumlah hari hujan yang relatif banyak. Curah hujan tertinggi tercatat pada bulan April, yaitu 416,10 mm dengan 19 hari hujan. Sementara itu, jumlah hari hujan kurang dari 10 hari terjadi pada bulan Juni hingga Oktober. Tingginya curah hujan serta luasnya lahan pertanian, baik sawah yang mencakup hampir 24 persen maupun lahan bukan sawah yang mencapai lebih dari 41 persen, memberikan pengaruh besar terhadap struktur dan pola perekonomian masyarakat Kota Banjar. Dengan potensi agraris yang masih tinggi, Kota Banjar mengusung visi untuk menjadi kota agropolitan.

B. Aspek Kependudukan

Penduduk dengan beragam potensi Sumber Daya Manusia (SDM) di dalamnya memainkan peran strategis dalam proses pembangunan daerah, tidak hanya sebatas diposisikan sebagai objek atau penerima manfaat belaka, tetapi juga merupakan penggerak dalam proses pembangunan itu sendiri. Dalam hal ini, gambaran kependudukan di suatu daerah dapat merefleksikan sejauh mana kapabilitas penduduk dalam mengelola atau

memanfaatkan sumber daya lokal secara bijaksana dan berkelanjutan sehingga menjadi penentu dalam mengukur keberhasilan daerah dalam melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kendati suatu daerah dari segi kuantitasnya dihuni oleh sedikit penduduk, namun apabila jumlah tersebut didukung oleh tingginya kualitas SDM maka akan menjadi peluang yang dapat membawakan perubahan signifikan dalam menstimulasi proses pencapaian misi pembangunan.

Berdasarkan data dari hasil proyeksi penduduk yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar, jumlah penduduk Kota Banjar pada tahun 2024 mencapai 209,791 ribu jiwa, yakni meliputi 105.289 jiwa laki-laki dan 104.502 jiwa perempuan dengan laju pertumbuhan penduduk secara keseluruhan senilai 1,15 persen.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Banjar Tahun 2023-2024

Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk Kota Banjar Hasil Proyeksi Interim Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)	
	2023	2024
Laki-laki	104.152	105.289
Perempuan	103.358	104.502
Laki-laki + Perempuan	207.510	209.791

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025²³

Kecamatan Pataruman menjadi wilayah dengan populasi penduduk terbanyak di Kota Banjar pada tahun 2024, yakni sebesar 63,6 ribu jiwa atau sekitar 30,32 persen dari total jumlah penduduk di Kota Banjar. Jumlah tersebut kemudian disusul secara berurutan oleh Kecamatan Banjar (60,4 ribu jiwa), Kecamatan Langensari (60,2 ribu jiwa) dan Kecamatan Purwaharja

²³ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). Jumlah Penduduk Kota Banjar Hasil Proyeksi Interim Menurut Jenis Kelamin (Jiwa), 2023-2024. <https://banjarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NjUjMg==/jumlah-penduduk-kota-banjar-hasil-proyeksi-interim-menurut-jenis-kelamin-.html>.

(25,5 ribu jiwa). Sementara wilayah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi dipegang oleh Kecamatan Langensari dengan laju pertumbuhan sebesar 1,51 persen, lebih massif dibandingkan dengan urutan kecamatan setelahnya yaitu Kecamatan Purwaharja (1,43 persen), Kecamatan Pataruman (0,98 persen), dan Kecamatan Banjar (0,86) persen. Kemudian bila ditinjau dari segi kepadatan penduduk, berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan penduduknya yang menempati posisi terakhir di Kota Banjar, Kecamatan Banjar justru menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi dengan kisaran sebanyak 2.310 penduduk/km².

Tabel 2. 3 Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banjar Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km persegi (Km2)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Banjar	60,4	0,86	28,81	2.310	99,6
Purwaharja	25,5	1,43	12,16	1.483	101,5
Pataruman	63,6	0,98	30,32	1.175	100,4
Langensari	60,2	1,51	28,71	1.868	102
Banjar	209,8	1,15	100	1.617	100,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025²⁴

Secara distributif, populasi penduduk di Kota Banjar didominasi oleh kelompok usia 0-4 tahun dengan jumlah mencapai 17,3 ribu jiwa. Sedangkan penduduk berusia 75 tahun keatas jauh

²⁴ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Banjar, 2024. <https://banjarkota.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWNGcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw%3D%3D/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-banjar--2022.html?year=2024>.

lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kelompok umur di bawahnya, yakni hanya mencapai 5,2 ribu jiwa.

Tabel 2. 4 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banjar Tahun 2024

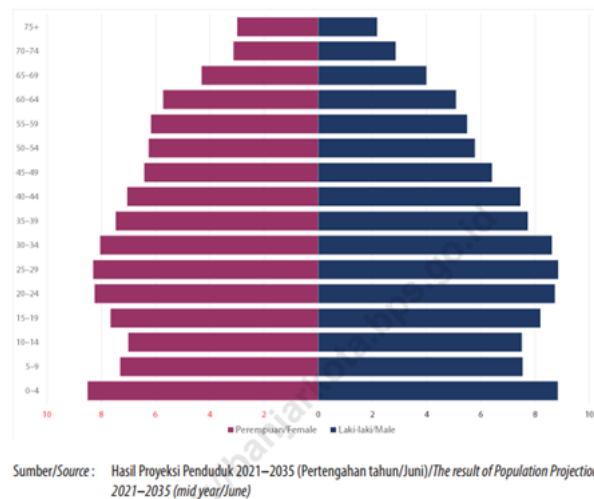
Kelompok Umur	Penduduk (Laki-Laki) (Ribu)	Penduduk (Perempuan) (Ribu)	Penduduk (Laki-Laki + Perempuan) (Ribu)
0-4	8,8	8,5	17,3
5-9	7,5	7,3	14,9
10-14	7,5	7	14,5
15-19	8,2	7,7	15,9
20-24	8,7	8,2	17
25-29	8,9	8,3	17,2
30-34	8,6	8	16,7
35-39	7,7	7,5	15,2
40-44	7,5	7,1	14,5
45-49	6,4	6,4	12,8
50-54	5,8	6,3	12
55-59	5,5	6,2	11,7
60-64	5,1	5,7	10,8
65-69	4	4,3	8,3
70-74	2,9	3,1	6
75+	2,2	3	5,2
Jumlah/Total	105,3	104,5	209,8

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025²⁵

Kecenderungan piramida penduduk di Kota Banjar pada tahun 2024 divisualisasikan melalui piramida ekspansif yang mengindikasikan dominasi penduduk usia muda lebih besar dibandingkan dengan usia tua (umur tua). Dengan kata lain, pada tahun tersebut angka kelahiran bayi di Kota Banjar jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat kematian bayi. Namun secara

²⁵ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Banjar, 2024. <https://banjarkota.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQZWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin-di-kota-banjar--2023.html>.

keseluruhan komposisi penduduk Kota Banjar jika dilihat berdasarkan komposisi kelompok umur muda, umur produktif dan umur tua, sebagian besar berada pada kelompok umur produktif yaitu sebanyak 143.935 jiwa atau 69% dari total jumlah penduduk, disusul oleh kelompok umur muda sebanyak 47.721 jiwa (23%) dan umur non produktif sebanyak 16.653 jiwa (8%).



Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Kota Banjar (Ribuan) Tahun 2024

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025²⁶

Dengan membandingkan jumlah penduduk yang tidak produktif dengan jumlah penduduk usia produktif, maka didapat angka 44,72. Artinya tiap 100 penduduk produktif menanggung 44,72 penduduk tidak produktif. Dan jika dilihat dari komposisi umur muda dan umum non produktif (+65 tahun) dapat dilihat angka ketergantungan umur muda menyumbang angka terbesar pada rasio ketergantungan di Kota Banjar.

²⁶ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). Piramida Penduduk Kota Banjar (Ribuan), 2024. Kota Banjar Dalam Angka 2025.

Komposisi penduduk dengan mayoritas penduduk berada di usia produktif membuka kesempatan besar bagi Kota Banjar untuk memanfaatkan bonus demografi di kemudian hari. Dengan proporsi beban ketergantungan usia non produktif terhadap penduduk usia produktif lebih ringan, maka Kota Banjar dapat menjadikan peluang ini sebagai momentum untuk memaksimalkan potensi ekonomi melalui kegiatan peningkatan kualitas SDM seperti menggali produktivitas, memperkuat tenaga kerja, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

C. Aspek Ketenagakerjaan

Salah satu aspek yang tidak kalah penting sebagai wajah sekaligus elemen vital pembangunan sosial dan ekonomi suatu daerah adalah capaian dalam ketenagakerjaannya. Dimensi ketenagakerjaan di Kota Banjar diantaranya nampak dari persentase Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), gambaran proporsi penduduk usia kerja yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja maupun pencari kerja. Penduduk usia kerja di Kota Banjar pada Agustus 2024 mencapai 163.048 orang dengan sebagian besar diantaranya merupakan angkatan kerja yakni sebanyak 109.604 orang, sementara sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebesar 53.444 orang. Jumlah angkatan kerja tersebut didominasi oleh penduduk laki-laki sebanyak 66.993 jiwa sedang 42.611 jiwa diantaranya adalah perempuan.

Tabel 2. 5 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja Kota Banjar Tahun 2022- 2024

Tabel 1 Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022 – Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Agt 2022–Agt 2023		Perubahan Agt 2023–Agt 2024	
	orang	orang	orang	orang	persen	orang	persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Penduduk Usia Kerja (PUK)	148.735	161.510	163.048	12.775	8,59	1.538	0,94
Angkatan Kerja	94.831	108.924	109.604	14.093	14,86	680	0,62
- Bekerja	89.588	103.010	103.637	13.422	14,98	627	0,60
- Pengangguran	5.243	5.914	5.967	671	12,8	53	0,89
Bukan Angkatan Kerja	53.904	52.586	53.444	-1.318	-2,45	858	1,61
	persen	persen	persen	persen poin		persen poin	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	63,76	67,44	67,22	-0,31		0,22	
- Laki-Laki	80,88	84,21	82,35	4,57		-1,86	
- Perempuan	47,38	50,74	52,16	-4,98		1,42	

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025²⁷

Sementara Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Banjar per Agustus 2024 ialah sebesar 67,22 persen, turun 0,22 persen poin dibandingkan tahun sebelumnya. Persentase TPAK didominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki yakni sebesar 82,35 persen, lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan sebesar 52,16 persen. Angka tersebut menunjukkan penurunan jumlah TPAK laki-laki sebesar -1,86 persen poin dari 84,21 persen di tahun 2023, namun di sisi lain terjadi kenaikan sebesar 1,42 persen poin TPAK perempuan dari 50,74 persen pada tahun yang sama.

²⁷ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2022-Agustus 2024. Keadaan Ketenagakerjaan Kota Banjar Agustus 2024.

Tabel 2. 6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Banjar (Persen) Tahun 2023-2024

Jenis Kelamin	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Banjar (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	73,6	80,9	84,2	82,4
Perempuan	52,4	47,4	50,7	52,2
Laki-laki + Perempuan	64,1	63,8	67,4	67,2

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025²⁸

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak di Kota Banjar adalah sektor jasa sebesar 62,55 persen dengan jumlah pekerja sebanyak 64.827 jiwa, disusul sektor manufaktur sebesar 23,80 persen (24.666 jiwa), dan terakhir sektor pertanian sebesar 13,65 persen (14.144 jiwa).

Tabel 2. 7 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Banjar Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Pertanian/Agriculture	9.436	4.708	14.144
2. Industri Pengolahan/Manufacturing	17.804	6.862	24.666
3. Jasa/Service	36.646	28.181	64.827
Jumlah/Total	63.886	39.751	103.637

²⁸ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Jenis Kelamin di Kota Banjar (Persen), 2023-2024. <https://banjarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/OTgjMg==/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja--tpak--menurut-jenis-kelamin-di-kota-banjar.html>.

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025²⁹

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal sebanyak 60.730 orang (57,29 persen), sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 42.907 orang (42,71 persen). Adapun dari jumlah tersebut, sebagian besar penduduk bekerja berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 39,15 persen atau sejumlah 40.570 jiwa dari total 103.637 penduduk bekerja di Kota Banjar, sedangkan status pekerjaan yang paling sedikit yakni senilai 2,25 persen atau 2.337 jiwa merupakan penduduk yang berusaha dibantu buruh tetap/dibayar.

²⁹ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Banjar, 2024. Kota Banjar Dalam Angka 2025.

Tabel 2. 8 Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Banjar Tahun 2024

Status Pekerjaan Utama Main Employment Status	Laki-Laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri Own account worker	14.955	11.714	26.669
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar Employer assisted by temporary worker/unpaid worker	7.352	3.984	11.336
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar Employer assisted by permanent worker/paid worker	1.544	793	2.337
Buruh/Karyawan/Pegawai/Employee	26.609	13.961	40.570
Pekerja bebas Casual worker	9.146	2.697	11.843
Pekerja keluarga/tak dibayar Family worker/unpaid worker	4.280	6.602	10.882
Jumlah/Total	63.886	39.751	103.637

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025³⁰

Selain itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menjadi indikator yang digunakan untuk menggambarkan komposisi tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja namun aktif mencari pekerjaan. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, TPT Kota Banjar adalah sebesar 5,44 persen yang berarti dari 100 orang angkatan kerja, sekitar 5-6 orang diantaranya merupakan pengangguran. Persentase TPT tersebut didominasi oleh perempuan dengan angka 6,71 persen atau 2,07 persen lebih tinggi dibandingkan dengan persentase laki-laki sejumlah 4,64 persen.

³⁰ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu Terakhir Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Banjar, 2024. Kota Banjar Dalam Angka 2025.

Tabel 2. 9 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Banjar (Persen) Tahun 2023-2024

Jenis Kelamin	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Banjar (Persen)			
	2024	2023	2022	2021
Laki-laki	4,64	5,78	5,57	7,18
Perempuan	6,71	4,85	5,46	4,57
Laki-laki + Perempuan	5,44	5,43	5,53	6,09

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025³¹

D. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

❖ Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Indikator kesejahteraan suatu daerah salah satunya dapat ditinjau berdasarkan perkembangan perekonomiannya dalam periode tertentu. Dalam hal ini, besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara periodik dapat memberikan gambaran struktur perekonomian dan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga penting untuk diketahui. Nilai PDRB Kota Banjar berdasarkan harga berlaku tahun 2024 mencapai 5549,3 miliar rupiah, lebih tinggi dibandingkan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 5245,4 miliar rupiah. Kenaikan nilai PDRB ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi pada seluruh lapangan usaha dengan disertai adanya inflasi. Sedangkan apabila faktor inflasi dihilangkan, PDRB Kota Banjar berdasarkan harga konstan 2010 pada tahun 2024 mencapai 3884

³¹ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Jenis Kelamin di Kota Banjar (Persen), 2023-2024. <https://banjarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAwIzI=/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--menurut-jenis-kelamin-di-kota-banjar--persen-.html>.

miliar rupiah, peningkatan signifikan dari yang sebelumnya berada di angka 3682 miliar rupiah.

Tabel 2. 10 Nilai PDRB Kota Banjar Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2022-2024

Lapangan Usaha	[Seri 2010] Nilai PDRB Kota Banjar Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)					
	Harga Berlaku			Harga Konstan 2010		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	651,26	693,1	719,13	398,28	414,1	423,58
Pertambangan dan Penggalian	11,1	11,3	11,81	7,97	8,1	8,53
Industri Pengolahan	503,53	533,71	570,69	364,87	380,8	395,63
Pengadaan Listrik dan Gas	5,99	6,26	6,62	3,74	3,91	4,25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,67	11,08	12,55	7,09	7,28	8,22
Konstruksi	499,67	533,17	542,7	349,2	366,3	372,45
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1248,8	1313,9	1298,3	930,26	964,3	985,46
Transportasi dan Pergudangan	263,39	299,47	400,03	166,65	184,1	242,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	145,17	165,29	175,2	99,12	108	114,34
Informasi dan Komunikasi	293,4	314,69	347,48	309,35	331,7	370,48
Jasa Keuangan dan Asuransi	176,06	182,44	195,09	122,14	124,2	125,45
Real Estate	138	149,83	165,89	115,19	122,7	137,94
Jasa Perusahaan	35,95	40,34	44,16	25,69	27,85	28,5
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	389,58	393,5	439,72	253,85	254,1	268,85
Jasa Pendidikan	388,91	413,11	420,41	242,52	253,6	257,54
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,59	152,3	160,47	97,61	106,4	114,37
Jasa lainnya	28,95	31,93	39,05	23,05	25,05	25,63
Produk Domestik Regional Bruto	4928	5245,4	5549,3	3516,6	3682	3884

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025³²

Jika dilihat dari harga konstan, pembentukan PDRB Kota Banjar pada tahun 2024 didominasi oleh kontribusi pendapatan dari empat sektor lapangan usaha utama yang cenderung sama dengan tahun sebelumnya, yaitu kategori perdagangan besar dan eceran, kategori pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori industri pengolahan, dan kategori konstruksi. Secara kumulatif, kontribusi keempat sektor tersebut menyumbang lebih dari separuh perekonomian Kota Banjar yakni mencapai 56,42 persen dengan andil sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 23,40 persen.

Berikut Tabel Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota Banjar Tahun 2022–2024, dibawah ini:

³² Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). [Seri 2010] Nilai PDRB Kota Banjar Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2022-2024. <https://banjarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzQjMg==/nilai-pdrb-kota-banjar-menurut-lapangan-usaha.html>.

**Tabel 2. 11 Kontribusi Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kota
Banjar Tahun 2022–2024**

Lapangan Usaha	[Seri 2010] Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,22	13,21	12,96
Pertambangan dan Penggalian	0,23	0,22	0,21
Industri Pengolahan	10,22	10,17	10,28
Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,22	0,21	0,23
Konstruksi	10,14	10,16	9,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	25,34	25,05	23,4
Transportasi dan Pergudangan	5,34	5,71	7,21
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,95	3,15	3,16
Informasi dan Komunikasi	5,95	6	6,26
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,57	3,48	3,52
Real Estate	2,8	2,86	2,99
Jasa Perusahaan	0,73	0,77	0,8
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,91	7,5	7,92
Jasa Pendidikan	7,89	7,88	7,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,79	2,9	2,89
Jasa lainnya	0,59	0,61	0,7
Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025³³

❖ **PDRB Per Kapita**

Indikator makro ekonomi lainnya yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kemakmuran suatu daerah adalah PDRB Per Kapita atau yang biasa disebut dengan pendapatan per kapita, yakni rerata pendapatan penduduk yang

³³ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). [Seri 2010] Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kota Banjar Menurut Lapangan Usaha. <https://banjarkota.bps.go.id/id/query-builder>.

diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk di suatu daerah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan daerah tersebut semakin makmur. PDRB Per Kapita Kota Banjar pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari yang sebelumnya senilai 25, 2778 juta rupiah di tahun 2023 menjadi 26,4513 juta rupiah. Akan tetapi bila disandingkan dalam cakupan provinsi, angka tersebut tergolong jauh lebih rendah sekitar 29,62 juta rupiah dari PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Barat yang mencapai 56,0796 juta rupiah.

Berikut Tabel PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Ribuan Rupiah) Tahun 2023-2024, dibawah ini:

**Tabel 2. 12 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Ribu Rupiah)
Tahun 2023-2024**

Wilayah Jawa Barat	[Seri 2010] PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Ribu Rupiah)	
	2023	2024
Provinsi Jawa Barat	52651,59	56079,61
Bogor	51378,19	54856,84
Sukabumi	29373,82	31167,47
Cianjur	22825,64	24914,37
Bandung	41372,25	44125,83
Garut	26914,4	29012,36
Tasikmalaya	24172,45	25916,29
Ciamis	31833,51	34336,05
Kuningan	27080,93	29273,4
Cirebon	25973,86	28139,5
Majalengka	31137,6	34233,99
Sumedang	36772,93	39699,13
Indramayu	54668,52	55165,55
Subang	30119,77	33037,26
Purwakarta	79193,71	84024,43
Karawang	115168,7	121298,5
Bekasi	121647,2	128692,9
Bandung Barat	30621,68	32500,07
Pangandaran	33041,97	35647,16
Kota Bogor	53238,77	56615,77
Kota Sukabumi	42561,94	44760,23
Kota Bandung	140143,6	147081,4
Kota Cirebon	84135,31	88560,48
Kota Bekasi	45281,17	48921,73
Kota Depok	40816,92	43514,52
Kota Cimahi	68552,17	72528,37
Kota Tasikmalaya	36954,58	39445,45
Kota Banjar	25277,8	26451,36

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025³⁴

³⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Ribu Rupiah), 2023-2024. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzA4IzI=/pdrb-per-kapita-atas-dasar-harga-berlaku-menurut-kabupaten-kota-ribu-rupiah-.html>.

❖ **Pertumbuhan Ekonomi**

Laju Pertumbuhan PDRB atau Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Banjar pada tahun 2024 mencapai angka 5,48 persen, nilai tersebut merupakan peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 4,71 persen sekaligus menempati posisi lebih tinggi dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat pada tahun yang sama, yakni sebesar 4,95 persen. Bahkan secara umum Kota Banjar menempati posisi ke-4 (keempat) sebagai Kabupaten/Kota dengan LPE tertinggi di Jawa Barat, menyusul Kabupaten Kuningan pada peringkat ketiga (5,61 persen), Kabupaten Cirebon pada peringkat kedua (5,83 persen) dan Kabupaten Majalengka di peringkat pertama dengan nilai 6,38 persen.³⁵ Prestasi tersebut menjadi titik bagi Kota Banjar yang sebelumnya pernah mengalami pertumbuhan paling kecil di tahun 2020 akibat pengaruh multidimensional dari adanya pandemi Covid-19. Apabila ditinjau secara sektoral, peningkatan LPE di Kota Banjar pada tahun 2024 tersebut hampir menjangkau seluruh kategori lapangan usaha. Pertumbuhan paling massif diantaranya dicapai oleh kategori transportasi dan pergudangan, kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan kategori real estate dengan nilai masing-masing sebesar 31,9 persen, 12,9 persen, dan 12,5 persen.

³⁵ [1] Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). [Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat (Persen), 2023-2024. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDgiMg==/-seri-2010--laju-pertumbuhan-pdrb-atas-dasar-harga-konstan-menurut-kabupaten-kota-provinsi-jawa-barat.html>.

**Tabel 2. 13 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Kota Banjar Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022-2024**

Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)		
	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,37	3,97	2,29
Pertambangan dan Penggalian	0,78	1,6	5,32
Industri Pengolahan	3,93	4,35	3,91
Pengadaan Listrik dan Gas	5,1	4,48	8,66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,21	2,66	12,9
Konstruksi	4,84	4,89	1,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,54	3,66	2,19
Transportasi dan Pergudangan	10	10,5	31,9
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,51	8,94	5,89
Informasi dan Komunikasi	6,19	7,21	11,7
Jasa Keuangan dan Asuransi	-0,48	1,67	1,03
Real Estate	6,65	6,47	12,5
Jasa Perusahaan	10,3	8,43	2,34
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-1,14	0,1	5,8
Jasa Pendidikan	3,66	4,56	1,57
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,3	9,05	7,45
Jasa lainnya	9,9	8,71	2,31
Produk Domestik Regional Bruto	4,29	4,71	5,48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025³⁶

❖ **Kemiskinan**

Kesejahteraan suatu daerah juga umumnya dapat dilihat dari jumlah penduduk miskin berikut persentasenya yang menggambarkan seberapa banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada daerah tersebut. Berdasarkan data dari BPS Kota Banjar, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kota Banjar dalam

³⁶ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Banjar Menurut Lapangan Usaha, 2022-2024. <https://banjarkota.bps.go.id/id/query-builder>.

beberapa tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2024, tingkat kemiskinan Kota Banjar berada di angka 5,85 persen. Capaian tingkat kemiskinan ini jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai angka 6,14 persen, kemudian sebesar 6,73 persen di tahun 2022, bahkan pernah mencatat angka 7,11 persen di tahun 2021. Begitupun dari segi jumlah, penduduk miskin di Kota Banjar secara signifikan mengalami penurunan dari yang sebelumnya mencapai 11,66 ribu jiwa pada tahun 2023, kemudian 12,73 ribu jiwa di tahun 2022 hingga jumlah terbanyak di tahun 2021 mencapai 13,37 ribu jiwa menjadi hanya 11,2 ribu jiwa di tahun 2024.

Berikut Tabel Indikator Kemiskinan Kota Banjar Tahun 2021-2024, dibawah ini:

Tabel 2. 14 Indikator Kemiskinan Kota Banjar Tahun 2021-2024

Rincian Indikator Kemiskinan	Indikator Kemiskinan Kota Banjar			
	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan)	13,37	12,73	11,66	11,2
Tingkat kemiskinan (P0) (Persen)	7,11	6,73	6,14	5,85
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,19	1,02	0,68	1,03
Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2)	0,28	0,28	0,12	0,29
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	357210	373510	408710	430590

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2024³⁷

❖ Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkat kesejahteraan daerah juga dapat dilihat berdasarkan ketercapaian daerah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan

³⁷ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2024). Indikator Kemiskinan Kota Banjar, 2021-2024. <https://banjarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDUjMg==/indikator-kemiskinan-kota->.

Manusia (IPM), yakni indikator yang dipergunakan untuk mengukur aksesibilitas penduduk terhadap hasil-hasil pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan secara komprehensif tidak hanya menggunakan indikator ekonomi semata, melainkan mencakup aspek lainnya seperti kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Banjar pada tahun 2024 menduduki peringkat ke-12 dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan perolehan nilai sebesar 73,6.

Tabel 2. 15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Barat Menurut Kabupaten Kota Tahun 2022-2024

Wilayah Jawa Barat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten Kota (Umur Harapan Hidup/UHH Hasil SP2010*)		
	2022	2023	2024
Provinsi Jawa Barat	73,1	73,7	74,4
Bogor	71,2	71,8	72,4
Sukabumi	67,6	68,5	69
Cianjur	65,9	66,6	67,2
Bandung	73,2	73,7	74,3
Garut	67,4	68,1	68,8
Tasikmalaya	66,8	67,8	68,4
Ciamis	71,5	72,1	72,6
Kuningan	70,2	70,7	71,3
Cirebon	70,1	71	71,4
Majalengka	68,6	69,1	69,7
Sumedang	72,7	73,2	73,7
Indramayu	68,6	69,3	69,8
Subang	69,9	70,7	71,4
Purwakarta	71,6	72,1	72,7
Karawang	71,7	72,4	72,9
Bekasi	75,2	75,8	76,4
Bandung Barat	69	69,6	70
Pangandaran	69	69,4	69,9
Kota Bogor	77,2	77,9	78,5
Kota Sukabumi	75,4	76,3	76,9
Kota Bandung	82,5	83	83,5
Kota Cirebon	75,9	76,5	77,1
Kota Bekasi	82,5	83	83,5
Kota Depok	81,9	82,4	82,9
Kota Cimahi	78,8	79,5	80,1
Kota Tasikmalaya	73,8	74,5	75
Kota Banjar	72,6	73,1	73,6

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2025³⁸

Angka tersebut tentunya menjadi suatu prestasi tersendiri bagi Kota Banjar sebagai wilayah administratif baru di Provinsi Jawa Barat, belum lagi secara signifikan skor yang diperoleh menunjukkan tren fluktuatif dari yang sebelumnya sebesar 72,55 (2022) menjadi 73,08 (2023) kemudian kembali naik menjadi 73,64 (2024). Konsistensi kemajuan dalam tiga tahun terakhir ini mencerminkan adanya komitmen Pemerintah Daerah Kota Banjar dalam mengupayakan perbaikan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih inklusif dan sejahtera.

Tabel 2. 16 Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjar dan Komponen Pembentuknya Tahun 2022-2024

Rincian IPM dan Pembentuknya	Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjar dan Komponen Pembentuknya		
	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH)	71,49	71,8	72,03
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,25	13,27	13,28
Angka Harapan Lama Sekolah Rata-Rata Lama Sekolah (ULS)	8,78	8,79	8,83
Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan	10967	11356	11811
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,55	73,08	73,64

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2024³⁹

Salah satu indikator pendidikan yang turut berkontribusi terhadap peningkatan IPM di Kota Banjar berkenaan dengan angka

³⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten Kota (Umur Harapan Hidup/UHH Hasil SP2010*), 2022-2024. <https://jabar.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIzIzI=/indeks-pembangunan-manusia.html>.

³⁹ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2024). Indeks Pembangunan Manusia Kota Banjar dan Komponen Pembentuknya, 2022-2024. <https://banjarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDcjMg==/indeks-pembangunan-manusia-kota-banjar-dan-komponen-pembentuknya.html>.

rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). Melalui indikator ini, tingkat aksesibilitas dan partisipasi penduduk usia sekolah terhadap pendidikan formal di Kota Banjar maka akan tergambarkan. Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kota Banjar secara dinamis mengalami perubahan dari tahun 2022 hingga 2024. Dalam rentang tahun tersebut, jenjang SMP/ sederajat menjadi jenjang pendidikan dengan persentase peningkatan paling signifikan di Kota Banjar yakni dari 90,86 persen di tahun 2022 menjadi 92,5 persen pada 2023 dan kembali meningkat di 2024 menjadi 92,91 persen. Adapun lonjakan persentase paling tinggi nampak dari persentase APK jenjang SMA/ sederajat dari tahun 2023 ke tahun 2024, yakni dari 82,74 persen menjadi 94,32 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah cukup baik dalam memperluas kesempatan pendidikan menengah sehingga semakin banyak penduduk usia sekolah yang dapat mengenyam bangku SMA/ sederajat.

Tabel 2. 17 Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Banjar Tahun 2022-2024

Jenjang Pendidikan	Laki-laki dan Perempuan		
	2022	2023	2024
SD/ Sederajat	103,15	102,21	103,77
SMP/ Sederajat	90,86	92,5	92,91
SMA/ Sederajat	86,56	82,74	94,32

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Banjar, 2025⁴⁰

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2024). Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kota Banjar, 2022-2024. <https://banjarkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAzIzI=/angka-partisipasi-kasar--apk--menurut-jejang-pendidikan-dan-jenis-kelamin-di-kota-banjar--persen-.html>.

E. Produk Unggulan Daerah

Kota Banjar merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi besar dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pariwisata, hingga pertanian. Sebagai kota yang berbatasan dengan Jawa Tengah, Banjar memiliki peran strategis dalam perdagangan dan transportasi antar regional. Tahun 2024, potensi daerah ini terus berkembang dengan berbagai inovasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program pengembangan telah diterapkan untuk meningkatkan daya saing daerah ini, menjadikannya salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan di kawasan perbatasan provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Salah satu pendekatan yang dapat dipergunakan untuk memetakan potensi ekonomi suatu daerah adalah dengan cara mengukur Location Quotient (LQ) secara sektoral. Melalui metode ini, sektor-sektor basis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah dapat diketahui untuk kemudian hasilnya dijadikan sebagai bahan kajian dalam mengidentifikasi spesialisasi kegiatan perekonomian daerah. Pengetahuan akan sektor basis sangatlah penting mengingat sektor-sektor inilah yang pada kontribusinya tidak hanya berdampak langsung atas peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga dapat menstimulasi pertumbuhan bagi sektor lain. Berdasarkan hasil perhitungan nilai LQ pada tahun 2023s, diperoleh hasil bahwa dari sejumlah tujuh belas sektor ekonomi yang terdapat di Kota Banjar, sebagian besar sektor yakni sebanyak dua belas sektor mempunyai nilai $LQ > 1$, sementara lima sektor diantaranya bernilai $LQ < 1$. Artinya, hampir secara keseluruhan sektor ekonomi di Kota Banjar

merupakan sektor basis yang memiliki nilai tambah terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah.

Adapun dua belas sektor yang teridentifikasi sebagai sektor unggulan di Kota Banjar tersebut terdiri atas sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estat, sektor Jasa Perusahaan, sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor-sektor ini dapat dikatakan sebagai sektor unggulan atau sektor prima yang pertumbuhannya cepat (*rapid growth sector*) sehingga secara komparatif maupun kompetitif memiliki keunggulan dibandingkan dengan sektor lainnya.

Sejalan dengan upaya pembangunan ekonomi berbasis kearifan lokal di Kota Banjar, maka inventarisasi potensi daerah menjadi suatu kebutuhan yang harus dilakukan guna menciptakan kebijakan pola pengembangan baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Berkaitan dengan hal tersebut, maka identifikasi terhadap produk-produk unggulan daerah di Kota Banjar penting halnya untuk dilakukan. Secara definitif, produk unggulan merupakan produk dengan nilai tambah yang memberikan sumbangsih tertinggi terhadap kenaikan pendapatan perekonomian daerah. Sementara dalam arti luas, produk unggulan secara implisit merupakan output yang dihasilkan dari kemampuan daerah dalam menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas

dan investasinya. Sehingga, pada pendekatannya, untuk mengidentifikasi dan menentukan produk unggulan tidak hanya semata-mata mengandalkan keunggulan dari aspek ekonominya saja, melainkan perlu menilai kiprahnya berdasarkan tinjauan sumberdaya lokal, sumber daya manusia dan aspek pasar.

Dalam rangka menentukan produk unggulan di Kota Banjar, pemerintah Kota Banjar menitikberatkan pengamatan pada produk-produk khas daerah yang lebih banyak dari segi jumlah unit usahanya, lebih tinggi penyerapan tenaga kerjanya dan secara umum mampu memenuhi kepentingan arah kebijakan pembangunan daerah. Bila dirincikan, setidaknya terdapat 7 (tujuh) parameter yang termasuk dalam kelompok pengungkit atau pendukung suatu produk dikatakan unggul di Kota Banjar, yakni (1) Jumlah unit/usaha; (2) Ketersediaan Pasar; (3) Ketersediaan Bahan Baku; (4) Sumbangan Terhadap Perekonomian; (5) Sarana Produksi/Usaha; (6) Sosial Budaya (Faktor Endogen); dan (7) Penyerapan Tenaga Kerja. Parameter yang termasuk pengungkit ini merupakan parameter yang nilainya memberikan kontribusi positif terhadap keunggulan suatu produk. Berangkat dari parameter tersebut, maka berdasarkan diskusi yang dilakukan di beberapa lokasi dengan melibatkan pihak-pihak kompeten, diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa produk/komoditas dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang berpotensi dikembangkan sebagai produk/komoditas unggulan di Kota Banjar, yakni **(a) Rambutan Si Batulawang, (b) Pepaya Kalifornia dan (c) Belimbing Madu.**

Pemilihan ketiga produk unggulan tersebut didasarkan atas berbagai pertimbangan. Selain dikarenakan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor basis yang pada kontribusinya membawakan peningkatan signifikan bagi pembangunan ekonomi di Kota Banjar, berbicara khusus mengenai

budidaya ketiga produk unggulan tersebut nampaknya dapat diberdayakan secara berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi lokal tanpa merusak lingkungan maupun budaya setempat. Hal ini dikarenakan kendati Kota Banjar dari segi kewilayahan memiliki luas yang relatif kecil, namun pada proporsinya terdapat lahan produktif yang cukup luas untuk dioptimalkan dalam budidaya sektor pertanian, baik tanaman pangan, palawija, maupun hortikultura, termasuk halnya untuk mengembangkan produk Rambutan Si Batulawang, Pepaya Kalifornia dan Belimbing Madu. Oleh sebab ketiga komoditas ini didominasi oleh kekhasan lokal maka upaya peningkatan produksi dan produktivitasnya pun dapat dimaksimalkan baik melalui pemanfaatan sumber daya maupun pengembangan inovasi dan teknologi di daerah. Potensi daya saing ini tidak hanya menguntungkan di pasaran lokal saja, tetapi juga bernilai tinggi dalam jangkauan pemasaran yang luas, baik di dalam negeri maupun global sehingga akan senantiasa berkontribusi bagi peningkatan pendapatan dan kemampuan masyarakat.

Dengan demikian, pengembangan klaster di Kota Banjar, khususnya Klaster Agroteknopark yang mengembangkan produk pertanian (rambutan si Batulawang dan papaya kalifornia) dengan pendekatan agribisnis dan agroindustri, akan mendorong masyarakat untuk menjadi wirausaha baru yang bergerak secara home industry di kawasan atau desa tersebut. Sehingga ke depannya, beberapa desa/kelurahan yang mengembangkan produk yang sama dapat membentuk jaringan yang mengelompok secara spasial dalam kawasan yang lebih luas membentuk *industrial district* sebagai suatu klaster produk unggulan yang terspesialisasi secara geografis dan merupakan industri tradisional yang dominan ditemukan di kawasan tersebut.

2.2 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah Saat Ini Pada PUD dan Permasalahan Utama Daerah yang Diusulkan

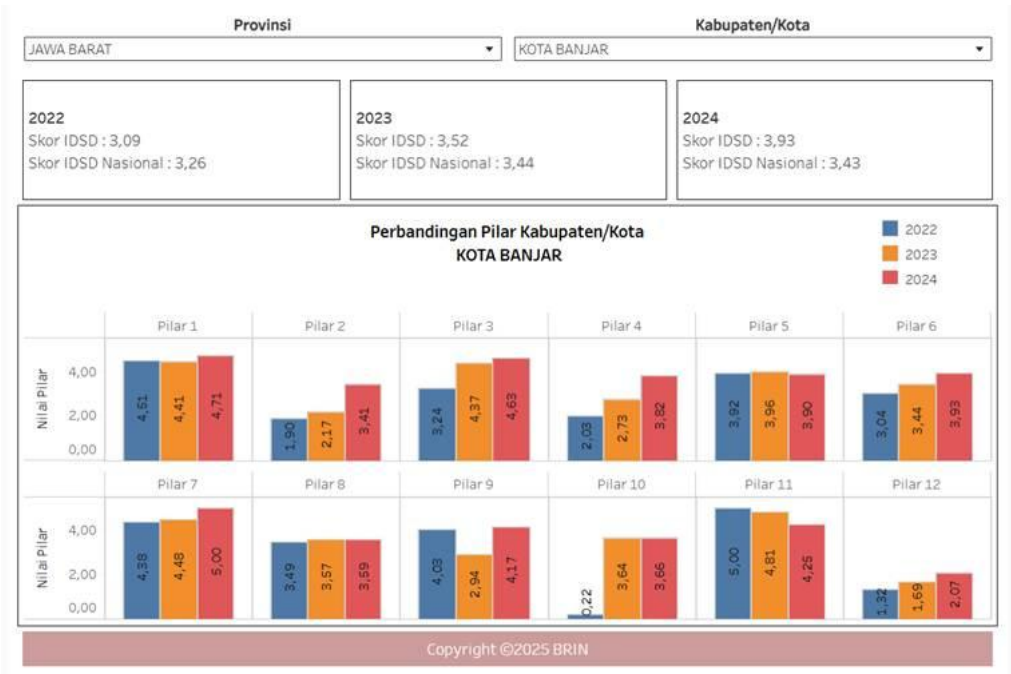
A. Gambaran kondisi riset dan inovasi daerah

Berbagai dinamika yang terjadi di tengah masyarakat pada hakikatnya menuntut adaptabilitas tinggi dari pemerintah untuk senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Hal ini tidak lain dikarenakan setiap perubahan akan membawakan tantangan sekaligus peluang baru yang tidak dapat dihindarkan dan harus dihadapi oleh pemerintah dengan penyesuaian kebijakan yang tepat. Maka disinilah inovasi dibutuhkan oleh pemerintah daerah sebagai upaya dalam mewujudkan *good governance* dan *good public service* yang adaptif. Inovasi daerah sebagaimana merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 ialah dimaknai sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, 2017). Pada implementasinya inovasi tidak hanya dimanifestasikan sebagai bentuk adaptasi teknologi sebagaimana perspektif umum yang familiar di mata publik saat ini, melainkan memungkinkan segala wujud pembaharuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konsisten (terus-menerus) baik melalui dukungan teknologi digital maupun non digital mencakup inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik, dan bentuk inovasi bentuk lainnya sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Kapasitas pemerintah daerah dalam berinovasi tidak hanya berkontribusi bagi daya saing nasional di mata global, melainkan juga bagi peningkatan daya saing bagi daerah itu sendiri. Berbicara mengenai daya saing daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional

(BRIN) secara berkala melakukan pengukuran daya saing pada setiap provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia melalui instrumen Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dengan tujuan untuk menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam memaksimalkan potensi yang dimilikinya agar dapat menciptakan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan skor IDSD tersebut, sejak tahun 2022 Kota Banjar menunjukkan tren peningkatan daya saing yang konsisten dan secara signifikan mengungguli skor rata-rata nasional, yakni dari 3,09 pada tahun 2022 menjadi 3,52 di tahun 2023 hingga mencapai skor 3,93 di tahun 2024. Lompatan besar yang terjadi dari tahun 2023 ke 2024 tersebut menjadi prestasi bermakna bagi Kota Banjar sebab secara kumulatif telah berhasil menyusul perolehan skor IDSD Jawa Barat tahun 2024.

**Tabel 2. 18 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Banjar
Tahun 2022-2024**



Sumber: BRIN, 2025⁴¹

**Tabel 2. 19 Perbandingan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Kota Banjar Dengan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024**



Sumber: BRIN, 2025⁴²

Apabila dikomparasikan, maka selisih antara perolehan skor IDSD Kota banjar dengan Provinsi Jawa Barat dan skor nasional tahun 2022-2024 ialah sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

⁴¹ Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2025). Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Banjar Tahun 2022-2024.

<https://public.tableau.com/app/profile/fungsi.data.dan.bi.pusdatin/viz/shared/HRNJ9PQQB>.

⁴² Ibid.

Tabel 2. 20 Selisih Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Banjar Dengan Provinsi Jawa Barat dan Skor Nasional Tahun 2022-2024

Tahun	Skor IDSD Kota Banjar	Skor IDSD Jawa Barat	Skor IDSD Nasional	Selisih IDSD
2022	3,09	3,64	3,26	-0,55 di bawah provinsi dan -0,17 di bawah nasional
2023	3,52	3,76	3,44	-24 di bawah provinsi dan +0,08 melampaui nasional
2024	3,93	3,88	3,43	+0,05 melampaui provinsi dan +0,50 melampaui nasional

Sumber: Olahan Periset

Terdapat 12 pilar yang dijadikan sebagai indikator pengukuran dalam IDSD, yakni terdiri atas pilar: (1) Institusi, (2) Infrastruktur, (3) Adopsi TIK, (4) Stabilitas Ekonomi Makro, (5) Kesehatan, (6) Keterampilan, (7) Pasar Produk, (8) Pasar Tenaga Kerja, (9) Sistem Keuangan, (10) Ukuran Pasar, (11) Dinamika Bisnis dan (12) Kapabilitas Inovasi.⁴³ Dari keseluruhan pilar tersebut, pertumbuhan skor IDSD paling tajam dalam transisi tahun 2022 ke 2023 terjadi pada pilar 10 yang menandakan adanya kemajuan inovasi dari segi ukuran pasar di Kota Banjar. Kemudian dalam rentang tahun berikutnya, secara umum keseluruhan pilar IDSD di Kota Banjar mengalami peningkatan dengan kenaikan paling massif nampak dari perkembangan pilar 2 (infrastruktur), pilar 4 (stabilitas ekonomi makro), pilar 6 (keterampilan) dan pilar 9 (sistem keuangan). Pada tahun 2024, Kota Banjar juga berhasil memecahkan skor tertinggi pada pilar 7 (pasar produk) dengan perolehan skor sebesar 5,00. Sayangnya dibalik kenaikan skor IDSD dalam rentang tahun 2022-2024 tersebut, pilar 11 pada

⁴³ Badan Riset dan Inovasi Nasional. (2024). Indeks Daya Saing Daerah (IDSD). <https://brin.go.id/drid/page/indeks-daya-saing-daerah>.

perkembangannya masih meninggalkan catatan penting yang mengharuskan Pemerintah Kota Banjar untuk senantiasa meningkatkan daya inovasinya dalam menjalankan dinamika bisnis.

Tabel 2. 21 Perkembangan Pilar Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Banjar Tahun 2022-2024

No	Pilar	2022	2023	2024	Deskripsi
1.	Institusi	4,51	4,41	4,71	Meningkat
2.	Infrastruktur	1,90	2,17	3,41	Konsisten Meningkat
3.	Adopsi TIK	3,24	4,37	4,63	Konsisten Meningkat
4.	Stabilitas Ekonomi Makro	2,03	2,73	3,82	Lonjakan Peningkatan
5.	Kesehatan	3,92	3,96	3,90	Relatif Stagnan
6.	Keterampilan	3,04	3,44	3,93	Konsisten Meningkat
7.	Pasar Produk	4,38	4,48	5,00	Konsisten Meningkat
8.	Pasar Tenaga Kerja	3,49	3,57	3,59	Relatif Stagnan
9.	Sistem Keuangan	4,03	2,94	4,17	Lonjakan Peningkatan
10.	Ukuran Pasar	0,22	3,64	3,66	Lonjakan Peningkatan
11.	Dinamika Bisnis	5,00	4,81	4,25	Konsisten Menurun
12.	Kapabilitas Inovasi	1,32	1,69	2,07	Konsisten Meningkat

Sumber: Olahan Periset

Pada kesimpulannya, secara garis besar Kota Banjar telah berhasil mendongkrak perolehan skor IDSD dalam tiga tahun terakhir secara berkelanjutan sehingga mencerminkan adanya peningkatan inovasi secara sistemik di berbagai sektor. Hanya saja, tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi merupakan buah hasil pemikiran manusia yang tidak luput dari *trial and error* sehingga wajar bilamana pada implementasinya tidak akan selalu berhasil. Inovasi merupakan proses panjang yang perlu dilakukan secara berkesinambungan dan didukung oleh berbagai sumber daya, baik

dari segi SDM, kebijakan maupun anggaran. Maka dengan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan inovasi yang salah satunya tergambarkan melalui perolehan skor IDSD tersebut, hal ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran sekaligus bahan bakar bagi Pemerintah Kota Banjar untuk senantiasa meningkatkan inovasinya demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, efisien dan inovatif secara berkelanjutan.

B. Gambaran permasalahan utama dalam bentuk tema prioritas yang ingin diselesaikan oleh daerah

Mengidentifikasi permasalahan utama merupakan hal yang krusial dalam menyusun rencana pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan pembangunan yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang jelas terhadap kondisi riil dan masalah kritis yang dihadapi oleh daerah tersebut. Dalam suatu daerah, permasalahan yang dihadapi seringkali sangat kompleks dan beragam yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan, serta infrastruktur dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, perlunya permasalahan-permasalahan tersebut disusun ke dalam beberapa tema prioritas yang akan menjadi fokus perhatian pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu. Tema prioritas ini berfungsi sebagai kerangka strategis yang mengarahkan seluruh program dan kegiatan pembangunan sehingga sumber daya yang terbatas dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Berangkat dari hal tersebut, maka tema prioritas Kota Banjar disusun berdasarkan analisis isu strategis yang telah dirumuskan dalam dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti RPJP, RPJMD yang selaras dengan visi dan misi Kota Banjar. Penetapan visi “Banjar Agropolitan” menegaskan bahwa posisi Kota Banjar sebagai daerah yang mayoritas kegiatan ekonominya berasal dari sektor pertanian. Sejalan dengan visi ini, misi pembangunan

mengedepankan pengembangan sumber daya manusia dan perwujudan budaya yang produktif, penguatan ekonomi berbasis agribisnis, meningkatkan kinerja dan kualitas lingkungan hidup, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Dengan merujuk pada visi, isi, serta isu-isu strategis yang ada maka tema prioritas yang diambil harus mampu menjawab tantangan utama sekaligus memanfaatkan peluang yang ada di Kota Banjar agar pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Maka, dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kota Banjar dapat dikategorikan kedalam beberapa tema prioritas berikut:

Pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan kreatif.

Kota Banjar menghadapi sejumlah masalah mendasar yang menghambat pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan ekonomi kreatif. Pada sektor pertanian dan perikanan, permasalahan utama meliputi belum memadainya sarana, prasarana, dan infrastruktur penunjang, termasuk keterbatasan alat mesin pertanian dan teknologi budidaya ikan yang masih bersifat konvensional. Pembenihan dan pembesaran perikanan belum optimal, serta penyediaan dan penyaluran pangan pokok belum mampu menjamin stabilitas pasokan dan harga. Rantai pemasaran hasil pertanian yang masih panjang serta pengawasan produk pangan segar asal hewan dan tumbuhan yang belum efektif semakin memperburuk kondisi pasar. Selain itu, pencapaian target konsumsi pangan per kapita belum optimal. Permasalahan berlanjut pada menurunnya jumlah petani, peternak, dan pembudidaya ikan akibat kurangnya regenerasi dan alih fungsi lahan pertanian yang terus meningkat.

Di sektor pariwisata, pengembangan dan inovasi destinasi wisata masih belum optimal dengan keterbatasan fasilitas,

rendahnya promosi, dan keterbatasan SDM pengelola. Hal ini membatasi potensi ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan sebagai penguatan ekonomi berbasis pertanian dan budaya lokal. Permasalahan sosial seperti kemiskinan yang masih tinggi serta rendahnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan jaminan sosial juga mempersempit ruang gerak pengembangan ekonomi masyarakat. Dari sisi kelembagaan dan pemasaran, daya saing koperasi dan UMKM masih rendah, dengan akses permodalan dan teknologi yang terbatas, serta nilai ekspor produk lokal yang masih minim. Stabilitas harga kebutuhan pokok belum terjamin, dan investasi di berbagai sektor ekonomi belum optimal, dengan nilai realisasi investasi yang rendah.

Meskipun demikian, Kota Banjar memiliki peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan ekonomi berbasis pertanian dan ekonomi kreatif. Sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian Kota Banjar dengan didominasi jenis tanaman hortikultura. Keunggulan utama lainnya adalah struktur demografi Kota Banjar yang didominasi oleh kelompok umur produktif sebanyak 143.935 jiwa atau 69% dari total jumlah penduduk pada tahun 2019-2023. Proporsi usia produktif yang besar ini memberikan potensi sumber daya manusia yang kuat untuk menunjang pengembangan sektor ekonomi kreatif dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kondisi ini membuka peluang besar bagi pengembangan inovasi, kewirausahaan, dan diversifikasi produk berbasis pada potensi lokal serta penguatan kapasitas masyarakat dalam bidang pertanian dan ekonomi kreatif.

Tabel 2. 22 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan jenis Kelamin di Kota Banjar Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Umur Muda	Umur Produktif	Umur Non Produktif	Jumlah Penduduk
1	Banjar	13.819	41.345	5.156	60.320
2	Pataruman	14.362	43.589	4.966	62.917
3	Purwaharja	5.813	17.318	1.710	24.841
4	Langensari	13.727	41.683	4.821	60.231
Jumlah		47.721	143.935	16.653	208.309

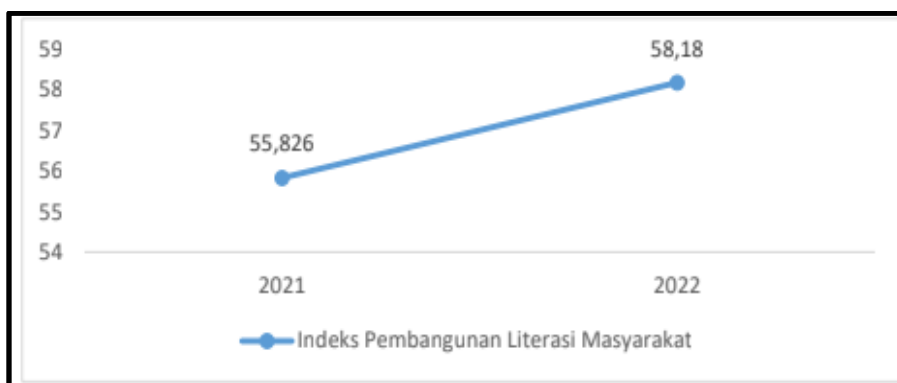
Sumber: Rantek RPJMD Kota Banjar tahun 2025-2029.

Peningkatan infrastruktur dan konektivitas. Kota Banjar menghadapi berbagai tantangan utama dalam meningkatkan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang masih perlu menjadi prioritas penyelesaian. Di sektor transportasi, belum diketahuinya tingkat konektivitas antar wilayah secara komprehensif, minimnya moda transportasi umum, serta belum tersedianya terminal bertipe C menjadi kendala dalam mendukung mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi. Kesadaran keselamatan berkendara masih rendah, ditambah dengan permasalahan terkait pelaksanaan uji KIR kendaraan angkutan umum dan regulasi yang belum berjalan optimal, turut menghambat peningkatan kualitas layanan transportasi. Pengelolaan perlengkapan jalan juga belum optimal, dengan proses peremajaan yang masih rendah dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) untuk pemeliharaan jalan dan fasilitas pendukungnya. Tata ruang wilayah Kota Banjar masih belum optimal dengan berbagai kendala, seperti pengendalian ruang yang lemah, konflik penggunaan lahan, batas kawasan yang belum jelas, serta dukungan terhadap sistem informasi tata ruang yang belum maksimal.

Kondisi infrastruktur irigasi juga belum optimal, disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan, bangunan yang sudah melewati masa pakai, serta minimnya pembinaan SDM pengawas. Jaringan drainase kota belum efektif dalam mengalirkan debit air dengan belum tersedianya data dan masterplan banjir yang memadai. Kemantapan dan drainase jalan belum sejalan dengan volume kendaraan yang terus meningkat tiap tahun, sehingga perlu peningkatan konstruksi dan manajemen jalan. Pengelolaan sistem penyediaan air minum dan sanitasi juga masih harus diperbaiki, dengan belum adanya standar kebutuhan minimal air minum, sumber air bersih yang sulit dijangkau, serta kelembagaan pengelolaan sanitasi yang belum efektif. Penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan pemukiman kumuh belum optimal, dipengaruhi oleh minimnya partisipasi masyarakat dan belum terbentuknya forum koordinasi yang efektif. Selain itu, pengelolaan emisi dari sumber bergerak maupun tidak bergerak, seperti kendaraan bermotor dan industri UMKM, belum memadai karena belum tersedianya pejabat pengawas lingkungan hidup serta belum dilaksanakannya uji emisi secara optimal. Dalam aspek kebencanaan, kualitas penanggulangan bencana, penyediaan sarana dan prasarana, dan kapasitas SDM masih rendah, dengan dokumen kebencanaan yang belum legal dan partisipasi masyarakat yang kurang, sehingga kesiapsiagaan bencana dan penanganan risiko belum optimal. Ancaman longsor juga masih tinggi akibat kondisi topografi yang curam dan belum optimalnya pembangunan infrastruktur mitigasi seperti tembok penahan tanah.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berwawasan lingkungan. Kota Banjar masih menghadapi berbagai permasalahan utama dalam pengembangan sumber daya

manusia khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, daya saing, pengendalian penduduk, serta perlindungan perempuan dan anak. Dari sisi pendidikan, kualitas dan akses layanan pendidikan belum optimal yang diperparah oleh kurangnya bantuan pemerintah untuk sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas pendidik serta tenaga kependidikan. Budaya baca masyarakat juga masih rendah tercermin dari Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Banjar yang pada tahun 2021 baru mencapai 55,826 dan sedikit meningkat menjadi 58,18 pada tahun 2022 menunjukkan bahwa masih banyak aspek literasi yang perlu ditingkatkan. Hal ini diperparah dengan masih minimnya koleksi bahan bacaan dan kurangnya pemahaman terhadap perpustakaan digital.



Gambar 2. 33 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Banjar Tahun 2021-2022

Sumber: Rantek RPJMD Kota Banjar Tahun 2025-2029

Di bidang kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan masih belum memadai dengan tingginya angka kasus penyakit menular, stunting, serta kurangnya fasilitas dan tenaga kesehatan terutama dokter spesialis dan ahli psikolog. Sanitasi dan program promotif belum optimal. Dalam ketenagakerjaan, kualitas tenaga kerja masih rendah dengan minimnya lapangan kerja yang sesuai kompetensi, sarana pelatihan yang terbatas dan rendahnya penguasaan IPTEK.

Partisipasi perempuan dan pemuda dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik juga masih rendah termasuk akses dan pembinaan kewirausahaan yang belum memadai. Permasalahan-permasalahan tersebut menjadi tantangan utama yang harus diatasi untuk mewujudkan sumber daya manusia Kota Banjar yang unggul, produktif, serta berwawasan lingkungan sesuai dengan visi daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan. Kota Banjar menghadapi berbagai permasalahan signifikan dalam pengelolaan lingkungan hidup yang masih belum optimal. Penanganan limbah cair domestik dan industri mengalami kendala akibat belum meratanya pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) domestik komunal, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengendalian pencemaran air serta ketersediaan sumber daya manusia yang belum memadai sebagai pejabat pengawas lingkungan hidup. Bertambahnya jumlah penduduk dan usaha yang menghasilkan limbah cair turut memperburuk kualitas lingkungan perairan. Selain itu, ruang terbuka hijau (RTH) mengalami penurunan luas yang cukup signifikan. Kepemilikan lahan yang didominasi swasta, tingginya angka alih fungsi lahan serta terbatasnya lahan untuk pembangunan RTH menjadi tantangan utama. Pengelolaan lahan pemahaman yang belum jelas tanggung jawabnya juga menyulitkan pelestarian fungsi RTH dalam kota.

Pengelolaan persampahan juga masih menghadapi kendala meliputi kurangnya armada pengangkut sampah, teknologi pengelolaan yang belum memadai, manajemen pengelolaan sampah yang belum sesuai target serta minimnya pelatihan bagi sumber daya manusia menangani sampah di tingkat TPS dan pengelolaan daerah. Selain itu, pengetahuan sosial dan budaya masyarakat terkait pengelolaan sampah masih rendah sehingga upaya

pengurangan sampah dan pengelolaan yang berkelanjutan belum optimal.

Peningkatan iklim investasi dan tata kelola pemerintahan.

Sejumlah permasalahan masih menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan iklim investasi dan tata kelola pemerintahan di Kota Banjar. Dari sisi investasi, sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi belum memadai sehingga menghambat sektor-sektor produktif seperti pembenihan dan pembesaran perikanan yang belum optimal. Selain itu, penyediaan dan distribusi pangan pokok serta pengembangan inovasi destinasi pariwisata juga belum terlaksana secara maksimal. Kondisi ini turut berdampak pada rendahnya tingkat dan realisasi investasi di berbagai sektor di daerah. Dari sisi tata kelola pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan publik yang belum optimal serta tata kelola pemerintahan di kecamatan yang kurang efektif turut menjadi tantangan. Pengelolaan arsip pemerintahan masih rendah, yang berpengaruh pada transparansi dan akuntabilitas administrasi. Implementasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) juga belum sepenuhnya profesional, sementara gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat masih cukup tinggi. Selain itu, tata kelola akuntabilitas kinerja, manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) belum berjalan optimal. Inspektorat daerah pun belum memiliki sistem deteksi dini yang efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi, dan pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan masih belum maksimal.

C. Gambaran uraian 6 elemen kondisi ekosistem riset dan inovasi di daerah saat ini dalam mendukung tema prioritas

Penggambaran kondisi yang berkaitan dengan riset dan inovasi pada Kota Banjar dilihat melalui permasalahan utama yang telah diuraikan dalam isu strategis Kota Banjar. Adapun dalam kondisi tersebut dianalisis dengan menggunakan ke-6 elemen ekosistem riset dan inovasi di daerah sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023.

1) Kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah

Kebijakan riset dan inovasi berhubungan dengan dukungan regulasi yang tersedia dalam mengembangkan ekosistem riset dan inovasi yang optimal. Regulasi tersebut memungkinkan bagi setiap daerah untuk mengembangkan strategi kebutuhan riset berdasarkan pada kebutuhan lokal. Kebijakan yang dilahirkan juga harus mencakup upaya kolaborasi antar sektor antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, sokongan anggaran yang memadai, serta sumber daya berkualitas. Infrastruktur riset yang kuat juga turut menjadi pondasi penting dalam mendorong perkembangan inovasi daerah. Melalui fasilitas modern yang terintegrasi dengan kebutuhan lokal maka dapat membantu daerah dalam meningkatkan produktivitas riset dan inovasi yang berkelanjutan.

2) Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi

Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi mencakup penguatan lembaga riset daerah, institusi pemerintah daerah, dan universitas dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang didukung oleh keberadaan alokasi anggaran riset dan inovasi yang memadai, perluasan jejaring kolaborasi, dan aksesibilitas teknologi canggih.

3) Kemitraan Riset dan Inovasi

Hubungan kemitraan yang terjalin antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting dalam memperkuat daya saing daerah. Kemitraan dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian yang dihasilkan dari hubungan kolaborasi antar sektor untuk menjawab permasalahan daerah. Kemitraan yang semakin luas dapat mendorong percepatan transfer teknologi, inovasi produk, dan komersialisasi hasil riset yang dapat memberikan manfaat baik secara ekonomi maupun sosial bagi daerah.

4) Budaya Riset dan Inovasi

Budaya riset dan inovasi perlu ditanamkan kepada masyarakat melalui pendidikan dan partisipasi. Pemerintah daerah bersama lembaga pendidikan harus secara aktif mengedukasi masyarakat akan pentingnya riset dan inovasi dalam menjawab permasalahan daerah yang dihadapi. Peningkatan kesadaran masyarakat dapat didorong secara bertahap, dimulai dari pengintegrasian kurikulum sekolah dengan kegiatan riset sebagai bagian dari komponen penilaian. Selain itu, kepemimpinan yang visioner juga mempengaruhi percepatan keterlibatan aktif masyarakat dan melahirkan gagasan baru untuk tumbuh.

5) Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah

Keterpaduan riset dan inovasi di daerah mengacu pada kerja sama antara berbagai aktor dalam menciptakan ekosistem riset berkelanjutan dan terintegrasi. Kerja sama mencakup menyelaraskan agenda riset dengan kebutuhan industri dan masyarakat, sehingga temuan riset dapat diterapkan secara praktis dan inovatif dalam berbagai industri.

6) Penyelarasan dengan Perkembangan Global

Dalam hal riset dan inovasi, penyelarasan dengan perkembangan global harus diperhatikan agar daerah tidak mengalami keterbelakangan inovasi teknologi. Daerah harus proaktif dalam mengikuti tren perkembangan riset global dengan menyesuaikan prioritas riset lokal terhadap isu internasional seperti perubahan iklim, kesehatan, energi terbarukan, dan digitalisasi.

Tabel 2. 23 Kondisi Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
I	Produk Unggulan Komoditas Pertanian/Hortikultura			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Tersedianya peraturan yang mendukung pengembangan komoditas pertanian	Penyelenggaraan peraturan dalam pengembangan produk unggulan pertanian dalam Kepwal No. 284 Tahun 2018 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Kepwal No. 236 Tahun 2023	-
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang berisi informasi seputar komoditas pertanian seperti harga, jumlah pelaku	Tidak ada data mengenai jumlah pelaku usaha, harga produk, dan omzet yang dihasilkan	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		usaha, dan omzet		
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Tersedianya infrastruktur dasar yang dapat mendukung kegiatan riset dan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber air/irigasi masih kurang memadai dan pemanfaatan teknologi modern belum optimal - Tidak ada pusat inovasi produk pertanian yang dapat memberikan arahan dan fasilitas kepada para petani dan pengusaha lokal 	-
D.	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran khusus pengembangan komoditas pertanian	Pos pembiayaan anggaran riset dan inovasi masih terbatas, tidak hanya dalam lingkup daerah melainkan juga nasional	
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Inventaris data kekayaan intelektual para pelaku budidaya pertanian	Tidak ada data kekayaan intelektual dan mekanisme jaminan perlindungan yang jelas	-
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terjalannya kerja sama dengan BRIN, swasta, dan perguruan tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama dengan pihak swasta masih minim - Kelembagaan litbang yang mandiri belum terbentuk dan masih tergabung dalam Bapelitbangda Kota Banjar 	-
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Adanya situs jaringan inovasi pengembangan budidaya komoditas pertanian	Fasilitas sarana pendukung riset berupa situs jaringan inovasi belum ada	-
3. Kemitraan Riset dan Inovasi				
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalanan kemitraan antar sektor penghasil dan pengguna pengembangan tanaman pertanian	Kemitraan pengembangan tanaman pertanian belum berjalan optimal	-
B.	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi bagi para pelaku bisnis	Tidak ada upaya transfer teknologi untuk produk pertanian	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset	Praktik baik dan diseminasi hasil riset pengembangan produk unggulan pertanian belum dilakukan	-
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye pengembangan PUD pertanian	Promosi dan kampanye terkait PUD pertanian sudah ada, namun perlu ditingkatkan lagi.	-
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Perlombaan inovasi terkait komoditas pertanian	Belum terdapat upaya apresiasi yang mendukung inovasi budidaya komoditas pertanian	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema dukungan pengembangan perusahaan pemula berbasis riset di sektor pertanian belum ada	-
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pendataan dan jaminan perlindungan terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Inventarisasi belum diselenggarakan dengan baik	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Adanya prakarsa riset dan inovasi daerah dalam rangka pengembangan komoditas pertanian	Prakarsa riset dan inovasi untuk pengembangan PUD pertanian belum dilakukan secara optimal	-
B.	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan dan pengembangan kluster inovasi berbasis produk pertanian	Kluster Agroteknopark sebagai kluster inovasi produk pertanian (rambutan Sibatulawang dan pepaya Kalifornia)	-
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan Kota Banjar dengan pusat terkait pengembangan komoditas pertanian	Kesesuaian kebijakan terkait pengembangan PUD pertanian belum optimal	-
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional	Standarisasi internasional terhadap	Kepedulian isu internasional serta standarisasi	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	produk olahan pertanian	yang berpengaruh pada pengembangan PUD pertanian masih rendah	
B.	Penguatan kerja sama internasional	Hubungan kerja sama internasional dan kajian pengembangan produk ramah lingkungan	Belum terdapat kerja sama internasional dalam pengembangan produk pertanian	-
II	Prioritas 1: Optimalisasi pengembangan sumber daya alam, ekonomi kreatif pada sektor olahraga, pariwisata, seni, budaya, dan UMKM			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Tersedianya peraturan yang mendukung pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif	Belum ada kebijakan riset dan inovasi yang mengarah pada optimalisasi pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif	-
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang berisi informasi seputar sumber daya alam dan ekonomi kreatif	Belum terdapat basis data yang memadai untuk program riset dan inovasi optimalisasi sumber daya alam dan ekonomi	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Tersedianya infrastruktur dasar yang dapat mendukung kegiatan riset dan inovasi	Infrastruktur riset masih minim dalam upaya optimalisasi sumber daya ekonomi dan kreatif	-
D.	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran khusus pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif	Anggaran untuk riset dan inovasi khusus optimalisasi sumber daya alam dan ekonomi kreatif masih lemah	-
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Inventaris data kekayaan intelektual para pelaku usaha	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual masih minim	-
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terjalinnya kerja sama dengan BRIN, swasta, dan perguruan tinggi	Kerja sama antara lembaga riset, perguruan tinggi, dan swasta belum terkoordinasi dengan baik	-
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan	Adanya situs jaringan inovasi pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif	Sarana pendukung riset dan inovasi belum ada	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	kemampuan daerah			
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan kemitraan antar sektor penghasil dan pengguna	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan di daerah masih belum optimal dalam rangka mendorong pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif	-
B.	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi bagi para pelaku bisnis	Difusi hasil inovasi perihal sumber daya alam dan ekonomi kreatif masih minim	-
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset	Diseminasi hasil riset kepada publik dan pelaku sektor ekonomi kreatif belum optimal	-
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah, seperti pada sektor pariwisata	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Perlombaan inovasi terkait sumber daya alam dan ekonomi kreatif	Belum ada ajang apresiasi untuk mendorong para inovator lokal berkontribusi dalam pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap optimalisasi sumber daya alam dan sektor ekonomi kreatif	-
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pendataan dan jaminan perlindungan terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Belum terdapat langkah konkret untuk menginventarisir dan mengembangkan teknologi masyarakat yang dapat mendukung percepatan optimalisasi sumber daya alam dan	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			keberlangsungan ekonomi kreatif	
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Adanya prakarsa riset dan inovasi daerah dalam rangka pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis	-
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis produk UMKM	Kondisi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal	-
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan Kota Banjar dengan pusat terkait sumber daya alam dan ekonomi kreatif	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna optimalisasi pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif	-
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Standarisasi internasional terhadap produk ekonomi kreatif	Penerapan standar global dalam pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif masih belum optimal	-
B.	Penguatan kerja sama internasional	Hubungan kerja sama internasional dan kajian pengembangan produk ramah lingkungan	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif dasar masih lemah	-
III	Prioritas 2: Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi yang mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Kebijakan riset dan inovasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar belum tersedia	-
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dasar	Basis data belum terintegrasi secara optimal	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Adanya infrastruktur dasar untuk melakukan riset dan inovasi	Infrastruktur masih kurang memadai untuk melakukan inovasi	-
D.	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran khusus riset dan inovasi untuk pemerataan pembangunan infrastruktur	Ketersediaan anggaran untuk melakukan riset dan inovasi masih minim	-
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Mekanisme perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual jelas	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual belum dilakukan dengan optimal	-
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terjalinnnya kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi	Kerja sama antara lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi belum terkoordinasi dengan baik	-
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan	Adanya sarana pendukung untuk melakukan riset dan inovasi	Penyediaan sarana pendukung belum optimal untuk kegiatan riset dan inovasi yang efektif	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	dengan kemampuan daerah			
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan kemitraan antar sektor penghasil dan pengguna	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan di daerah masih belum optimal dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	-
B.	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi bagi para pelaku bisnis	Difusi hasil inovasi perihal pembangunan infrastruktur dasar belum optimal	-
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset kepada publik dan pemberi modal	Diseminasi hasil riset kepada publik dan pemberi modal masih minim	-
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Adanya promosi dan kampanye terkait pembangunan infrastruktur	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri	
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Perlombaan inovasi terkait pembangunan infrastruktur dasar	Belum ada ajang apresiasi untuk mendorong para inovator lokal berkontribusi dalam hal pemerataan infrastruktur dasar	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap pemerataan infrastruktur dasar	-
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pendataan dan jaminan perlindungan terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Belum terdapat langkah konkret untuk menginventarisir dan mengembangkan teknologi masyarakat yang dapat	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			mendukung percepatan pembangunan infrastruktur	
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Adanya prakarsa riset dan inovasi daerah dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis	-
B.	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan dan pengembangan kluster inovasi	Kondisi kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal	-
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan Kota Banjar dengan pusat terkait pembangunan infrastruktur dasar	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Standarisasi internasional terhadap pembangunan infrastruktur dasar	Penerapan standar global dalam pengembangan infrastruktur dasar masih belum optimal	-
B.	Penguatan kerja sama internasional	Hubungan kerja sama internasional dan kajian pengembangan infrastruktur dasar	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam pengembangan infrastruktur dasar masih lemah	-
IV	Prioritas 3: Peningkatan konektivitas antar wilayah			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi yang mendukung peningkatan konektivitas wilayah	Kebijakan riset dan inovasi di daerah belum ada	-
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang berkaitan dengan ketersediaan sarana transportasi antar wilayah	Basis data berupa rencana strategis sudah ada. Namun untuk kebutuhan basis data riset masih terbatas karena	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			belum terintegrasi secara komprehensif	
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Adanya infrastruktur dasar untuk melakukan riset dan inovasi	Infrastruktur dasar sebagai pendukung kegiatan riset masih minim	-
D.	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran khusus riset dan inovasi untuk peningkatan konektivitas wilayah	Alokasi anggaran untuk melakukan riset masih terbatas	-
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Mekanisme perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual jelas	Belum terdapat upaya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pada isu ini	-
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terjalannya kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi	Kerja sama antara lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi belum terkoordinasi dengan baik	-
B.	Penyediaan sarana	Adanya sarana pendukung	Penyediaan sarana	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	untuk melakukan riset dan inovasi	pendukung belum optimal untuk kegiatan riset dan inovasi yang efektif	
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan kemitraan antar sektor penghasil dan pengguna	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan di daerah masih belum optimal dalam rangka optimalisasi konektivitas wilayah	-
B.	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi bagi para pelaku bisnis	Difusi hasil inovasi perihal konektivitas wilayah masih minim, data mengenai perhitungan konektivitas pun belum tersedia	-
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset	Diseminasi hasil riset kepada publik dan pemilik kendaraan angkutan umum belum tersedia	-
4.	Budaya Riset dan Inovasi			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Adanya promosi dan kampanye terkait konektivitas wilayah	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri	-
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Perlombaan inovasi terkait peningkatan konektivitas wilayah	Belum ada ajang apresiasi untuk mendorong para inovator lokal berkontribusi dalam hal penanganan transportasi	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap konektivitas antar wilayah	-
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan	Pendataan dan jaminan perlindungan terhadap	Belum terdapat langkah konkret untuk menginventarisir	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	teknologi masyarakat dan kearifan lokal	dan mengembangkan teknologi masyarakat yang dapat mendukung percepatan peningkatan konektivitas wilayah	
5.	Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Adanya prakarsa riset dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan konektivitas wilayah	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis	-
B.	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan dan pengembangan kluster inovasi	Kondisi kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal	-
C.	Kesesuaian kebijakan	Sinkronisasi kebijakan Kota	Kepaduan antara kebijakan pusat	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Banjar dengan pusat terkait konektivitas wilayah	dan daerah belum sesuai guna peningkatan konektivitas wilayah	
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Standarisasi internasional terhadap sarana transportasi	Penerapan standar global dalam peningkatan konektivitas wilayah melalui sarana transportasi	-
B.	Penguatan kerja sama internasional	Hubungan kerja sama internasional dan kajian pengembangan konektivitas wilayah	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif dasar masih lemah	-
V	Prioritas 4: Peningkatan kualitas lingkungan hidup			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi yang mendukung percepatan perbaikan lingkungan	Kebijakan mengenai lingkungan hidup sudah ada namun belum terintegrasi dengan riset dan	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		hidup	inovasi	
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup	Basis data seperti Indeks Risiko Bencana (IRB), kondisi geografis dan sosial ekonomi sudah ada namun belum terintegrasi dengan riset dan inovasi	-
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Adanya infrastruktur dasar untuk melakukan riset dan inovasi	Kualitas infrastruktur yang dimiliki masih minim sehingga masih rentan terkena resiko bencana	-
D.	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran khusus riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup	Alokasi anggaran riset masih minim sehingga masih terbatas pada fokus penataan permasalahan utama	-
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Mekanisme perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual jelas	Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual dalam mengatasi permasalahan kualitas lingkungan hidup	-
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terjalannya kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi	Kerja sama antara lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi belum terkoordinasi dengan baik	-
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Adanya sarana pendukung untuk melakukan riset dan inovasi	Penyediaan sarana pendukung belum optimal untuk kegiatan riset dan inovasi yang efektif	-
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan kemitraan antar sektor penghasil dan pengguna	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan di daerah masih belum optimal dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup	-
B.	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi bagi para pelaku bisnis	Difusi hasil inovasi perihal kualitas lingkungan hidup masih minim	-
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi	Diseminasi hasil riset kepada publik dan sektor	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	hasil riset	industri belum optimal sehingga masih ditemukan permasalahan terkait penanganan limbah cair domestik dan industri	
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Adanya promosi dan kampanye terkait lingkungan hidup	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri	-
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Perlombaan inovasi terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR Award)	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			tergabung dalam inovasi riset terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup	
E.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pendataan dan jaminan perlindungan terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Inventarisasi terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal melalui Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 266 Tahun 2024	-
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Adanya prakarsa riset dan inovasi daerah dalam rangka perbaikan lingkungan hidup	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis	-
B.	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi	Pembentukan dan pengembangan kluster inovasi berbasis	Kondisi kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	berbasis produk unggulan daerah	produk ramah lingkungan	secara maksimal	
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan Kota Banjar dengan pusat terkait lingkungan hidup	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna peningkatan kualitas lingkungan hidup	-
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Standarisasi internasional terhadap pemeliharaan lingkungan hidup	Penerapan standar global dalam kualitas lingkungan hidup masih rendah	-
B.	Penguatan kerja sama internasional	Hubungan kerja sama internasional dan kajian pengelolaan lingkungan hidup	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam pemeliharaan lingkungan hidup dasar masih lemah	-
VI	Prioritas 5: Peningkatan kualitas dan kuantitas air			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di	Kebijakan riset dan inovasi yang	Kebijakan berkaitan dengan upaya	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	daerah	mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas air	peningkatan kualitas air sudah ada, yakni melalui Perda Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah akan tetapi belum terintegrasi dengan upaya riset dan inovasi yang dilakukan	
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang berkaitan dengan ketersediaan air bersih	Basis data seperti indeks kualitas air dan pengguna air bersih tersedia dalam satu portal terintegrasi	-
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Adanya infrastruktur dasar untuk melakukan riset dan inovasi	Infrastruktur untuk kebutuhan riset masih minim untuk kegiatan inovasi terhadap kualitas dan kuantitas air	-
D.	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran khusus riset dan inovasi untuk pemerataan air bersih	Anggaran kebutuhan riset untuk membantu mengkaji permasalahan kualitas dan kuantitas air masih terbatas	-
E.	Peningkatan perlindungan	Mekanisme perlindungan	Pemanfaatan kekayaan	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	dan pemanfaatan kekayaan intelektual	dan pemanfaatan kekayaan intelektual jelas	intelektual untuk peningkatan kuantitas dan kualitas air masih minim	
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terjalinnya kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi	Kerja sama antara lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi belum terkoordinasi dengan baik	-
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Adanya sarana pendukung untuk melakukan riset dan inovasi	Penyediaan sarana pendukung belum optimal untuk kegiatan riset dan inovasi yang efektif	-
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalanan kemitraan antar sektor penghasil dan pengguna	Kemitraan antar lembaga belum kuat sehingga perlu lebih banyak keterlibatan dari berbagai pihak	-
B.	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi bagi para pelaku bisnis	Difusi hasil inovasi perihal kualitas dan kuantitas air	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			masih minim	
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset	Diseminasi hasil riset kepada publik dan perusahaan daerah masih minim	-
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Adanya promosi dan kampanye terkait kualitas dan kuantitas air	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri	-
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Perlombaan inovasi terkait peningkatan kualitas dan kuantitas air	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR Awards)	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			peningkatan mutu air bersih	
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pendataan dan jaminan perlindungan terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Belum terdapat inventarisasi dan pengembangan teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait pemeliharaan kualitas air	-
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Adanya prakarsa riset dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas air	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis	-
B.	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan dan pengembangan kluster inovasi air bersih	Kondisi kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal	-
C.	Kesesuaian	Sinkronisasi	Kepaduan antara	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	kebijakan Kota Banjar dengan pusat terkait pengelolaan air bersih	kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna peningkatan kualitas dan kuantitas air	
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Standarisasi internasional terhadap kualitas air bersih	Penerapan standar internasional dalam peningkatan kualitas dan kuantitas air masih belum optimal	-
B.	Penguatan kerja sama internasional	Hubungan kerja sama internasional dan kajian pengembangan kualitas dan kuantitas air	Belum ada upaya kolaborasi dengan lembaga internasional dalam penyediaan air bersih	-
VII	Prioritas 6: Pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i>			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi yang mendukung pengelolaan persampahan	Kebijakan pengelolaan sampah di daerah belum diimplementasikan secara optimal	-
B.	Penataan basis data riset dan	Basis data yang berkaitan	Basis data riset belum	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	inovasi	dengan pengelolaan persampahan	terintegrasi secara optimal	
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Adanya infrastruktur dasar untuk melakukan riset dan inovasi	Infrastruktur masih kurang memadai untuk melakukan riset dan inovasi	-
D.	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran khusus riset dan inovasi untuk pengelolaan persampahan	Alokasi anggaran masih minim di tingkat daerah	-
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Mekanisme perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual jelas	Kekayaan intelektual masih belum dimanfaatkan dengan optimal untuk mengatasi permasalahan sampah di daerah	-
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terjalinnya kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi	Kerja sama antara lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi belum terkoordinasi dengan baik	-
B.	Penyediaan sarana pendukung	Adanya sarana pendukung untuk	Penyediaan sarana pendukung	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	melakukan riset dan inovasi	belum optimal untuk kegiatan riset dan inovasi yang efektif	
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalanan kemitraan antar sektor penghasil dan pengguna	Kemitraan antar lembaga belum kuat sehingga perlu lebih banyak keterlibatan dari berbagai pihak	-
B.	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi bagi para pelaku bisnis	Difusi hasil inovasi perihal pengelolaan sampah di daerah masih minim	-
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset	Diseminasi hasil riset kepada publik masih minim sehingga perlu ditingkatkan	-
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Adanya promosi dan kampanye terkait lingkungan yang bebas dari sampah	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan kolaboratif antara	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			pemerintah daerah, akademisi, dan industri	
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Perlombaan inovasi terkait pemeliharaan lingkungan dari sampah	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR) Awards	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap pengelolaan sampah	-
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pendataan dan jaminan perlindungan terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Inventarisasi terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal melalui Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 266 Tahun 2024	-
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di	Adanya prakarsa riset dan inovasi daerah dalam	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	rangka pengelolaan persampahan	masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis	
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan dan pengembangan klaster inovasi berbasis produk ramah lingkungan	Kondisi kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal	-
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan Kota Banjar dengan pusat terkait pengelolaan sampah	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna pengelolaan sampah menuju <i>zero waste to landfill</i>	-
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan	Standarisasi internasional terhadap pengelolaan sampah	Penerapan standar global dalam pengelolaan sampah masih minim	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	inovasi di daerah			
B.	Penguatan kerja sama internasional	Hubungan kerja sama internasional dan kajian pengembangan pengelolaan persampahan	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam pengelolaan persampahan masih lemah	-
VIII	Prioritas 7: Peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi yang mendukung terciptanya iklim ramah investasi	Kebijakan yang ada masih berupa pendeskripsian secara umum	-
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang berkaitan dengan kemudahan investasi	Belum tersedianya basis data potensi investasi hasil kajian <i>feasibility study</i>	-
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Adanya infrastruktur dasar untuk melakukan riset dan inovasi	Perencanaan pengembangan infrastruktur masih terbatas, salah satunya seperti belum tersedianya lahan ruang untuk kawasan industri	-
D.	Penyediaan anggaran riset	Tersedianya anggaran	Alokasi anggaran di tingkat daerah	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	dan inovasi	khusus riset dan inovasi untuk peningkatan iklim ramah investasi	masih terbatas sehingga kegiatan inovasi berbasis riset pun menjadi terhambat	
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Mekanisme perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual jelas	Belum ada upaya pemanfaatan kekayaan intelektual dalam rangka peningkatan iklim ramah investasi daerah	-
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terjalinnya kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi	Kerja sama antara lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi belum terkoordinasi dengan baik	-
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Adanya sarana pendukung untuk melakukan riset dan inovasi	Penyediaan sarana pendukung belum optimal untuk kegiatan riset dan inovasi yang efektif	-
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan	Jalanan kemitraan	Kemitraan antara pemerintah	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	antar lembaga	antar sektor penghasil dan pengguna	daerah, swasta, dan masyarakat masih minim sehingga perlu ditingkatkan	
B.	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi bagi para pelaku bisnis	Difusi hasil inovasi perihal peningkatan iklim ramah investasi belum tersedia	-
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset	Diseminasi hasil riset kepada masyarakat dan pemberi modal belum tersedia	-
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Adanya promosi dan kampanye terkait kemudahan investasi	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri	-
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Perlombaan inovasi terkait kemudahan investasi	Belum ada ajang apresiasi yang disediakan dalam rangka menyalurkan inovasi terkait penciptaan iklim	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			ramah investasi	
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap peningkatan investasi daerah	-
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pendataan dan jaminan perlindungan terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Belum terdapat langkah konkret untuk menginventarisir dan mengembangkan teknologi masyarakat yang dapat mendukung percepatan iklim investasi	-
5.	Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk	Adanya prakarsa riset dan inovasi daerah dalam rangka menciptakan iklim ramah investasi	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah		strategis	
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan dan pengembangan klaster inovasi	Kondisi kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal	-
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan Kota Banjar dengan pusat terkait iklim ramah investasi	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna peningkatan iklim ramah investasi daerah	-
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Standarisasi internasional terhadap kemudahan investasi	Penerapan standar global dalam kondisi ramah investasi masih sangat minim	-
B.	Penguatan kerja sama internasional	Hubungan kerja sama internasional dan kajian pengembangan	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam peningkatan	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		kemudahan investasi	ramah investasi masih lemah	
IX	Prioritas 8: Peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan			
1.	Elemen 1: Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi yang mendukung perbaikan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Kebijakan yang tersedia belum secara eksplisit memprioritaskan sumber daya yang signifikan untuk kegiatan riset dan inovasi berkaitan dengan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	-
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang berkaitan dengan pengelolaan pendidikan	Belum ada basis data terpusat secara khusus yang mendokumentasikan hasil riset dan inovasi di bidang pendidikan	-
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Adanya infrastruktur dasar untuk melakukan riset dan inovasi	Ketersediaan infrastruktur riset di bidang pendidikan masih terbatas, fasilitas TIK belum memadai untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
D.	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran khusus riset dan inovasi untuk perbaikan pendidikan	Anggaran yang disediakan dalam praktiknya belum mampu mengatasi kekurangan yang ada pada sektor pendidikan	-
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Mekanisme perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual jelas	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual masih rendah, belum ada mekanisme yang kuat untuk mendorong perlindungan kekayaan intelektual di sektor pendidikan	-
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terjalinnya kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi	Kerja sama antara lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi belum terkoordinasi dengan baik	-
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan	Adanya sarana pendukung untuk melakukan riset dan inovasi	Penyediaan sarana pendukung belum optimal untuk kegiatan riset dan inovasi yang efektif	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	kemampuan daerah			
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan kemitraan antar sektor penghasil dan pengguna	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan terutama dengan lembaga riset di daerah masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi	-
B.	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi bagi para pelaku bisnis	Difusi hasil inovasi berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan tidak tersedia, namun perlu ada upaya peningkatan dalam prosesnya	-
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset	Diseminasi hasil riset kepada masyarakat dan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan	-
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Adanya promosi dan kampanye terkait pendidikan	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan tenaga pendidik	
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Perlombaan inovasi terkait pendidikan	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR) Awards	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap kualitas pendidikan yang lebih baik	-
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pendataan dan jaminan perlindungan terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Inventarisasi terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal melalui Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 266 Tahun 2024	-
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa	Adanya	Kolaborasi antara	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	prakarsa riset dan inovasi daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis	
B.	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan dan pengembangan kluster inovasi pendidikan	Kondisi kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal	-
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan Kota Banjar dengan pusat terkait penyelenggaraan pendidikan	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna kualitas dan pemerataan pendidikan	-
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan	Standarisasi internasional terhadap kualitas pendidikan	Penerapan standar global dalam peningkatan kualitas dan aksesibilitas	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	n ekosistem riset dan inovasi di daerah		pendidikan masih belum optimal	
B.	Penguatan kerja sama internasional	Hubungan kerja sama internasional dan kajian pengembangan pendidikan	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam pendidikan masih lemah	-
X	Prioritas 9: Peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan Kota Banjar			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi yang mendukung perbaikan layanan kesehatan	Kebijakan belum mengakomodir upaya riset dan inovasi di sektor kesehatan	-
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang berkaitan dengan layanan kesehatan	Basis data terkait yang berhubungan dengan kesehatan telah tersedia secara terpusat pada satu server, namun untuk persebaran fasilitas kesehatan belum <i>up to date</i>	-
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan	Adanya infrastruktur dasar untuk	Ketersediaan infrastruktur kesehatan masih	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	inovasi	melakukan riset dan inovasi	terbatas, mencakup rumah sakit jiwa (RSJ) dan rumah sakit khusus (RSK) serta pendirian gedung kesehatan yang sesuai standar	
D.	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran khusus riset dan inovasi untuk perbaikan pelayanan kesehatan	Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang kesehatan	-
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Mekanisme perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual jelas	Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang kesehatan	-
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terjalinnya kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi	Kerja sama antara lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi belum terkoordinasi dengan baik	-
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan	Adanya sarana pendukung untuk melakukan	Penyediaan sarana pendukung belum optimal	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	riset dan inovasi	untuk kegiatan riset dan inovasi yang efektif	
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalanan kemitraan antar sektor penghasil dan pengguna	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan, terutama dengan lembaga riset di daerah masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi	-
B.	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi bagi para pelaku bisnis	Difusi hasil inovasi berkaitan dengan peningkatan mutu kesehatan belum optimal	-
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset	Diseminasi hasil riset kepada masyarakat dan tenaga medis masih belum ditingkatkan	-
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Adanya promosi dan kampanye terkait perbaikan layanan	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		kesehatan	kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan tenaga medis	
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Perlombaan inovasi terkait pelayanan kesehatan	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR) Awards	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap kesehatan	-
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pendataan dan jaminan perlindungan terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Inventarisasi terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal melalui Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 266 Tahun 2024	-
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan	Adanya prakarsa riset	Kolaborasi antara pemerintah,	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	n riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	dan inovasi daerah dalam rangka perbaikan pelayanan kesehatan	perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis	
B.	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan dan pengembangan kluster inovasi pelayanan kesehatan	Kondisi kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal	-
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan Kota Banjar dengan pusat terkait kesehatan	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna peningkatan kualitas dan keterjangkauan fasilitas kesehatan	-
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi	Standarisasi internasional terhadap kualitas pelayanan	Penerapan standar global dalam mutu kesehatan masih belum optimal	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	kesehatan		
B.	Penguatan kerja sama internasional	Hubungan kerja sama internasional dan kajian pengembangan kualitas kesehatan	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam perbaikan mutu kesehatan daerah masih lemah	-
XI	Prioritas 10: Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi yang mendukung peningkatan kualitas SDM unggul dan berdaya saing	Kebijakan daerah terkait pembangunan SDM belum terintegrasi dengan riset dan inovasi	-
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang berkaitan dengan kualitas SDM	Basis data yang tersedia cakupannya masih terbatas, sehingga kurang mendukung dalam pembuatan kebijakan berbasis data	-
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Adanya infrastruktur dasar untuk melakukan	Sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kreatif di	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		riset dan inovasi	daerah masih terbatas	
D.	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran khusus riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas SDM	Alokasi anggaran masih minim dalam hal pengembangan SDM berbasis riset dan inovasi	-
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Mekanisme perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual jelas	Pemanfaatan kekayaan intelektual dalam hal pengembangan SDM belum optimal	-
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Terjalinnya kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi	Kerja sama antara lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi belum terkoordinasi dengan baik	-
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Adanya sarana pendukung untuk melakukan riset dan inovasi	Penyediaan sarana pendukung belum optimal untuk kegiatan riset dan inovasi yang efektif	-
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan kemitraan antar sektor penghasil dan pengguna	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan, terutama dengan lembaga riset di daerah masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi	-
B.	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi bagi para pelaku bisnis	Difusi hasil inovasi berkaitan dengan pembangunan SDM masih minim	-
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset	Diseminasi hasil riset kepada masyarakat terutama kelompok perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan	-
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Adanya promosi dan kampanye terkait peningkatan SDM unggul dan berdaya saing	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah,	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			akademisi, dan industri	
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Perlombaan inovasi terkait SDM unggul dan berdaya saing	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR) <i>Awards</i>	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM masih minim	-
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Pendataan dan jaminan perlindungan terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Inventarisasi dan pengembangan teknologi masyarakat masih minim	-
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi	Adanya prakarsa riset dan inovasi daerah dalam rangka pengembangan SDM unggul dan berdaya saing	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah		relevan dan strategis	
B.	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan dan pengembangan kluster inovasi	Kondisi kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal	-
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan Kota Banjar dengan pusat terkait pengelolaan SDM	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna peningkatan kualitas SDM	-
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Standarisasi internasional terhadap kualitas SDM	Pembangunan SDM belum sesuai dengan standar global	-
B.	Penguatan kerja sama internasional	Hubungan kerja sama internasional dan kajian	Saat ini belum terdapat kerja sama internasional	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		pengembangan kualitas SDM	yang dilakukan dalam rangka pembangunan SDM	
XII	Prioritas 11: Pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi yang mendukung optimalisasi pemanfaatan TIK	Telah ada kebijakan yang diinisiasi yakni melalui Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	-
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang berkaitan dengan pemanfaatan TIK	Terdapat beberapa layanan sistem informasi pelayanan publik seperti AKSI SRIKANDI, ASIK BEBEONG, LANGGAR, PA ONOM, PASINI, Pelanduk Kuda, dan sebagainya	-
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Adanya infrastruktur dasar untuk melakukan riset dan inovasi	Sudah banyak layanan pemerintah daerah yang mengarah pada sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE),	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
			akan tetapi masih diperlukan adanya upaya dalam mendorong pelayanan publik berbasis riset dan teknologi	
D.	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Tersedianya anggaran khusus riset dan inovasi untuk optimalisasi pemanfaatan TIK	Ketersediaan anggaran pemanfaatan riset berbasis teknologi masih minim	-
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Mekanisme perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual jelas	Data mengenai kekayaan intelektual telah dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 266 Tahun 2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kota Banjar Tahun 2024, namun hanya memuat daftar nama-nama inovasi yang tersedia	-
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di	Terjalannya kolaborasi riset dan inovasi dengan	Kerja sama antara lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	daerah dengan pemangku kepentingan	lembaga riset, swasta, dan perguruan tinggi	belum terkoordinasi dengan baik	
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Adanya sarana pendukung untuk melakukan riset dan inovasi	Penyediaan sarana pendukung belum optimal untuk kegiatan riset dan inovasi yang efektif	-
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan kemitraan antar sektor penghasil dan pengguna	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan terutama dengan lembaga riset di daerah masih belum optimal sehingga masih perlu ditingkatkan lagi	-
B.	Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi bagi para pelaku bisnis	Difusi hasil inovasi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi yang optimal telah tersedia namun masih perlu ditingkatkan lagi	-
C.	Peningkatan	Sosialisasi	Diseminasi hasil	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	praktik baik dan diseminasi hasil riset	riset kepada masyarakat dan perangkat daerah masih perlu ditingkatkan	
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Adanya promosi dan kampanye terkait penggunaan TIK	Promosi dan penyebaran informasi telah dilakukan namun perlu ditingkatkan lagi	-
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Perlombaan inovasi terkait pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR) Awards	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap pelayanan publik berbasis teknologi	-
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau	Pendataan dan jaminan perlindungan terhadap teknologi masyarakat	Inventarisasi terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal melalui	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
	teknologi masyarakat	dan kearifan lokal	Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 266 Tahun 2024	
5.	Keterpaduan atau Koherensi Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Adanya prakarsa riset dan inovasi daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan TIK	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis	-
B.	Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pembentukan dan pengembangan kluster inovasi TIK	Kondisi kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal	-
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan Kota Banjar dengan pusat terkait optimalisasi pemanfaatan TIK dalam pelayanan	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Keterangan
		publik		
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Standarisasi internasional terhadap penggunaan TIK dalam pelayanan publik	Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik telah menunjukkan adanya pengadopsian standar internasional, meskipun dalam praktiknya masih perlu optimalisasi lebih lanjut	-
B.	Penguatan kerja sama internasional	Hubungan kerja sama internasional dan kajian pengembangan pemanfaatan TIK dalam pelayanan publik	Kerja sama dengan lembaga internasional masih belum dimanfaatkan secara maksimal	-

BAB III

TANTANGAN DAN PELUANG RISET DAN INOVASI DI DAERA

Kesejahteraan merupakan suatu hal yang sangat didambakan oleh seluruh umat manusia sebagai langkah menuju kebahagiaan. Pada dasarnya, peningkatan taraf hidup masyarakat adalah esensi dari pembangunan berdasarkan prinsip keadilan sosial serta dilaksanakan secara berkelanjutan. Proses pembangunan yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan memiliki orientasi utama pada peningkatan kesejahteraan rakyat (Kato, *et.al*, 2021:2). Pembangunan yang dilaksanakan baik di tingkat pusat maupun daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah berdasarkan pada perkembangan yang terjadi secara regional dan nasional. Prioritas krusial dalam pembangunan di tingkat daerah adalah penciptaan lapangan kerja yang lebih luas yang secara langsung berkorelasi terhadap peningkatan pendapatan dan penurunan jumlah pengangguran di daerah. Selain itu, pembangunan daerah juga mencakup inisiatif dalam perbaikan aksesibilitas dan mutu layanan-layanan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan tempat tinggal. Hal ini tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas hidup secara individual melainkan juga berperan penting dalam mereduksi ketimpangan sosial dan mendorong peningkatan kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi adalah dua konsep yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain dan memberikan pengaruh berupa timbal balik dalam berbagai aspek.

Pembangunan daerah yang efektif menjadi pondasi bagi pertumbuhan ekonomi. Kualitas infrastruktur yang prima termasuk jalan, sumber daya listrik, dan telekomunikasi turut memberikan kemudahan bagi kinerja perusahaan baik domestik maupun asing. Di samping itu, kebijakan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan usaha dapat menarik investor modal di daerah yang berujung pada terciptanya lapangan kerja baru dan peningkatan hasil ekonomi daerah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan kerap menjadi salah satu aspirasi utama dalam kerangka pembangunan daerah. Ketika sektor ekonomi mengalami kemajuan maka terciptalah peluang kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta investasi di bidang infrastruktur dan layanan masyarakat menjadi dapat terealisasi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Banjar pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 4,63 (RPJPD Kota Banjar, 2019-2023). Jika dilihat dari grafik yang tercantum, pertumbuhan ekonomi Kota Banjar mengalami fluktuasi signifikan sepanjang 5 tahun terakhir. Penurunan drastis terjadi pada tahun 2020 sebagai dampak dari adanya wabah Covid-19 di mana angka PDRB mengalami anjlok sebesar 0.94. Angka pertumbuhan pada tahun 2023 menunjukkan adanya tren peningkatan meskipun jumlahnya tidak setinggi pada saat sebelum pandemi. Selain itu jika dibandingkan dalam lingkup provinsi Jawa Barat, pertumbuhan ekonomi Kota Banjar masih masuk dalam kategori rendah. Terdapat beberapa sektor ekonomi yang perannya terus menurun terhadap pertumbuhan PDRB di Kota Banjar sejak adanya pandemi Covid-19 seperti sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta jasa

pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2023). Di sisi lain terdapat sejumlah sektor yang peranannya terus mengalami peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi yakni sektor pertanian, kehutanan, perikanan, dan konstruksi.

Melalui riset dan inovasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan dapat membantu percepatan ekonomi daerah, begitu pula bagi wilayah Kota Banjar. Riset memberikan kesempatan bagi daerah untuk memahami secara komprehensif aset sumber daya alam dan manusia yang dimilikinya. Hal tersebut juga merupakan sesuatu yang mendasar terutama dalam upaya menyusun kebijakan yang lebih efektif dan mengenali sektor-sektor ekonomi yang menjanjikan untuk pertumbuhan di masa depan. Adapun inovasi berfokus pada pengadopsian ide-ide baru, teknologi mutakhir, dan praktik bisnis yang mampu mengoptimalkan efisiensi dan produktivitas. Melalui inovasi yang dilakukan dapat memberikan suatu daerah potensi untuk meningkatkan daya saing daerah baik di tingkat regional, nasional, dan internasional. Maka dari itu, upaya dalam menstimulus riset dan inovasi di daerah sangat dibutuhkan dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.

Pencapaian inovasi daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Dan/Atau Insentif Inovasi Daerah. Upaya penilaian dan penghargaan ditujukan untuk mengetahui tingkat inovasi di daerah sekaligus menjadi ajang motivasi bagi daerah untuk dapat semakin meningkatkan inovasi dan kreativitas yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Penilaian terhadap *Innovative Government Award* (IGA) terbagi ke dalam 4 kategori sebagai berikut.

Tabel 3. 1 Skor dan Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022

Kategori	Rentang Skor
Sangat Inovatif	60,01 – 100,00
Inovatif	35,00 – 60,00
Kurang Inovatif	0,01 – 34,99
Tidak Dapat Dinilai	0

Sumber: Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award & Penjelasan Teknis Indikator Indeks Inovasi Daerah Tahun 2022 Kemendagri

Berdasarkan ketentuan tersebut, diketahui bahwa Kota Banjar memperoleh skor 44,56 dan berada pada kategori inovatif⁴⁴. Dapat dikatakan bahwa perolehan skor untuk inovasi daerah bagi Kota Banjar masih terbilang rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menjadi kendala terhadap pengembangan inovasi. Sebagai upaya untuk meningkatkan pengembangan inovasi daerah Kota Banjar maka perlu diketahui mengenai kendala/tantangan dan peluang pemanfaatan riset dan inovasi di daerah dalam membantu menyusun kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti.

Tabel 3. 2 Tantangan dan Peluang Riset dan Inovasi di Daerah

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
I	Produk Unggulan Komoditas Pertanian/Hortikultura			

⁴⁴ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6301.A Tahun 2022 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2022

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Permintaan terkait ketersediaan komoditas yang berkualitas akan semakin meningkat, sehingga perlu adanya regulasi tingkat lanjut yang mencakup kualitas produk dan daya saing.	Kepwal No. 236 Tahun 2023 tentang Pengembangan Produk Daerah Sektor Pertanian sebagai basis kebijakan.	Kebijakan yang mendukung pengembangan komoditas pertanian dalam peningkatan kualitas dan daya saing.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Keterbukaan informasi sangat membantu dalam menunjang kemudahan riset dan inovasi.	Pengembangan basis data yang telah tersedia sejauh ini untuk kebutuhan riset di masa mendatang.	Tersedianya basis data yang komprehensif untuk kepentingan investasi, kewirausahaan, dan bisnis terkait produk unggulan komoditas pertanian.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungan riset dan inovasi yang mutakhir.	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam rangka pembangunan fasilitas.	Adanya pusat inovasi pengembangan komoditas pertanian yang dapat memberikan arahan dan fasilitas kepada para

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				petani dan pengusaha lokal.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi sumber daya finansial untuk mendukung riset dan inovasi di daerah masih terbatas.	Pendanaan alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, serta skema berbasis proyek.	Terdapat alokasi anggaran khusus untuk riset dan inovasi produk pertanian.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pembajakan dan distribusi ilegal yang dapat mengancam hak kepemilikan inovasi pada produk pertanian.	Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dalam proses pendataan kekayaan intelektual agar menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh kalangan luas.	Inventarisasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual telah dilakukan.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada sesama <i>stakeholder</i> masih kurang.	Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk membangun komunikasi dua arah dan diskusi intens.	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam pengembangan komoditas tanaman pertanian dapat terjalin dengan optimal.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terbatasnya anggaran dan perbedaan skala prioritas dibanding infrastruktur fisik atau pelayanan dasar.	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka peluang <i>co-investment</i> dan penggunaan bersama sarana riset.	Sarana pengembangan budidaya tanaman pertanian tersedia dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani dan peneliti.
3. Kemitraan Riset dan Inovasi				
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk hubungan kemitraan dalam hal pengembangan produk unggulan jangka panjang masih kurang.	Kesamaan kepentingan atau <i>concern</i> terhadap pengembangan produk pertanian dapat menjadi landasan untuk menjalin kemitraan antar lembaga yang berkelanjutan.	Terjalinnya kemitraan riset dan inovasi antara penghasil dengan pengguna teknologi budidaya tanaman pertanian untuk percepatan hasil inovasi.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Bimbingan teknis (bimtek) inovasi belum pernah dilakukan.	Pembekalan secara rutin bagi SDM pemerintah terkait bimbingan teknologi inovasi.	Model dan strategi transfer teknologi bisnis produk pertanian telah diimplementasikan dan meningkatka

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				n produktivitas usaha.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Sosialisasi praktik baik dan hasil riset dilakukan secara rutin kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan adopsi teknologi.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang 	Peningkatan promosi dan kampanye pengembangan komoditas pertanian secara aktif dan meluas.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			menekankan pada pentingnya inovasi.	
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik dapat menghambat kreativitas dan inovasi.	Mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif. Selain itu, adanya KIBAR Awards telah menjadi salah satu upaya untuk menanamkan apresiasi inovasi.	Terdapat upaya apresiasi berupa penghargaan maupun lomba yang diselenggarakan bagi petani.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat perkembangan jumlah perusahaan pemula berbasis riset di daerah.	Penguatan kebijakan pro riset dan inovasi termasuk pada jaminan kemudahan pendaftaran usaha berbasis inovasi.	Adanya skema dukungan pengembangan perusahaan pemula berbasis riset yang diimplementasikan.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan	- Memperkuat sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat	Inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal dalam budidaya komoditas

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		<p>penerapan inovasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi. 	<p>untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan edukasi literasi dan inovasi kepada masyarakat. 	<p>pertanian sebagai referensi riset dan inovasi lebih lanjut.</p>
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	<p>Terbatasnya alokasi anggaran riset dan inovasi daerah dan <i>roadmap</i> inovasi yang masih minim dimiliki oleh pemerintah daerah.</p>	<p>Kerja sama dengan pihak swasta untuk dana alternatif dan perguruan tinggi untuk penyusunan peta jalan.</p>	<p>Optimalisasi prakarsa riset dan inovasi untuk pengembangan komoditas pertanian yang diinisiasi dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.</p>
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan klaster inovasi. - Keterbatasan SDM yang terampil dan mumpuni di bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek. 	<p>Terbentuknya pengembangan klaster inovasi produk komoditas tanaman pertanian.</p>

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		dalam menjalankan kluster inovasi.	- Penguatan kapasitas SDM perangkat daerah dan kolaborasi dengan akademisi.	
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Regulasi yang berlebih menyebabkan disharmoni regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.	Perbaikan tata regulasi yang terpadu dan koordinasi dengan pemerintah pusat.	Kebijakan daerah mengenai pengembangan produk pertanian telah sinkron dengan pusat sehingga mendorong efektivitas implementasi.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami dan merespons isu global secara strategis. - Keterbatasan sarana komunikasi dapat menjadi hambatan dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan <i>workshop</i> dan mentoring aparatur pemerintah daerah terkait isu global secara berkala. - Mendorong pengembangan infrastruktur 	Peningkatan kepedulian isu internasional berikut penerapan standarisasi olahan berdasarkan ketentuan internasional sehingga meningkatkan daya saing di pasar global.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		pengembangan riset dan inovasi yang setara dengan perkembangan global.	ur dan literasi digital.	
B.	Penguatan kerja sama internasional	Masih adanya budaya kerja paternalistik tidak sesuai dengan dinamika internasional yang mengedepankan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.	Mengedepankan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Kerja sama internasional dalam pengembangan produk unggulan pertanian.
II	Prioritas 1: Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ekonomi Kreatif pada Sektor Olahraga, Pariwisata, Seni, Budaya, dan UMKM			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi yang mengakomodir pengembangan sumber daya alam dan sektor ekonomi kreatif.	Perbaikan dan pemutakhiran regulasi yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi.	Dukungan kebijakan riset dan inovasi yang dapat membantu pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif daerah.
B.	Penataan basis	Keterbukaan	Pengembangan	Ketersediaan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	data riset dan inovasi	informasi sangat membantu dalam menunjang kemudahan riset dan inovasi.	basis data yang telah tersedia sejauh ini untuk kebutuhan riset di masa mendatang.	basis data mengenai optimalisasi sebagai dukungan analisis data dan perencanaan program.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungan riset dan inovasi yang mutakhir.	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam rangka pembangunan fasilitas.	Infrastruktur yang cukup dan memadai dalam mengakomodir kegiatan riset dan inovasi.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi sumber daya finansial untuk mendukung riset dan inovasi di daerah masih terbatas.	Pendanaan alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, serta skema berbasis proyek.	Alokasi anggaran riset khusus pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif serta jaminan keberlanjutan program di masa depan.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pembajakan dan distribusi ilegal yang dapat mengancam hak kepemilikan inovasi pada produk ekonomi kreatif.	Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dalam proses pendataan kekayaan intelektual agar menjadi lebih efisien	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang optimal dalam optimalisasi sumber daya

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			dan mudah diakses oleh kalangan luas.	alam dan ekonomi kreatif.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada sesama <i>stakeholder</i> masih kurang.	Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk membangun komunikasi dua arah dan diskusi intens.	Kolaborasi riset yang terjalin bersama BRIN dan perguruan tinggi untuk membantu percepatan optimalisasi pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terbatasnya anggaran dan perbedaan skala prioritas dibanding infrastruktur fisik atau pelayanan dasar.	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka peluang <i>co-investment</i> dan penggunaan bersama sarana riset.	Pembentukan jaringan inovasi yang mendukung pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk hubungan kemitraan	Kesamaan kepentingan atau <i>concern</i> terhadap pengembangan produk	Terselenggaranya kerja sama antara lembaga riset daerah, OPD terkait, dan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		dalam hal optimalisasi sumber daya alam dan ekonomi kreatif jangka panjang masih kurang.	sumber daya alam dan ekonomi kreatif dapat menjadi landasan untuk menjalin kemitraan antar lembaga yang berkelanjutan.	lembaga riset profesional lainnya untuk menghasilkan program inovatif.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Bimbingan teknis (bimtek) inovasi belum pernah dilakukan.	Pembekalan secara rutin bagi SDM pemerintah terkait bimbingan teknologi inovasi.	Terselenggaranya transfer teknologi terkait peningkatan pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif sehingga memberikan kemudahan kepada pelaku di sektor ekonomi kreatif.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. 	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai pengembangan sumber daya alam

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		kondusif terhadap penerapan inovasi.	- Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi.	dan ekonomi kreatif telah dilakukan secara rutin sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Promosi dan kampanye pengembangan inovasi sumber daya alam dan ekonomi kreatif telah dilakukan secara berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik dapat	Mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka pengembangan sumber daya alam dan ekonomi

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		menghambat kreativitas dan inovasi.	Selain itu, adanya KIBAR Awards telah menjadi salah satu upaya untuk menanamkan apresiasi inovasi.	kreatif sehingga mendorong kreativitas para inovator.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat perkembangan jumlah perusahaan pemula berbasis riset di daerah.	Penguatan kebijakan pro riset dan inovasi termasuk pada jaminan kemudahan pendaftaran usaha berbasis inovasi.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka optimalisasi sumber daya alam dan ekonomi kreatif telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan usaha yang berfokus pada hal yang sama.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan inovasi. - Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah. 	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait optimalisasi sumber daya alam dan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		terhadap inovasi.	- Melakukan edukasi literasi dan inovasi kepada masyarakat .	keberlangsungan ekonomi kreatif telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program pembangunan ekonomi.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan inovasi daerah dan <i>roadmap</i> inovasi yang masih minim dimiliki oleh pemerintah daerah.	Kerja sama dengan pihak swasta untuk dana alternatif dan perguruan tinggi untuk penyusunan peta jalan.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk optimalisasi pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan klaster inovasi. - Keterbatasan SDM yang terampil dan mumpuni di bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek. 	Klaster inovasi untuk pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif telah dibentuk dengan penguatan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		dalam menjalankan klaster inovasi.	- Penguatan kapasitas SDM perangkat daerah dan kolaborasi dengan akademisi.	jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Regulasi yang berlebih menyebabkan disharmoni regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.	Perbaikan tata regulasi yang terpadu dan koordinasi dengan pemerintah pusat.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami dan merespons isu global secara strategis. - Keterbatasan sarana komunikasi dapat menjadi hambatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan <i>workshop</i> dan mentoring aparatur pemerintah daerah terkait isu global secara berkala. - Mendorong pengembangan 	Pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif berdasarkan pada standar global serta jaminan kualitas sumber daya alam dan sektor ekonomi kreatif yang

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		dalam pengembangan riset dan inovasi yang setara dengan perkembangan global.	infrastruktur dan literasi digital.	unggul di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Masih adanya budaya kerja paternalistik tidak sesuai dengan dinamika internasional yang mengedepankan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.	Mengedepankan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Terjalinnya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.
III	Prioritas 2: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi yang mengakomodir pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan inklusif.	Perbaikan dan pemutakhiran regulasi yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi.	Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan inklusif untuk mewujudkan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				kesejahteraan masyarakat.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Keterbukaan informasi sebagai bagian dari perwujudan <i>good governance</i> sangat membantu dalam menunjang kemudahan riset dan inovasi.	Pengembangan basis data yang telah tersedia sejauh ini untuk kebutuhan riset di masa mendatang.	Data mengenai wilayah dengan infrastruktur dasar yang minim tersedia sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungan riset dan inovasi yang mutakhir.	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam rangka pembangunan fasilitas.	Perencanaan pembangunan infrastruktur secara merata di setiap wilayah beserta dengan target yang jelas.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi sumber daya finansial untuk mendukung riset dan inovasi di daerah masih terbatas.	Pendanaan alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, serta skema berbasis proyek.	Anggaran untuk mendukung kegiatan riset berkaitan dengan pemerataan infrastruktur dasar tersedia dengan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				cukup.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pembajakan dan distribusi ilegal yang dapat mengancam hak kepemilikan inovasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dalam proses pendataan kekayaan intelektual agar menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh kalangan luas.	Kekayaan intelektual dimanfaatkan sebagai langkah percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di setiap wilayah.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada sesama <i>stakeholder</i> masih kurang.	Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk membangun komunikasi dua arah dan diskusi intens.	Kolaborasi riset yang terjalin dengan BRIN dan perguruan tinggi untuk proyek-proyek pemerataan infrastruktur dasar guna menghasilkan solusi pembangunan infrastruktur berbasis data.
B.	Penyediaan sarana	Terbatasnya	Kolaborasi	Pembentukan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	alokasi anggaran riset dan perbedaan skala prioritas dibanding infrastruktur fisik atau pelayanan dasar.	antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka peluang <i>co-investment</i> dan penggunaan bersama sarana riset.	n jaringan inovasi dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitator kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
3. Kemitraan Riset dan Inovasi				
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk hubungan kemitraan dalam hal pengembangan infrastruktur dasar jangka panjang masih kurang.	Kesamaan kepentingan atau <i>concern</i> terhadap pengembangan infrastruktur dasar dapat menjadi landasan untuk menjalin kemitraan antar lembaga yang berkelanjutan.	Hubungan kemitraan yang terjalin secara optimal dengan berbagai pihak untuk mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Bimbingan teknis (bimtek)	Pembekalan secara rutin	Terselenggara nya transfer

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		inovasi belum pernah dilakukan.	bagi SDM pemerintah terkait bimbingan teknologi inovasi.	teknologi dalam rangka kemudahan pembangunan infrastruktur dasar di daerah.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi pemerataan infrastruktur yang efektif dan efisien telah dilakukan secara rutin.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan 	Promosi dan kampanye pemerataan pembangunan infrastruktur dasar telah dilakukan secara efektif dan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		terhadap penerapan inovasi.	an program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi.	berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik dapat menghambat kreativitas dan inovasi.	Mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif. Selain itu, adanya KIBAR Awards telah menjadi salah satu upaya untuk menanamkan apresiasi inovasi.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka pemerataan infrastruktur dasar sehingga mendorong kreativitas para inovator.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat perkembangan jumlah perusahaan pemula berbasis riset di daerah.	Penguatan kebijakan pro riset dan inovasi termasuk pada jaminan kemudahan pendaftaran usaha berbasis inovasi.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				proyek-proyek infrastruktur.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan inovasi. - Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah. - Melakukan edukasi literasi dan inovasi kepada masyarakat. 	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait penguatan infrastruktur telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program pembangunan ekonomi.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan inovasi daerah dan <i>roadmap</i> inovasi yang masih minim dimiliki oleh pemerintah daerah.	Kerja sama dengan pihak swasta untuk dana alternatif dan perguruan tinggi untuk penyusunan peta jalan.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk pembangunan infrastruktur dasar telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan klaster inovasi. - Keterbatasan SDM yang terampil dan mumpuni di bidangnya dalam menjalankan klaster inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek. - Penguatan kapasitas SDM perangkat daerah dan kolaborasi dengan akademisi. 	Klaster inovasi untuk pembangunan infrastruktur dasar telah dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Regulasi yang berlebih menyebabkan disharmoni regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.	Perbaikan tata regulasi yang terpadu dan koordinasi dengan pemerintah pusat.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan <i>workshop</i> dan 	Pembangunan infrastruktur dasar

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	<p>dan merespons isu global secara strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana komunikasi dapat menjadi hambatan dalam pengembangan riset dan inovasi yang setara dengan perkembangan global. 	<p>mentoring aparatur pemerintah daerah terkait isu global secara berkala.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengembangan infrastruktur dan literasi digital. 	berdasarkan pada standar global serta jaminan kualitas proyek infrastruktur di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Masih adanya budaya kerja paternalistik tidak sesuai dengan dinamika internasional yang mengedepankan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.	Mengedepankan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Terjalinnnya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.
IV	Prioritas 3: Peningkatan Konektivitas antar Wilayah			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi	Perkembangan	Perbaikan dan	Kebijakan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	kebijakan riset dan inovasi di daerah	teknologi mendorong perubahan termasuk pada moda transportasi sehingga diperlukan regulasi yang mengakomodir ketentuan pemanfaatan teknologi digital dan analisis dampak lingkungan.	pemutakhiran regulasi yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi.	yang mampu mengintegrasikan kegiatan riset dan upaya peningkatan konektivitas wilayah berikut dengan analisis terhadap dampak lingkungan.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Keterbukaan informasi sebagai bagian dari perwujudan <i>good governance</i> sangat membantu dalam menunjang kemudahan riset dan inovasi.	Pengembangan basis data yang telah tersedia sejauh ini untuk kebutuhan riset di masa mendatang.	Tersedianya basis data yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung upaya peningkatan konektivitas antar wilayah.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungan riset dan inovasi yang mutakhir.	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam rangka pembangunan fasilitas.	Keberadaan infrastruktur dasar yang mumpuni untuk menunjang kegiatan riset berkaitan dengan peningkatan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				konektivitas antar wilayah.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi sumber daya finansial untuk mendukung riset dan inovasi di daerah masih terbatas.	Pendanaan alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, serta skema berbasis proyek.	Optimalisasi alokasi anggaran agar upaya pengembangan moda transportasi dapat tercapai.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pembajakan dan distribusi ilegal yang dapat mengancam hak kepemilikan inovasi berkaitan dengan pengembangan sarana transportasi.	Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dalam proses pendataan kekayaan intelektual agar menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh kalangan luas.	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung percepatan pengembangan konektivitas wilayah telah dilakukan, mendukung kepaduan pengembangan teknologi informasi dalam transportasi wilayah.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jalinan komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada sesama	Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		<i>stakeholder</i> masih kurang.	membangun komunikasi dua arah dan diskusi intens.	badan riset termasuk BRIN dan perguruan tinggi untuk membantu meningkatkan konektivitas antar wilayah.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terbatasnya anggaran dan perbedaan skala prioritas penyediaan sarana pendukung riset dibanding infrastruktur fisik atau pelayanan dasar.	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka peluang <i>co-investment</i> dan penggunaan bersama sarana riset.	Sarana pendukung telah disediakan dengan baik termasuk pada perlengkapan jalan yang memadai.
3. Kemitraan Riset dan Inovasi				
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk hubungan kemitraan dalam hal peningkatan konektivitas wilayah jangka panjang masih kurang.	Kesamaan kepentingan atau <i>concern</i> terhadap peningkatan konektivitas wilayah dapat menjadi landasan untuk menjalin kemitraan antar lembaga yang	Terselenggaranya kerja sama antara lembaga riset daerah, OPD terkait, dan lembaga riset profesional lainnya untuk menghasilkan program inovatif.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			berkelanjutan.	
B.	Peningkatan difusi inovasi	Bimbingan teknis (bimtek) inovasi belum pernah dilakukan.	Pembekalan secara rutin bagi SDM pemerintah terkait bimbingan teknologi inovasi.	Transfer teknologi terkait peningkatan konektivitas wilayah yang menyeluruh telah difasilitasi, termasuk penyediaan sarana transportasi dengan adopsi teknologi yang ramah pada komunitas yang memiliki keterbatasan teknologi (gaptek).
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang 	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai kelayakan kendaraan umum dan pemeliharaan perlengkapan jalan telah dilakukan secara rutin sekaligus

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			menekankan pada pentingnya inovasi.	meningkatkan pengetahuan masyarakat.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Promosi dan kampanye pemerataan sarana transportasi umum telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik dapat menghambat kreativitas dan inovasi.	Mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif. Selain itu, adanya KIBAR Awards telah menjadi salah satu upaya untuk	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka konektivitas wilayah sehingga mendorong kreativitas para inovator.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			menanamkan apresiasi inovasi.	
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat perkembangan jumlah perusahaan pemula berbasis riset di daerah.	Penguatan kebijakan pro riset dan inovasi termasuk pada jaminan kemudahan pendaftaran usaha berbasis inovasi.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka konektivitas antar wilayah telah tersedia.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan inovasi. - Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah. - Melakukan edukasi literasi dan inovasi kepada masyarakat. 	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait penyediaan sarana transportasi telah dilakukan.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di	Terbatasnya alokasi anggaran riset	Kerja sama dengan pihak swasta untuk	Prakarsa pengembangan riset dan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	dan inovasi daerah dan <i>roadmap</i> inovasi yang masih minim dimiliki oleh pemerintah daerah.	dana alternatif dan perguruan tinggi untuk penyusunan peta jalan.	inovasi untuk peningkatan konektivitas wilayah telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan klaster inovasi. - Keterbatasan SDM yang terampil dan mumpuni di bidangnya dalam menjalankan klaster inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek. - Penguatan kapasitas SDM perangkat daerah dan kolaborasi dengan akademisi. 	Klaster inovasi untuk peningkatan konektivitas wilayah telah dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Regulasi yang berlebih menyebabkan disharmoni regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.	Perbaikan tata regulasi yang terpadu dan koordinasi dengan pemerintah pusat.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya peningkatan konektivitas

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				antar wilayah.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami dan merespons isu global secara strategis. - Keterbatasan sarana komunikasi dapat menjadi hambatan dalam pengembangan riset dan inovasi yang setara dengan perkembangan global. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan <i>workshop</i> dan mentoring aparatur pemerintah daerah terkait isu global secara berkala. - Mendorong pengembangan infrastruktur dan literasi digital. 	Penyediaan transportasi umum berdasarkan pada standar global serta jaminan keamanan dan kenyamanan transportasi umum di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Masih adanya budaya kerja paternalistik tidak sesuai dengan dinamika internasional yang mengedepankan fleksibilitas, transparansi, dan	Mengedepankan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Terjalinnya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan peningkatan konektivitas wilayah berikut dengan akses teknologi

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		akuntabilitas.		canggih dan pendanaan global.
V	Prioritas 4: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi yang mengakomodir peningkatan kualitas lingkungan hidup yang adil dan inklusif.	Perbaikan dan pemutakhiran regulasi yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi.	Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan inklusif untuk mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Keterbukaan informasi sebagai bagian dari perwujudan <i>good governance</i> sangat membantu dalam menunjang kemudahan riset dan inovasi.	Pengembangan basis data yang telah tersedia sejauh ini untuk kebutuhan riset di masa mendatang.	Data mengenai wilayah dengan infrastruktur dasar yang minim tersedia sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungan	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i>	Perencanaan pembangunan infrastruktur

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		n riset dan inovasi yang mutakhir.	dalam rangka pembangunan fasilitas.	secara merata di setiap wilayah beserta dengan target yang jelas.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi sumber daya finansial untuk mendukung riset dan inovasi di daerah masih terbatas.	Pendanaan alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, serta skema berbasis proyek.	Anggaran untuk mendukung kegiatan riset berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup tersedia dengan cukup.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pembajakan dan distribusi ilegal yang dapat mengancam hak kepemilikan inovasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dalam proses pendataan kekayaan intelektual agar menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh kalangan luas.	Kekayaan intelektual dimanfaatkan sebagai langkah percepatan pemerataan peningkatan kualitas lingkungan hidup di setiap wilayah.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan	Jalanan	Mengoptimalk	Kolaborasi

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada sesama <i>stakeholder</i> masih kurang.	an penggunaan teknologi digital untuk membangun komunikasi dua arah dan diskusi intens.	riset yang terjalin dengan BRIN dan perguruan tinggi untuk proyek-proyek peningkatan kualitas lingkungan hidup guna menghasilkan solusi peningkatan kualitas lingkungan hidup berbasis data.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan perbedaan skala prioritas dibanding infrastruktur fisik atau pelayanan dasar.	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka peluang <i>co-investment</i> dan penggunaan bersama sarana riset.	Pembentukan jaringan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fasilitator kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan dalam proyek-proyek peningkatan kualitas lingkungan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				hidup.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk hubungan kemitraan dalam hal peningkatan kualitas lingkungan hidup jangka panjang masih kurang.	Kesamaan kepentingan atau <i>concern</i> terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat menjadi landasan untuk menjalin kemitraan antar lembaga yang berkelanjutan.	Hubungan kemitraan yang terjalin secara optimal dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Bimbingan teknis (bimtek) inovasi belum pernah dilakukan.	Pembekalan secara rutin bagi SDM pemerintah terkait bimbingan teknologi inovasi.	Terselenggaranya transfer teknologi dalam rangka kemudahan peningkatan kualitas lingkungan hidup di daerah.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. 	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi peningkatan kualitas

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		kondusif terhadap penerapan inovasi.	- Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi.	lingkungan hidup yang efektif dan efisien telah dilakukan secara rutin.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Promosi dan kampanye peningkatan kualitas lingkungan hidup telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik dapat	Mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		menghambat kreativitas dan inovasi.	Selain itu, adanya KIBAR Awards telah menjadi salah satu upaya untuk menanamkan apresiasi inovasi.	sehingga mendorong kreativitas para inovator.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat perkembangan jumlah perusahaan pemula berbasis riset di daerah.	Penguatan kebijakan pro riset dan inovasi termasuk pada jaminan kemudahan pendaftaran usaha berbasis inovasi.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan hidup telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui proyek-proyek lingkungan hidup.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan inovasi. - Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah. 	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait peningkatan kualitas lingkungan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		terhadap inovasi.	- Melakukan edukasi literasi dan inovasi kepada masyarakat .	hidup telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program lingkungan hidup.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan inovasi daerah dan <i>roadmap</i> inovasi yang masih minim dimiliki oleh pemerintah daerah.	Kerja sama dengan pihak swasta untuk dana alternatif dan perguruan tinggi untuk penyusunan peta jalan.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan klaster inovasi. - Keterbatasan SDM yang terampil dan mumpuni di bidangnya dalam menjalankan klaster inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek. - Penguatan kapasitas SDM perangkat 	Klaster inovasi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup telah dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			daerah dan kolaborasi dengan akademisi.	
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Regulasi yang berlebih menyebabkan disharmoni regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.	Perbaikan tata regulasi yang terpadu dan koordinasi dengan pemerintah pusat.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami dan merespons isu global secara strategis. - Keterbatasan sarana komunikasi dapat menjadi hambatan dalam pengembangan riset dan inovasi yang setara 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan <i>workshop</i> dan mentoring aparatur pemerintah daerah terkait isu global secara berkala. - Mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup dan literasi digital. 	Peningkatan kualitas lingkungan hidup berdasarkan pada standar global serta jaminan kualitas proyek lingkungan hidup di tingkat internasional.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		dengan perkembangan global.		
B.	Penguatan kerja sama internasional	Masih adanya budaya kerja paternalistik tidak sesuai dengan dinamika internasional yang mengedepankan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.	Mengedepankan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Terjalinnya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.
VI	Prioritas 5: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Air			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi yang mengakomodir peningkatan kualitas dan kuantitas air yang adil dan inklusif.	Perbaikan dan pemutakhiran regulasi yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi.	Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan inklusif untuk mewujudkan peningkatan kualitas dan kuantitas air.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Keterbukaan informasi sebagai bagian dari	Pengembangan basis data yang telah tersedia sejauh	Data mengenai wilayah dengan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		perwujudan <i>good governance</i> sangat membantu dalam menunjang kemudahan riset dan inovasi.	ini untuk kebutuhan riset di masa mendatang.	infrastruktur dasar yang minim tersedia sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungan riset dan inovasi yang mutakhir.	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam rangka pembangunan fasilitas.	Perencanaan pembangunan infrastruktur secara merata di setiap wilayah beserta dengan target yang jelas.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi sumber daya finansial untuk mendukung riset dan inovasi di daerah masih terbatas.	Pendanaan alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, serta skema berbasis proyek.	Anggaran untuk mendukung kegiatan riset berkaitan dengan peningkatan kualitas dan kuantitas air tersedia dengan cukup.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pembajakan dan distribusi ilegal yang dapat mengancam hak kepemilikan	Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dalam proses pendataan kekayaan	Kekayaan intelektual dimanfaatkan sebagai langkah percepatan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		inovasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	intelektual agar menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh kalangan luas.	pemerataan peningkatan kualitas dan kuantitas air di setiap wilayah.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada sesama <i>stakeholder</i> masih kurang.	Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk membangun komunikasi dua arah dan diskusi intens.	Kolaborasi riset yang terjalin dengan BRIN dan perguruan tinggi untuk proyek-proyek peningkatan kualitas dan kuantitas air guna menghasilkan solusi peningkatan kualitas dan kuantitas air berbasis data.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan perbedaan skala prioritas dibanding infrastruktur fisik atau	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka peluang <i>co-investment</i> dan	Pembentukan jaringan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas air dan fasilitator

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		pelayanan dasar.	penggunaan bersama sarana riset.	kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan dalam proyek-proyek peningkatan kualitas dan kuantitas air.
3. Kemitraan Riset dan Inovasi				
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk hubungan kemitraan dalam hal peningkatan kualitas dan kuantitas air jangka panjang masih kurang.	Kesamaan kepentingan atau <i>concern</i> terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas air dapat menjadi landasan untuk menjalin kemitraan antar lembaga yang berkelanjutan.	Hubungan kemitraan yang terjalin secara optimal dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas air.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Bimbingan teknis (bimtek) inovasi belum pernah dilakukan.	Pembekalan secara rutin bagi SDM pemerintah terkait bimbingan teknologi inovasi.	Terselenggaranya transfer teknologi dalam rangka kemudahan peningkatan kualitas dan kuantitas air di daerah.
C.	Peningkatan	- Keterbatasan	- Menyelengg	Upaya

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - arakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi peningkatan kualitas dan kuantitas air yang efektif dan efisien telah dilakukan secara rutin.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Promosi dan kampanye peningkatan kualitas dan kuantitas air telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik dapat menghambat kreativitas dan inovasi.	Mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif. Selain itu, adanya KIBAR Awards telah menjadi salah satu upaya untuk menanamkan apresiasi inovasi.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas air sehingga mendorong kreativitas para inovator.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat perkembangan jumlah perusahaan pemula berbasis riset di daerah.	Penguatan kebijakan pro riset dan inovasi termasuk pada jaminan kemudahan pendaftaran usaha berbasis inovasi.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas air telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui proyek-proyek peningkatan kualitas dan kuantitas air.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi	- Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam	- Memperkuat sosialisasi dalam meningkatkan	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	masyarakat	<p>pengembangan dan penerapan inovasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi. 	<p>partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan edukasi literasi dan inovasi kepada masyarakat. 	<p>terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait peningkatan kualitas dan kuantitas air telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program peningkatan kualitas dan kuantitas air.</p>
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan inovasi daerah dan <i>roadmap</i> inovasi yang masih minim dimiliki oleh pemerintah daerah.	Kerja sama dengan pihak swasta untuk dana alternatif dan perguruan tinggi untuk penyusunan peta jalan.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan klaster inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana alternatif sektor swasta, kemitraan 	Klaster inovasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air telah

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang terampil dan mumpuni di bidangnya dalam menjalankan klaster inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> publik-swasta, dan skema berbasis proyek. - Penguatan kapasitas SDM perangkat daerah dan kolaborasi dengan akademisi. 	dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Regulasi yang berlebih menyebabkan disharmoni regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.	Perbaikan tata regulasi yang terpadu dan koordinasi dengan pemerintah pusat.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas air.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami dan merespons isu global secara strategis. - Keterbatasan sarana komunikasi 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan <i>workshop</i> dan mentoring aparatur pemerintah daerah terkait isu global secara berkala. 	Peningkatan kualitas dan kuantitas air berdasarkan pada standar global serta jaminan kualitas proyek peningkatan kualitas dan kuantitas air

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		dapat menjadi hambatan dalam pengembangan riset dan inovasi yang setara dengan perkembangan global.	- Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas air dan literasi digital.	di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Masih adanya budaya kerja paternalistik tidak sesuai dengan dinamika internasional yang mengedepankan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.	Mengedepankan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Terjalinnya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas air berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.
VII	Prioritas 6: Pengembangan Dan Peningkatan Pengelolaan Persampahan Kota Banjar Menuju Zero Waste To Landfill			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi yang mengakomodir pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar	Perbaikan dan pemutakhiran regulasi yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi.	Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan inklusif

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		menuju <i>zero waste to landfill</i> yang adil dan inklusif.		untuk mewujudkan pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> .
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Keterbukaan informasi sebagai bagian dari perwujudan <i>good governance</i> sangat membantu dalam menunjang kemudahan riset dan inovasi.	Pengembangan basis data yang telah tersedia sejauh ini untuk kebutuhan riset di masa mendatang.	Data mengenai wilayah dengan infrastruktur dasar yang minim tersedia sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungan riset dan inovasi yang mutakhir.	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam rangka pembangunan fasilitas.	Perencanaan pembangunan infrastruktur secara merata di setiap wilayah beserta dengan target yang jelas.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi sumber daya finansial untuk	Pendanaan alternatif sektor swasta,	Anggaran untuk mendukung

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		mendukung riset dan inovasi di daerah masih terbatas.	kemitraan publik-swasta, serta skema berbasis proyek.	kegiatan riset berkaitan dengan pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> tersedia dengan cukup.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pembajakan dan distribusi ilegal yang dapat mengancam hak kepemilikan inovasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dalam proses pendataan kekayaan intelektual agar menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh kalangan luas.	Kekayaan intelektual dimanfaatkan sebagai langkah percepatan pemerataan pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> di setiap wilayah.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada	Mengoptimalkan penggunaan teknologi	Kolaborasi riset yang terjalin dengan BRIN

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	kepentingan	sesama <i>stakeholder</i> masih kurang.	digital untuk membangun komunikasi dua arah dan diskusi intens.	dan perguruan tinggi untuk proyek-proyek pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan guna menghasilkan solusi pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> berbasis data.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan perbedaan skala prioritas dibanding infrastruktur fisik atau pelayanan dasar.	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka peluang <i>co-investment</i> dan penggunaan bersama sarana riset.	Pembentukan jaringan inovasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> dan fasilitator kerja sama antar

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				berbagai pemangku kepentingan dalam proyek-proyek pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan .
3. Kemitraan Riset dan Inovasi				
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk hubungan kemitraan dalam hal pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> jangka panjang masih kurang.	Kesamaan kepentingan atau <i>concern</i> terhadap pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> dapat menjadi landasan untuk menjalin kemitraan antar lembaga yang berkelanjutan.	Hubungan kemitraan yang terjalin secara optimal dengan berbagai pihak untuk mendukung pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> .
B.	Peningkatan difusi inovasi	Bimbingan teknis (bimtek) inovasi belum pernah	Pembekalan secara rutin bagi SDM pemerintah	Terselenggara nya transfer teknologi dalam rangka

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		dilakukan.	terkait bimbingan teknologi inovasi.	kemudahan pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> di daerah.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> yang efektif dan efisien telah dilakukan secara rutin.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring 	Promosi dan kampanye pengembangan dan peningkatan pengelolaan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		<ul style="list-style-type: none"> - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<p>inovasi secara rutin.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	<p>persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.</p>
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik dapat menghambat kreativitas dan inovasi.	Mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif. Selain itu, adanya KIBAR Awards telah menjadi salah satu upaya untuk menanamkan apresiasi inovasi.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> sehingga mendorong kreativitas para inovator.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat perkembangan jumlah perusahaan pemula berbasis riset di daerah.	Penguatan kebijakan pro riset dan inovasi termasuk pada jaminan kemudahan pendaftaran usaha berbasis	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			inovasi.	Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui proyek-proyek pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan .
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan inovasi. - Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah. - Melakukan edukasi literasi dan inovasi kepada masyarakat . 	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				pengembangan program pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan inovasi daerah dan <i>roadmap</i> inovasi yang masih minim dimiliki oleh pemerintah daerah.	Kerja sama dengan pihak swasta untuk dana alternatif dan perguruan tinggi untuk penyusunan peta jalan.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan klaster inovasi. - Keterbatasan SDM yang terampil dan mumpuni di bidangnya 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek. 	Klaster inovasi untuk pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> telah

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		dalam menjalankan klaster inovasi.	- Penguatan kapasitas SDM perangkat daerah dan kolaborasi dengan akademisi.	dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Regulasi yang berlebih menyebabkan disharmoni regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.	Perbaikan tata regulasi yang terpadu dan koordinasi dengan pemerintah pusat.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> .
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami dan merespons isu global secara strategis. - Keterbatasan sarana 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan <i>workshop</i> dan mentoring aparaturnya pemerintah daerah terkait isu global secara 	Pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> berdasarkan pada standar

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		komunikasi dapat menjadi hambatan dalam pengembangan riset dan inovasi yang setara dengan perkembangan global.	berkala. - Mendorong pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> dan literasi digital.	global serta jaminan kualitas proyek pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Masih adanya budaya kerja paternalistik tidak sesuai dengan dinamika internasional yang mengedepankan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.	Mengedepankan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Terjalinnnya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju <i>zero waste to landfill</i> berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.
VIII	Prioritas 7: Peningkatan Iklim Ramah Investasi di Kota Banjar			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi yang mengakomodir peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar yang adil dan inklusif.	Perbaikan dan pemutakhiran regulasi yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi.	Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan inklusif untuk mewujudkan peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Keterbukaan informasi sebagai bagian dari perwujudan <i>good governance</i> sangat membantu dalam menunjang kemudahan riset dan inovasi.	Pengembangan basis data yang telah tersedia sejauh ini untuk kebutuhan riset di masa mendatang.	Data mengenai wilayah dengan infrastruktur dasar yang minim tersedia sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungan riset dan inovasi yang mutakhir.	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam rangka pembangunan fasilitas.	Perencanaan pembangunan infrastruktur secara merata di setiap wilayah beserta dengan target

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				yang jelas.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi sumber daya finansial untuk mendukung riset dan inovasi di daerah masih terbatas.	Pendanaan alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, serta skema berbasis proyek.	Anggaran untuk mendukung kegiatan riset berkaitan dengan peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar tersedia dengan cukup.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pembajakan dan distribusi ilegal yang dapat mengancam hak kepemilikan inovasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dalam proses pendataan kekayaan intelektual agar menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh kalangan luas.	Kekayaan intelektual dimanfaatkan sebagai langkah percepatan pemerataan peningkatan iklim ramah investasi di setiap wilayah.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada sesama <i>stakeholder</i> masih kurang.	Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk membangun komunikasi	Kolaborasi riset yang terjalin dengan BRIN dan perguruan tinggi untuk

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			dua arah dan diskusi intens.	proyek-proyek peningkatan iklim ramah investasi guna menghasilkan solusi peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar berbasis data.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan perbedaan skala prioritas dibanding infrastruktur fisik atau pelayanan dasar.	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka peluang <i>co-investment</i> dan penggunaan bersama sarana riset.	Pembentukan jaringan inovasi dalam rangka peningkatan iklim ramah investasi dan fasilitator kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan dalam proyek-proyek peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan komunikasi dan koordinasi yang	Kesamaan kepentingan atau <i>concern</i>	Hubungan kemitraan yang terjalin

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		efektif untuk hubungan kemitraan dalam hal peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar jangka panjang masih kurang.	terhadap peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar dapat menjadi landasan untuk menjalin kemitraan antar lembaga yang berkelanjutan.	secara optimal dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Bimbingan teknis (bimtek) inovasi belum pernah dilakukan.	Pembekalan secara rutin bagi SDM pemerintah terkait bimbingan teknologi inovasi.	Terselenggaranya transfer teknologi dalam rangka kemudahan peningkatan iklim ramah investasi di daerah.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada 	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar yang efektif dan efisien telah dilakukan secara rutin.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			pentingnya inovasi.	
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Promosi dan kampanye peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik dapat menghambat kreativitas dan inovasi.	Mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif. Selain itu, adanya KIBAR Awards telah menjadi salah satu upaya untuk menanamkan apresiasi	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar sehingga mendorong kreativitas para inovator.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			inovasi.	
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat perkembangan jumlah perusahaan pemula berbasis riset di daerah.	Penguatan kebijakan pro riset dan inovasi termasuk pada jaminan kemudahan pendaftaran usaha berbasis inovasi.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui proyek-proyek investasi.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan inovasi. - Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah. - Melakukan edukasi literasi dan inovasi kepada masyarakat. 	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program investasi.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan inovasi daerah dan <i>roadmap</i> inovasi yang masih minim dimiliki oleh pemerintah daerah.	Kerja sama dengan pihak swasta untuk dana alternatif dan perguruan tinggi untuk penyusunan peta jalan.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan klaster inovasi. - Keterbatasan SDM yang terampil dan mumpuni di bidangnya dalam menjalankan klaster inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek. - Penguatan kapasitas SDM perangkat daerah dan kolaborasi dengan akademisi. 	Klaster inovasi untuk peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar telah dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah	Regulasi yang berlebih menyebabkan disharmoni	Perbaikan tata regulasi yang terpadu dan koordinasi	Kebijakan pusat dan daerah memiliki

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	daerah	regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.	dengan pemerintah pusat.	tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami dan merespons isu global secara strategis. - Keterbatasan sarana komunikasi dapat menjadi hambatan dalam pengembangan riset dan inovasi yang setara dengan perkembangan global. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan <i>workshop</i> dan mentoring aparatur pemerintah daerah terkait isu global secara berkala. - Mendorong peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar dan literasi digital. 	Peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar berdasarkan pada standar global serta jaminan kualitas proyek investasi di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Masih adanya budaya kerja paternalistik tidak sesuai dengan	Mengedepankan budaya organisasi yang lebih terbuka,	Terjalinnnya kolaborasi lembaga internasional dalam

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		dinamika internasional yang mengedepankan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.	kolaboratif, dan partisipatif.	percepatan peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.
IX	Prioritas 8: Peningkatan Kualitas Serta Aksesibilitas Pendidikan			
1	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi yang mengakomodir peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar yang adil dan inklusif.	Perbaikan dan pemutakhiran regulasi yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi.	Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan inklusif untuk mewujudkan peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Keterbukaan informasi sebagai bagian dari perwujudan <i>good governance</i> sangat membantu dalam	Pengembangan basis data yang telah tersedia sejauh ini untuk kebutuhan riset di masa mendatang.	Data mengenai wilayah dengan infrastruktur dasar yang minim tersedia sebagai

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		menunjang kemudahan riset dan inovasi.		acuan dalam melaksanakan kebijakan.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungan riset dan inovasi yang mutakhir.	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam rangka pembangunan fasilitas.	Perencanaan pembangunan infrastruktur secara merata di setiap wilayah beserta dengan target yang jelas.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi sumber daya finansial untuk mendukung riset dan inovasi di daerah masih terbatas.	Pendanaan alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, serta skema berbasis proyek.	Anggaran untuk mendukung kegiatan riset berkaitan dengan peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar tersedia dengan cukup.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pembajakan dan distribusi ilegal yang dapat mengancam hak kepemilikan inovasi berkaitan dengan	Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dalam proses pendataan kekayaan intelektual agar menjadi lebih efisien	Kekayaan intelektual dimanfaatkan sebagai langkah percepatan pemerataan peningkatan kualitas serta

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	dan mudah diakses oleh kalangan luas.	aksesibilitas pendidikan di setiap wilayah.
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jalinan komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada sesama <i>stakeholder</i> masih kurang.	Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk membangun komunikasi dua arah dan diskusi intens.	Kolaborasi riset yang terjalin dengan BRIN dan perguruan tinggi untuk proyek-proyek peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan guna menghasilkan solusi peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar berbasis data.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan perbedaan skala prioritas dibanding infrastruktur fisik atau	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka peluang <i>co-investment</i> dan	Pembentukan jaringan inovasi dalam rangka peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		pelayanan dasar.	penggunaan bersama sarana riset.	dan fasilitator kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan dalam proyek-proyek peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk hubungan kemitraan dalam hal peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar jangka panjang masih kurang.	Kesamaan kepentingan atau <i>concern</i> terhadap peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar dapat menjadi landasan untuk menjalin kemitraan antar lembaga yang berkelanjutan.	Hubungan kemitraan yang terjalin secara optimal dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Bimbingan teknis (bimtek) inovasi belum pernah dilakukan.	Pembekalan secara rutin bagi SDM pemerintah terkait bimbingan	Terselenggara nya transfer teknologi dalam rangka kemudahan peningkatan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			teknologi inovasi.	kualitas serta aksesibilitas pendidikan di daerah.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar yang efektif dan efisien telah dilakukan secara rutin.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan 	Promosi dan kampanye peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			nan yang menekankan pada pentingnya inovasi.	
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik dapat menghambat kreativitas dan inovasi.	Mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif. Selain itu, adanya KIBAR Awards telah menjadi salah satu upaya untuk menanamkan apresiasi inovasi.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar sehingga mendorong kreativitas para inovator.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat perkembangan jumlah perusahaan pemula berbasis riset di daerah.	Penguatan kebijakan pro riset dan inovasi termasuk pada jaminan kemudahan pendaftaran usaha berbasis inovasi.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui proyek-proyek pendidikan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan inovasi. - Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah. - Melakukan edukasi literasi dan inovasi kepada masyarakat. 	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program pendidikan.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan inovasi daerah dan <i>roadmap</i> inovasi yang masih minim dimiliki oleh pemerintah daerah.	Kerja sama dengan pihak swasta untuk dana alternatif dan perguruan tinggi untuk penyusunan peta jalan.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				pihak.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan klaster inovasi. - Keterbatasan SDM yang terampil dan mumpuni di bidangnya dalam menjalankan klaster inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek. - Penguatan kapasitas SDM perangkat daerah dan kolaborasi dengan akademisi. 	Klaster inovasi untuk peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar telah dibentuk dengan penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Regulasi yang berlebih menyebabkan disharmoni regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.	Perbaikan tata regulasi yang terpadu dan koordinasi dengan pemerintah pusat.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami dan merespons isu global secara strategis. - Keterbatasan sarana komunikasi dapat menjadi hambatan dalam pengembangan riset dan inovasi yang setara dengan perkembangan global. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan <i>workshop</i> dan mentoring aparatur pemerintah daerah terkait isu global secara berkala. - Mendorong peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar dan literasi digital. 	Peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar berdasarkan pada standar global serta jaminan kualitas proyek pendidikan di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Masih adanya budaya kerja paternalistik tidak sesuai dengan dinamika internasional yang mengedepankan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.	Mengedepankan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Terjalinnya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan di Kota Banjar berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
X	Prioritas 9: Peningkatan Mutu Dan Persebaran serta Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Kota Banjar			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi yang mengakomodir peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan Kota Banjar yang adil dan inklusif.	Perbaikan dan pemutakhiran regulasi yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi.	Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan inklusif untuk mewujudkan peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Keterbukaan informasi sebagai bagian dari perwujudan <i>good governance</i> sangat membantu dalam menunjang kemudahan riset dan inovasi.	Pengembangan basis data yang telah tersedia sejauh ini untuk kebutuhan riset di masa mendatang.	Data mengenai wilayah dengan infrastruktur dasar yang minim tersedia sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan fasilitas yang memadai untuk	Kerja sama dengan berbagai	Perencanaan pembangunan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		keberlangsungan riset dan inovasi yang mutakhir.	<i>stakeholder</i> dalam rangka pembangunan fasilitas.	infrastruktur secara merata di setiap wilayah beserta dengan target yang jelas.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi sumber daya finansial untuk mendukung riset dan inovasi di daerah masih terbatas.	Pendanaan alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, serta skema berbasis proyek.	Anggaran untuk mendukung kegiatan riset berkaitan dengan peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar tersedia dengan cukup.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pembajakan dan distribusi ilegal yang dapat mengancam hak kepemilikan inovasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan	Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dalam proses pendataan kekayaan intelektual agar menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh kalangan luas.	Kekayaan intelektual dimanfaatkan sebagai langkah percepatan pemerataan peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		masyarakat.		setiap wilayah.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jalinan komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada sesama <i>stakeholder</i> masih kurang.	Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk membangun komunikasi dua arah dan diskusi intens.	Kolaborasi riset yang terjalin dengan BRIN dan perguruan tinggi untuk proyek-proyek peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan guna menghasilkan solusi peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar berbasis data.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan perbedaan skala prioritas dibanding	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka	Pembentukan jaringan inovasi dalam rangka peningkatan mutu dan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	daerah	infrastruktur fisik atau pelayanan dasar.	peluang <i>co-investment</i> dan penggunaan bersama sarana riset.	persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan dan fasilitator kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan dalam proyek-proyek peningkatan mutu Dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalinan komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk hubungan kemitraan dalam hal peningkatan mutu Dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar	Kesamaan kepentingan atau <i>concern</i> terhadap peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar dapat menjadi landasan untuk	Hubungan kemitraan yang terjalin secara optimal dengan berbagai pihak untuk mendukung peningkatan mutu Dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		jangka panjang masih kurang.	menjalin kemitraan antar lembaga yang berkelanjutan.	kesehatan di Kota Banjar.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Bimbingan teknis (bimtek) inovasi belum pernah dilakukan.	Pembekalan secara rutin bagi SDM pemerintah terkait bimbingan teknologi inovasi.	Terselenggaranya transfer teknologi dalam rangka kemudahan peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di daerah.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar yang efektif dan efisien telah dilakukan secara rutin.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Promosi dan kampanye peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik dapat menghambat kreativitas dan inovasi.	Mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif. Selain itu, adanya KIBAR Awards telah menjadi salah satu upaya untuk menanamkan apresiasi inovasi.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar sehingga mendorong kreativitas para inovator.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat perkembangan jumlah perusahaan pemula berbasis riset di daerah.	Penguatan kebijakan pro riset dan inovasi termasuk pada jaminan kemudahan pendaftaran usaha berbasis inovasi.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui proyek-proyek fasilitas kesehatan.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan inovasi. - Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah. - Melakukan edukasi literasi dan inovasi kepada masyarakat 	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar telah

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			.	dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program kesehatan.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan inovasi daerah dan <i>roadmap</i> inovasi yang masih minim dimiliki oleh pemerintah daerah.	Kerja sama dengan pihak swasta untuk dana alternatif dan perguruan tinggi untuk penyusunan peta jalan.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan klaster inovasi. - Keterbatasan SDM yang terampil dan mumpuni di bidangnya dalam 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek. - Penguatan 	Klaster inovasi untuk peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar telah dibentuk

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		menjalankan kluster inovasi.	kapasitas SDM perangkat daerah dan kolaborasi dengan akademisi.	berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Regulasi yang berlebih menyebabkan disharmoni regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.	Perbaikan tata regulasi yang terpadu dan koordinasi dengan pemerintah pusat.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami dan merespons isu global secara strategis. - Keterbatasan sarana komunikasi dapat 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan <i>workshop</i> dan mentoring aparatur pemerintah daerah terkait isu global secara berkala. - Mendorong 	Peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar berdasarkan pada standar global serta jaminan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		menjadi hambatan dalam pengembangan riset dan inovasi yang setara dengan perkembangan global.	peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar dan literasi digital.	kualitas proyek kesehatan di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Masih adanya budaya kerja paternalistik tidak sesuai dengan dinamika internasional yang mengedepankan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.	Mengedepankan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Terjalinnya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kota Banjar berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.
XI	Prioritas 10: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul dan Berdaya Saing			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi yang mengakomodir pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar yang adil dan inklusif.	Perbaikan dan pemutakhiran regulasi yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi.	Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan inklusif untuk mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Keterbukaan informasi sebagai bagian dari perwujudan <i>good governance</i> sangat membantu dalam menunjang kemudahan riset dan inovasi.	Pengembangan basis data yang telah tersedia sejauh ini untuk kebutuhan riset di masa mendatang.	Data mengenai wilayah dengan infrastruktur dasar yang minim tersedia sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungan riset dan inovasi yang mutakhir.	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam rangka pembangunan fasilitas.	Perencanaan pembangunan infrastruktur secara merata di setiap

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				wilayah beserta dengan target yang jelas.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi sumber daya finansial untuk mendukung riset dan inovasi di daerah masih terbatas.	Pendanaan alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, serta skema berbasis proyek.	Anggaran untuk mendukung kegiatan riset berkaitan dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar tersedia dengan cukup.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pembajakan dan distribusi ilegal yang dapat mengancam hak kepemilikan inovasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dalam proses pendataan kekayaan intelektual agar menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh kalangan luas.	Kekayaan intelektual dimanfaatkan sebagai langkah percepatan pemerataan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di setiap wilayah.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada sesama <i>stakeholder</i> masih kurang.	Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk membangun komunikasi dua arah dan diskusi intens.	Kolaborasi riset yang terjalin dengan BRIN dan perguruan tinggi untuk proyek-proyek pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing guna menghasilkan solusi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar berbasis data.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan perbedaan skala prioritas dibanding infrastruktur	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka peluang co-	Pembentukan jaringan inovasi dalam rangka pembangunan Sumber Daya

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		fisik atau pelayanan dasar.	<i>investment</i> dan penggunaan bersama sarana riset.	Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing dan fasilitator kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan dalam proyek-proyek pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk hubungan kemitraan dalam hal pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar jangka panjang masih	Kesamaan kepentingan atau <i>concern</i> terhadap pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar dapat menjadi landasan untuk menjalin	Hubungan kemitraan yang terjalin secara optimal dengan berbagai pihak untuk mendukung pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		kurang.	kemitraan antar lembaga yang berkelanjutan.	berdaya saing di Kota Banjar.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Bimbingan teknis (bimtek) inovasi belum pernah dilakukan.	Pembekalan secara rutin bagi SDM pemerintah terkait bimbingan teknologi inovasi.	Terselenggara nya transfer teknologi dalam rangka kemudahan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di daerah.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar yang efektif dan efisien telah dilakukan secara rutin.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
A.	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Promosi dan kampanye pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik dapat menghambat kreativitas dan inovasi.	Mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif. Selain itu, adanya KIBAR Awards telah menjadi salah satu upaya untuk menanamkan apresiasi inovasi.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar sehingga mendorong kreativitas para inovator.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat	Penguatan kebijakan pro riset dan	Perusahaan pemula berbasis riset

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		menghambat perkembangan jumlah perusahaan pemula berbasis riset di daerah.	inovasi termasuk pada jaminan kemudahan pendaftaran usaha berbasis inovasi.	dalam rangka di Kopembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saingta Banjar telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui proyek-proyek pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan inovasi. - Masih terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi daerah. - Melakukan 	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait pembangunan Sumber Daya Manusia

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		inovasi.	edukasi literasi dan inovasi kepada masyarakat .	(SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan inovasi daerah dan <i>roadmap</i> inovasi yang masih minim dimiliki oleh pemerintah daerah.	Kerja sama dengan pihak swasta untuk dana alternatif dan perguruan tinggi untuk penyusunan peta jalan.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan klaster inovasi. - Keterbatasan SDM yang terampil dan mumpuni di bidangnya dalam menjalankan klaster inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber dana alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek. - Penguatan kapasitas SDM perangkat daerah dan kolaborasi dengan akademisi. 	Klaster inovasi untuk pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar telah dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Regulasi yang berlebih menyebabkan disharmoni regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.	Perbaikan tata regulasi yang terpadu dan koordinasi dengan pemerintah pusat.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami dan merespons isu global secara strategis. - Keterbatasan sarana komunikasi dapat menjadi hambatan dalam pengembangan riset dan inovasi yang setara dengan perkembangan global. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyelenggaraan <i>workshop</i> dan mentoring aparatur pemerintah daerah terkait isu global secara berkala. - Mendorong pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar dan literasi digital. 	Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota Banjar berdasarkan pada standar global serta jaminan kualitas proyek pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Masih adanya budaya kerja paternalistik tidak sesuai dengan dinamika internasional yang mengedepankan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.	Mengedepankan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Terjalinnya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing di Kota

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				Banjar berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.
XII	Prioritas 11: Pengoptimalan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dalam Pelayanan Publik			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Regulasi yang mengakomodir pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota Banjar yang adil dan inklusif.	Perbaikan dan pemutakhiran regulasi yang telah ada agar dapat meningkatkan efektivitas implementasi.	Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan inklusif untuk mewujudkan pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota Banjar.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Keterbukaan informasi sebagai bagian dari perwujudan <i>good governance</i> sangat membantu	Pengembangan basis data yang telah tersedia sejauh ini untuk kebutuhan riset di masa mendatang.	Data mengenai wilayah dengan infrastruktur dasar yang minim tersedia

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		dalam menunjang kemudahan riset dan inovasi.		sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Penyediaan fasilitas yang memadai untuk keberlangsungan riset dan inovasi yang mutakhir.	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam rangka pembangunan fasilitas.	Perencanaan pembangunan infrastruktur secara merata di setiap wilayah beserta dengan target yang jelas.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi sumber daya finansial untuk mendukung riset dan inovasi di daerah masih terbatas.	Pendanaan alternatif sektor swasta, kemitraan publik-swasta, serta skema berbasis proyek.	Anggaran untuk mendukung kegiatan riset berkaitan dengan pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota Banjar tersedia dengan cukup.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan	Pembajakan dan distribusi ilegal yang dapat	Pemanfaatan teknologi <i>big data</i> dalam proses	Kekayaan intelektual dimanfaatkan sebagai

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	intelektual	mengancam hak kepemilikan inovasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	pendataan kekayaan intelektual agar menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh kalangan luas.	langkah percepatan pemerataan pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di setiap wilayah.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif kepada sesama <i>stakeholder</i> masih kurang.	Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital untuk membangun komunikasi dua arah dan diskusi intens.	Kolaborasi riset yang terjalin dengan BRIN dan perguruan tinggi untuk proyek-proyek pemanfaatan teknologi guna menghasilkan solusi dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota Banjar

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
				berbasis data.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan perbedaan skala prioritas dibanding infrastruktur fisik atau pelayanan dasar.	Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri membuka peluang <i>co-investment</i> dan penggunaan bersama sarana riset.	Pembentukan jaringan inovasi dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik dan fasilitator kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan dalam proyek-proyek teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota Banjar.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Jalanan komunikasi dan koordinasi yang efektif untuk hubungan kemitraan dalam hal pengoptimalan	Kesamaan kepentingan atau <i>concern</i> terhadap pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi	Hubungan kemitraan yang terjalin secara optimal dengan berbagai pihak untuk

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota Banjar jangka panjang masih kurang.	dalam pelayanan publik dapat menjadi landasan untuk menjalin kemitraan antar lembaga yang berkelanjutan.	mendukung pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Bimbingan teknis (bimtek) inovasi belum pernah dilakukan.	Pembekalan secara rutin bagi SDM pemerintah terkait bimbingan teknologi inovasi.	Terselenggaranya transfer teknologi dalam rangka kemudahan pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di daerah.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan 	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			nan yang menekankan pada pentingnya inovasi.	publik di Kota Banjar yang efektif dan efisien telah dilakukan secara rutin.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM yang memahami arti strategis sebuah inovasi. - Kepemimpinan yang masih kurang kondusif terhadap penerapan inovasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelenggarakan pelatihan, <i>workshop</i>, dan mentoring inovasi secara rutin. - Melaksanakan program pengembangan kepemimpinan yang menekankan pada pentingnya inovasi. 	Promosi dan kampanye pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota Banjar telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Budaya organisasi yang masih mengedepankan prinsip-prinsip kerja paternalistik dapat menghambat kreativitas dan inovasi.	Mengembangkan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif. Selain itu, adanya KIBAR Awards telah menjadi salah	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
			satu upaya untuk menanamkan apresiasi inovasi.	Banjar sehingga mendorong kreativitas para inovator.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Regulasi dan birokrasi yang kompleks dapat menghambat perkembangan jumlah perusahaan pemula berbasis riset di daerah.	Penguatan kebijakan pro riset dan inovasi termasuk pada jaminan kemudahan pendaftaran usaha berbasis inovasi.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota Banjar telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui proyek-proyek teknologi komunikasi.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan penerapan inovasi. - Masih terbatasnya pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat sosialisasi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengembangkan dan menerapkan inovasi 	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait pengoptimalan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
		masyarakat terhadap inovasi.	daerah. - Melakukan edukasi literasi dan inovasi kepada masyarakat .	pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota Banjar telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program pelayanan publik berbasis TIK.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terbatasnya alokasi anggaran riset dan inovasi daerah dan <i>roadmap</i> inovasi yang masih minim dimiliki oleh pemerintah daerah.	Kerja sama dengan pihak swasta untuk dana alternatif dan perguruan tinggi untuk penyusunan peta jalan.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk	- Keterbatasan anggaran menghambat pengembangan	- Sumber dana alternatif sektor	Klaster inovasi untuk pengoptimalan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	unggulan daerah	an kluster inovasi. - Keterbatasan SDM yang terampil dan mumpuni di bidangnya dalam menjalankan kluster inovasi.	swasta, kemitraan publik-swasta, dan skema berbasis proyek. - Penguatan kapasitas SDM perangkat daerah dan kolaborasi dengan akademisi.	pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota Banjar telah dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Regulasi yang berlebih menyebabkan disharmoni regulasi baik di tingkat pusat maupun daerah.	Perbaikan tata regulasi yang terpadu dan koordinasi dengan pemerintah pusat.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota Banjar.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi	- Keterbatasan kapasitas SDM dalam memahami	- Penyelenggaraan <i>workshop</i> dan	pengoptimalan pemanfaatan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Tantangan	Peluang	Kondisi yang Diharapkan
	pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	<p>dan merespons isu global secara strategis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan sarana komunikasi dapat menjadi hambatan dalam pengembangan riset dan inovasi yang setara dengan perkembangan global. 	<p>mentoring aparatur pemerintah daerah terkait isu global secara berkala.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mendorong Banjar dan literasi digital. 	teknologi komunikasi dalam pelayanan publik berdasarkan pada standar global serta jaminan kualitas proyek pemanfaatan teknologi di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Masih adanya budaya kerja paternalistik tidak sesuai dengan dinamika internasional yang mengedepankan fleksibilitas, transparansi, dan akuntabilitas.	Mengedepankan budaya organisasi yang lebih terbuka, kolaboratif, dan partisipatif.	Terjalinnnya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di Kota Banjar berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.

BAB IV

ANALISIS KESENJANGAN

Kegiatan riset dan inovasi daerah merupakan salah satu upaya dalam menjawab kebutuhan daerah dengan menggali potensi unik yang dimiliki oleh daerah dan mengenali tantangan lokal yang ada. Selain itu, kajian riset juga bermanfaat dalam memberikan pengembangan kebijakan yang berbasis data. Hasil riset menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih efektif dan tepat sasaran. Di sisi lain, inovasi sebagai bentuk pengadopsian ide-ide baru untuk menunjang kebaruan dalam rangka pemajuan daerah. Sehingga riset dan inovasi merupakan elemen fundamental dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan dan adil. Melalui pendalaman terhadap potensi wilayah, mengatasi tantangan spesifik, dan menghasilkan nilai tambah melalui gagasan-gagasan inovatif dan teknologi akan berdampak pada peningkatan daya saing ekonomi, mutu hidup masyarakat, serta kemandirian daerah. Keberhasilan yang sedemikian rupa bergantung pada kondisi ekosistem riset dan inovasi yang kondusif dan kolaboratif, dengan pelibatan kerja sama aktif dari berbagai elemen dan *support* kebijakan yang solid dari pemerintah daerah.

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, yang dimaksud dengan ekosistem riset dan inovasi di daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang minding rantai nilai riset dan inovasi di daerah. Pemerintah pusat melalui Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong

perbaikan dan pergerakan ekosistem riset dan inovasi di daerah dengan melalui pendampingan dan kolaborasi yang terjalin dengan setiap daerah di seluruh Indonesia. Lebih lanjut dalam Bab 5 Pasal 23 ayat (2) disebutkan mengenai elemen-elemen yang meliputi ekosistem riset dan inovasi di daerah yaitu (1) kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di daerah, (2) kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi, (3) kemitraan riset dan inovasi, (4) budaya riset dan inovasi, (5) keterpaduan riset dan inovasi di daerah, dan (6) penyelarasan dengan perkembangan global. Pada bagian analisis kesenjangan ini akan diuraikan mengenai kondisi kesenjangan yang ada antara kondisi awal ekosistem riset dan inovasi di Kota Banjar dengan standar ekosistem yang telah ditetapkan oleh BRIN sehingga pemerintah daerah Kota Banjar melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) dapat melakukan perbaikan dan mengembangkan ekosistem berdasarkan analisis kesenjangan yang telah disampaikan.

Tabel 4. 1 Analisis Kesenjangan Antara Kondisi Saat Ini dan Kondisi yang Diharapkan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
I	Produk Unggulan Komoditas Pertanian/Hortikultura			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Penyelenggaraa n peraturan dalam pengembangan produk unggulan pertanian dalam	Kebijakan yang mendukung pengembangan produk pertanian dalam peningkatan	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		Kepwal No. 284 Tahun 2018 tentang Pengembangan Produk Unggulan Daerah dan Kepwal No. 236 Tahun 2023	kualitas dan daya saing.	
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Tidak ada data mengenai jumlah pelaku usaha, harga produk, dan omzet yang dihasilkan	Tersedianya basis data yang komprehensif untuk kepentingan investasi, kewirausahaan, dan bisnis terkait produk pertanian	Belum tersedianya basis data yang komprehensif dan terintegrasi mengenai produk pertanian.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	<ul style="list-style-type: none"> - Sumber air/irigasi masih kurang memadai dan pemanfaatan teknologi modern belum optimal - Tidak ada pusat inovasi produk pertanian yang dapat memberikan arahan dan fasilitas kepada para petani dan 	Adanya pusat inovasi pengembangan komoditas pertanian yang dapat memberikan arahan dan fasilitas kepada para petani dan pengusaha lokal.	Pembentukan pusat inovasi pengembangan untuk hilirisasi produk pertanian.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		pengusaha lokal		
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Pos pembiayaan anggaran riset dan inovasi masih terbatas, tidak hanya dalam lingkup daerah melainkan juga nasional	Terdapat alokasi anggaran khusus untuk riset dan inovasi produk pertanian.	Skema anggaran untuk pengembangan produk pertanian belum tersedia.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Tidak ada data kekayaan intelektual dan mekanisme jaminan perlindungan yang jelas	Inventarisasi perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual telah dilakukan.	Inventarisasi kekayaan intelektual untuk produk komoditas pertanian belum ada.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja sama dengan pihak swasta masih minim - Kelembagaan litbang yang mandiri belum terbentuk dan masih tergabung dalam Bapelitbangda Kota Banjar 	Kerja sama dengan berbagai <i>stakeholder</i> dalam pengembangan komoditas pertanian dapat terjalin dengan optimal.	Belum optimalnya hubungan kerja sama dan kolaborasi riset dengan perguruan tinggi, BRIN, dan swasta.
B.	Penyediaan sarana	Fasilitas sarana	Sarana	Masih

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	pendukung riset berupa situs jaringan inovasi belum ada	pengembangan budidaya komoditas pertanian tersedia dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh petani dan peneliti.	kurangnya sarana yang disediakan untuk pengembangan budidaya komoditas pertanian.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Kemitraan pengembangan tanaman pertanian belum berjalan optimal	Terjalannya kemitraan riset dan inovasi antara penghasil dengan pengguna teknologi budidaya komoditas pertanian untuk percepatan hasil inovasi.	Kemitraan riset antara penghasil dengan pengguna inovasi masih minim.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Tidak ada upaya transfer teknologi untuk produk pertanian	Model dan strategi transfer teknologi bisnis pertanian telah diimplementasikan dan meningkatkan produktivitas usaha.	Belum ada penerapan model dan strategi transfer teknologi budidaya komoditas pertanian yang dapat meningkatkan produktivitas

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
				usaha.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Praktik baik dan diseminasi hasil riset pengembangan produk unggulan pertanian belum dilakukan	Sosialisasi praktik baik dan hasil riset dilakukan secara rutin kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan adopsi teknologi.	Belum ada kegiatan sosialisasi berkaitan dengan praktik baik dan hasil riset secara rutin.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye terkait PUD pertanian sudah ada, namun perlu ditingkatkan lagi.	Peningkatan promosi dan kampanye pengembangan PUD pertanian secara aktif dan meluas.	Promosi dan kampanye yang dilakukan masih belum dilakukan secara aktif dan meluas.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Belum terdapat upaya apresiasi yang mendukung inovasi budidaya komoditas pertanian	Terdapat upaya apresiasi berupa penghargaan maupun lomba yang diselenggarakan bagi petani.	Apresiasi yang melibatkan para petani belum ada.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema dukungan pengembangan	Adanya skema dukungan pengembangan	Belum ada implementasi skema

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		perusahaan pemula berbasis riset di sektor pertanian belum ada	perusahaan pemula berbasis riset yang diimplementasikan.	dukungan bagi perusahaan pemula di sektor pertanian yang berbasis riset.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Inventarisasi belum diselenggarakan dengan baik	Inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal dalam budidaya komoditas pertanian sebagai referensi riset dan inovasi lebih lanjut.	Belum adanya inventarisasi sehingga sulit untuk menjadikannya sebagai referensi pengembangan riset dan inovasi lebih lanjut.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Prakarsa riset dan inovasi untuk pengembangan PUD pertanian belum dilakukan secara optimal	Optimalisasi prakarsa riset dan inovasi untuk pengembangan PUD pertanian di daerah yang diinisiasi dan didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.	Belum adanya prakarsa riset dan inovasi yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk	Klaster Agroteknopark sebagai klaster inovasi produk	Terbentuknya pengembangan klaster inovasi produk	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	unggulan daerah	pertanian (rambutan Sibatulawang dan pepaya Kalifornia)	pertanian.	
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kesesuaian kebijakan terkait pengembangan PUD pertanian belum optimal	Kebijakan daerah mengenai pengembangan PUD pertanian telah sinkron dengan pusat sehingga mendorong efektivitas implementasi.	Sinkronisasi kebijakan pengembangan PUD pertanian belum optimal dengan kebijakan pusat.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Kepedulian isu internasional serta standarisasi yang berpengaruh pada pengembangan PUD pertanian masih rendah	Peningkatan kepedulian isu internasional berikut penerapan standarisasi olahan berdasarkan ketentuan internasional sehingga meningkatkan daya saing di pasar global.	Rendahnya kepedulian isu dan standarisasi yang masih rendah.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Belum terdapat kerja sama internasional dalam pengembangan produk	Kerja sama internasional dalam pengembangan PUD pertanian untuk	Kerja sama internasional belum terjadi untuk membantu meningkatka

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		pertanian	meningkatkan transfer teknologi dan akses pasar global.	n transfer teknologi dan akses ke pasar global.
II	Prioritas 1: Optimalisasi Pengembangan Sumber Daya Alam, Ekonomi Kreatif pada Sektor Olahraga, Pariwisata, Seni, Budaya, dan UMKM			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Belum ada kebijakan riset dan inovasi yang mengarah pada optimalisasi pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif.	Dukungan kebijakan riset dan inovasi yang dapat membantu pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif daerah.	Belum terdapat kebijakan riset dan inovasi yang mengarah pada optimalisasi pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Belum terdapat basis data yang memadai untuk program riset dan inovasi optimalisasi sumber daya alam dan ekonomi kreatif.	Ketersediaan basis data mengenai optimalisasi sebagai dukungan analisis data dan perencanaan program.	Belum ada basis data yang lengkap mengenai optimalisasi sebagai dukungan analisis dan perencanaan program.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Infrastruktur riset masih minim dalam upaya optimalisasi	Infrastruktur yang cukup dan memadai dalam mengakomodir	Infrastruktur riset yang memadai dalam mengakomodir

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		sumber daya alam dan ekonomi kreatif.	kegiatan riset dan inovasi.	ir kegiatan riset dan inovasi masih minim.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran untuk riset dan inovasi khusus optimalisasi sumber daya alam dan ekonomi kreatif masih lemah.	Alokasi anggaran riset khusus pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif serta jaminan keberlanjutan program di masa depan.	Lemahnya alokasi anggaran riset dan inovasi.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual masih minim.	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang optimal dalam optimalisasi sumber daya alam dan ekonomi kreatif.	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual dalam optimalisasi sumber daya alam dan ekonomi kreatif belum optimal.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kerja sama antara lembaga riset dan perguruan tinggi belum terkoordinasi	Kolaborasi riset yang terjalin bersama BRIN dan perguruan tinggi untuk	Kolaborasi belum terjalin dengan baik sehingga belum mampu

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		dengan baik.	membantu percepatan optimalisasi pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif.	membantu percepatan optimalisasi pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana pendukung riset dan pusat inovasi belum ada.	Pembentukan jaringan inovasi yang mendukung pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif.	Belum ada sarana pendukung berupa pembentukan jaringan inovasi.
3. Kemitraan Riset dan Inovasi				
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan di daerah masih belum optimal dalam rangka mendorong pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif.	Terselenggaranya kerja sama antara lembaga riset daerah, OPD terkait, dan lembaga riset profesional lainnya untuk menghasilkan program inovatif.	Kerja sama antara lembaga riset di daerah masih belum terselenggara secara optimal.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil inovasi perihal sumber daya alam dan ekonomi kreatif masih minim.	Terselenggaranya transfer teknologi terkait peningkatan pengembangan sumber daya	Minimnya difusi hasil inovasi terkait peningkatan pengembangan sumber

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			alam dan ekonomi kreatif sehingga memberikan kemudahan kepada pelaku di sektor ekonomi kreatif.	daya alam dan ekonomi kreatif.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset kepada publik dan pelaku sektor ekonomi kreatif belum optimal.	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif telah dilakukan secara rutin sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat.	Belum dilaksanakannya diseminasi dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah, seperti pada sektor pariwisata.	Promosi dan kampanye pengembangan inovasi sumber daya alam dan ekonomi kreatif telah dilakukan secara berkelanjutan.	Rendahnya promosi dan kampanye terutama pada sektor pariwisata secara berkelanjutan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Belum ada ajang apresiasi untuk mendorong para inovator lokal berkontribusi dalam pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif sehingga mendorong kreativitas para inovator.	Ajang apresiasi yang belum terselenggarakan.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap optimalisasi sumber daya alam dan sektor ekonomi kreatif.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka optimalisasi sumber daya alam dan ekonomi kreatif telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan usaha yang berfokus pada hal yang sama.	Ketersediaan mekanisme dukungan bagi perusahaan pemula berbasis riset masih belum ditemukan.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum terdapat langkah konkret untuk menginventarisir dan mengembangkan teknologi masyarakat yang dapat mendukung	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait	Inventarisasi dan pengembangan teknologi atau kearifan lokal belum dilakukan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		percepatan optimalisasi sumber daya alam dan keberlangsungan ekonomi kreatif.	optimalisasi sumber daya alam dan keberlangsungan ekonomi kreatif telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program pembangunan ekonomi.	
5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah				
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk optimalisasi pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.	Pelibatan atau kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan riset dan inovasi belum diselenggarakan secara maksimal.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kondisi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal.	Klaster inovasi untuk pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif telah dibentuk berikut dengan	Minimnya perkembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah melalui

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			penguatan jaringan kolaborasi.	penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna optimalisasi pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif.	Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah belum optimal.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Penerapan standar global dalam pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif masih belum optimal.	Pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif berdasarkan pada standar global serta jaminan kualitas sumber daya alam dan sektor ekonomi kreatif yang unggul di tingkat internasional.	Belum optimalnya pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif berdasarkan standar global serta jaminan kualitas yang unggul di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Kolaborasi dengan lembaga	Terjalannya kolaborasi	Belum terjalin

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		internasional dalam pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif dasar masih lemah.	lembaga internasional dalam percepatan pengembangan sumber daya alam dan ekonomi kreatif berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.	kolaborasi lembaga internasional untuk akses teknologi canggih dan pendanaan global.
III	Prioritas 2: Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Dasar			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dasar belum tersedia.	Kebijakan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar yang adil dan inklusif untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.	Belum ada kebijakan daerah yang mendukung inovasi terhadap pembangunan infrastruktur dasar.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data belum terintegrasi secara optimal.	Data mengenai wilayah dengan infrastruktur dasar yang minim tersedia sebagai acuan dalam melaksanakan kebijakan.	Belum ada data yang lengkap dan terintegrasi mengenai wilayah dengan infrastruktur dasar yang minim.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Infrastruktur masih kurang memadai untuk melakukan inovasi.	Perencanaan pembangunan infrastruktur secara merata di setiap wilayah beserta dengan target yang jelas.	Infrastruktur untuk membangun pusat inovasi kurang memadai.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Ketersediaan anggaran untuk melakukan riset dan inovasi masih minim.	Anggaran untuk mendukung kegiatan riset berkaitan dengan pemerataan infrastruktur dasar tersedia dengan cukup.	Alokasi anggaran riset dan inovasi untuk pemerataan infrastruktur belum disusun dan diimplementasikan.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual belum dilakukan dengan optimal.	Kekayaan intelektual dimanfaatkan sebagai langkah percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di setiap wilayah.	Inventarisasi pemanfaatan kekayaan intelektual belum dimanfaatkan secara optimal.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan	Belum terdapat upaya	Kolaborasi riset yang	Kolaborasi dengan BRIN

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	kolaborasi yang terjalin dalam hal pembangunan infrastruktur bersama lembaga riset.	terjalin dengan BRIN dan perguruan tinggi untuk proyek-proyek pemerataan infrastruktur dasar guna menghasilkan solusi pembangunan infrastruktur berbasis data.	dan perguruan tinggi belum terjalin untuk proyek-proyek pemerataan infrastruktur dasar.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Penyediaan sarana pendukung belum optimal untuk kegiatan riset dan inovasi yang efektif.	Pembentukan jaringan inovasi dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan fasilitator kerja sama antar berbagai pemangku kepentingan dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur.	Ketersediaan sarana pendukung untuk kegiatan riset dan inovasi belum optimal.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Kemitraan antar lembaga belum kuat sehingga perlu lebih banyak keterlibatan dari berbagai	Hubungan kemitraan yang terjalin secara optimal dengan berbagai pihak untuk	Jalanan kemitraan antar lembaga dalam mendukung pemerataan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		pihak.	mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur.	pembangunan infrastruktur belum optimal.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil inovasi perihal pembangunan infrastruktur masih minim.	Terselenggaranya transfer teknologi dalam rangka kemudahan pembangunan infrastruktur dasar di daerah.	Minimnya difusi hasil inovasi dalam rangka kemudahan pembangunan infrastruktur dasar di daerah.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset kepada publik dan pemberi modal masih minim.	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi pemerataan infrastruktur yang efektif dan efisien telah dilakukan secara rutin.	Minimnya diseminasi dan sosialisasi hasil riset secara rutin kepada publik.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan	Promosi dan kampanye pemerataan pembangunan infrastruktur dasar telah dilakukan secara efektif	Rendahnya promosi dan kampanye pemerataan pembangunan secara kolaboratif dan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri.	dan berkelanjutan.	berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Belum ada ajang apresiasi untuk mendorong para inovator lokal berkontribusi dalam hal pemerataan infrastruktur dasar.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka pemerataan infrastruktur dasar sehingga mendorong kreativitas para inovator.	Ajang apresiasi yang belum terselenggarakan.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap pemerataan infrastruktur dasar.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui proyek-proyek infrastruktur.	Ketersediaan mekanisme dukungan bagi perusahaan pemula berbasis riset masih belum ditemukan.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum terdapat langkah konkret untuk menginventarisir dan mengembangkan teknologi	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi	Inventarisasi dan pengembangan teknologi atau kearifan lokal belum dilakukan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		masyarakat yang dapat mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.	masyarakat atau kearifan lokal terkait penguatan infrastruktur telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program pembangunan ekonomi.	
5. Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah				
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk pembangunan infrastruktur dasar telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.	Perlibatan atau kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan riset dan inovasi belum diselenggarakan secara maksimal.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kondisi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal.	Klaster inovasi untuk pembangunan infrastruktur dasar telah dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.	Minimnya perkembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah melalui penguatan jaringan kolaborasi.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur dasar.	Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah belum optimal.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Penerapan standar global dalam pembangunan infrastruktur dasar masih belum optimal.	Pembangunan infrastruktur dasar berdasarkan pada standar global serta jaminan kualitas proyek infrastruktur di tingkat internasional.	Belum optimalnya pembangunan infrastruktur berdasarkan standar global serta jaminan kualitas proyek infrastruktur yang unggul di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam pembangunan infrastruktur dasar masih lemah.	Terjalannya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan pembangunan infrastruktur dasar berikut	Belum terjalin kolaborasi lembaga internasional untuk akses teknologi canggih dan pendanaan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.	global.
IV	Prioritas 3: Peningkatan Konektivitas antar Wilayah			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan riset dan inovasi di daerah belum ada.	Kebijakan yang mampu mengintegrasikan kegiatan riset dan upaya peningkatan konektivitas wilayah berikut dengan analisis terhadap dampak lingkungan.	Belum ada kebijakan yang mengintegrasikan kegiatan riset dengan upaya peningkatan konektivitas wilayah.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data berupa rencana strategis sudah ada. Namun untuk kebutuhan basis data riset masih terbatas karena belum terintegrasi secara komprehensif.	Tersedianya basis data yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung upaya peningkatan konektivitas antar wilayah.	Belum ada basis data yang terintegrasi secara komprehensif.
C.	Pengembangan	Infrastruktur	Keberadaan	Minimnya

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	infrastruktur dasar riset dan inovasi	dasar sebagai pendukung kegiatan riset masih minim.	infrastruktur dasar yang mumpuni untuk menunjang kegiatan riset berkaitan dengan peningkatan konektivitas antar wilayah.	ketersediaan infrastruktur dasar untuk menunjang kegiatan riset berkaitan dengan peningkatan konektivitas wilayah.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi anggaran untuk melakukan riset masih terbatas.	Optimalisasi alokasi anggaran agar upaya pengembangan moda transportasi dapat tercapai.	Ketersediaan anggaran untuk riset yang terbatas.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum terdapat upaya perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual pada isu ini.	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendukung percepatan pengembangan konektivitas wilayah telah dilakukan, mendukung kepaduan pengembangan teknologi informasi dalam transportasi wilayah.	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual yang mendukung kepaduan pengembangan teknologi informasi dalam transportasi wilayah belum dilakukan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Upaya kolaborasi riset belum terwujud dalam membantu memecahkan permasalahan transportasi antar wilayah.	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan riset termasuk BRIN dan perguruan tinggi untuk membantu meningkatkan konektivitas antar wilayah.	Belum terwujudnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan badan riset.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan sarana untuk menunjang kegiatan riset masih minim.	Sarana pendukung telah disediakan dengan baik termasuk pada perlengkapan jalan yang memadai.	Belum ada sarana pendukung yang tersedia dengan baik.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan di daerah masih belum optimal dalam rangka optimalisasi konektivitas wilayah.	Terselenggaranya kerja sama antara lembaga riset daerah, OPD terkait, dan lembaga riset profesional lainnya untuk menghasilkan program inovatif.	Hubungan kemitraan antar lembaga riset daerah belum terselenggara secara optimal.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
B.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil inovasi perihal konektivitas wilayah masih minim, data mengenai perhitungan konektivitas pun belum tersedia.	Transfer teknologi terkait peningkatan konektivitas wilayah yang menyeluruh telah difasilitasi, termasuk penyediaan sarana transportasi dengan adopsi teknologi yang ramah pada komunitas yang memiliki keterbatasan teknologi (gaptek).	Belum terdapat fasilitas transfer teknologi dalam meningkatkan konektivitas wilayah yang menyeluruh.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset kepada publik dan pemilik kendaraan angkutan umum belum tersedia.	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai kelayakan kendaraan umum dan pemeliharaan perlengkapan jalan telah dilakukan secara rutin sekaligus meningkatkan pengetahuan masyarakat.	Diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai kelayakan kendaraan umum kepada para pemilik kendaraan angkutan umum belum dilakukan secara rutin.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri.	Promosi dan kampanye pemerataan sarana transportasi umum telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	Rendahnya promosi dan kampanye pemerataan sarana transportasi secara efektif dan berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Belum ada ajang apresiasi untuk mendorong para inovator lokal berkontribusi dalam hal pengadaan transportasi.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka konektivitas wilayah sehingga mendorong kreativitas para inovator.	Ajang apresiasi yang belum terselenggarakan.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap konektivitas antar wilayah.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka konektivitas antar wilayah telah tersedia.	Ketersediaan mekanisme dukungan bagi perusahaan pemula berbasis riset masih belum ditemukan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum terdapat langkah konkret untuk menginventarisir dan mengembangkan teknologi masyarakat yang dapat mendukung percepatan peningkatan konektivitas wilayah.	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait penyediaan sarana transportasi telah dilakukan.	Inventarisasi dan pengembangan teknologi atau kearifan lokal belum dilakukan.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk peningkatan konektivitas wilayah telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.	Perlibatan atau kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan riset dan inovasi belum diselenggarakan secara maksimal.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kondisi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal.	Klaster inovasi untuk peningkatan konektivitas wilayah telah dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.	Minimnya perkembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah melalui penguatan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
				jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna peningkatan konektivitas wilayah.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya peningkatan konektivitas antar wilayah.	Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah belum optimal.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Penerapan standar global dalam penyediaan transportasi umum masih belum optimal.	Penyediaan transportasi umum berdasarkan pada standar global serta jaminan keamanan dan kenyamanan transportasi umum di tingkat internasional.	Belum optimalnya pengembangan moda transportasi berdasarkan standar global serta jaminan keamanan dan kenyamanan di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam peningkatan konektivitas wilayah dasar masih lemah.	Terjalannya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan peningkatan konektivitas	Minimnya kolaborasi lembaga internasional untuk akses teknologi canggih dan pendanaan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			wilayah berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.	global.
V	Prioritas 4: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan mengenai lingkungan hidup sudah ada namun belum terintegrasi dengan riset dan inovasi.	Kebijakan dalam peningkatan lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas telah diterapkan.	Belum ada kebijakan lingkungan hidup yang terintegrasi dengan riset dan inovasi.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data seperti Indeks Risiko Bencana (IRB), kondisi geografis dan sosial ekonomi sudah ada namun belum terintegrasi dengan riset dan inovasi.	Basis data yang tertata dan komprehensif sebagai penunjang kegiatan riset berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah.	Basis data yang tersedia belum terintegrasi dengan riset dan inovasi.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Kualitas infrastruktur yang dimiliki masih minim	Kondisi infrastruktur dasar yang sudah	Kondisi infrastruktur dasar masih belum

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		sehingga masih rentan terkena resiko bencana.	memenuhi standar sehingga turut membantu meminimalisir resiko bencana yang terjadi di masa mendatang.	sepenuhnya memenuhi standar.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi anggaran riset masih minim sehingga masih terbatas pada fokus penataan permasalahan utama.	Anggaran untuk memfasilitasi riset tersedia sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan riset dan inovasi daerah.	Belum ada alokasi anggaran riset untuk kebutuhan pengakjian pada isu ini.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual dalam mengatasi permasalahan kualitas lingkungan hidup.	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk percepatan peningkatan kualitas lingkungan hidup berjalan secara optimal meliputi perbaikan kondisi yang menjadi faktor kerentanan bencana.	Pemanfaatan kekayaan intelektual belum dilakukan untuk mengatasi permasalahan kualitas lingkungan hidup.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam upaya pengendalian pencemaran air masih kurang.	Keterlibatan semua pihak dalam upaya mencegah pencemaran sebagai langkah menjaga kualitas lingkungan terlaksana dengan baik.	Keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam mencegah pencemaran belum terlaksana dengan baik.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana pendukung dalam menunjang riset masih minim, ketersediaan lahan yang terbatas dan kurangnya teknologi yang dapat menunjang pengelolaan sampah.	Jaringan inovasi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup telah terbentuk yang mampu memfasilitasi berbagai pemangku kepentingan dalam program lingkungan hidup.	Belum terbentuknya jaringan inovasi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan di daerah masih belum optimal dalam rangka peningkatan	Terselenggaranya kerja sama antara lembaga riset daerah, OPD terkait, dan lembaga riset profesional	Kerja sama antara lembaga riset di daerah masih belum terselenggara secara optimal.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		kualitas lingkungan hidup.	lainnya untuk menghasilkan program inovatif.	
B.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil inovasi perihal kualitas lingkungan hidup masih minim.	Terselenggaranya transfer teknologi terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup sehingga mampu menunjang pengelolaan persampahan secara optimal.	Minimnya difusi hasil inovasi terkait peningkatan kualitas lingkungan hidup.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset kepada publik dan sektor industri belum optimal sehingga masih ditemukan permasalahan terkait penanganan limbah cair domestik dan industri.	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai peningkatan kualitas lingkungan hidup telah dilakukan secara rutin.	Belum dilaksanakannya diseminasi dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan	Promosi dan kampanye lingkungan hidup telah dilakukan secara efektif	Rendahnya promosi dan kampanye lingkungan hidup secara berkelanjutan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri.	dan berkelanjutan.	n.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR) <i>Award</i> .	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan hidup sehingga mendorong kreativitas para inovator.	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan hidup telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui program-program pemeliharaan lingkungan.	Ketersediaan mekanisme dukungan bagi perusahaan pemula berbasis riset masih belum ditemukan.
D.	Inventarisasi, pengembangan,	Inventarisasi terhadap	Inventarisasi dan	Pengembangan serta

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	teknologi masyarakat dan kearifan lokal melalui Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 266 Tahun 2024.	pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait lingkungan hidup telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program pemeliharaan lingkungan.	perlindungan teknologi masyarakat dan kearifan lokal.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.	Perlibatan atau kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan riset dan inovasi belum diselenggarakan secara maksimal.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kondisi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara	Klaster inovasi untuk perbaikan lingkungan hidup telah dibentuk berikut dengan	Minimnya perkembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		maksimal.	penguatan jaringan kolaborasi.	daerah melalui penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup.	Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah belum optimal.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Penerapan standar global dalam kualitas lingkungan hidup masih rendah.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup berdasarkan pada standar global.	Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup berdasarkan standar global.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam pemeliharaan lingkungan hidup dasar masih lemah.	Terjalannya kolaborasi lembaga internasional dalam pemeliharaan lingkungan hidup berikut dengan akses teknologi	Belum terjalin kolaborasi lembaga internasional untuk akses teknologi canggih dan pendanaan global.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			canggih dan pendanaan global.	
VI	Prioritas 5: Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Air			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas air sudah ada, yakni melalui Perda Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah akan tetapi belum terintegrasi dengan upaya riset dan inovasi yang dilakukan.	Optimalisasi dukungan kebijakan riset dan inovasi terhadap kualitas dan kuantitas air mencakup program-program yang dapat meningkatkan kualitas air dan persebaran jumlah air pada masyarakat.	Kebijakan daerah belum terintegrasi dengan kegiatan riset dan inovasi.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data seperti indeks kualitas air dan pengguna air bersih tersedia dalam satu portal terintegrasi.	Keberadaan basis data yang komprehensif, terarah, dan mudah diakses untuk kebutuhan riset dan inovasi yang optimal.	-
C.	Pengembangan	Infrastruktur	Perencanaan	Minimnya

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	infrastruktur dasar riset dan inovasi	untuk kebutuhan riset masih minim untuk kegiatan inovasi terhadap kualitas dan kuantitas air.	peningkatan infrastruktur kualitas dan kuantitas air secara menyeluruh berikut dengan target yang ditetapkan secara jelas.	infrastruktur yang dapat memfasilitasi kegiatan riset dan inovasi kualitas dan kuantitas air.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran kebutuhan riset untuk membantu mengkaji permasalahan kualitas dan kuantitas air masih terbatas.	Ketersediaan anggaran secara khusus untuk mendukung kajian riset daerah terkait permasalahan air sehingga akar masalah dapat dipetakan dengan baik.	
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk peningkatan kuantitas dan kualitas air masih minim.	Pemanfaatan kekayaan intelektual telah dioptimalkan untuk mendorong inovasi dalam program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan	Belum optimalnya pemanfaatan kekayaan intelektual untuk mendorong inovasi dalam program-program berkaitan dengan kualitas dan kuantitas air.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			persebarannya secara merata kepada masyarakat.	
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kapasitas lembaga riset di daerah belum optimal dalam mendukung inovasi.	Keberadaan lembaga riset di daerah mampu mengambil peran dalam program-program mencakup pendistribusian air serta peninjauan terhadap kuantitas air.	Lembaga riset daerah belum optimal dalam mendukung inovasi sehingga belum mampu mengambil peran riset menyangkut program pendistribusian air serta peninjauan kuantitas air.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana dan prasarana seperti laboratorium dan pusat inovasi belum tersedia.	Sarana pendukung riset telah tersedia, mencakup laboratorium dan pusat inovasi yang mampu menunjang kegiatan riset.	Laboratorium dan pusat inovasi belum tersedia.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar	Kemitraan antar lembaga belum	Hubungan kemitraan	Kemitraan antara

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	lembaga	kuat sehingga perlu lebih banyak keterlibatan dari berbagai pihak.	yang terjalin secara optimal dengan berbagai pihak untuk mendukung ketersediaan air bersih bagi masyarakat.	lembaga riset di daerah masih belum terselenggara dengan kuat.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil inovasi perhal kualitas dan kuantitas air masih minim.	Terselenggaranya transfer teknologi dalam rangka menyediakan sarana air bersih dengan kualitas dan kuantitas yang melimpah di daerah.	Minimnya difusi hasil inovasi terkait peningkatan kualitas dan kuantitas air.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset kepada publik dan perusahaan daerah masih minim.	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai peningkatan mutu air bersih telah dilakukan secara rutin.	Belum dilaksanakannya diseminasi dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat dan perusahaan daerah.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga	Promosi dan kampanye kualitas dan kuantitas air	Rendahnya promosi dan kampanye kualitas dan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri.	telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	kuantitas air secara berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR) <i>Award</i> .	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan hidup sehingga mendorong kreativitas para inovator.	Ajang apresiasi yang belum terselenggarakan.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap peningkatan mutu air bersih.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka perbaikan kualitas air bersih telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui program-program pemeliharaan lingkungan.	Ketersediaan mekanisme dukungan bagi perusahaan pemula berbasis riset masih belum ditemukan.
D.	Inventarisasi,	Belum terdapat	Inventarisasi	Inventarisasi

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	inventarisasi dan pengembangan teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait pemeliharaan kualitas air.	dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait lingkungan hidup telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program pemeliharaan lingkungan.	dan pengembangan teknologi atau kearifan lokal belum dilakukan.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk peningkatan kualitas dan kuantitas air telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.	Perlibatan atau kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan riset dan inovasi belum diselenggarakan secara maksimal.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kondisi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang	Klaster inovasi untuk ketersediaan air bersih telah dibentuk berikut dengan	Minimnya perkembangan klaster inovasi berbasis produk

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		secara maksimal.	penguatan jaringan kolaborasi.	unggulan daerah melalui penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna peningkatan kualitas dan kuantitas air.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya penyediaan kualitas air bersih dan debit air yang mencukupi.	Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah belum optimal.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Penerapan standar internasional dalam peningkatan kualitas dan kuantitas air masih belum optimal.	Peningkatan kualitas dan kuantitas air berdasarkan pada standar global serta jaminan kualitas air bersih di tingkat internasional.	Belum optimalnya peningkatan kualitas dan kuantitas air berdasarkan standar global serta jaminan kualitas air bersih di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Belum ada upaya kolaborasi	Terjalannya kolaborasi lembaga	Belum terjalin kolaborasi

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		dengan lembaga internasional dalam penyediaan air bersih.	internasional dalam percepatan peningkatan kualitas dan kuantitas air berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.	lembaga internasional untuk akses teknologi canggih dan pendanaan global.
VII	Prioritas 6: Pengembangan Dan Peningkatan Pengelolaan Persampahan Kota Banjar Menuju <i>Zero Waste To Landfill</i>			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan pengelolaan sampah di daerah belum diimplementasikan secara optimal.	Kebijakan yang mendukung peningkatan pengelolaan sampah diterapkan dengan baik mencakup manajemen pengelolaan sampah dan pelatihan SDM.	Belum optimalnya penerapan kebijakan pengelolaan sampah di daerah.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data riset belum terintegrasi secara optimal.	Basis data mengenai persebaran sampah dan jumlah TPS di setiap wilayah yang terintegrasi dan mampu	Integrasi basis data untuk kebutuhan riset permasalahan sampah belum optimal.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			mendukung analisis pemetaan program <i>zero waste to landfill</i> .	
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Infrastruktur masih kurang memadai untuk melakukan riset dan inovasi.	Perencanaan pengembangan infrastruktur untuk menunjang riset dan inovasi dalam rangka mendukung upaya menuju <i>zero waste to landfill</i> .	Infrastruktur yang tersedia belum dapat menunjang riset dan inovasi.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi anggaran masih minim di tingkat daerah.	Anggaran untuk menunjang program tersedia termasuk untuk melakukan pelatihan kepada SDM pengelolaan sampah.	Minimnya alokasi anggaran di tingkat daerah.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Kekayaan intelektual belum dimanfaatkan dengan optimal	Pemanfaatan kekayaan intelektual dalam menunjang	Belum optimalnya pemanfaatan kekayaan intelektual

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		untuk mengatasi permasalahan sampah di daerah.	inovasi sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan.	dalam menunjang inovasi.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kerja sama antara lembaga riset dan perguruan tinggi belum terkoordinasi dengan baik.	Kolaborasi riset yang terjalin bersama BRIN dan perguruan tinggi untuk membantu menetapkan pengelolaan persampahan yang tepat guna.	Kolaborasi belum terjalin dengan baik bersama badan riset.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Sarana pendukung riset dan pusat inovasi belum ada.	Pembentukan jaringan inovasi yang mendukung pengembangan pengelolaan sampah menuju <i>zero waste to landfill</i> .	Jaringan inovasi yang mendukung pengelolaan sampah belum ada.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Kemitraan antar lembaga belum kuat sehingga perlu lebih banyak keterlibatan dari berbagai	Hubungan kemitraan yang terjalin secara optimal dengan berbagai pihak untuk	Jalanan kemitraan antar lembaga dalam mendukung pengembangan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		pihak.	mendukung program <i>zero waste to landfill</i> .	n dan peningkatan pengelolaan persampahan belum optimal.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil inovasi perihal pengelolaan sampah di daerah masih minim.	Terselenggaranya transfer teknologi dalam rangka kemudahan pengelolaan sampah yang tepat guna.	Minimnya difusi hasil inovasi dalam rangka kemudahan pengelolaan sampah yang tepat guna.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset kepada publik masih minim sehingga perlu ditingkatkan.	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi pengelolaan sampah yang ramah lingkungan telah dilakukan secara rutin.	Minimnya diseminasi dan sosialisasi hasil riset secara rutin kepada publik.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan kolaboratif	Promosi dan kampanye pengelolaan sampah telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	Rendahnya promosi dan kampanye pengelolaan sampah secara berkelanjutan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri.		
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR) <i>Award</i> .	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka kepedulian terhadap lingkungan hidup sehingga mendorong kreativitas para inovator.	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap pengelolaan sampah.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka pengelolaan sampah telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui program-program pemeliharaan lingkungan.	Ketersediaan mekanisme dukungan bagi perusahaan pemula berbasis riset masih belum ditemukan.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Inventarisasi terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal melalui Keputusan Wali	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi	Pengembangan dan perlindungan teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		Kota Banjar Nomor 266 Tahun 2024.	masyarakat atau kearifan lokal terkait lingkungan hidup telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program pemeliharaan lingkungan.	lingkungan hidup.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk pengelolaan sampah telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.	Perlibatan atau kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan riset dan inovasi belum diselenggarakan secara maksimal.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kondisi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal.	Klaster inovasi untuk pengelolaan sampah telah dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.	Minimnya perkembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah melalui penguatan jaringan kolaborasi.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna pengelolaan sampah menuju <i>zero waste to landfill</i> .	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya pengelolaan sampah menuju <i>zero waste to landfill</i> .	Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah belum optimal.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Penerapan standar global dalam pengelolaan sampah masih minim.	Pengelolaan sampah berdasarkan pada standar global yang terbaru.	Belum optimalnya pengelolaan sampah berdasarkan standar global.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam pengelolaan persampahan masih lemah.	Terjalannya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan menuju <i>zero waste to landfill</i> berikut dengan akses teknologi canggih dan pendanaan global.	Belum terjalin kolaborasi lembaga internasional untuk akses teknologi canggih dan pendanaan global.
VIII	Prioritas 7: Peningkatan Iklim Ramah Investasi di Kota Banjar			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan yang ada masih berupa pendeskripsian secara umum.	Kebijakan yang tersedia mampu mendukung penguatan iklim investasi daerah.	Belum ada kebijakan yang secara komprehensif mampu mendukung penguatan iklim investasi daerah.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Belum tersedianya basis data potensi investasi hasil kajian <i>feasibility study</i> .	Basis data seputar data investasi daerah yang komprehensif dan terintegrasi sebagai dasar dalam kajian riset.	Belum ada basis data komprehensif mengenai potensi investasi hasil kajian <i>feasibility study</i> .
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Perencanaan pengembangan infrastruktur masih terbatas, salah satunya seperti belum tersedianya lahan ruang untuk kawasan industri.	Perencanaan peningkatan infrastruktur dasar secara terukur dan tertata dalam rangka perbaikan dan pengembangan infrastruktur.	Terbatasnya perencanaan pengembangan infrastruktur secara terukur dan tertata.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi anggaran di tingkat daerah masih terbatas	Anggaran untuk perbaikan wilayah untuk	Terbatasnya alokasi anggaran untuk riset di

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		sehingga kegiatan inovasi berbasis riset pun menjadi terhambat.	meningkatkan iklim investasi daerah telah dialokasikan.	daerah.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum ada upaya pemanfaatan kekayaan intelektual dalam rangka peningkatan iklim ramah investasi daerah.	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk peningkatan kapasitas wilayah sehingga mampu menarik para investor untuk menanamkan modalnya.	Belum ada pemanfaatan kekayaan intelektual berkaitan dengan peningkatan kapasitas wilayah.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Upaya kolaborasi riset belum terwujud dalam membantu memecahkan permasalahan minimnya investor di daerah.	Terwujudnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan badan riset termasuk BRIN dan perguruan tinggi untuk menyusun strategi yang efektif dalam menjadikan daerah sebagai daya tarik investor.	Belum terwujudnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan badan riset.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Belum terdapat sarana pendukung riset dan inovasi di daerah.	Pembentukan jaringan inovasi yang mendukung peningkatan iklim ramah investasi.	Belum ada sarana pendukung yang tersedia dengan baik.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Kemitraan antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat masih minim sehingga perlu ditingkatkan.	Hubungan kemitraan yang terjalin secara optimal dengan berbagai pihak untuk melahirkan kebijakan yang efektif.	Jalinan kemitraan antar lembaga dalam melahirkan kebijakan yang efektif.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil inovasi perihal peningkatan iklim ramah investasi belum tersedia.	Transfer teknologi berkaitan dengan perbaikan kondisi daerah agar menjadi daya tarik investor telah terlaksana.	Belum tersedianya difusi hasil inovasi dalam rangka perbaikan kondisi daerah.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset kepada masyarakat dan pemberi modal belum tersedia.	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi untuk meningkatkan daya tarik daerah bagi	Minimnya diseminasi dan sosialisasi hasil riset secara rutin kepada publik.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			investor telah dilakukan secara rutin.	
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan perusahaan.	Promosi dan kampanye kenyamanan investasi telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	Rendahnya promosi dan kampanye kenyamanan investasi secara efektif dan berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Belum ada ajang apresiasi yang disediakan dalam rangka menyalurkan inovasi terkait penciptaan iklim ramah investasi.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka mendorong daya tarik investor.	Ajang apresiasi yang belum terselenggarakan.
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka perbaikan kondisi daerah telah tersedia dan mampu mendorong iklim ramah	Ketersediaan mekanisme dukungan bagi perusahaan pemula berbasis riset masih belum ditemukan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		dalam inovasi riset terhadap peningkatan investasi daerah.	investasi.	
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Belum terdapat langkah konkret untuk menginventarisir dan mengembangkan teknologi masyarakat yang dapat mendukung percepatan iklim investasi.	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait peningkatan iklim investasi telah dilakukan.	Inventarisasi dan pengembangan teknologi atau kearifan lokal belum dilakukan.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk peningkatan iklim ramah investasi telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.	Perlibatan atau kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan riset dan inovasi belum diselenggarakan secara maksimal.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kondisi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum	Klaster inovasi untuk pengembangan kapasitas daerah telah	Minimnya perkembangan klaster inovasi berbasis

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		berkembang secara maksimal.	dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.	produk unggulan daerah melalui penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna peningkatan iklim ramah investasi daerah.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya peningkatan iklim ramah investasi daerah.	Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah belum optimal.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Penerapan standar global dalam kondisi ramah investasi masih sangat minim.	Peningkatan iklim ramah investasi berdasarkan pada standar global serta jaminan keamanan di tingkat internasional.	Belum optimalnya peningkatan iklim ramah investasi berdasarkan standar global serta jaminan keamanan di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam	Terjalinnnya kolaborasi lembaga internasional	Belum terjalin kolaborasi lembaga

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		peningkatan iklim ramah investasi masih lemah.	dalam penciptaan daya tarik investor berikut dengan pendanaan global.	internasional untuk akses teknologi canggih dan pendanaan global.
IX	Prioritas 8: Peningkatan Kualitas Serta Aksesibilitas Pendidikan			
1	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan yang tersedia belum secara eksplisit memprioritaskan sumber daya yang signifikan untuk kegiatan riset dan inovasi berkaitan dengan kualitas dan aksesibilitas pendidikan.	Kebijakan yang secara spesifik mendorong riset dan inovasi, mencakup pengembangan model pembelajaran inovatif, pelatihan SDM pengajar, optimalisasi pendidikan non formal (PKBM), dan pemanfaatan teknologi.	Belum ada kebijakan yang secara rinci mengatur sumber daya yang signifikan untuk kegiatan riset dan inovasi.
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Belum ada basis data terpusat secara khusus yang mendokumentasikan hasil riset dan inovasi di bidang pendidikan.	Basis data berisikan hasil-hasil riset serta data sekunder sebagai bahan kebutuhan inovasi dalam mengatasi permasalahan	Basis data belum terintegrasi untuk mendokumentasikan hasil-hasil riset.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			pendidikan.	
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Ketersediaan infrastruktur riset di bidang pendidikan masih terbatas, fasilitas TIK belum memadai untuk mendukung kegiatan riset dan inovasi.	Infrastruktur mendasar dalam menunjang riset pendidikan telah tersedia seperti laboratorium, pusat pengembangan kurikulum, serta akses internet di setiap instansi pendidikan.	Terbatasnya infrastruktur dasar untuk menunjang riset pendidikan.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran yang disediakan pada praktiknya belum mampu mengatasi kekurangan yang ada pada sektor pendidikan.	Alokasi anggaran yang spesifik dan berkelanjutan untuk mendukung ekosistem riset dan inovasi daerah.	Ketersediaan anggaran belum mampu mendukung ekosistem riset dan inovasi terkait pendidikan.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual masih rendah, belum ada mekanisme yang kuat	Perlindungan kekayaan intelektual atas inovasi telah terfasilitasi dengan baik, mencakup model	Perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual belum terfasilitasi dengan baik dan masih

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		untuk mendorong perlindungan kekayaan intelektual di sektor pendidikan.	pembelajaran dan aplikasi penunjang kegiatan pendidikan.	lemah.
2	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Inovasi di daerah sudah ada melalui berbagai aplikasi penunjang pembelajaran yang inovatif, akan tetapi kolaborasi dengan lembaga riset masih minim.	Pembentukan kolaborasi riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset untuk menghasilkan suatu program inovatif yang lebih efektif bagi kemajuan pendidikan di daerah.	Kolaborasi dengan lembaga riset belum terbentuk dalam menghasilkan program inovatif dalam kemajuan pendidikan.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan sarana untuk menunjang kegiatan riset masih minim.	Sarana pendukung telah disediakan dengan baik termasuk pada pusat inovasi pendidikan.	Pusat inovasi pendidikan belum tersedia dengan baik.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Hubungan kemitraan yang terjalin antar	Terselenggaranya kerja sama antara	Jalinan kemitraan antar

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		kelembagaan, terutama dengan lembaga riset di daerah masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi.	lembaga riset daerah, OPD terkait, dan lembaga riset profesional lainnya untuk menghasilkan program inovatif.	lembaga dalam menghasilkan program pendidikan yang inovatif belum optimal.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil inovasi berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan telah tersedia, namun perlu ada upaya peningkatan dalam prosesnya.	Terselenggaranya transfer teknologi terkait peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan sehingga mampu menunjang pendidikan yang optimal.	Peningkatan upaya difusi hasil inovasi.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset kepada masyarakat dan tenaga pendidik masih perlu ditingkatkan.	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi peningkatan kualitas pendidikan telah dilakukan secara rutin sehingga mampu memberikan solusi dalam penciptaan	Peningkatan upaya diseminasi dan sosialisasi secara rutin kepada masyarakat dan tenaga pendidik.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			pendidikan berkualitas dan terjangkau.	
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan tenaga pendidik.	Promosi dan kampanye pendidikan telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	Rendahnya promosi dan kampanye pendidikan secara efektif dan berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR) Award.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka kemajuan kualitas pendidikan sehingga mendorong kreativitas para inovator.	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka perbaikan pendidikan	Ketersediaan mekanisme dukungan bagi perusahaan pemula

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap kualitas pendidikan yang lebih baik.	telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui program-program di bidang pendidikan.	berbasis riset masih belum ditemukan.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Inventarisasi terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal melalui Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 266 Tahun 2024.	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait pendidikan telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program pendidikan.	Pengembangan dan perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait pendidikan.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan tenaga pendidik masih minim sehingga belum mampu menghasilkan	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk kualitas dan aksesibilitas pendidikan telah diselenggarakan dengan	Perlibatan atau kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan riset dan inovasi belum diselenggarakan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	permasalahan daerah	riset yang lebih relevan dan strategis.	melibatkan berbagai pihak.	an secara maksimal.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kondisi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal.	Klaster inovasi untuk pengembangan kualitas pendidikan telah dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.	Minimnya perkembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah melalui penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan.	Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah belum optimal.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Penerapan standar internasional dalam peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan pada standar global serta jaminan efektivitas	Belum optimalnya pengembangan kualitas pendidikan berdasarkan standar global serta

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		masih belum optimal.	program pendidikan di tingkat internasional.	jaminan efektivitas program pendidikan di tingkat internasional.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam bidang pendidikan masih lemah.	Terjalannya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan pengembangan pendidikan berikut dengan akses teknologi canggih, transfer ilmu pengetahuan, dan pendanaan global.	Belum terjalin kolaborasi lembaga internasional untuk akses teknologi canggih dan pendanaan global.
X	Prioritas 9: Peningkatan Mutu Dan Persebaran serta Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Kota Banjar			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan belum mengakomodir upaya riset dan inovasi di sektor kesehatan.	Kebijakan riset dan inovasi yang mampu mendorong pengembangan teknologi kesehatan tepat guna, model pelayanan inovatif, dan aksesibilitas	Belum ada kebijakan yang mendorong riset dan inovasi pada bidang kesehatan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			pelayanan.	
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data terkait yang berhubungan dengan kesehatan telah tersedia secara terpusat pada satu server, namun untuk persebaran fasilitas kesehatan belum <i>up to date</i> .	Tersedianya basis data secara terpusat, komprehensif, dan <i>up to date</i> sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan riset dan inovasi.	Basis data yang tersedia belum <i>up to date</i> sehingga membutuhkan pembaharuan data.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Ketersediaan infrastruktur kesehatan masih terbatas, mencakup Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dan Rumah Sakit Khusus (RSK) serta pendirian gedung kesehatan yang sesuai standar.	Infrastruktur kesehatan dasar yang memenuhi standar dan penyediaan fasilitas kesehatan yang inklusif bagi seluruh golongan masyarakat.	Masih ada infrastruktur kesehatan yang belum sesuai dengan standar serta penyediaan fasilitas kesehatan yang terbatas.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran khusus riset dan inovasi di bidang kesehatan masih minim.	Alokasi anggaran secara efektif dan berkelanjutan demi mendukung	Anggaran belum dapat secara efektif dan berkelanjutan mendukung

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			inovasi di bidang kesehatan seperti pelayanan bergerak, peningkatan kapasitas tenaga medis, dan deteksi dini.	inovasi di bidang kesehatan.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Belum adanya pemanfaatan kekayaan intelektual di bidang kesehatan.	Kekayaan intelektual dapat dimanfaatkan dan dijamin perlingkungannya sebagai bagian dari inovasi daerah.	Pemanfaatan kekayaan intelektual belum ada dan tidak ada jaminan perlindungan.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kerja sama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi belum terkoordinasi dengan baik.	Kolaborasi riset yang terjalin bersama BRIN dan perguruan tinggi untuk membantu percepatan peningkatan mutu dan keterjangkauan fasilitas kesehatan.	Belum terkoordinasinya kolaborasi dengan badan riset untuk percepatan peningkatan mutu dan keterjangkauan fasilitas kesehatan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Terdapat laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) untuk kebutuhan pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat.	Keberadaan sarana pendukung yang mampu menunjang kebutuhan riset dan inovasi serta keterpaduan dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan di daerah.	-
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan, terutama dengan lembaga riset di daerah masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi.	Terselenggaranya kerja sama antara lembaga riset daerah, OPD terkait, dan lembaga riset profesional lainnya untuk menghasilkan program inovatif.	Jalinan kemitraan antar lembaga dalam menghasilkan program inovatif belum optimal.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil inovasi berkaitan dengan peningkatan mutu kesehatan belum optimal.	Terselenggaranya transfer teknologi terkait peningkatan kualitas serta keterjangkauan fasilitas kesehatan sehingga mampu	Minimnya difusi hasil inovasi dalam rangka peningkatan mutu kesehatan di daerah.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			memberikan pelayanan kesehatan yang mudah dan lengkap bagi masyarakat.	
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset kepada masyarakat dan tenaga medis masih perlu ditingkatkan.	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi peningkatan mutu kesehatan telah dilakukan secara rutin sehingga mampu memberikan solusi dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau.	Minimnya diseminasi dan sosialisasi hasil riset secara rutin kepada masyarakat dan tenaga medis sehingga belum mampu memberikan solusi atas permasalahan seputar pelayanan kesehatan.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang	Promosi dan kampanye kesehatan telah dilakukan secara efektif dan	Rendahnya promosi dan kampanye kesehatan secara berkelanjutan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan tenaga medis.	berkelanjutan.	
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR) <i>Award</i> .	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka peningkatan mutu kesehatan sehingga mendorong kreativitas para inovator.	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap kesehatan.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka peningkatan mutu kesehatan telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui program-program kesehatan.	Ketersediaan mekanisme dukungan bagi perusahaan pemula berbasis riset masih belum ditemukan.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi	Inventarisasi terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan	Pengembangan dan perlindungan teknologi masyarakat

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	masyarakat	melalui Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 266 Tahun 2024.	terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait kesehatan telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program perbaikan kualitas kesehatan yang lebih baik.	atau kearifan lokal terkait kesehatan.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan tenaga medis masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk peningkatan mutu dan keterjangkauan fasilitas kesehatan telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.	Perlibatan atau kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan riset dan inovasi belum diselenggarakan secara maksimal.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kondisi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum	Klaster inovasi untuk pengembangan mutu fasilitas kesehatan	Minimnya perkembangan klaster inovasi berbasis

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		berkembang secara maksimal.	telah dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.	produk unggulan daerah melalui penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna peningkatan kualitas dan keterjangkauan fasilitas kesehatan.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya peningkatan kualitas dan keterjangkauan fasilitas kesehatan.	Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah belum optimal.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Penerapan standar global dalam mutu kesehatan masih belum optimal.	Peningkatan mutu dan keterjangkauan fasilitas kesehatan berdasarkan pada standar global serta jaminan kualitas kesehatan di tingkat internasional.	Belum optimalnya peningkatan mutu dan keterjangkauan fasilitas kesehatan berdasarkan standar global serta jaminan kualitas yang unggul di tingkat internasional.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
B.	Penguatan kerja sama internasional	Kolaborasi dengan lembaga internasional dalam perbaikan mutu kesehatan daerah masih lemah.	Terjalannya kolaborasi lembaga internasional dalam percepatan perbaikan mutu kesehatan berikut dengan akses teknologi canggih, transfer ilmu pengetahuan, dan pendanaan global.	Belum terjalin kolaborasi lembaga internasional untuk akses teknologi canggih, transfer ilmu pengetahuan, dan pendanaan global.
XI	Prioritas 10: Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Yang Unggul dan Berdaya Saing			
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan daerah terkait pembangunan SDM belum terintegrasi dengan riset dan inovasi.	Kebijakan yang mendukung pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing termasuk pada upaya peningkatan partisipasi perempuan dan pemuda serta tata kelola kebudayaan daerah.	Kebijakan yang mendukung pembangunan SDM belum terintegrasi dengan riset dan inovasi.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang tersedia cakupannya masih terbatas sehingga kurang mendukung dalam pembuatan kebijakan berbasis data.	Tersedianya basis data secara terintegrasi guna mendukung upaya pengembangan SDM yang unggul dan berdaya saing.	Kapasitas basis data masih terbatas.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas kreatif di daerah masih terbatas.	Sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kreativitas perempuan dan pemuda telah tersedia sehingga memungkinkan mereka untuk menyalurkan bakatnya dengan bebas.	Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kreativitas.
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi anggaran masih minim dalam hal pengembangan SDM berbasis riset dan inovasi.	Ketersediaan anggaran untuk program-program peningkatan partisipasi perempuan dan pemuda serta tata	Minimnya ketersediaan anggaran untuk program-program berkaitan dengan pengembangan SDM yang

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			kelola kebudayaan dan dapat digunakan secara efektif.	berbasis riset dan inovasi.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pemanfaatan kekayaan intelektual dalam hal pengembangan SDM belum optimal.	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk percepatan pengembangan SDM yang optimal sehingga mampu meningkatkan daya saing.	Kekayaan intelektual dalam hal pengembangan SDM belum dimanfaatkan secara optimal.
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi bersama BRIN dan perguruan tinggi dalam pembangunan SDM masih terbatas.	Jalinan kolaborasi bersama lembaga riset telah terlaksana untuk program yang menyangkut peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.	Belum terlaksananya jaringan kolaborasi bersama lembaga riset secara optimal.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di	Penyediaan sarana pendukung	Pembentukan jaringan inovasi dalam	Sarana riset dan inovasi dalam rangka

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	belum optimal untuk kegiatan riset dan inovasi yang efektif.	rangka pembangunan SDM unggul dan berdaya saing melalui pertukaran ide dan praktik pendidikan serta pelatihan.	pembangunan SDM unggul belum tersedia dengan baik.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Hubungan kemitraan yang terjalin antar kelembagaan, terutama dengan lembaga riset di daerah masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi.	Terselenggaranya kerja sama antara lembaga riset daerah, OPD terkait, dan lembaga riset profesional lainnya untuk menghasilkan program inovatif.	Jalinan kemitraan antar lembaga dalam mendukung pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing belum optimal.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil inovasi berkaitan dengan pembangunan SDM masih minim.	Terselenggaranya transfer teknologi terkait pengembangan keterampilan dan kompetensi SDM sehingga meningkatkan efektivitas program pendidikan dan pelatihan.	Minimnya difusi hasil inovasi dalam terkait pengembangan keterampilan dan kompetensi SDM di daerah.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset kepada masyarakat terutama kelompok perempuan dan pemuda masih perlu ditingkatkan.	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai strategi peningkatan kualitas SDM telah dilakukan secara rutin sehingga mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.	Minimnya diseminasi dan sosialisasi hasil riset secara rutin kepada publik.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan penyebaran informasi masih rendah sehingga diperlukan kegiatan kampanye yang terarah dan kolaboratif antara pemerintah daerah, akademisi, dan industri.	Promosi dan kampanye peningkatan SDM telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	Rendahnya promosi dan kampanye SDM secara berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR)	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka peningkatan	-

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		<i>Award.</i>	kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing.	
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang berfokus pada peningkatan kualitas SDM masih minim.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka peningkatan kualitas SDM telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui program-program pendidikan dan pelatihan.	Ketersediaan mekanisme dukungan bagi perusahaan pemula berbasis riset masih belum ditemukan.
D.	Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Inventarisasi dan pengembangan teknologi masyarakat masih minim.	Inventarisasi dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait peningkatan kualitas SDM telah dilakukan dan menjadi rujukan untuk pengembangan program pendidikan.	Inventarisasi dan pengembangan teknologi atau kearifan lokal belum dilakukan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk pembentukan kualitas SDM telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.	Perlibatan atau kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan riset dan inovasi belum diselenggarakan secara maksimal.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kondisi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal.	Klaster inovasi untuk pengembangan kualitas SDM telah dibentuk berikut dengan penguatan jaringan kolaborasi.	Minimnya perkembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah melalui penguatan jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna peningkatan kualitas SDM.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya peningkatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya	Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah belum optimal.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			saing.	
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Pembangunan SDM belum sesuai dengan standar global.	Pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing mengikuti standar global yang ditetapkan telah dilakukan dan memastikan relevansi dan tingkat daya saing dunia kerja internasional.	Belum optimalnya pembangunan SDM yang unggul dan berdaya saing berdasarkan standar global.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Saat ini belum terdapat kerja sama internasional yang dilakukan dalam rangka pembangunan SDM.	Terselenggaranya kerja sama internasional dalam percepatan pembangunan SDM serta penguatan akses pengetahuan dan teknologi yang mendukung pengembangan kompetensi.	Belum terjalin kolaborasi lembaga internasional untuk akses teknologi canggih dan pengetahuan.
XII	Prioritas 11: Pengoptimalan Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Dalam Pelayanan Publik			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
1.	Kebijakan Infrastruktur Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Telah ada kebijakan yang diinisiasi yakni melalui Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Kebijakan yang mendukung peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik telah diterapkan, mencakup reformasi birokrasi.	-
B.	Penataan basis data riset dan inovasi	Terdapat beberapa layanan sistem informasi pelayanan publik seperti AKSI SRIKANDI, ASIK, BEBEONG, LANGGAR, PAK ONOM, PASINI, Pelanduk Kuda, dan sebagainya.	Basis data berkaitan dengan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik telah tersedia dan mampu meningkatkan perencanaan dan evaluasi tata kelola pemerintahan.	Optimalisasi dalam rangka peningkatan perencanaan dan evaluasi tata kelola pemerintahan.
C.	Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Sudah banyak layanan pemerintah daerah yang mengarah pada Sistem Pemerintahan Berbasis	Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik yang terukur dengan target	Peningkatan pemanfaatan teknologi berbasis riset masih harus dioptimalkan.

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		Elektronik (SPBE), akan tetapi masih diperlukan adanya upaya dalam mendorong pelayanan publik berbasis riset dan teknologi.	yang jelas.	
D	Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Ketersediaan anggaran pemanfaatan teknologi berbasis riset masih minim.	Alokasi anggaran khusus riset dan inovasi tersedia dan dapat tersalurkan secara tepat guna.	Minimnya alokasi anggaran untuk pemanfaatan teknologi berbasis riset.
E.	Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Data mengenai kekayaan intelektual telah dituangkan dalam Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 266 Tahun 2024 tentang Penetapan Inovasi Daerah Kota Banjar Tahun 2024, namun hanya memuat daftar nama-nama	Inventarisasi data mengenai kekayaan intelektual berupa inovasi disediakan secara komprehensif berikut dengan jaminan perlindungan yang optimal.	Inventarisasi data kekayaan intelektual belum tersajikan secara komprehensif .

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		inovasi yang tersedia.		
2.	Kapasitas Kelembagaan dan Daya Dukung Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kerja sama antara lembaga riset dan perguruan tinggi belum terkoordinasi dengan baik.	Kolaborasi riset yang terjalin bersama BRIN dan perguruan tinggi untuk membantu optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi agar dapat memberikan kemajuan dalam pelayanan publik.	Belum terkoordinasinya kolaborasi riset bersama BRIN dan perguruan tinggi untuk membantu optimalisasi penggunaan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik.
B.	Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan sarana untuk menunjang kegiatan riset masih terbatas.	Sarana pendukung telah disediakan dengan baik termasuk pada pengoperasian teknologi komunikasi dan pelatihan kemampuan SDM aparatur.	Penyediaan sarana untuk menunjang kegiatan riset belum optimal.
3.	Kemitraan Riset dan Inovasi			
A.	Penguatan kemitraan antar lembaga	Hubungan kemitraan yang terjalin antar	Terselenggaranya kerja sama antara	Jalinan kemitraan antar

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		kelembagaan, terutama dengan lembaga riset di daerah masih belum optimal sehingga perlu ditingkatkan lagi.	lembaga riset daerah, OPD terkait, dan lembaga riset profesional lainnya untuk menghasilkan program inovatif.	lembaga dalam pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik belum optimal.
B.	Peningkatan difusi inovasi	Difusi hasil inovasi berkaitan dengan pemanfaatan teknologi komunikasi yang optimal telah tersedia namun masih perlu ditingkatkan lagi.	Terselenggaranya transfer teknologi terkait pemanfaatan teknologi komunikasi sehingga dapat memfasilitasi semua aspek pelayanan publik.	Peningkatan difusi hasil inovasi dalam rangka pemanfaatan teknologi di daerah.
C.	Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Diseminasi hasil riset kepada masyarakat dan perangkat daerah masih perlu ditingkatkan.	Upaya diseminasi dan sosialisasi hasil riset mengenai pemanfaatan teknologi telah dilakukan secara rutin sehingga dapat dioperasikan oleh semua pihak yang berkepentingan.	Peningkatan diseminasi dan sosialisasi hasil riset secara rutin kepada publik.
4.	Budaya Riset dan Inovasi			

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
A.	Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan penyebaran informasi telah dilakukan, namun perlu ditingkatkan lagi.	Promosi dan kampanye pelayanan publik berbasis teknologi telah dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.	Rendahnya promosi dan kampanye pelayanan publik berbasis teknologi secara berkelanjutan.
B.	Apresiasi prestasi inovasi	Ajang apresiasi melalui Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR) Award.	Penyelenggaraan ajang apresiasi dalam rangka inovasi pelayanan publik sehingga mendorong kreativitas para inovator.	-
C.	Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Belum terdapat mekanisme dukungan yang signifikan dalam mendorong pengembangan perusahaan pemula yang tergabung dalam inovasi riset terhadap pelayanan publik berbasis teknologi.	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka optimalisasi teknologi komunikasi telah tersedia dan mampu mendukung pengembangan melalui program-program pelayanan publik.	Ketersediaan mekanisme dukungan bagi perusahaan pemula berbasis riset masih belum ditemukan.
D.	Inventarisasi,	Inventarisasi	Inventarisasi	Pengembang

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
	pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	terhadap teknologi masyarakat dan kearifan lokal melalui Keputusan Wali Kota Banjar Nomor 266 Tahun 2024.	dan pengembangan serta perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait inovasi pelayanan publik telah dilakukan.	n dan perlindungan terhadap teknologi masyarakat atau kearifan lokal terkait inovasi pelayanan publik.
5.	Keterpaduan Riset dan Inovasi di Daerah			
A.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset lainnya masih minim sehingga belum mampu menghasilkan riset yang lebih relevan dan strategis.	Prakarsa pengembangan riset dan inovasi untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi komunikasi telah diselenggarakan dengan melibatkan berbagai pihak.	Perlibatan atau kolaborasi dengan berbagai pihak untuk pengembangan riset dan inovasi belum diselenggarakan secara maksimal.
B.	Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Kondisi klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah belum berkembang secara maksimal.	Klaster inovasi untuk pemanfaatan teknologi komunikasi pada pelayanan publik telah dibentuk berikut dengan	Minimnya perkembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah melalui penguatan

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
			penguatan jaringan kolaborasi.	jaringan kolaborasi.
C.	Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Kepaduan antara kebijakan pusat dan daerah belum sesuai guna optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi.	Kebijakan pusat dan daerah memiliki tingkat koherensi yang sesuai dan sinkron dalam upaya optimalisasi pelayanan publik berbasis teknologi.	Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah belum optimal.
6.	Penyelarasan dengan Perkembangan Global			
A.	Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik telah menunjukkan adanya pengadopsian standar internasional, meskipun dalam praktiknya masih perlu optimalisasi lebih lanjut.	Pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik secara mutakhir sesuai dengan standar global.	Peningkatan adopsi pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik berdasarkan standar global.
B.	Penguatan kerja sama internasional	Kerja sama dengan lembaga internasional masih belum	Terjalinnya kerja sama internasional dalam	Kolaborasi dengan lembaga internasional

No.	Prioritas PUD/Permasalahan	Kondisi Saat Ini	Kondisi yang Diharapkan	Kesenjangan
		dimanfaatkan secara maksimal.	pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik dan memperoleh praktik terbaik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	belum maksimal untuk memperoleh praktik terbaik.



BAB V STRATEGI RISET DAN INOVASI DI DAERAH

5.1 Strategi Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah

Penguatan ekosistem riset dan inovasi menjadi fondasi utama dalam pengembangan produk unggulan daerah yang kompetitif dan berkelanjutan. Di Kota Banjar, pengembangan produk unggulan daerah ini dilakukan melalui kolaborasi aktif antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat yang masing-masingnya menjalankan peran sesuai kapasitas dan fungsinya. Kolaborasi terstruktur ini tidak hanya memacu inovasi yang sesuai dengan potensi lokal, tetapi juga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berorientasi jangka panjang. Berdasarkan hasil *focus group discussion*, Kota Banjar memfokuskan produk unggulannya pada rambutan Sibatulawang, pepaya kalifornia, dan belimbing madu. Berangkat dari produk unggulan tersebut, maka strategi daerah dan arah kebijakan yang sesuai dengan elemen ekosistem riset dan inovasi dapat dilihat melalui Tabel 5.1 berikut:

**Tabel 5. 1 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan
Produk Unggulan Daerah**

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1	Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi.	Mengoptimalkan pengembangan produk unggulan daerah melalui penguatan kebijakan riset dan inovasi, peningkatan kualitas data dan basis informasi, pengembangan infrastruktur riset dan teknologi, penyediaan anggaran yang memadai serta perlindungan kekayaan intelektual untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk unggulan daerah.	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat implementasi Kepwal No. 236 Tahun 2023 sebagai payung hukum pengembangan rambutan Sibatulawang, serta merumuskan kebijakan baru yang mendukung pengembangan produk seperti pepaya kalifornia dna belimbing madu; - Menyusun dan mengintegrasikan basis data yang komprehensif yang mencakup produksi, pelaku usaha, dan pemetaan kawasan untuk ketiga produk unggulan untuk mendukung investasi dan kewirausahaan; - Mendirikan pusat inovasi dan pengembangan budidaya khusus untuk rambutan Sibatulawang, pepaya kalifornia, dan belimbing madu yang dilengkapi fasilitas riset, teknologi, dna pelatihan petani serta pelaku usaha lokal; - Mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD untuk

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
			<p>riset dan inovasi pengembangan produk unggulan serta mendorong kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga penelitian;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan inventarisasi dan perlindungan hak kekayaan intelektual untuk varietas, teknologi budidaya, dan produk olahan guna menjaga keunikan dan daya saing produk unggulan.
2	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi.	Meningkatkan efektivitas pengembangan produk unggulan melalui penguatan kolaborasi riset dan inovasi dengan berbagai pemangku kepentingan serta saran pendukung yang memadai sesuai kemampuan daerah untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, dan daya saing produk unggulan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong terjalinnya kerjasama yang optimal antara pemerintah daerah Kota Banjar, perguruan tinggi, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan produk unggulan seperti rambutan Sibatulawang, pepaya kalifornia, dna belimbing madu; - Menyediakan dan mengoptimalkan sarana dan fasilitas riset serta inovasi yang sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah untuk mendukung budidaya dan

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
			<p>pengolahan produk unggulan;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memfasilitasi pelatihan, pendampingan, dan transfer teknologi kepada petani dan pelaku usaha agar memanfaatkan sarana riset dan inovasi; - Mengembangkan mekanisme koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan untuk memperkuat jaringan kolaborasi riset dan inovasi.
3	Kemitraan riset dan inovasi.	Memperkuat kemitraan antar kelembagaan serta meningkatkan difusi dan diseminasi inovasi untuk mempercepat adopsi teknologi dan praktek dalam pengembangan produk unggulan.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong terjalinnya kemitraan yang sinergis antara peneliti, perguruan tinggi, dan lembaga riset dengan petani, pelaku usaha, industri dalam pengembangan teknologi budidaya dan pengolahan produk unggulan seperti rambutan Sibatulawang, pepaya kalifornia, dna belimbing madu; - Mengembangkan dan mengimplementasikan model serta strategi teknologi yang jelas dan efektif untuk mempercepat difusi inovasi di kalangan pelaku usaha dan petani;

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi rutin mengenai praktek dan hasil riset kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan; - Mengintegrasikan kegiatan diseminasi hasil riset ke dalam program pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan.
4	Budaya riset dan inovasi.	Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk unggulan melalui penguatan promosi dan kampanye inovasi, pemberian apresiasi terhadap prestasi inovasi, pengembangan perusahaan pemula berbasis riset, serta inventarisasi dan perlindungan pengetahuan dan teknologi lokal sebagai sumber inovasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan intensitas dan jangkauan promosi serta kampanye pengembangan produk unggulan secara aktif dan meluas untuk memperkuat citra dan pasar produk seperti rambutan Sibatulawang, pepaya kalifornia, dan belimbing madu; - Menyelenggarakan program apresiasi berupa penghargaan dan lomba inovasi yang melibatkan petani dan pelaku usaha sebagai pengakuan atas prestasi inovasi; - Merancang dan mengimplementasikan skema dukungan bagi pengembangan

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
			perusahaan pemula berbasis riset.
5	Keterpaduan riset dan inovasi di daerah.	Mendorong prakarsa riset dan inovasi yang responsif terhadap kebutuhan dan permasalahan daerah, mengembangkan klaster inovasi berbasis produk unggulan, serta menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat untuk mendukung pengembangan produk unggulan	<ul style="list-style-type: none"> - Menginisiasi dan mengoptimalkan prakarsa riset dan inovasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di daerah guna mengatasi tantangan dan mengembangkan potensi rambutan Sibatulawang, pepaya kalifornia, dan belimbing madu secara terintegrasi; - Meningkatkan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pusat, khususnya dalam aspek regulasi, pendanaan, dan program pengembangan produk unggulan agar implementasi kebijakan berjalan efektif.
6	Penyelarasan dengan perkembangan global	Meningkatkan daya saing produk unggulan daerah di pasar global dengan meningkatkan kepedulian terhadap isu internasional dan penerapan standar internasional, serta memperkuat kerja sama internasional.	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong penerapan standar dan sertifikasi internasional pada produk olahan rambutan Sibatulawang, pepaya kalifornia, dan belimbing madu untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor dan

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
			<p>meningkatkan daya saing global;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menginisiasi dan memperluas kerja sama internasional dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan pelaku usaha di luar negeri untuk mempercepat transfer teknologi budidaya dan pengolahan produk unggulan; - Menyusun program pelatihan dan pendampingan bagi petani dan pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas dalam memenuhi standar internasional dan memanfaatkan peluang kerja sama global.

5.2 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah Melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah

Strategi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah menjadi kunci utama dalam mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan prioritas daerah yang dihadapi. Penyusunan strategi ini berangkat dari analisis mendalam terhadap kesenjangan prioritas daerah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun prioritas daerah Kota Banjar meliputi optimalisasi SDA dan pengembangan ekonomi kreatif (termasuk sektor olahraga, pariwisata, seni, budaya, dan UMKM), pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan konektivitas

wilayah, perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya air, pengelolaan sampah menuju *zero waste to landfill*, penguatan iklim investasi, peningkatan kualitas serta akses pendidikan dan kesehatan, penguatan sumber daya manusia, serta pengoptimalan digitalisasi pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang terarah untuk memperkuat, membangun, dan mengembangkan aspek-aspek yang masih menjadi kesenjangan dalam ekosistem riset dan inovasi di daerah. Melalui upaya penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah, diharapkan berbagai permasalahan prioritas daerah dapat diselesaikan secara bertahap dan terukur. Strategi daerah dan arah kebijakan disusun selaras dengan elemen ekosistem riset dan inovasi, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut:

Tabel 5. 2 Strategi Penyelesaian Permasalahan Prioritas Daerah

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
1	Kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dan menetapkan peraturan daerah mengenai riset dan inovasi yang terintegrasi dengan memprioritaskan pengembangan sektor-sektor strategis daerah; - Mengembangkan dan menyediakan <i>database</i> secara komprehensif yang mencakup hasil riset dalam sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah; - Meningkatkan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan peraturan daerah yang memperkuat integrasi riset dan inovasi daerah dengan memprioritaskan pengembangan sektor-sektor prioritas Kota Banjar, seperti sumber daya alam, ekonomi kreatif, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup, serta menguatkan peran Bappelitbangda Kota Banjar untuk memperkuat sinergi

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
		<p>infrastruktur yang efisien dan efektif;</p> <p>- Penyediaan laboratorium dan/atau pusat hak kekayaan intelektual di daerah.</p>	<p>pelaksanaan riset dan inovasi di Kota Banjar;</p> <p>- Mengelola <i>database</i> riset dan inovasi yang komprehensif, terpusat, dan mudah diakses serta terjamin keterpaduannya antara data hasil riset dengan data perencanaan pembangunan daerah;</p> <p>- Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur riset yang efisien dan efektif seperti fasilitas yang memadai di bidang pendidikan, kesehatan, meningkatkan kualitas dan kuantitas air;</p> <p>- Penyediaan fasilitas laboratorium dan pusat kekayaan intelektual yang memadai untuk mendukung perlindungan dan pemanfaatan hasil riset serta mendorong inovasi yang berdaya saing.</p>
2	Kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi.	<p>- Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga riset dan perguruan tinggi;</p>	<p>- Meningkatkan mekanisme koordinasi dan kolaborasi antara lembaga riset,</p>

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan keterlibatan perangkat daerah melalui pelatihan maupun pendampingan. 	<ul style="list-style-type: none"> - perguruan tinggi, dan pemerintah daerah Kota Banjar melalui diskusi yang rutin dalam mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi riset; - Mengembangkan program pelatihan, pendampingan, dan peningkatan perangkat daerah yang berfokus pada peningkatan kompetensi dalam pengelolaan riset dan inovasi, serta pemanfaatan hasil riset.
3	Kemitraan riset dan inovasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan memperkuat kerjasama riset dan inovasi dengan lembaga riset dan perguruan tinggi; - Memperkuat komunikasi publik terkait agenda riset dan inovasi prioritas daerah; - Diseminasi hasil riset dilakukan secara aktif melalui berbagai media. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan memperkuat kerjasama riset dan inovasi antar pemerintah daerah, lembaga riset, perguruan tinggi, pemberi modal, dan masyarakat melalui penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk membangun koordinasi dan kolaborasi yang efektif; - Mengelola dan mengembangkan sistem informasi beserta <i>database</i> riset yang mudah diakses untuk

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
			<p>mendukung difusi inovasi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan diseminasi hasil riset dan inovasi secara aktif melalui berbagai media dan forum inovasi yang dapat diakses oleh pelaku usaha, masyarakat, dan pemberi modal untuk meningkatkan pemanfaatan hasil riset.
4	Budaya riset dan inovasi.	<ul style="list-style-type: none"> - Memperluas promosi dan penyebaran informasi serta kampanye inovasi melalui platform digital; - Meningkatkan ajang apresiasi dan penghargaan hasil inovasi; - Membangun mekanisme dukungan untuk pengembangan perusahaan pemula inovatif; - Melakukan pendataan dan pengembangan teknologi dan kearifan lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun dan mengelola platform digital yang terintegrasi dan mudah diakses sebagai pusat data dan referensi inovasi daerah; - Menyelenggarakan kompetisi dan penghargaan inovasi secara berkala seperti Kompetisi Inovasi Kota Banjar (KIBAR) <i>Award</i> untuk memberikan pengakuan dan motivasi kepada inovator lokal; - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan riset daerah melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
			<p>infrastruktur riset yang juga mendukung pengembangan perusahaan pemula inovatif melalui fasilitas akses pendanaan, inkubasi, dan kemitraan dengan lembaga riset dan perguruan tinggi;</p> <p>- Melaksanakan inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal secara sistematis sebagai bagian dari kebijakan inovasi daerah.</p>
5	Keterpaduan riset dan inovasi di daerah.	<p>- Membangun dan memperkuat kolaborasi sinergis antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan industri untuk menciptakan ekosistem inovasi yang produktif;</p> <p>- Menganalisis, memetakan, menginisiasi, dan mengembangkan klaster riset dan inovasi yang berfokus pada produk unggulan daerah (PUD);</p> <p>- Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi</p>	<p>- Mendorong sinergi yang erat antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, dan pemangku kepentingan lain untuk membangun ekosistem inovasi yang produktif dan berkelanjutan;</p> <p>- Melakukan analisis, pemetaan, inisiasi, dan pengembangan klaster riset dan inovasi yang fokus pada produk unggulan daerah sebagai pusat pertumbuhan inovasi dan ekonomi lokal;</p>

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
		kebijakan pusat dan daerah.	- Meningkatkan koordinasi dan keselarasan kebijakan pusat dan daerah untuk mendukung optimalisasi pengembangan sumber daya alam, ekonomi kreatif, infrastruktur, konektivitas, lingkungan hidup, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik berbasis teknologi.
6	Penyelarasan dengan perkembangan global.	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan sistem standardisasi dan penerapan standar global; - Menginisiasi dan memperluas kerjasama dengan lembaga internasional. 	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong pengembangan sistem standardisasi nasional yang mengacu pada standar internasional sebagai platform inovasi dan daya saing daerah; - Menginisiasi dan memperluas kemitraan strategis dengan lembaga standarisasi internasional, organisasi perdagangan, dan badan sertifikasi global untuk transfer teknologi, pengakuan standar, peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

No	Elemen	Strategi Daerah	Arah Kebijakan
			serta penguatan lembaga riset daerah.

BAB VI

PETA JALAN KAJIAN KEBIJAKAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Bab ini berisi tentang langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan dalam pengembangan produk-produk unggulan dan permasalahan-permasalahan pokok daerah selama lima tahun.

Tabel 6. 1 Sub Elemen Ekosistem RID

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Produk unggulan ke-1: Rambutan Sibatulawang						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan yang mendukung pengembangan Rambutan Sibatulawang	Tersusunnya kajian dan rekomendasi kebijakan yang mendukung	Terbitnya peraturan daerah atau peraturan	Terlaksananya implementasi kebijakan	Terlaksananya implementasi kebijakan	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kebijakan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	kepala daerah terkait pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang			
Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha omzet, dsb) dan data investor yang bergerak di bidang Rambutan	Tersusunnya desain sistem satu data penyediaan informasi pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Tersusunnya database terkait penyediaan data dan informasi pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terbentuknya website dan media sosial yang interaktif berdasarkan database penyediaan informasi pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksana dan termanfaatkannya sistem informasi terkait pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksana dan evaluasi sistem informasi terkait pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Sibatulawang					
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Pembentukan pusat inovasi pengembangan Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya pembentukan pusat inovasi pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya kajian rantai nilai ekonomi pusat inovasi pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Penguatan infrastruktur pusat inovasi pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Termanfaatkan pusat inovasi pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Termanfaatkan dan evaluasi terhadap pusat inovasi pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang
	Inkubator dan layanan tenant untuk pengembangan Rambutan Sibatulawang	Tersusunnya kajian mengenai jenis-jenis inkubator dan layanan tenant yang akan dikembangkan dari para inovator di daerah	Tersusunnya kajian studi kelayakan pembentukan inkubator dan layanan tenant untuk pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya pembentukan inkubator dan layanan tenant pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Termanfaatkan inkubator dan layanan tenant pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Termanfaatkan dan evaluasi terhadap inkubator layanan tenant pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang
	Infrastruktur dalam	Tersusunnya kajian	Proses pembentukan	Termanfaatkannya	Termanfaatkan	Termanfaatkan dan evaluasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	mendukung pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	identifikasi kebutuhan infrastruktur riset dan inovasi berupa laboratorium, balai penelitian dan workshop terhadap kebutuhan para inovator yang berasal dari kelompok masyarakat, badan usaha dan akademisi	atau pembangunan infrastruktur riset yang sesuai dengan kebutuhan para inovator daerah	infrastruktur riset dan inovasi yang sesuai kebutuhan para inovator daerah	infrastruktur riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan para inovator daerah	kinerja infrastruktur riset dan inovasi
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Skema/model dana anggaran khusus untuk	Tersusunnya kajian identifikasi potensi	Terlaksananya forum CSR atau anggaran khusus lainnya	Meningkatnya jumlah pendanaan dari CSR	Termanfaatkannya anggaran khusus untuk pengembangan	Termanfaatkannya anggaran khusus untuk evaluasi anggaran khusus untuk

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	riset dan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	anggaran khusus seperti CSR atau lainnya pada kegiatan pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	yang melibatkan pemda, perusahaan, kelompok masyarakat budidaya Rambutan Sibatulawang dan stakeholder lainnya terkait kegiatan pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	maupun anggaran khusus lainnya dari badan usaha yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan budidaya Rambutan Sibatulawang	budidaya Rambutan Sibatulawang	pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Inventaris data kekayaan intelektual pada pelaku usaha budidaya perkebunan Rambutan	Terlaksananya pelatihan SDM untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait pengelola Kekayaan	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan	Terlaksananya pendataan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh daerah	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat	Terlaksananya dan evaluasi pendataan dan inventarisasi mengenai potensi kekayaan intelektual daerah dan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Sibatulawang	Intelektual dalam memberikan fasilitasi pendaftaran HKI	Intelektual			yang sudah didaftarkan oleh masyarakat
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kerjasama yang dilakukan dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan perkebunan Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya kajian kebutuhan riset dan inovasi di seluruh sektor pembangunannya urusan konkuren daerah	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset seperti BRIN, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya yang menghubungkan kebutuhan riset dan inovasi dengan lembaga riset	Terlaksananya penyusunan draft nota kerjasama dengan lembaga riset seperti BRIN atau perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset seperti BRIN atau perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset seperti BRIN atau perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang			utan Sibatulawang
				Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset		
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Penyediaan demplot untuk uji coba dan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya	Tersusunnya kajian mengenai penyediaan demplot uji coba dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan	Tersusunnya kajian mengenai kebutuhan pembuatan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan	Terlaksananya kegiatan budidaya Rambutan Sibatulawang melalui demplot uji coba dan kegiatan penyusunan	Terlaksananya kegiatan budidaya Rambutan Sibatulawang melalui demplot uji coba dan kegiatan penyusunan website jaringan	Evaluasi kegiatan penyusunan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Rambutan Sibatulawang	Sibatulawang	Sibatulawang	website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Sibatulawang
		Peningkatan kapasitas SDM IPTEK dalam mengikuti bimtek dan seminar terkait penyediaan demplot uji coba	Peningkatan kapasitas SDM IPTEK dalam mengikuti bimtek dan seminar terkait pembuatan website jaringan inovasi			
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan kemitraan antar kelembagaan	Kemitraan riset dan inovasi antara stakeholder	Tersusunnya kajian identifikasi model	Tersusunnya kajian kemitraan yang menghubungkan	Terlaksananya forum kemitraan antara	Terlaksananya implementasi kemitraan riset dan inovasi	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kemitraan riset

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	penghasil dan pengguna inovasi di daerah dalam rangka pengembangan Rambutan Sibatulawang	kemitraan antara stakeholder penghasil inovasi seperti perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya dan pengguna inovasi seperti pemda, pelaku usaha, badan usaha dan komunitas lainnya dalam rangka pengembangan budidaya dan rantai nilai klaster industri	n riset dan inovasi dari apa yang dapat diberikan oleh lembaga riset terkait dengan kebutuhan riset dan inovasi yang dibutuhkan oleh pemda, pelaku usaha, badan usaha dan lainnya dalam rangka pengembangan dan rantai nilai klaster industri Rambutan Sibatulawang	pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	antara pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	dan inovasi antara pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Rambutan Sibatulawang				
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam rangka pengembangan Rambutan Sibatulawang	Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Peningkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait proses difusi dan transfer teknologi kepada pelaku bisnis dan masyarakat	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi terkait proses difusi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya implementasi kegiatan transfer teknologi kepada pelaku bisnis budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan transfer teknologi kepada pelaku bisnis budidaya Rambutan Sibatulawang
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset pengembangan Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya kajian identifikasi diseminasi dan praktik baik kemitraan riset dan inovasi	Terlaksananya kegiatan diseminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha budidaya Rambutan	Terlaksananya kegiatan diseminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha budidaya	Terlaksananya kegiatan diseminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha budidaya Rambutan	Evaluasi kegiatan diseminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha budidaya

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		kepada pelaku usaha yang menjadi model percontohan untuk pelaku usaha lainnya untuk pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Sibatulawang yang sedang mengembangkan usahanya	Rambutan Sibatulawang yang sedang mengembangkan usahanya	Sibatulawang yang sedang mengembangkan usahanya	Rambutan Sibatulawang yang sedang mengembangkan usahanya
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi dan kampanye yang tepat dalam pengembangan Rambutan Sibatulawang	Peningkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait penyediaan	Tersusunnya materi dan design mengenai promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka	Meningkatnya jumlah peserta dari kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		promosi dan kampanye yang tepat kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang
Apresiasi prestasi inovasi	Penyelenggaraan lomba inovasi dalam rangka pengembangan Rambutan Sibatulawang	Terlaksanannya kajian mengenai lomba dan pameran inovasi yang cocok berdasarkan praktik baik yang sudah ada dalam rangka pengembangan	Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi di tingkat sekolah dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi di tingkat sekolah dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan	Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi di tingkat sekolah dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan lomba dan pameran inovasi di tingkat sekolah dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		an budidaya Rambutan Sibatulawang		Sibatulawang		
			Terdapat fasilitas juara lomba inovasi untuk mengikuti lomba pada level provinsi dan nasional	Terdapat fasilitas juara lomba inovasi untuk mengikuti lomba pada level provinsi dan nasional	Terdapat fasilitas juara lomba inovasi untuk mengikuti lomba pada level provinsi dan nasional	
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset komoditas Rambutan Sibatulawang	Tersusunnya kajian identifikasi model dan inkubasi bisnis yang menarik dan mudah dipahami terkait budidaya dan pengolahan Rambutan	Peningkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait pengetahuan inkubasi bisnis terutama dalam rangka pengembangan budidaya dan	Terlaksananya kegiatan pelatihan teknis dan manajemen bisnis terkait inkubasi bisnis untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan	Terlaksananya kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		Sibatulawang yang menguntungkan bagi pengusaha	pengolahan Rambutan Sibatulawang	yang berbasis riset terkait budidaya dan pengolahan Rambutan Sibatulawang	budidaya dan pengolahan Rambutan Sibatulawang	riset terkait budidaya dan pengolahan Rambutan Sibatulawang
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengembangan Rambutan Sibatulawang	Tersusunnya database terkait identifikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Tersusunnya kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya implementasi dari penggunaan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya implementasi dari penggunaan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya implementasi dan evaluasi dari penggunaan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang
Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH						

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Rambutan Sibatulawang	Tersusunnya kajian identifikasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggaraa n kegiatan riset iptek untuk pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggara n kegiatan riset iptek untuk pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggaraa n kegiatan riset iptek untuk pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya implementasi dan evaluasi peningkatan penyelenggara n kegiatan riset iptek untuk pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi berbasis Rambutan Sibatulawang	Tersusunnya kajian identifikasi model bisnis untuk pengembangan klaster inovasi industri Rambutan Sibatulawang	Terselenggaranya forum koordinasi antara pelaku usaha klaster industri Rambutan Sibatulawang dan sub-sub klaster lainnya yang saling berkaitan satu sama lain	Terlaksananya penumbuhan klaster industri sektor Rambutan Sibatulawang dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah	Terlaksananya penumbuhan klaster industri sektor Rambutan Sibatulawang dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah	Terlaksananya dan evaluasi penumbuhan klaster industri sektor Rambutan Sibatulawang dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kota Banjar dengan kebijakan pusat terkait pengembangan Rambutan Sibatulawang	Tersusunnya kajian harmonisasi kebijakan pengembangan Rambutan Sibatulawang antara Pemerintah Kota Banjar dengan kebijakan pusat	Terselenggaranya forum koordinasi antara Pemerintah Kota Banjar dan kementerian terkait untuk menyelaraskan kebijakan pengembangan Rambutan Sibatulawang	Implementasi kebijakan sinkronisasi di Kota Banjar dengan dukungan program pusat terkait pengembangan sektor Rambutan Sibatulawang	Optimalisasi kebijakan dan program pengembangan Rambutan Sibatulawang di Kota Banjar melalui sinergi dengan kementerian terkait	Evaluasi dan perbaikan kebijakan pengembangan Rambutan Sibatulawang di Kota Banjar untuk memastikan keberlanjutan dan keterpaduan dengan kebijakan pusat
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan	Standarisasi produk hasil olahan Rambutan Sibatulawang dalam rangka pengembangan olahan	Tersusunnya kajian identifikasi kemampuan pelaku usaha budidaya Rambutan Sibatulawang	Peningkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait standar produk	Terlaksananya kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait produk	Terlaksananya kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait produk	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
n ekosistem riset dan inovasi di daerah	Rambutan Sibatulawang	dan pengolahan Rambutan Sibatulawang dalam memenuhi standar yang dipersyaratkan perusahaan terkait	budidaya Rambutan Sibatulawang dan produk hasil pengolahan Rambutan Sibatulawang dalam memenuhi standar yang dipersyaratkan perusahaan terkait	Rambutan Sibatulawang dan olahannya kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan	Rambutan Sibatulawang dan olahannya kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan	produk Rambutan Sibatulawang dan olahannya kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan
	Kajian teknik pengembangan dan pengolahan Rambutan Sibatulawang yang ramah lingkungan	Tersusunnya kajian mengenai cara budidaya Rambutan Sibatulawang serta teknik pengolahan Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptek untuk kegiatan budidaya Rambutan Sibatulawang serta teknik	Terlaksananya pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptek untuk kegiatan budidaya Rambutan Sibatulawang	Terlaksananya pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptek untuk kegiatan budidaya Rambutan Sibatulawang serta teknik	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptek untuk kegiatan budidaya

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		yang ramah lingkungan	pengolahan Rambutan Sibatulawang yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat	serta teknik pengolahan Rambutan Sibatulawang yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat	pengolahan Rambutan Sibatulawang yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat	Rambutan Sibatulawang serta teknik pengolahan Rambutan Sibatulawang yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat
Penguatan kerja sama internasional	Kerjasama internasional yang harus dibuat dalam rangka pengembangan Rambutan Sibatulawang	Tersusunnya kajian identifikasi kerjasama internasional di bidang budidaya Rambutan Sibatulawang dan pengolahannya	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dengan lembaga riset internasional yang dapat mendukung pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang serta	Terlaksananya kesepakatan kerjasama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang serta pengolahannya	Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang serta	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan budidaya Rambutan Sibatulawang

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			pengolahannya		pengolahannya	serta pengolahannya
Produk unggulan ke-2: Pepaya Kalifornia						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan yang mendukung pengembangan Pepaya Kalifornia	Tersusunnya kajian dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terbitnya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksananya implementasi kebijakan	Terlaksananya implementasi kebijakan	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kebijakan
Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja,	Tersusunnya desain sistem satu data penyediaan informasi pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Tersusunnya database terkait penyediaan data dan informasi pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terbentuknya website dan media sosial yang interaktif berdasarkan database penyediaan informasi pengembangan	Terlaksana dan termanfaatkannya sistem informasi terkait pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksana dan evaluasi sistem informasi terkait pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	sektor usaha omzet, dsb) dan data investor yang bergerak di bidang Pepaya Kalifornia			n budidaya Pepaya Kalifornia		
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Pembentukan pusat inovasi pengembangan Pepaya Kalifornia	Terlaksananya a pembentukana pusat inovasi pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksananya kajian rantai nilai ekonomi pusat inovasi pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Penguatan infrastruktur pusat inovasi pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Termanfaatkan pusat inovasi pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Termanfaatkan dan evaluasi terhadap pusat inovasi pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia
	Inkubator dan layanan tenant untuk pengembangan Pepaya Kalifornia	Tersusunnya kajian mengenai jenis-jenis inkubator dan layanan tenant yang akan	Tersusunnya kajian studi kelayakan pembentukan inkubator dan layanan tenant untuk pengembangan	Terlaksananya pembentukan inkubator dan layanan tenant pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Termanfaatkan inkubator dan layanan tenant pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Termanfaatkan dan evaluasi terhadap inkubator layanan tenant pengembangan budidaya Pepaya

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		dikembangkan dari para inovator di daerah	budidaya Pepaya Kalifornia			Kalifornia
	Infrastruktur dalam mendukung pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Tersusunnya kajian identifikasi kebutuhan infrastruktur riset dan inovasi berupa laboratorium, balai penelitian dan workshop terhadap kebutuhan para inovator yang berasal dari kelompok masyarakat, badan usaha	Proses pembentukan atau pembangunan infrastruktur riset yang sesuai dengan kebutuhan para inovator daerah	Termanfaatkannya infrastruktur riset dan inovasi yang sesuai kebutuhan para inovator daerah	Termanfaatkan infrastruktur riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan para inovator daerah	Termanfaatkan dan evaluasi kinerja infrastruktur riset dan inovasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		dan akademisi				
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Skema/model dana anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Tersusunnya kajian identifikasi potensi anggaran khusus seperti CSR atau lainnya pada kegiatan pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksananya forum CSR atau anggaran khusus lainnya yang melibatkan pemda, perusahaan, kelompok masyarakat budidaya Pepaya Kalifornia dan stakeholder lainnya terkait kegiatan pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Meningkatnya jumlah pendanaan dari CSR maupun anggaran khusus lainnya dari badan usaha yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Termanfaatkan nya anggaran khusus untuk pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Termanfaatkan dan evaluasi anggaran khusus untuk pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia
Peningkatan perlindungan	Inventaris data	Terlaksananya pelatihan	Terlaksananya edukasi dan	Terlaksananya pendataan	Terlaksananya pendataan dan	Terlaksananya dan evaluasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
dan pemanfaatan kekayaan intelektual	kekayaan intelektual pada pelaku usaha budidaya perkebunan Pepaya Kalifornia	SDM untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait pengelola Kekayaan Intelektual dalam memberikan fasilitasi pendaftaran HKI	sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh daerah	inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat	pendataan dan inventarisasi mengenai potensi kekayaan intelektual daerah dan yang sudah didaftarkan oleh masyarakat
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kerjasama yang dilakukan dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka pengembangan perkebunan	Terlaksananya kajian kebutuhan riset dan inovasi di seluruh sektor pembanguan urusan konkuren	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset seperti BRIN, perguruan tinggi dan	Terlaksananya penyusunan draft nota kerjasama dengan lembaga riset seperti BRIN atau perguruan tinggi atau	Terlaksananya kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset seperti BRIN atau perguruan tinggi atau	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset seperti BRIN atau

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	Pepaya Kalifornia	daerah	lembaga riset lainnya yang menghubungkan kebutuhan riset dan inovasi dengan lembaga riset dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	lembaga riset lainnya dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	lembaga riset lainnya dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia
				Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset		
Penyediaan sarana pendukung	Penyediaan demplot untuk uji	Tersusunnya kajian mengenai	Tersusunnya kajian mengenai kebutuhan	Terlaksananya kegiatan budidaya	Terlaksananya kegiatan budidaya	Evaluasi kegiatan penyusunan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	coba dan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	penyediaan demplot uji coba dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	pembuatan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Pepaya Kalifornia melalui demplot uji coba dan kegiatan penyusunan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Pepaya Kalifornia melalui demplot uji coba dan kegiatan penyusunan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia
		Peningkatan kapasitas SDM IPTEK dalam mengikuti bimtek dan seminar terkait penyediaan demplot uji	Peningkatan kapasitas SDM IPTEK dalam mengikuti bimtek dan seminar terkait pembuatan website jaringan inovasi			

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		coba				
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan kemitraan antar kelembagaan	Kemitraan riset dan inovasi antara stakeholder penghasil dan pengguna inovasi di daerah dalam rangka pengembangan Pepaya Kalifornia	Tersusunnya kajian identifikasi model kemitraan antara stakeholder penghasil inovasi seperti perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya dan pengguna inovasi seperti pemda, pelaku usaha, badan usaha dan	Tersusunnya kajian kemitraan yang menghubungkan riset dan inovasi dari apa yang dapat diberikan oleh lembaga riset terkait dengan kebutuhan riset dan inovasi yang dibutuhkan oleh pemda, pelaku usaha, badan usaha dan lainnya dalam rangka pengembangan dan rantai nilai	Terlaksananya forum kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksananya implementasi kemitraan riset dan inovasi antara pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kemitraan riset dan inovasi antara pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		komunitas lainnya dalam rangka pengembangan budidaya dan rantai nilai klaster industri Pepaya Kalifornia	klaster industri Pepaya Kalifornia			
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam rangka pengembangan Pepaya Kalifornia	Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Peningkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait proses difusi dan transfer teknologi kepada pelaku bisnis dan masyarakat	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi terkait proses difusi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksananya implementasi kegiatan transfer teknologi kepada pelaku bisnis budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan transfer teknologi kepada pelaku bisnis budidaya Pepaya Kalifornia
Peningkatan	Sosialisasi	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	Evaluasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	praktik baik dan diseminasi hasil riset pengembangan Pepaya Kalifornia	a kajian identifikasi desiminasi dan praktik baik kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha yang menjadi model percontohan untuk pelaku usaha lainnya untuk pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	kegiatan diseminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha budidaya Pepaya Kalifornia yang sedang mengembangkan usahanya	kegiatan diseminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha budidaya Pepaya Kalifornia yang sedang mengembangkan usahanya	kegiatan diseminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha budidaya Pepaya Kalifornia yang sedang mengembangkan usahanya	kegiatan diseminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha budidaya Pepaya Kalifornia yang sedang mengembangkan usahanya
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan kampanye	Promosi dan kampanye	Peningkatan kapasitas	Tersusunnya materi dan	Terlaksananya kegiatan	Meningkatnya jumlah peserta	Terlaksananya dan evaluasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
inovasi	yang tepat dalam pengembangan Pepaya Kalifornia	SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait penyediaan promosi dan kampanye yang tepat kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	design mengenai promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	dari kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia
Apresiasi prestasi inovasi	Penyelenggaraan lomba inovasi dalam rangka pengembangan	Terlaksanannya kajian mengenai lomba dan pameran	Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi di tingkat sekolah	Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi di	Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi di tingkat sekolah	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan lomba dan pameran inovasi di

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	n Pepaya Kalifornia	inovasi yang cocok berdasarkan praktik baik yang sudah ada dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	tingkat sekolah dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	tingkat sekolah dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia
			Terdapat fasilitasi juara lomba inovasi untuk mengikuti lomba pada level provinsi dan nasional	Terdapat fasilitasi juara lomba inovasi untuk mengikuti lomba pada level provinsi dan nasional	Terdapat fasilitasi juara lomba inovasi untuk mengikuti lomba pada level provinsi dan nasional	
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersusunnya kajian identifikasi model dan inkubasi	Peningkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti	Terlaksananya kegiatan pelatihan teknis dan manajemen	Terlaksananya kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan pendampingan inkubasi bisnis

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	komoditas Pepaya Kalifornia	bisnis yang menarik dan mudah dipahami terkait budidaya dan pengolahan Pepaya Kalifornia yang menguntungkan bagi pengusaha	bimtek dan seminar terkait pengetahuan inkubasi bisnis terutama dalam rangka pengembangan budidaya dan pengolahan Pepaya Kalifornia	bisnis terkait inkubasi bisnis untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait budidaya dan pengolahan Pepaya Kalifornia	untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait budidaya dan pengolahan Pepaya Kalifornia	yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait budidaya dan pengolahan Pepaya Kalifornia
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengembangan Pepaya Kalifornia	Tersusunnya database terkait identifikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam	Tersusunnya kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan budidaya Pepaya	Terlaksananya implementasi dari penggunaan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan	Terlaksananya implementasi dari penggunaan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam	Terlaksananya implementasi dan evaluasi dari penggunaan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Kalifornia	dalam pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	digunakan dalam pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia
Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Pepaya Kalifornia	Tersusunnya kajian identifikasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggaraa n kegiatan riset iptek untuk pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggara n kegiatan riset iptek untuk pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggara n kegiatan riset iptek untuk pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksananya implementasi dan evaluasi peningkatan penyelenggara n kegiatan riset iptek untuk pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi	Tersusunnya kajian identifikasi model bisnis untuk	Terselenggaranya forum koordinasi antara pelaku usaha klaster	Terlaksananya penumbuhan klaster industri sektor Pepaya	Terlaksananya penumbuhan klaster industri sektor Pepaya Kalifornia dan	Terlaksananya dan evaluasi penumbuhan klaster industri sektor Pepaya

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
berbasis produk unggulan daerah	berbasis Pepaya Kalifornia	pengembangan klaster inovasi industri Pepaya Kalifornia	industri Pepaya Kalifornia dan sub-sub klaster lainnya yang saling berkaitan satu sama lain	Kalifornia dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah	berkontribusi terhadap ekonomi daerah	Kalifornia dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kota Banjar dengan kebijakan pusat terkait pengembangan Pepaya Kalifornia	Tersusunnya kajian harmonisasi kebijakan pengembangan Pepaya Kalifornia antara Pemerintah Kota Banjar dengan kebijakan pusat	Terselenggaranya forum koordinasi antara Pemerintah Kota Banjar dan kementerian terkait untuk menyelaraskan kebijakan pengembangan Pepaya Kalifornia	Implementasi kebijakan sinkronisasi di Kota Banjar dengan dukungan program pusat terkait pengembangan sektor Pepaya Kalifornia	Optimalisasi kebijakan dan program pengembangan Pepaya Kalifornia di Kota Banjar melalui sinergi dengan kementerian terkait	Evaluasi dan perbaikan kebijakan pengembangan Pepaya Kalifornia di Kota Banjar untuk memastikan keberlanjutan dan keterpaduan dengan kebijakan pusat
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian	Standarisasi produk hasil	Tersusunnya kajian	Peningkatan kapasitas SDM	Terlaksananya kegiatan	Terlaksananya kegiatan	Terlaksananya dan evaluasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	olahan Pepaya Kalifornia dalam rangka pengembangan olahan Pepaya Kalifornia	identifikasi kemampuan pelaku usaha budidaya Pepaya Kalifornia dan pengolahan Pepaya Kalifornia dalam memenuhi standar yang dipersyaratkan perusahaan terkait	IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait standar produk budidaya Pepaya Kalifornia dan produk hasil pengolahan Pepaya Kalifornia dalam memenuhi standar yang dipersyaratkan perusahaan terkait	pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait produk Pepaya Kalifornia dan olahannya kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan	pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait produk Pepaya Kalifornia dan olahannya kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan	kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait produk Pepaya Kalifornia dan olahannya kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan
	Kajian teknik pengembangan dan pengolahan Pepaya Kalifornia	Tersusunnya kajian mengenai cara budidaya Pepaya	Terlaksananya pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptek	Terlaksananya pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan	Terlaksananya pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptek	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	yang ramah lingkungan	Kalifornia serta teknik pengolahan Pepaya Kalifornia yang ramah lingkungan	untuk kegiatan budidaya Pepaya Kalifornia serta teknik pengolahan Pepaya Kalifornia yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat	Iptek untuk kegiatan budidaya Pepaya Kalifornia serta teknik pengolahan Pepaya Kalifornia yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat	untuk kegiatan budidaya Pepaya Kalifornia serta teknik pengolahan Pepaya Kalifornia yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat	terkait penerapan Iptek untuk kegiatan budidaya Pepaya Kalifornia serta teknik pengolahan Pepaya Kalifornia yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat
Penguatan kerja sama internasional	Kerjasama internasional yang harus dibuat dalam rangka pengembangan Pepaya Kalifornia	Tersusunnya kajian identifikasi kerjasama internasional di bidang budidaya Pepaya Kalifornia	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dengan lembaga riset internasional yang dapat mendukung	Terlaksananya kesepakatan kerjasama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan budidaya	Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		dan pengolahannya	pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia serta pengolahannya	Pepaya Kalifornia serta pengolahannya	pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia serta pengolahannya	dalam rangka pengembangan budidaya Pepaya Kalifornia serta pengolahannya
Produk unggulan ke-3: Belimbing Madu						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan yang mendukung pengembangan Belimbing Madu	Tersusunnya kajian dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengembangan budidaya Belimbing Madu	Terbitnya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait pengembangan budidaya Belimbing Madu	Terlaksananya implementasi kebijakan	Terlaksananya implementasi kebijakan	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kebijakan
Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data yang mendukung investasi dan bisnis, data	Tersusunnya desain sistem satu data penyediaan informasi	Tersusunnya database terkait penyediaan data dan informasi pengembangan	Terbentuknya website dan media sosial yang interaktif berdasarkan	Terlaksana dan termanfaatkannya sistem informasi terkait	Terlaksana dan evaluasi sistem informasi terkait

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	kewirausahaan (jumlah UMKM, tenaga kerja, sektor usaha omzet, dsb) dan data investor yang bergerak di bidang Belimbing Madu	pengembangan budidaya Belimbing Madu	budidaya Belimbing Madu	database penyediaan informasi pengembangan budidaya Belimbing Madu	pengembangan budidaya Belimbing Madu	pengembangan budidaya Belimbing Madu
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Pembentukan pusat inovasi pengembangan Belimbing Madu	Terlaksananya pembentukan pusat inovasi pengembangan budidaya Belimbing Madu	Terlaksananya kajian rantai nilai ekonomi pusat inovasi pengembangan budidaya Belimbing Madu	Penguatan infrastruktur pusat inovasi pengembangan budidaya Belimbing Madu	Termanfaatkan pusat inovasi pengembangan budidaya Belimbing Madu	Termanfaatkan dan evaluasi terhadap pusat inovasi pengembangan budidaya Belimbing Madu
	Inkubator dan layanan tenant untuk	Tersusunnya kajian mengenai	Tersusunnya kajian studi kelayakan	Terlaksananya pembentukan inkubator dan	Termanfaatkan inkubator dan layanan tenant	Termanfaatkan dan evaluasi terhadap

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pengembangan Belimbing Madu	jenis-jenis inkubator dan layanan tenant yang akan dikembangkan dari para inovator di daerah	pembentukan inkubator dan layanan tenant untuk pengembangan budidaya Belimbing Madu	layanan tenant pengembangan budidaya Belimbing Madu	pengembangan budidaya Belimbing Madu	inkubator layanan tenant pengembangan budidaya Belimbing Madu
	Infrastruktur dalam mendukung pengembangan budidaya Belimbing Madu	Tersusunnya kajian identifikasi kebutuhan infrastruktur riset dan inovasi berupa laboratorium, balai penelitian dan workshop terhadap kebutuhan para inovator	Proses pembentukan atau pembangunan infrastruktur riset yang sesuai dengan kebutuhan para inovator daerah	Termanfaatkannya infrastruktur riset dan inovasi yang sesuai kebutuhan para inovator daerah	Termanfaatkannya infrastruktur riset dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan para inovator daerah	Termanfaatkannya dan evaluasi kinerja infrastruktur riset dan inovasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		yang berasal dari kelompok masyarakat, badan usaha dan akademisi				
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Skema/model dana anggaran khusus untuk riset dan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	Tersusunnya kajian identifikasi potensi anggaran khusus seperti CSR atau lainnya pada kegiatan pengembangan budidaya Belimbing Madu	Terlaksananya forum CSR atau anggaran khusus lainnya yang melibatkan pemda, perusahaan, kelompok masyarakat budidaya Belimbing Madu dan stakeholder lainnya terkait kegiatan pengembangan budidaya Belimbing Madu	Meningkatnya jumlah pendanaan dari CSR maupun anggaran khusus lainnya dari badan usaha yang ikut berpartisipasi dalam mengembangkan budidaya Belimbing Madu	Termanfaatkan nya anggaran khusus untuk pengembangan budidaya Belimbing Madu	Termanfaatkan dan evaluasi anggaran khusus untuk pengembangan budidaya Belimbing Madu

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Inventaris data kekayaan intelektual pada pelaku usaha budidaya perkebunan Belimbing Madu	Terlaksananya pelatihan SDM untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait pengelola Kekayaan Intelektual dalam memberikan fasilitasi pendaftaran HKI	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya pendataan potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh daerah	Terlaksananya pendataan dan inventarisasi kekayaan intelektual yang telah didaftarkan oleh masyarakat	Terlaksananya dan evaluasi pendataan dan inventarisasi mengenai potensi kekayaan intelektual daerah dan yang sudah didaftarkan oleh masyarakat
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kerjasama yang dilakukan dengan BRIN, swasta atau perguruan tinggi dalam rangka	Terlaksananya kajian kebutuhan riset dan inovasi di seluruh sektor pembanguna	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga riset seperti BRIN,	Terlaksananya penyusunan draft nota kerjasama dengan lembaga riset seperti BRIN atau	Terlaksananya kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset seperti BRIN atau	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pengembangan perkebunan Belimbing Madu	n urusan konkuren daerah	perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya yang menghubungkan kebutuhan riset dan inovasi dengan lembaga riset dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	seperti BRIN atau perguruan tinggi atau lembaga riset lainnya dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu
				Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset dan inovasi bersama dengan lembaga riset		
Penyediaan sarana	Penyediaan demplot	Tersusunnya kajian	Tersusunnya kajian mengenai	Terlaksananya kegiatan	Terlaksananya kegiatan	Evaluasi kegiatan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	untuk uji coba dan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	mengenai penyediaan demplot uji coba dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	kebutuhan pembuatan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	budidaya Belimbing Madu melalui demplot uji coba dan kegiatan penyusunan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	budidaya Belimbing Madu melalui demplot uji coba dan kegiatan penyusunan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	penyusunan website jaringan inovasi dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu
		Peningkatan kapasitas SDM IPTEK dalam mengikuti bimtek dan seminar terkait penyediaan demplot uji	Peningkatan kapasitas SDM IPTEK dalam mengikuti bimtek dan seminar terkait pembuatan website jaringan inovasi			

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		coba				
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan kemitraan antar kelembagaan	Kemitraan riset dan inovasi antara stakeholder penghasil dan pengguna inovasi di daerah dalam rangka pengembangan Belimbing Madu	Tersusunnya kajian identifikasi model kemitraan antara stakeholder penghasil inovasi seperti perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya dan pengguna inovasi seperti pemda, pelaku usaha, badan usaha dan	Tersusunnya kajian kemitraan yang menghubungkan riset dan inovasi dari apa yang dapat diberikan oleh lembaga riset terkait dengan kebutuhan riset dan inovasi yang dibutuhkan oleh pemda, pelaku usaha, badan usaha dan lainnya dalam rangka pengembangan dan rantai nilai	Terlaksananya forum kemitraan antara pemerintah daerah, pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk pengembangan budidaya Belimbing Madu	Terlaksananya implementasi kemitraan riset dan inovasi antara pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk pengembangan budidaya Belimbing Madu	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kemitraan riset dan inovasi antara pelaku usaha, masyarakat, perguruan tinggi dan lembaga riset lainnya untuk pengembangan budidaya Belimbing Madu

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		komunitas lainnya dalam rangka pengembangan budidaya dan rantai nilai klaster industri Belimbing Madu	klaster industri Belimbing Madu			
Peningkatan difusi inovasi	Model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam rangka pengembangan Belimbing Madu	Tersusunnya kajian identifikasi model dan strategi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan budidaya Belimbing Madu	Peningkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait proses difusi dan transfer teknologi kepada pelaku bisnis dan masyarakat	Terlaksananya edukasi dan sosialisasi terkait proses difusi transfer teknologi bagi pelaku bisnis dalam pengembangan budidaya Belimbing Madu	Terlaksananya implementasi kegiatan transfer teknologi kepada pelaku bisnis budidaya Belimbing Madu	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan transfer teknologi kepada pelaku bisnis budidaya Belimbing Madu
Peningkatan	Sosialisasi	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	Terlaksananya	Evaluasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	praktik baik dan diseminasi hasil riset pengembangan Belimbing Madu	a kajian identifikasi desiminasi dan praktik baik kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha yang menjadi model percontohan untuk pelaku usaha lainnya untuk pengembangan budidaya Belimbing Madu	kegiatan diseminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha budidaya Belimbing Madu yang sedang mengembangkan usahanya	kegiatan diseminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha budidaya Belimbing Madu yang sedang mengembangkan usahanya	kegiatan diseminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha budidaya Belimbing Madu yang sedang mengembangkan usahanya	kegiatan diseminasi model bisnis kemitraan riset dan inovasi kepada pelaku usaha budidaya Belimbing Madu yang sedang mengembangkan usahanya
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan kampanye	Promosi dan kampanye	Peningkatan kapasitas	Tersusunnya materi dan	Terlaksananya kegiatan	Meningkatnya jumlah peserta	Terlaksananya dan evaluasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
inovasi	yang tepat dalam pengembangan Belimbing Madu	SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait penyediaan promosi dan kampanye yang tepat kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	design mengenai promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	dari kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	kegiatan sosialisasi, promosi dan kampanye kepada masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu
Apresiasi prestasi inovasi	Penyelenggaraan lomba inovasi dalam rangka pengembangan	Terlaksanannya kajian mengenai lomba dan pameran	Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi di tingkat sekolah	Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi di	Terlaksananya kegiatan lomba dan pameran inovasi di tingkat sekolah	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan lomba dan pameran inovasi di

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	n Belimbing Madu	inovasi yang cocok berdasarkan praktik baik yang sudah ada dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	tingkat sekolah dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu	tingkat sekolah dan kelompok masyarakat dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing Madu
			Terdapat fasilitasi juara lomba inovasi untuk mengikuti lomba pada level provinsi dan nasional	Terdapat fasilitasi juara lomba inovasi untuk mengikuti lomba pada level provinsi dan nasional	Terdapat fasilitasi juara lomba inovasi untuk mengikuti lomba pada level provinsi dan nasional	
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Skema pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Tersusunnya kajian identifikasi model dan inkubasi	Peningkatan kapasitas SDM IPTEK di daerah untuk mengikuti	Terlaksananya kegiatan pelatihan teknis dan manajemen	Terlaksananya kegiatan pendampingan inkubasi bisnis yang tepat	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan pendampingan inkubasi bisnis

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	komoditas Belimbing Madu	bisnis yang menarik dan mudah dipahami terkait budidaya dan pengolahan Belimbing Madu yang menguntungkan bagi pengusaha	bimtek dan seminar terkait pengetahuan inkubasi bisnis terutama dalam rangka pengembangan budidaya dan pengolahan Belimbing Madu	bisnis terkait inkubasi bisnis untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait budidaya dan pengolahan Belimbing Madu	untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait budidaya dan pengolahan Belimbing Madu	yang tepat untuk menumbuhkan pengusaha baru dalam membentuk perusahaan yang berbasis riset terkait budidaya dan pengolahan Belimbing Madu
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal terkait dengan pengembangan Belimbing Madu	Tersusunnya database terkait identifikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam	Tersusunnya kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam pengembangan budidaya Belimbing Madu	Terlaksananya implementasi dari penggunaan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan	Terlaksananya implementasi dari penggunaan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat digunakan dalam	Terlaksananya implementasi dan evaluasi dari penggunaan kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang dapat

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		pengembangan budidaya Belimbing Madu		dalam pengembangan budidaya Belimbing Madu	pengembangan budidaya Belimbing Madu	digunakan dalam pengembangan budidaya Belimbing Madu
Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Prakarsa riset dan inovasi dalam rangka pengembangan Belimbing Madu	Tersusunnya kajian identifikasi prakarsa riset dan inovasi yang tepat dalam pengembangan budidaya Belimbing Madu	Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggaraa n kegiatan riset iptek untuk pengembangan budidaya Belimbing Madu	Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggara an kegiatan riset iptek untuk pengembangan budidaya Belimbing Madu	Terlaksananya implementasi peningkatan penyelenggaraa n kegiatan riset iptek untuk pengembangan budidaya Belimbing Madu	Terlaksananya implementasi dan evaluasi peningkatan penyelenggara an kegiatan riset iptek untuk pengembangan budidaya Belimbing Madu
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi	Pengembangan dan pembentukan klaster inovasi	Tersusunnya kajian identifikasi model bisnis untuk	Terselenggaranya forum koordinasi antara pelaku usaha klaster	Terlaksananya penumbuhan klaster industri sektor Belimbing	Terlaksananya penumbuhan klaster industri sektor Belimbing	Terlaksananya dan evaluasi penumbuhan klaster industri sektor

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
berbasis produk unggulan daerah	berbasis Belimbing Madu	pengembangan klaster inovasi industri Belimbing Madu	industri Belimbing Madu dan sub-sub klaster lainnya yang saling berkaitan satu sama lain	Madu dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah	Madu dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah	Belimbing Madu dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Sinkronisasi kebijakan yang ada di Kota Banjar dengan kebijakan pusat terkait pengembangan Belimbing Madu	Tersusunnya kajian harmonisasi kebijakan pengembangan Belimbing Madu antara Pemerintah Kota Banjar dengan kebijakan pusat	Terselenggaranya forum koordinasi antara Pemerintah Kota Banjar dan kementerian terkait untuk menyelaraskan kebijakan pengembangan Belimbing Madu	Implementasi kebijakan sinkronisasi di Kota Banjar dengan dukungan program pusat terkait pengembangan sektor Belimbing Madu	Optimalisasi kebijakan dan program pengembangan Belimbing Madu di Kota Banjar melalui sinergi dengan kementerian terkait	Evaluasi dan perbaikan kebijakan pengembangan Belimbing Madu di Kota Banjar untuk memastikan keberlanjutan dan keterpaduan dengan kebijakan pusat
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian	Standarisasi produk hasil	Tersusunnya kajian	Peningkatan kapasitas SDM	Terlaksananya kegiatan	Terlaksananya kegiatan	Terlaksananya dan evaluasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	olahan Belimbing Madu dalam rangka pengembangan olahan Belimbing Madu	identifikasi kemampuan pelaku usaha budidaya Belimbing Madu dan pengolahan Belimbing Madu dalam memenuhi standar yang dipersyaratkan perusahaan terkait	IPTEK di daerah untuk mengikuti bimtek dan seminar terkait standar produk budidaya Belimbing Madu dan produk hasil pengolahan Belimbing Madu dalam memenuhi standar yang dipersyaratkan perusahaan terkait	pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait produk Belimbing Madu dan olahannya kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan	pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait produk Belimbing Madu dan olahannya kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan	kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi pemenuhan standar terkait produk Belimbing Madu dan olahannya kepada pelaku usaha dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan
	Kajian teknik pengembangan dan pengolahan Belimbing Madu yang ramah	Tersusunnya kajian mengenai cara budidaya Belimbing Madu serta	Terlaksananya pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptek untuk kegiatan	Terlaksananya pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptek untuk	Terlaksananya pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait penerapan Iptek untuk kegiatan	Terlaksananya dan evaluasi kegiatan pelatihan, edukasi dan sosialisasi terkait

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	lingkungan	teknik pengolahan Belimbing Madu yang ramah lingkungan	budidaya Belimbing Madu serta teknik pengolahan Belimbing Madu yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat	kegiatan budidaya Belimbing Madu serta teknik pengolahan Belimbing Madu yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat	budidaya Belimbing Madu serta teknik pengolahan Belimbing Madu yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat	penerapan Iptek untuk kegiatan budidaya Belimbing Madu serta teknik pengolahan Belimbing Madu yang ramah lingkungan kepada pelaku usaha dan masyarakat
Penguatan kerja sama internasional	Kerjasama internasional yang harus dibuat dalam rangka pengembangan Belimbing Madu	Tersusunnya kajian identifikasi kerjasama internasional di bidang budidaya Belimbing Madu dan pengolahann	Terlaksananya forum kerjasama dan kolaborasi riset dengan lembaga riset internasional yang dapat mendukung pengembangan	Terlaksananya kesepakatan kerjasama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan budidaya Belimbing	Terlaksananya implementasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka pengembangan	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kegiatan kerjasama riset bersama dengan lembaga riset internasional dalam rangka

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		ya	budidaya Belimbing Madu serta pengolahannya	Madu serta pengolahannya	budidaya Belimbing Madu serta pengolahannya	pengembangan budidaya Belimbing Madu serta pengolahannya
Prioritas 1: Optimalisasi pengembangan sumber daya alam, ekonomi kreatif pada sektor olahraga, pariwisata, seni, budaya, dan UMKM						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi	Penyusunan kebijakan insentif pajak bagi sektor-sektor ekonomi strategis dan UMKM untuk mendorong pertumbuhan	Pengembangan kebijakan pendukung investasi lokal dan asing dengan penyederhanaan prosedur perizinan	Implementasi kebijakan pengembangan infrastruktur yang menunjang aktivitas ekonomi dan distribusi barang/jasa	Penguatan kebijakan akses pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah untuk mendorong ekspansi bisnis	Evaluasi dan penyesuaian kebijakan berdasarkan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan pasar
Penataan basis data riset dan	Basis data pertumbuhan ekonomi	Penyusunan sistem pengumpul	Implementasi dan pemutakhiran	Analisis data pertumbuhan ekonomi	Pemanfaatan data sebagai dasar	Evaluasi efektivitas basis data dan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
inovasi	daerah	n data pertumbuhan ekonomi daerah yang terintegrasi dengan indikator-indikator ekonomi	rutin basis data pertumbuhan ekonomi daerah secara berkala	untuk memahami sektor-sektor yang berpotensi meningkatkan ekonomi daerah	penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan ekonomi daerah	peningkatan akurasi untuk mendukung perencanaan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Perencanaan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi	Penyusunan rencana strategis peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan analisis potensi dan kebutuhan lokal	Pelaksanaan program untuk mendorong sektor-sektor ekonomi unggulan, seperti UMKM, industri kreatif, dan pertanian modern	Pengembangan program peningkatan investasi lokal dan asing dengan memperkuat daya tarik ekonomi daerah	Penguatan infrastruktur pendukung ekonomi, seperti transportasi, digitalisasi, dan fasilitas perdagangan	Evaluasi hasil pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan penyesuaian strategi untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan
Penyediaan	Anggaran	Anggaran	Pengembangan	Pendanaan	Pengalokasian	Evaluasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
anggaran riset dan inovasi	khusus daerah untuk pertumbuhan ekonomi	khusus daerah untuk pertumbuhan ekonomi	program bantuan modal dan insentif fiskal bagi UMKM dan usaha lokal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi	program pelatihan dan pengembangan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja	anggaran untuk infrastruktur ekonomi, seperti pasar, akses jalan, dan digitalisasi layanan publik	penggunaan anggaran dan penyempurnaan skema pembiayaan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk percepatan pertumbuhan ekonomi	Tersusunnya kajian potensi kekayaan intelektual daerah yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi	Pelaksanaan sosialisasi dan pelatihan pengelolaan kekayaan intelektual bagi pelaku usaha dan masyarakat lokal	Pengembangan program komersialisasi kekayaan intelektual, seperti hak cipta, merek dagang, dan paten, untuk meningkatkan nilai ekonomi	Pembentukan ekosistem kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku usaha untuk memanfaatkan kekayaan intelektual	Evaluasi dampak pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap pertumbuhan ekonomi dan perencanaan pengembangan yang

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
					secara optimal	berkelanjutan
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan BRIN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	Tersusunnya peta kebutuhan riset dan inovasi daerah serta identifikasi pemangku kepentingan utama, seperti pemerintah, perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta	Pembentukan forum komunikasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan untuk mendukung kolaborasi riset dan inovasi	Pelaksanaan proyek riset bersama yang berfokus pada inovasi untuk sektor-sektor strategis di daerah, seperti agribisnis, pariwisata, atau industri kreatif	Pengembangan program pendanaan bersama untuk riset dan inovasi yang relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi daerah	Evaluasi hasil kolaborasi riset dan inovasi serta perumusan kebijakan untuk penguatan kolaborasi berkelanjutan yang berdampak pada pembangunan daerah
Penyediaan sarana	Jaringan inovasi untuk	Tersusunnya peta jaringan	Pembentukan platform	Implementasi program	Pengembangan akses	Evaluasi dampak

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	meningkatkan pertumbuhan ekonomi	inovasi yang melibatkan pelaku usaha, pemerintah, lembaga riset, dan perguruan tinggi di daerah	kolaborasi untuk memfasilitasi komunikasi dan berbagi informasi antar pemangku kepentingan dalam jaringan inovasi	inkubasi dan akselerasi bisnis berbasis inovasi yang mendukung sektor-sektor prioritas ekonomi daerah	permodalan, bimbingan teknis, dan pendampingan bisnis bagi wirausahawan dan UMKM dalam jaringan inovasi	jaringan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta perencanaan pengembangan jaringan yang lebih luas
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan kemitraan antar kelembagaan	Transfer teknologi yang terkait dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi	Tersusunnya kajian kebutuhan teknologi untuk sektor-sektor ekonomi strategis yang memiliki potensi besar dalam	Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga riset, perguruan tinggi, dan mitra industri untuk memperoleh teknologi yang relevan bagi daerah	Implementasi program transfer teknologi kepada pelaku usaha lokal, termasuk pelatihan penggunaan teknologi baru dan pendampingan	Pengembangan pusat teknologi dan inovasi di daerah untuk memfasilitasi adopsi teknologi oleh UMKM dan industri lokal	Evaluasi dampak transfer teknologi terhadap peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, serta penyesuaian program untuk

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		pertumbuhan ekonomi daerah		teknis		keberlanjutan transfer teknologi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset tentang peningkatan pertumbuhan ekonomi	Tersusunnya rencana sosialisasi dan diseminasi hasil riset yang relevan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah	Pelaksanaan seminar, lokakarya, dan diskusi publik untuk membagikan praktik baik dan hasil riset kepada pemangku kepentingan	Pengembangan materi publikasi, seperti laporan, infografis, dan video, yang menjelaskan hasil riset dan praktik baik secara jelas dan menarik	Implementasi program pelatihan bagi pelaku usaha dan masyarakat tentang cara menerapkan hasil riset dan praktik baik dalam kegiatan ekonomi	Evaluasi efektivitas sosialisasi dan diseminasi hasil riset dalam meningkatkan pemahaman dan penerapan praktik baik untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi kampanye pengembangan inovasi	Tersusunnya rencana kampanye promosi yang	Pelaksanaan kegiatan promosi, seperti pameran	Pengembangan platform online untuk berbagi	Implementasi program penghargaan bagi inovator	Evaluasi dampak kampanye promosi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	stakeholder dalam percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi	melibatkan semua pemangku kepentingan untuk pengembangan inovasi dalam pertumbuhan ekonomi	inovasi, seminar, dan diskusi panel yang menampilkan inovasi dari berbagai stakeholder	informasi, sumber daya, dan hasil inovasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi	dan pelaku usaha yang berhasil menerapkan inovasi yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi	terhadap kesadaran dan partisipasi stakeholder dalam pengembangan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi
Apresiasi prestasi inovasi	Penyelenggaraan lomba inovasi dalam rangka pengembangan pangan untuk percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi	Tersusunnya rencana lomba inovasi yang berfokus pada pengembangan pangan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan	Pelaksanaan sosialisasi lomba kepada masyarakat, pelaku usaha, dan institusi terkait untuk menarik partisipasi dalam lomba	Pelaksanaan lomba inovasi yang mengedepankan solusi kreatif dan teknologi dalam pengembangan produk pangan dan proses pertanian	Penjurian dan pengumuman pemenang lomba, serta penyediaan dukungan bagi ide-ide yang berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut	Evaluasi dampak lomba inovasi terhadap pengembangan sektor pangan dan kontribusinya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		n ekonomi				
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi	Tersusunnya rencana strategis untuk mendirikan perusahaan pemula berbasis riset yang berfokus pada inovasi untuk pertumbuhan ekonomi	Pengembangan program inkubasi yang menyediakan bimbingan, pelatihan, dan akses permodalan bagi perusahaan pemula	Pelaksanaan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset untuk mendorong kolaborasi dalam pengembangan produk dan teknologi baru	Implementasi strategi pemasaran dan distribusi untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan pemula guna menjangkau pasar yang lebih luas	Evaluasi dampak perusahaan pemula berbasis riset terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta perencanaan untuk pengembangan perusahaan yang berkelanjutan
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau	Inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan	Tersusunnya kajian awal tentang teknologi masyarakat dan kearifan	Pelaksanaan inventarisasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang relevan di	Kodefikasi teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang telah	Pengembangan program pelatihan untuk memperkenalkan dan mengadopsi	Evaluasi dampak pemanfaatan teknologi masyarakat dan kearifan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
teknologi masyarakat	lokal yang terkait dengan percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi	lokal yang berpotensi mendukung percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi	daerah, termasuk metode produksi, pengolahan, dan pemasaran	terinventarisasi untuk memudahkan akses dan pemanfaatan oleh pelaku usaha	teknologi serta kearifan lokal yang telah dikodefikasi dalam praktik ekonomi	lokal terhadap percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta penyesuaian program untuk keberlanjutan
Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Prakarsa riset dan inovasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Tersusunnya peta kebutuhan riset dan inovasi yang relevan dengan potensi pertumbuhan ekonomi di daerah	Pengembangan program kolaborasi antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan pelaku usaha untuk menciptakan solusi inovatif bagi tantangan ekonomi	Implementasi proyek riset yang berfokus pada pengembangan produk dan proses yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi lokal	Pelaksanaan pelatihan dan lokakarya untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam menerapkan hasil riset dan inovasi	Evaluasi dampak prakarsa riset dan inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perencanaan untuk pengembangan lebih lanjut yang berkelanjutan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Klaster inovasi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi	Tersusunnya kajian tentang potensi klaster inovasi yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah	Pembentukan jaringan kolaborasi antara pelaku usaha, pemerintah, dan lembaga pendidikan untuk mengembangkan klaster inovasi	Implementasi program inovasi dalam klaster yang berfokus pada pengembangan produk dan layanan baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Pengembangan program dukungan bagi usaha mikro dan kecil dalam klaster inovasi untuk meningkatkan daya saing dan akses pasar	Evaluasi dampak klaster inovasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan perencanaan pengembangan klaster yang lebih luas dan berkelanjutan
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Koherensi kebijakan yang ada di daerah dengan kebijakan pusat terkait peningkatan pertumbuhan ekonomi	Tersusunnya kajian awal untuk mengidentifikasi kebijakan yang ada di Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkaitan	Pelaksanaan forum koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membahas keselarasan kebijakan dan	Pengembangan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis kesesuaian antara kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah	Implementasi kebijakan yang telah disesuaikan untuk meningkatkan sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mencapai target	Evaluasi dampak dari kesesuaian kebijakan terhadap pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan perbaikan berkelanjutan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		dengan pembangunan ekonomi	tujuan pembangunan		pembangunan ekonomi	dalam kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Peningkatan pertumbuhan ekonomi mengikuti standar global	Tersusunnya kajian awal tentang standar global yang relevan dengan pertumbuhan ekonomi dan pengukuran kinerja ekonomi	Pelaksanaan pelatihan untuk pemerintah daerah dan pelaku usaha mengenai penerapan standar global dalam praktik ekonomi	Implementasi program yang mendorong adopsi standar global dalam sektor-sektor strategis, seperti industri, pertanian, dan pariwisata	Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi untuk menilai penerapan standar global dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi	Evaluasi dampak penerapan standar global terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perumusan kebijakan untuk keberlanjutan
Penguatan kerja sama	Kerjasama internasional	Tersusunnya kajian	Pengembangan rencana	Pelaksanaan program	Implementasi proyek	Evaluasi dampak

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
internasional	dalam percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi	tentang potensi kerjasama internasional yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah	strategis untuk menjalin kerjasama dengan negara negara atau organisasi internasional yang relevan	pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan mitra internasional dalam bidang ekonomi, investasi, dan inovasi	kolaboratif dengan mitra internasional yang berfokus pada sektor unggulan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi	kerjasama internasional terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi dan perencanaan untuk pengembangan kerjasama yang lebih luas dan berkelanjutan
Prioritas 2: Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan yang mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Tersusunnya kajian untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam	Pengembangan rencana kebijakan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pemerataan pembangunan	Implementasi program pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan vokasi bagi pegawai yang	Pelaksanaan program pengembangan kapasitas untuk pemerataan pembangunan infrastruktur	Evaluasi dampak kebijakan terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah	infrastruktur dasar	relevan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	dasar	penyesuaian program untuk keberlanjutan serta relevansi
Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data tentang infrastruktur dasar	Tersusunnya rencana pengembangan basis data yang mengidentifikasi indikator dan parameter untuk mengukur kualitas infrastruktur dasar di daerah	Pengumpulan data awal tentang infrastruktur dasar di daerah	Pengembangan sistem basis data yang terintegrasi untuk memfasilitasi akses dan analisis data kualitas infrastruktur dasar	Pelaksanaan pelatihan untuk pemangku kepentingan dalam penggunaan dan pemeliharaan basis data kualitas infrastruktur dasar	Evaluasi penggunaan basis data dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan serta penyesuaian sistem untuk meningkatkan efektivitas pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
Pengembangan	Perencanaan pemerataan	Tersusunnya kajian awal	Pengembangan rencana	Implementasi program	Pelaksanaan evaluasi dan	Revisi dan penyesuaian

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
infrastruktur dasar riset dan inovasi	pembangunan infrastruktur dasar	untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah	strategis yang mencakup program pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	monitoring terhadap program pemerataan pembangunan infrastruktur dasar untuk mengukur efektivitas dan dampaknya	rencana pemerataan pembangunan infrastruktur dasar berdasarkan hasil evaluasi untuk keberlanjutan dan relevansi program
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Anggaran khusus daerah untuk pemenuhan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Tersusunnya rencana anggaran khusus untuk program pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Alokasi anggaran untuk program yang berfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur dasar sesuai kebutuhan daerah	Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran dalam program pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pengembangan laporan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan	Evaluasi dampak alokasi anggaran terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan penyesuaian anggaran untuk program

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
						yang lebih efektif dan berkelanjutan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Inventaris pemanfaatan kekayaan intelektual bidang infrastruktur	Tersusunnya kajian tentang potensi pemanfaatan kekayaan intelektual dalam program pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah	Pengembangan program pelatihan dan pendidikan yang memanfaatkan kekayaan intelektual lokal untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Implementasi kolaborasi antara institusi pendidikan, lembaga riset, untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar berbasis kekayaan intelektual	Pelaksanaan seminar dan workshop untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kekayaan intelektual dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Evaluasi dampak pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan perumusan strategi untuk keberlanjutan program
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah	Kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan BRIN dalam	Tersusunnya rencana kolaborasi antara pemerintah	Pengembangan program riset bersama yang berfokus pada inovasi untuk	Implementasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang	Pelaksanaan pelatihan dan workshop berbasis hasil riset untuk	Evaluasi dampak kolaborasi riset terhadap pemerataan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
dengan pemangku kepentingan	rangka pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	daerah, perguruan tinggi, dan BRIN untuk mengidentifikasi kebutuhan riset yang mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	melibatkan mahasiswa dan peneliti dalam proyek yang relevan dengan kebutuhan lokal	pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah	pembangunan infrastruktur dasar dan penyusunan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Jaringan inovasi untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Tersusunnya kajian tentang potensi jaringan inovasi yang dapat mendorong kemajuan infrastruktur dasar di	Pembentukan jaringan kolaborasi antara lembaga riset, dan pemerintah untuk mendukung program pemerataan pembangunan	Implementasi program inovasi yang melibatkan semua anggota jaringan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman antara anggota jaringan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur	Evaluasi dampak jaringan inovasi terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan perencanaan untuk

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		daerah	infrastruktur dasar		dasar	pengembangan jaringan yang lebih luas dan berkelanjutan
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi yang terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Tersusunnya kajian tentang jenis teknologi yang relevan dan berpotensi menguatkan infrastruktur dasar di daerah	Pengembangan program transfer teknologi yang melibatkan pelatihan bagi pegawai dalam penerapan teknologi terbaru	Implementasi proyek demonstrasi untuk menunjukkan manfaat dan aplikasi teknologi dalam konteks pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pelaksanaan workshop dan seminar untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam memanfaatkan teknologi untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Evaluasi dampak transfer teknologi terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan penyesuaian program untuk keberlanjutan dan relevansi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset	Tersusunnya rencana sosialisasi yang mencakup	Pelaksanaan seminar dan lokakarya untuk membagikan	Pengembangan materi diseminasi yang mencakup	Implementasi kampanye media untuk meningkatkan kesadaran	Evaluasi dampak sosialisasi dan diseminasi terhadap

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
dan inovasi kepada pelaku inovasi	tentang pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	praktik baik dan hasil riset terkait pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah	praktik baik dan hasil riset kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha	panduan dan rekomendasi berbasis hasil riset untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	tentang praktik baik dan hasil riset yang mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	adopsi praktik baik dan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi kampanye pengembangan inovasi stakeholder dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Tersusunnya rencana kampanye promosi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan inovasi untuk pemerataan	Pelaksanaan kegiatan promosi untuk mengedukasi pemangku kepentingan tentang pentingnya inovasi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pengembangan materi kampanye yang mencakup studi kasus inovasi sukses dan best practices dalam pemerataan pembangunan infrastruktur	Implementasi program kolaboratif antara pemangku kepentingan untuk mendorong inovasi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Evaluasi dampak kampanye promosi terhadap keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan inovasi dan pemerataan pembangunan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		pembangunan infrastruktur dasar		dasar		infrastruktur dasar
Apresiasi prestasi inovasi	Penyelenggaraan lomba inovasi dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Tersusunnya rencana penyelenggaraan lomba inovasi yang berfokus pada ide dan solusi untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah	Pelaksanaan sosialisasi dan promosi lomba inovasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk mendorong partisipasi	Pelaksanaan lomba inovasi yang mengundang peserta untuk mengajukan proposal dan ide kreatif untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Evaluasi hasil lomba dan penilaian inovasi yang diusulkan, serta pemilihan pemenang untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan	Implementasi dan monitoring inovasi yang dihasilkan dari lomba serta evaluasi dampaknya terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka pemerataan pembangunan	Tersusunnya rencana untuk mendirikan perusahaan pemula	Pengembangan produk atau layanan yang inovatif dari perusahaan pemula yang	Implementasi program kolaborasi antara perusahaan pemula,	Pelaksanaan pemasaran dan sosialisasi produk atau layanan kepada pemangku	Evaluasi dampak perusahaan pemula terhadap pemerataan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	infrastruktur dasar	berbasis riset yang fokus pada pengembangan solusi untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	bertujuan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	perguruan tinggi, dan lembaga riset untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	kepentingan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	pembangunan infrastruktur dasar dan perencanaan untuk pengembangan lebih lanjut dalam inovasi dan riset
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan lokal yang terkait dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Tersusunnya rencana inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat serta kearifan lokal yang dapat digunakan untuk pemerataan pembangunan	Pelaksanaan pengumpulan data tentang teknologi masyarakat dan kearifan lokal yang relevan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pengembangan basis data yang terintegrasi untuk menyimpan dan mengelola informasi tentang teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat tentang pemanfaatan teknologi dan kearifan lokal dalam konteks pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Evaluasi dampak pemanfaatan teknologi masyarakat dan kearifan lokal terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur dasar serta penyusunan rekomendasi untuk

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		n infrastruktur dasar				pengembangan lebih lanjut
Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Prakarsa riset dan inovasi untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Tersusunnya rencana prakarsa riset yang berfokus pada identifikasi kebutuhan dan tantangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pengembangan program riset kolaboratif yang melibatkan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan inovasi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Implementasi proyek riset dan inovasi yang menghasilkan solusi konkret untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pelaksanaan seminar dan workshop untuk mempresentasikan hasil riset dan inovasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Evaluasi dampak prakarsa riset dan inovasi terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur dasar serta perumusan strategi untuk pengembangan berkelanjutan
Penyelenggaraan pengembangan klaster	Klaster inovasi untuk pemerataan pembangunan	Tersusunnya kajian tentang pembentukan	Pembentukan jaringan klaster inovasi yang melibatkan	Implementasi program-program inovatif dalam	Pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan	Evaluasi dampak klaster inovasi terhadap

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
inovasi berbasis produk unggulan daerah	infrastruktur dasar	n klaster inovasi yang fokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah	pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset untuk kolaborasi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	klaster yang berfokus pada pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	dan pengalaman antar anggota klaster untuk meningkatkan kapasitas dan inovasi dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	pemerataan pembangunan infrastruktur dasar serta perencanaan untuk pengembangan klaster yang lebih luas dan berkelanjutan
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Koherensi kebijakan yang ada di daerah dengan kebijakan pusat terkait pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Tersusunnya kajian untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat terkait pemerataan pembangunan infrastruktur	Pengembangan rencana aksi untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat, termasuk konsultasi dengan pemangku kepentingan	Implementasi kebijakan yang disesuaikan untuk pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dengan memperhatikan regulasi dan arahan dari pemerintah pusat	Pelaksanaan forum koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur	Evaluasi dampak koherensi kebijakan terhadap peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah dan perumusan rekomendasi untuk

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		dasar			dasar	pengembangan lebih lanjut
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar mengikuti standar global	Tersusunnya kajian awal tentang standar global yang relevan dengan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pelaksanaan pelatihan untuk pemerintah daerah dan pelaku usaha mengenai pemerataan pembangunan infrastruktur dasar mengikuti standar global	Implementasi program yang mendorong adopsi standar global dalam sektor penting seperti pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi untuk menilai penerapan standar global dan dampaknya terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Evaluasi dampak penerapan standar global terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan perumusan kebijakan untuk keberlanjutan
Penguatan kerja sama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka pemerataan pembangunan infrastruktur dasar	Tersusunnya kajian tentang potensi kerjasama internasional yang dapat mendukung	Pengembangan rencana strategis untuk menjalin kerjasama dengan negara negara atau organisasi	Pelaksanaan program pertukaran pengetahuan dan pengalaman dengan mitra internasional	Implementasi proyek kolaboratif dengan mitra internasional yang berfokus pada pemerataan	Evaluasi dampak kerjasama internasional terhadap pemerataan pembangunan infrastruktur

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar di daerah	internasional yang relevan	dalam bidang infrastruktur dasar	pembangunan infrastruktur dasar	dasar dan perencanaan untuk pengembangan kerjasama yang lebih luas dan berkelanjutan
Prioritas 3: Peningkatan konektivitas antar wilayah						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan yang mendukung peningkatan konektivitas wilayah berbasis riset dan inovasi	Penyusunan kajian kebutuhan riset untuk penguatan konektivitas wilayah	Penyusunan regulasi daerah untuk integrasi infrastruktur antar wilayah	Terlaksananya implementasi kebijakan	Terlaksananya implementasi kebijakan	Terlaksananya implementasi dan evaluasi kebijakan
Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data konektivitas wilayah (transportasi, logistik,	Tersusunnya sistem database wilayah dan jaringan	Tersedianya dashboard informasi konektivitas antar wilayah	Terintegrasinya sistem informasi ke dalam perencanaan	Pemanfaatan database untuk mendukung investasi dan pengembangan	Evaluasi dan pemutakhiran berkala sistem database

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	digitalisasi) yang mendukung pengambilan kebijakan	konektivitas		daerah	wilayah	
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Kebijakan dan Fasilitas riset terkait transportasi dan konektivitas	Pemetaan kebutuhan fasilitas riset dan lab pengembangan konektivitas	Pembangunan fasilitas dasar (pusat data transportasi, dll.)	Optimalisasi sarana dan prasarana riset konektivitas	Peningkatan kapasitas dan kolaborasi antar lembaga riset	Evaluasi efektivitas dan keberlanjutan infrastruktur riset
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Kebijakan dan Alokasi anggaran daerah untuk riset dan inovasi konektivitas wilayah	Penetapan porsi anggaran untuk konektivitas dalam RKPD	Penggunaan anggaran untuk riset awal dan pilot project	Pendanaan riset terapan dan dukungan DAK tematik	Peningkatan insentif riset berbasis kebutuhan wilayah	Evaluasi efektivitas anggaran dan dampaknya terhadap konektivitas
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan	Jumlah hak cipta atau paten terkait teknologi	Sosialisasi HKI dan fasilitasi pendaftaran	Terdaftar nya beberapa HKI terkait sistem digital	Pemanfaatan hasil riset yang telah dipatenkan	Komersialisasi hasil inovasi untuk logistik	Evaluasi kontribusi HKI dalam mendukung

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
kekayaan intelektual	transportasi, digitalisasi dan konektivitas lainnya	karya inovasi	transportasi dan logistik	dalam proyek konektivitas		konektivitas wilayah
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jumlah dan kualitas kemitraan riset daerah dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat	Pemetaan mitra potensial dan identifikasi kebutuhan riset bersama	Penandatanganan MoU/PKS kemitraan riset daerah	Implementasi program riset kolaboratif multistakeholder	Evaluasi hasil kolaborasi dan dampaknya terhadap konektivitas wilayah	Institutionalizing model kemitraan sukses/ yang berhasil ke dalam kebijakan daerah
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan	Ketersediaan laboratorium, inkubator, dan coworking space riset daerah	Identifikasi aset dan potensi ruang riset eksisting	Pengadaan/pere majaan sarana pendukung riset (skala prioritas)	Pengoperasian sarana dan pelibatan komunitas riset lokal	Optimalisasi pemanfaatan melalui mekanisme terbuka dan inklusif	Penilaian keberlanjutan dan pengembangan jangka panjang berbasis evaluasi kebutuhan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
daerah						
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah dan kualitas kerja sama antar lembaga riset (pemerintah, swasta, kampus/lembaga akademik)	Identifikasi potensi kolaborasi dan pertemuan koordinatif antar lembaga	Penandatanganan kerja sama formal	Implementasi program riset dan inovasi lintas lembaga	Monitoring dan evaluasi efektivitas kemitraan	Replikasi model kemitraan dan ekspansi jejaring antar wilayah/lembaga
Peningkatan difusi inovasi	Jumlah inovasi yang terdokumentasi dan dimanfaatkan lintas daerah	Pemetaan inovasi lokal yang potensial untuk direplikasi	Penyiapan platform atau kanal difusi inovasi	Pelatihan dan pendampingan replikasi inovasi	Evaluasi keberhasilan adaptasi inovasi antar wilayah	Pengembangan sistem berbasis digital untuk memperkuat difusi inovasi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada	Jumlah forum, media publikasi, dan pelaku yang terlibat dalam diseminasi	Kompilasi praktik baik dan hasil riset unggulan	Pembuatan bahan publikasi dan diseminasi awal (buku, jurnal, website)	Penyelenggaraan forum diseminasi tingkat daerah/nasional	Keterlibatan pelaku inovasi lokal dalam forum dan media diseminasi	Integrasi praktik baik ke dalam kebijakan inovasi dan edukasi publik

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
pelaku inovasi						
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan kampanye inovasi	Jumlah kegiatan promosi dan kampanye inovasi di berbagai media/platform	Identifikasi kanal/media promosi dan aktor utama	Penyusunan strategi kampanye dan penyebaran konten awal	Pelaksanaan kampanye massal di media lokal dan digital	Evaluasi dan peningkatan efektivitas pesan kampanye	Institutional branding inovasi daerah melalui media nasional/inter nasional
Apresiasi prestasi inovasi	Jumlah penghargaan atau insentif kepada inovator daerah	Penyusunan skema dan kriteria penghargaan	Pelaksanaan seleksi dan pemberian apresiasi tahap awal	Penguatan branding penerima penghargaan	Peningkatan jumlah kategori dan jangkauan peserta	Institusionalisasi skema apresiasi inovator secara reguler
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah startup berbasis riset yang terbentuk dan aktif	Identifikasi potensi riset komersial dan inkubasi awal	Penyediaan dukungan inkubasi dan akses pendanaan awal	Pendampingan bisnis dan jejaring investor	Peningkatan kapasitas dan skala bisnis startup	Fasilitasi ekspansi pasar dan kolaborasi strategis

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah kekayaan intelektual lokal yang diinventarisasi, dikembangkan, dan dilindungi	Pemetaan pengetahuan tradisional dan teknologi lokal	Penyusunan database dan pelatihan HKI	Fasilitasi pendaftaran paten/HAKI lokal	Pengembangan produk dari kekayaan lokal	Komersialisasi berbasis komunitas dan pelestarian budaya inovatif
Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah program riset yang sesuai dengan permasalahan/kebutuhan lokal	Identifikasi isu dan potensi riset daerah	Penyusunan peta jalan riset lokal	Implementasi proyek riset berbasis kebutuhan lokal	Evaluasi dan replikasi hasil riset	Penguatan kapasitas lembaga daerah untuk riset berbasis evidence
Penyelenggaraan	Jumlah klaster	Identifikasi produk	Penyusunan model klaster	Pelaksanaan inisiasi klaster	Integrasi dukungan	Ekspansi dan hilirisasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	inovasi yang terbentuk dan berfungsi	unggulan dan pelaku kunci	inovasi	berbasis riset	akademik, industri, dan pemerintah	produk unggulan daerah ke pasar nasional/ internasional
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Jumlah kebijakan daerah yang harmonis dengan arah kebijakan pusat	Inventarisasi kebijakan pusat terkait riset dan inovasi	Review dan harmonisasi kebijakan daerah	Penyusunan kebijakan daerah adaptif	Sinkronisasi program dan penganggaran lintas level	Monitoring dan penyesuaian berkelanjutan terhadap dinamika kebijakan pusat
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem	Tingkat integrasi isu global (seperti SDGs, climate change, transformasi digital, dsb) dalam perencanaan	Identifikasi isu global relevan bagi daerah	Sosialisasi isu global kepada aktor riset dan inovasi daerah	Integrasi isu global dalam peta jalan riset daerah	Implementasi program riset yang mendukung agenda global	Evaluasi kontribusi daerah terhadap agenda global melalui riset dan inovasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
riset dan inovasi di daerah	riset daerah					
Penguatan kerja sama internasional	Jumlah dan kualitas kemitraan internasional untuk riset dan inovasi	Pemetaan potensi mitra internasional	Inisiasi komunikasi dan jejaring internasional	Penandatanganan nota kesepahaman atau kerja sama riset	Pelaksanaan joint research atau program pertukaran	Institutionalization: pelibatan berkelanjutan dalam konsorsium atau forum riset global
Prioritas 4: Peningkatan kualitas lingkungan hidup						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Jumlah dan kualitas regulasi yang mendukung riset dan inovasi lingkungan hidup	Review dan identifikasi kebijakan lama	Penyusunan kebijakan baru berbasis evidence	Pengesahan kebijakan baru	Implementasi kebijakan riset dan inovasi daerah	Monitoring & evaluasi efektivitas kebijakan
Penataan basis data riset dan	Ketersediaan dan keterpaduan	Audit data eksisting	Penyusunan sistem basis data terintegrasi	Peluncuran platform data terbuka	Pemanfaatan data oleh berbagai aktor	Update berkala dan pengembangan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
inovasi	data riset-inovasi berbasis lingkungan hidup					fitur basis data
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Jumlah fasilitas dan sarana pendukung riset lingkungan hidup	Pemetaan kebutuhan fasilitas riset	Penyusunan rencana pembangunan/ pengadaan	Pembangunan /pengadaan infrastruktur awal	Optimalisasi dan pemeliharaan	Replikasi/ekspansi infrastruktur ke daerah lain
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Persentase anggaran daerah untuk riset lingkungan hidup	Advokasi dan alokasi awal anggaran	Integrasi ke dalam APBD	Penyaluran ke program-program strategis	Audit dan pelaporan keuangan inovasi	Optimalisasi dan peningkatan nilai manfaat anggaran
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah KI yang didaftarkan dan dimanfaatkan (paten, HKI,	Sosialisasi pentingnya KI	Fasilitasi pendaftaran KI	Peningkatan kapasitas SDM riset	Promosi dan komersialisasi KI	Evaluasi dampak ekonomi dan sosial dari KI

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	dsb)					
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jumlah kemitraan strategis dan program kolaboratif	Identifikasi aktor kunci dan potensi mitra	Penandatanganan MoU/Perjanjian kerja sama	Implementasi program kolaboratif awal	Penguatan jaringan dan konsorsium riset	Pelembagaan kemitraan dalam sistem di pemerintahan daerah
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan fasilitas sesuai potensi dan kebutuhan lokal	Pemetaan sarana yang tersedia dan dibutuhkan	Perencanaan pengadaan berbasis prioritas daerah	Pengadaan dan distribusi sarana dasar	Pemanfaatan optimal sarana yang ada	Perawatan dan peningkatan sarana secara berkelanjutan
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan kemitraan	Jumlah dan keberlanjutan	Pemetaan potensi mitra	Penyusunan peta jalan	Implementasi program lintas	Evaluasi dan penguatan	Pelembagaan model

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
antar kelembagaan	kerja sama kelembagaan	antar lembaga	kemitraan	lembaga	sinergi	kemitraan
Peningkatan difusi inovasi	Persentase hasil inovasi yang dimanfaatkan	Identifikasi hasil inovasi yang potensial	Penyusunan strategi difusi inovasi	Implementasi kegiatan difusi	Replikasi inovasi di sektor lain	Penguatan ekosistem difusi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Jumlah praktik baik yang terdokumenta si dan didesiminasikan	Inventarisasi praktik baik daerah	Penyusunan dokumen pembelajaran	Publikasi hasil riset dan inovasi	Peningkatan kapasitas pelaku inovasi	Pemanfaatan hasil diseminasi secara luas
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan kampanye inovasi	Jumlah kegiatan promosi dan tingkat keterlibatan masyarakat	Identifikasi media dan kanal promosi	Pelaksanaan kampanye inovasi di daerah prioritas	Replikasi kampanye di lintas sektor	Kolaborasi dengan media massa & komunitas	Pelembagaan program kampanye tahunan
Apresiasi prestasi	Jumlah individu/kelembagaan	Penyusunan mekanisme	Peluncuran program	Penyelenggaraan kompetisi	Integrasi dengan event	Peningkatan penghargaan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
inovasi	mpok yang mendapat penghargaan	apresiasi inovasi	penghargaan tingkat daerah	inovasi tahunan	nasional	berbasis kategori inovasi hijau
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah startup riset yang didampingi dan berhasil tumbuh	Pemetaan potensi riset berbasis bisnis	Pelaksanaan inkubasi tahap awal	Dukungan fasilitasi legal dan akses pasar	Skema pembiayaan lanjutan	Penciptaan jejaring startup lintas sektor
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah pengetahuan lokal yang terdokumentasi dan dilindungi	Identifikasi pengetahuan /teknologi lokal terkait lingkungan hidup	Dokumentasi & registrasi kekayaan intelektual lokal	Pengembangan model bisnis berbasis pengetahuan lokal	Fasilitasi perlindungan hukum (HKI, paten sederhana, dll)	Integrasi pengetahuan lokal ke kebijakan inovasi daerah

Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan	Jumlah inisiatif riset yang berbasis kebutuhan lokal dan lingkungan	Identifikasi isu lingkungan strategis daerah	Penyusunan agenda riset tematik berbasis permasalahan	Pelaksanaan riset kolaboratif berbasis isu daerah	Implementasi hasil riset dalam bentuk program/kebijakan	Evaluasi dan pemutakhiran agenda riset daerah
---	---	--	---	---	---	---

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
kebutuhan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah						
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Jumlah klaster inovasi berbasis produk unggulan dan keberfungsian ekosistemnya	Pemetaan potensi produk unggulan daerah berbasis kelestarian lingkungan	Penyusunan model klaster inovasi (karena produk unggulan nya merupakan hasil bumi maka bisa dilihat dalam konteks keterkaitan dengan green product/eco-innovation)	Pengembangan kelembagaan klaster dan kemitraan antar pelaku	Fasilitasi investasi dan teknologi untuk klaster inovasi	Replikasi dan penguatan jejaring klaster antar wilayah
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah	Tingkat harmonisasi kebijakan riset dan	Review kebijakan pusat dan daerah yang	Penyusunan roadmap sinkronisasi kebijakan	Pelaksanaan koordinasi dan harmonisasi lintas level	Implementasi kebijakan terpadu dan intervensi	Evaluasi efektivitas keselarasan kebijakan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
pusat dan pemerintah daerah	inovasi lingkungan hidup	relevan		pemerintahan	bersama	pusat-daerah
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Tingkat adopsi isu global (perubahan iklim, SDGs, green economy) dalam kebijakan dan kegiatan riset daerah	Sosialisasi isu global terkait lingkungan hidup kepada pemda dan lembaga riset	Integrasi isu internasional dalam perencanaan riset daerah	Implementasi proyek percontohan berbasis isu global (misal: carbon offset, circular economy)	Monitoring dampak dan efektivitas program berbasis isu global	Replikasi dan adaptasi model keberhasilan antar wilayah
Penguatan kerja sama internasional	Jumlah dan kualitas kerja sama riset dengan mitra internasional	Identifikasi peluang kemitraan dan sumber pendanaan global	Penjajakan kerja sama dengan lembaga internasional	Implementasi proyek kolaboratif lintas negara atau lembaga internasional	Penguatan jejaring riset global dan pengiriman SDM riset ke forum internasional	Kelembagaan kemitraan internasional daerah dan integrasi hasilnya dalam kebijakan lokal

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Prioritas 5: Peningkatan kualitas dan kuantitas air						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Tersusunnya regulasi dan kebijakan daerah yang mendukung riset air bersih dan konservasi air	Audit regulasi eksisting & identifikasi gap	Penyusunan kebijakan dan peraturan baru	Implementasi kebijakan baru secara bertahap	Evaluasi dan revisi berdasarkan umpan balik	Replikasi dan penyempurnaan kebijakan antar wilayah
Penataan basis data riset dan inovasi	Ketersediaan dan integrasi data riset air (sumber, kualitas, debit)	Pengumpulan data awal dan integrasi dengan Bappeda/BPS	Pengembangan sistem database riset air terintegrasi	Uji coba dan pelatihan penggunaan database	Pemanfaatan data untuk riset dan kebijakan	Peningkatan kapasitas data real-time dan pemetaan
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Jumlah laboratorium atau fasilitas riset air di daerah	Identifikasi kebutuhan dan pemetaan infrastruktur	Perencanaan pembangunan atau revitalisasi fasilitas	Pembangunan fasilitas riset dan laboratorium	Operasionalisasi dan peningkatan kualitas alat	Optimalisasi pemanfaatan fasilitas oleh akademisi dan swasta
Penyediaan anggaran	Persentase APBD untuk	Advokasi dan komitmen	Alokasi awal dan	Peningkatan dukungan	Diversifikasi sumber	Evaluasi efektivitas

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
riset dan inovasi	riset air dan teknologi konservasi	politik anggaran	penyesuaian regulasi fiskal daerah	dana melalui skema matching fund	pembiayaan (CSR, KPBU(kerjasama pemerintah dan badan usaha))	anggaran dan peningkatan keberlanjutan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah HKI bidang teknologi air (filterisasi, konservasi, dsb.)	Pelatihan dan sosialisasi HKI bagi peneliti lokal	Pendampingan pengajuan paten/HAKI	Peningkatan peran daerah sebagai fasilitator HAKI	Komersialisasi produk inovatif berbasis paten	Replikasi teknologi dan lisensi terbuka antar wilayah
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jumlah kerja sama antar pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, dan komunitas dalam riset air	Identifikasi dan pemetaan aktor kunci	Fasilitasi forum koordinasi riset air lintas sektor	Penandatanganan MoU/PKS kolaboratif	Implementasi proyek kolaboratif	Evaluasi dan penguatan kelembagaan kemitraan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan alat uji dan teknologi sederhana untuk riset konservasi air	Identifikasi sarana eksisting dan gap fasilitas	Pengadaan peralatan riset skala lokal sesuai anggaran	Pelatihan teknis pemanfaatan sarana	Integrasi sarana riset dalam ekosistem inovasi desa	Perawatan, peningkatan teknologi, dan ekspansi jangkauan sarana
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah kolaborasi riset air antara lembaga daerah, nasional, dan internasional	Pemetaan lembaga potensial mitra	Inisiasi jejaring dan kesepakatan awal	Pengembangan program riset bersama	Implementasi dan pemantauan riset kolaboratif	Replikasi model kemitraan ke daerah lain
Peningkatan difusi inovasi	Jumlah inovasi teknologi air bersih yang diduplikasi	Identifikasi inovasi potensial untuk replikasi	Penyusunan panduan adopsi inovasi	Fasilitasi uji coba inovasi di daerah baru	Pendampingan penerapan inovasi	Evaluasi dan penguatan sistem difusi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	oleh daerah lain					
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Jumlah publikasi, forum, dan workshop diseminasi inovasi	Dokumentasi best practice dan hasil riset	Penyusunan materi diseminasi	Pelaksanaan diseminasi (seminar/loka karya)	Kolaborasi publikasi antar daerah/pusat	Penguatan platform digital berbagi pengetahuan
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan kampanye inovasi	Jumlah kegiatan kampanye / program inovasi terkait teknologi air bersih dan konservasi air	Penyusunan strategi kampanye , program dan konten	Peluncuran kampanye/ program tingkat daerah	Kampanye nasional berbasis media digital	Kolaborasi kampanye / program antar daerah	Evaluasi dampak dan perluasan target audiens
Apresiasi prestasi inovasi	Jumlah penghargaan kepada inovator lokal	Penyusunan kriteria apresiasi	Penyelenggaraa n ajang penghargaan inovator air	Penguatan jejaring inovator dan alumni	Integrasi penghargaan dengan program pembinaan	Publikasi dan promosi tokoh inovator air

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	bidang air		tingkat daerah			
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah start-up air berbasis riset yang dikembangkan dan dibina	Identifikasi riset air potensial untuk komersialisasi	Pembentukan inkubator khusus sektor air	Pelatihan manajemen dan akses permodalan	Kemitraan start-up dengan investor dan BUMD	Evaluasi kinerja dan replikasi di antar wilayah
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah kekayaan intelektual (KI) lokal yang didaftarkan dan dimanfaatkan	Pemetaan teknologi lokal tradisional terkait pengelolaan air	Fasilitasi hak kekayaan intelektual (HKI)	Pengembangan teknologi lokal berbasis riset	Diseminasi pengetahuan lokal berbasis dokumentasi digital	Penguatan hak komunal dan skema insentif komunitas
Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan	Jumlah inisiatif riset yang berbasis permasalahan air spesifik di daerah	Identifikasi permasalahan air daerah (akses, kualitas, irigasi, dll)	Tersusun riset prioritas daerah	Pendanaan riset lokal melalui kolaborasi multi pihak	Monitoring hasil dan pemanfaatan riset	Tercapainya pengembangan model riset prioritas daerah lain

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah						
Penyelenggaraan pengembangan kluster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Jumlah kluster inovasi sektor air bersih, irigasi, atau sanitasi berbasis kearifan lokal	Pemetaan potensi unggulan lokal dan pelaku inovasi	Perancangan model pembinaan kluster inovasi	Terlaksana implementasi pembinaan kluster inovasi	Penguatan ekosistem dan pendampingan kluster	Tercapainya integrasi kluster dalam kebijakan pembangunan daerah
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Dokumen kebijakan pusat-daerah terkait riset dan inovasi air	Peninjauan kebijakan pusat terkait air dan RID	Tercapainya sinkronisasi RPJMD, Renstra, dan Renja daerah	Terlaksananya implementasi kebijakan	Pelaksanaan kebijakan kolaboratif (joint program)	Terlaksananya implementasi kebijakan dan dapat dilakukan evaluasi / penyesuaian regulasi berdasarkan hasil

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
						implementasi
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Dokumen pendukung Integrasi isu global seperti ketahanan air, sanitasi, dan perubahan iklim ke dalam riset dan inovasi daerah	Tersusunnya kajian dampak perubahan iklim terhadap debit air dan ketersediaan air bersih di Kota Banjar	Tercapainya FGD dengan stakeholder lokal (DLH, PDAM, perguruan tinggi, komunitas lingkungan) untuk penyelarasan program riset	Tercapainya pengembangan kebijakan model konservasi dan pengelolaan air berbasis masyarakat	Tercapainya Implementasi teknologi/ kebijakan penyaringan air sederhana dan adaptif terhadap iklim (misal: bio-sand filter)	Dapat melakukan Evaluasi dan pelaporan kontribusi Kota Banjar terhadap SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)
Penguatan kerja sama internasional	Jumlah Inisiasi dan pelaksanaan kerja sama dengan mitra luar negeri dalam isu air bersih dan pengelolaan	Identifikasi peluang kemitraan (dengan Water.org, ASEAN Smart Cities Network, dll)	Tercapainya Penjajakan dan penyusunan proposal kerja sama riset & pilot project di kawasan rawan air bersih	Tercapainya Pelaksanaan riset bersama dan lokakarya internasional di Kota Banjar	Tercapainya adaptasi inovasi air bersih berbasis pengalaman internasional (rainwater harvesting, teknologi filtrasi)	Kuatnya institusi lokal sebagai model kolaboratif pengelolaan air skala kecil di wilayah urban perdesaan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	sumber daya air				murah)	
Prioritas 6: Pengembangan dan peningkatan pengelolaan persampahan Kota Banjar menuju zero waste to landfill						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan pengelolaan sampah berbasis riset dan inovasi lokal	Peninjauan perda/kebijakan eksisting terkait sampah & identifikasi gap inovasi	Penyusunan roadmap riset dan inovasi persampahan menuju zero waste	Tercapainya revisi/penetapan kebijakan daerah berbasis hasil riset	Tercapainya implementasi kebijakan di area prioritas	Tercapainya evaluasi dan replikasi kebijakan di seluruh wilayah kota Banjar
Penataan basis data riset dan inovasi	Ketersediaan dan integrasi data persampahan, pemilahan, dan daur ulang	Inventarisasi data timbulan dan jenis sampah di Kota Banjar	Integrasi data dengan sistem informasi lingkungan daerah	Tercapainya pengembangan dashboard digital pemantauan pengelolaan sampah	Tercapainya interkoneksi data dengan komunitas & sektor informal	Tercapainya optimalisasi data untuk prediksi dan pengambilan kebijakan
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Fasilitas riset dan laboratorium sederhana untuk	Identifikasi dan pemetaan kebutuhan infrastruktur	Penataan dan peningkatan fasilitas eksisting (contoh: Bank	Tercapainya pengadaan alat riset pengomposan dan Refuse	Tercapainya pembangunan fasilitas uji coba (pilot lab)	Tercapainya pemanfaatan infrastruktur untuk pelatihan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pengelolaan dan daur ulang sampah	riset persampahan	Sampah Induk)	Derived Fuel (RDF) sederhana		masyarakat
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Alokasi APBD/CSR/hibah untuk riset dan inovasi persampahan	Penyusunan skema insentif riset bagi perangkat daerah dan mitra lokal	Pengajuan hibah riset ke pemerintah pusat/lembaga donor	Tercapainya realisasi anggaran untuk pilot project persampahan terpadu	Tercapainya pengembangan skema kolaboratif pendanaan	Tercapainya keberlanjutan pendanaan melalui kemitraan daerah
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	HKI atas teknologi lokal pengelolaan sampah (komposter, biodigester, dll.)	Inventarisasi inovasi lokal dan potensi HKI dari komunitas pengelola sampah	Pelatihan penyusunan paten sederhana dan HKI untuk pelaku inovasi	Tercapainya pengajuan minimal 1 paten/HAKI inovasi pengelolaan sampah	Tercapainya pemanfaatan HKI untuk inkubasi bisnis daur ulang	Tercapainya replikasi inovasi berbasis perlindungan HKI dan manfaat ekonomi
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah	Jumlah dan kualitas kolaborasi antara pemerintah	Identifikasi pemangku kepentingan kunci dalam pengelolaan	Penandatanganan MoU kolaboratif dengan perguruan	Tercapainya kolaborasi aktif dalam riset dan uji coba	Tercapainya forum inovasi persampahan daerah berbasis multipihak	Tercapainya sistem kolaboratif berkelanjutan untuk riset

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
dengan pemangku kepentingan	daerah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta	sampah	tinggi dan komunitas	pengolahan sampah (kompos, biogas, dll.)		dan inovasi berbasis kebutuhan daerah
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Ketersediaan alat dan fasilitas sederhana untuk riset dan pengembangan solusi pengelolaan sampah	Pemetaan kebutuhan sarana pendukung (contoh: alat uji kompos, timbangan digital, bio-reaktor mini)	Pengadaan sarana dasar melalui penganggaran APBD dan/atau CSR lokal	Tercapainya penyediaan sarana riset yang digunakan oleh sekolah/komunitas/UMKM	Tercapainya optimalisasi penggunaan sarana oleh kelompok inovator lokal	Tercapainya pemanfaatan sarana secara mandiri dan replikasi di berbagai wilayah di Kota Banjar
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah dan efektivitas kerja sama antar institusi (pemerintah, perguruan tinggi, swasta, dan	Identifikasi potensi mitra lokal	Perumusan skema kerja sama kelembagaan	Tercapainya kolaborasi riset antar institusi di bidang pengurangan dan pemanfaatan	Tercapainya pengembangan teknologi pengolahan bersama mitra	Tercapainya kelembagaan kolaboratif yang rutin melakukan inovasi dan evaluasi bersama

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	masyarakat) dalam pengelolaan sampah			sampah		
Peningkatan difusi inovasi	Jumlah inovasi pengelolaan sampah yang disebarluaskan ke masyarakat	Pemilihan inovasi yang relevan untuk lingkungan Kota Banjar	Uji coba terbatas inovasi (misal: eco-brick, pengomposan terpadu)	Tercapainya penerapan inovasi di kecamatan secara mandiri	Tercapainya replikasi inovasi oleh komunitas/ masyarakat lokal	Tercapainya adopsi inovasi berbasis lokal secara luas dan berkelanjutan
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Jumlah praktik baik yang terdokumentasi dan disebarluaskan	Dokumentasi praktik baik (video, modul, laporan)	Penyusunan platform diseminasi digital (website/YouTube/IG)	Tercapainya publikasi dan penyuluhan hasil riset kepada komunitas	Tercapainya kegiatan diseminasi rutin tahunan (pameran, workshop)	Tercapainya jejaring pelaku inovasi persampahan yang aktif
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan kampanye inovasi	Jumlah kegiatan promosi/kam	Sosialisasi konsep Zero Waste to	Kampanye inovasi berbasis media sosial &	Festival inovasi persampahan	Kolaborasi kampanye lintas sektor	Integrasi kampanye dalam

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	panye inovasi pengelolaan sampah	Landfill di sekolah & komunitas	lokal	tahunan	(sekolah, swasta, masyarakat)	kebijakan komunikasi lingkungan daerah
Apresiasi prestasi inovasi	Jumlah penghargaan/ pengakuan terhadap inovator lokal	Identifikasi inovator dan komunitas pelopor	Pemberian penghargaan kepada inovator lokal	Kompetisi inovasi pengelolaan sampah	Pengembangan inkubasi inovator pemula	Pengakuan formal terhadap inovasi sebagai bagian dari strategi kota
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah start-up/UKM berbasis riset persampahan	Pemetaan potensi wirausaha berbasis inovasi persampahan	Pelatihan dan mentoring kewirausahaan berbasis riset	Fasilitasi pembentukan start-up lokal (inkubasi)	Dukungan perizinan, pembiayaan dan kemitraan	Evaluasi & penguatan jejaring usaha inovatif berbasis riset
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah teknologi lokal terdokumenta si dan terlindungi	Identifikasi dan dokumentasi teknologi/pe ngetahuan masyarakat	Pendampingan pengembangan teknologi tepat guna	Penyusunan model perlindungan HKI komunitas	Proses registrasi dan sertifikasi HKI lokal	Pelestarian dan diseminasi pengetahuan lokal berbasis riset

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah riset dan inovasi yang berbasis kebutuhan lokal	Identifikasi isu strategis pengelolaan sampah	Pengumpulan data dan konsultasi publik	Pelaksanaan riset terapan skala awal	Kolaborasi dengan akademisi dan dunia usaha	Implementasi hasil riset ke kebijakan dan praktik daerah
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Terbentuknya klaster inovasi produk pengelolaan sampah	Pemetaan potensi produk dan pelaku usaha lokal	Pembentukan forum/kelompok kerja klaster inovasi	Fasilitasi teknologi dan SDM pada klaster inovasi	Pengembangan jaringan distribusi dan promosi produk	Evaluasi dampak ekonomi dan lingkungan klaster
Kesesuaian kebijakan	Tingkat sinkronisasi	Analisis regulasi	Rekomendasi harmonisasi	Sinkronisasi peraturan	Monitoring pelaksanaan	Penyesuaian dan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	kebijakan pengelolaan sampah	pusat dan daerah	kebijakan	daerah dengan nasional	kebijakan terpadu	pembaruan kebijakan berkelanjutan
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelatihan terkait isu global	Identifikasi isu global yang relevan dengan iklim investasi	Sosialisasi isu-isu ESG (environmental, social, governance) kepada pelaku usaha	Integrasi prinsip keberlanjutan dalam kebijakan investasi daerah	Penerapan indikator keberlanjutan dalam evaluasi iklim investasi	Evaluasi dan pelaporan dampak kebijakan investasi ramah lingkungan
Penguatan kerja sama internasional	Jumlah kerja sama internasional yang mendukung ekosistem	Pemetaan potensi mitra kerja sama luar negeri	Penjajakan MoU dengan lembaga riset/investasi asing	Implementasi program kolaboratif dengan mitra asing	Penguatan jejaring dan pertukaran pengetahuan global	Replikasi praktik terbaik dari mitra internasional di Kota Banjar

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	riset dan investasi					
Prioritas 7: Peningkatan iklim ramah investasi di Kota Banjar						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Jumlah kebijakan baru/revisi yang mendukung investasi berbasis inovasi	Review regulasi lama	Draft kebijakan baru	Pengesahan regulasi	Implementasi kebijakan	Evaluasi dan revisi kebijakan
Penataan basis data riset dan inovasi	Tersedianya sistem database yang terintegrasi	Identifikasi kebutuhan data	Desain sistem basis data	Pengembangan sistem	Pelatihan penggunaan	Operasionalisasi penuh
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Jumlah fasilitas riset dan inovasi yang dibangun/diperbaiki	Pemetaan kebutuhan infrastruktur	Perencanaan teknis	Pembangunan tahap 1	Pembangunan tahap 2	Operasional dan pemeliharaan
Penyediaan	Persentase	Perencanaan	Alokasi	Peningkatan	Pendanaan	Skema insentif

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
anggaran riset dan inovasi	anggaran daerah untuk R&D	anggaran awal	anggaran pilot project	alokasi anggaran	berkelanjutan	bagi sektor swasta
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah HKI terdaftar dan dimanfaatkan	Sosialisasi HKI	Pendampingan pendaftaran HKI	Pendaftaran HKI lokal	Pemanfaatan HKI untuk investasi	Penguatan regulasi dan insentif HKI
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jumlah MoU/kolaborasi strategis	Pemetaan aktor strategis	Workshop dan FGD kolaboratif	Penandatanganan MoU	Implementasi kolaborasi	Evaluasi dan penguatan jejaring
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang	Jumlah sarana baru/peningkatan kualitas sarana yang ada	Identifikasi sarana esensial	Pengadaan alat riset dasar	Revitalisasi fasilitas eksisting	Peningkatan kualitas dan kapasitas	Operasionalisasi dan monitoring

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
disesuaikan dengan kemampuan daerah						
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah kemitraan strategis aktif	Identifikasi dan penjajakan mitra	MoU dengan institusi riset dan swasta	Pilot project kolaboratif	Ekspansi mitra baru	Institusionalisasi kolaborasi
Peningkatan difusi inovasi	Jumlah inovasi yang diadopsi	Pemetaan inovasi potensial	Forum adopsi inovasi	Fasilitasi uji coba dan adaptasi	Penyebarluasan praktik inovasi	Monitoring keberlanjutan adopsi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Jumlah forum/laporan hasil riset terdiseminasi	Dokumentasi hasil riset lokal	Publikasi hasil riset	Forum diseminasi lintas sektor	Sinergi antar pelaku inovasi	Aplikasi hasil riset dalam kebijakan/industri
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan	Jumlah	Sosialisasi	Kampanye	Lomba inovasi	Expo inovasi	Platform digital

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
kampanye inovasi	kegiatan promosi inovasi	umum	tematik berbasis sektor		daerah	promosi inovasi
Apresiasi prestasi inovasi	Jumlah penghargaan dan penerima	Perumusan skema apresiasi	Sosialisasi kriteria & seleksi	Pelaksanaan penghargaan	Peningkatan kategori apresiasi	Institusionalisasi agenda tahunan
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah startup berbasis riset yang terbentuk	Sosialisasi dan pelatihan wirausaha riset	Inkubasi bisnis inovatif	Pendampingan legal dan pasar	Pemberian insentif	Kolaborasi dengan investor/venture
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah pengetahuan lokal terdokumentasi & dilindungi	Pemetaan pengetahuan lokal	Dokumentasi & digitalisasi	Pendaftaran HKI lokal	Edukasi & pelatihan komunitas	Komersialisasi pengetahuan lokal
Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Prakarsa pengembangan riset dan	Jumlah inovasi berbasis	Identifikasi permasalahan utama	Penjaringan ide inovatif	Pendanaan solusi inovatif	Uji coba dan replikasi	Integrasi ke dalam program daerah

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	permasalahan lokal					
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Jumlah klaster inovasi aktif	Pemetaan potensi unggulan	Perumusan klaster prioritas	Penguatan ekosistem klaster	Kemitraan bisnis dan riset	Ekspansi pasar dan hilirisasi
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah	Jumlah kebijakan harmonis	Review kebijakan pusat-daerah	FGD dan sinkronisasi kebijakan	Penyesuaian peraturan daerah	Monitoring efektivitas harmonisasi	Penyesuaian lanjutan dan advokasi pusat

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
daerah						
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Jumlah program/riset terkait isu global	Sosialisasi SDGs dan isu global	Integrasi isu global ke riset lokal	Kolaborasi program regional/global	Evaluasi dan pelaporan capaian	Penyesuaian kebijakan berbasis hasil
Penguatan kerja sama internasional	Jumlah kerja sama internasional aktif	Identifikasi mitra global potensial	Penjajakan dan negosiasi	Penandatanganan kerja sama	Implementasi program	Replikasi dan penguatan kemitraan
Prioritas 8: Peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan	Jumlah regulasi	Review kebijakan	Penyusunan regulasi baru	Uji coba kebijakan	Evaluasi dan revisi	Implementasi luas

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
riset dan inovasi di daerah	pendidikan berbasis riset	eksisting				
Penataan basis data riset dan inovasi	Tersedianya dashboard data riset pendidikan	Identifikasi kebutuhan data	Pengembangan sistem database	Integrasi data sekolah dan perguruan tinggi	Uji coba dan pelatihan	Operasionalisasi penuh
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Jumlah fasilitas riset pendidikan dibangun/ditingkatkan	Pemetaan kebutuhan sarpras	Penyusunan rencana pembangunan	Pembangunan sarpras dasar	Operasionalisasi fasilitas	Pemeliharaan dan pengembangan lanjutan
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Persentase APBD untuk riset pendidikan	Sosialisasi kebutuhan anggaran	Alokasi awal dana riset	Peningkatan dan monitoring penggunaan	Evaluasi efektivitas	Penguatan skema pendanaan alternatif
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah karya ilmiah/hasil riset yang didaftarkan HKI	Sosialisasi HKI ke guru/dosen/siswa	Fasilitasi pendaftaran HKI	Pelatihan teknis dan klinik HKI	Monitoring dan pemanfaatan	Kolaborasi hilirisasi produk riset
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Jumlah MoU dan kegiatan kolaboratif	Identifikasi stakeholder pendidikan	Penjajakan dan MoU	Penelitian kolaboratif	Evaluasi hasil kerja sama	Penguatan kelembagaan bersama
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Rasio laboratorium/ ruang inovasi aktif	Pemetaan sarana riset	Pengadaan sarpras sederhana	Pemanfaatan ruang inovasi	Integrasi ke sistem sekolah	Duplikasi ke sekolah lain
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah mitra pendidikan dan riset	Pemetaan dan pendekatan mitra	Penandatanganan kerja sama	Implementasi bersama	Perluasan mitra	Evaluasi dan keberlanjutan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Peningkatan difusi inovasi	Jumlah inovasi pendidikan yang direplikasi	Forum pertukaran praktik baik	Dokumentasi dan diseminasi inovasi	Replikasi inovasi antar sekolah	Pendampingan dan penyesuaian lokal	Pembentukan komunitas inovasi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Jumlah diseminasi hasil riset	Kegiatan seminar/loka karya	Pelatihan untuk guru dan dosen	Publikasi digital hasil riset	Kolaborasi penelitian siswa-guru	Integrasi hasil riset ke kurikulum
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan kampanye inovasi	Jumlah kegiatan kampanye inovasi pendidikan	Lomba inovasi guru dan siswa	Festival inovasi sekolah	Media promosi hasil inovasi	Video edukatif berbasis riset	Kegiatan tahunan inovasi pendidikan
Apresiasi prestasi inovasi	Jumlah penghargaan bagi inovator	Skema penghargaan lokal	Penjurian inovasi sekolah	Pemberian penghargaan	Pengembangan kategori inovasi	Nasionalisasi kegiatan apresiasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah wirausaha pendidikan dari riset	Inkubasi inovasi siswa	Pembinaan dan pelatihan kewirausahaan	Pilot produk riset pendidikan	Kemitraan dengan investor lokal	Komersialisasi
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah pengetahuan lokal terinventarisasi	Identifikasi praktik pendidikan lokal	Dokumentasi pengetahuan lokal	Digitalisasi & HKI	Diseminasi ke sekolah	Integrasi praktik lokal dalam pembelajaran
Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan/atau mengatasi permasalahan	Jumlah riset pendidikan lokal	Pemetaan kebutuhan daerah	Prioritas topik riset	Pendanaan riset oleh pemda	Uji coba hasil riset	Kebijakan berbasis hasil riset

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
n daerah						
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Jumlah klaster inovasi pendidikan	Pemetaan potensi sekolah unggulan	Pembentukan klaster inovasi	Kolaborasi guru-mitra daerah	Replikasi ke zona lain	Institusionalisasi klaster
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Indeks kesesuaian kebijakan	Review kebijakan pendidikan	Penyesuaian Perda/RKPD	Implementasi terintegrasi	Monitoring keselarasan	Sinkronisasi berkelanjutan
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang	Jumlah topik global dalam kurikulum & riset	Sosialisasi SDGs & pendidikan inklusif	Integrasi isu global ke bahan ajar	Kegiatan tematik global	Kolaborasi riset lintas negara	Evaluasi pembelajaran berbasis global

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah						
Penguatan kerja sama internasional	Jumlah kerja sama internasional	Identifikasi mitra internasional	Program pertukaran pelajar/guru	Kolaborasi penelitian pendidikan	Peningkatan jejaring luar negeri	Pelaporan dan evaluasi capaian global
Prioritas 9: Peningkatan mutu dan persebaran serta keterjangkauan fasilitas kesehatan Kota Banjar						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Jumlah regulasi kesehatan berbasis riset	Review regulasi kesehatan	Penyusunan kebijakan baru	Uji coba fasilitas kesehatan	Revisi berdasarkan evaluasi	Implementasi menyeluruh
Penataan basis data riset dan inovasi	Tersedianya sistem data riset kesehatan	Audit dan identifikasi data	Pengembangan database	Integrasi data RS, Puskesmas, klinik	Pelatihan penggunaan	Operasionalisasi penuh
Pengembangan	Jumlah laboratorium	Pemetaan kebutuhan	Perencanaan pengadaan	Pembangunan laboratorium	Operasionalisasi dan pelatihan	Pemeliharaan dan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
infrastruktur dasar riset dan inovasi	dan fasilitas riset kesehatan	sarpras		mini		peningkatan
Penyediaan anggaran riset dan inovasi	Persentase anggaran kesehatan untuk riset	Sosialisasi pentingnya riset, dan identifikasi kebutuhan layanan serta kebutuhan aspek inovasi	Penganggaran awal	Evaluasi penggunaan dana	Peningkatan dana dan skema matching fund	Skema dana inovasi berkelanjutan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah paten/inovasi kesehatan terdaftar	Sosialisasi HKI bidang kesehatan	Fasilitasi instrumen pendukung	fasilitasi HKI untuk tenaga kesehatan	Pemanfaatan dalam layanan	Hilirisasi dan komersialisasi inovasi
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan	Jumlah MoU kolaboratif dengan rumah sakit, universitas, dll.	Identifikasi mitra strategis	Penandatanganan MoU	Program riset bersama	Evaluasi hasil kolaborasi	Perluasan dan keberlanjutan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
pemangku kepentingan						
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Rasio fasilitas riset terhadap jumlah institusi kesehatan	Pemetaan sarana riset	Penyediaan alat dasar riset	Pelatihan teknis alat	Optimalisasi fasilitas	Replikasi ke fasilitas lain
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah kerja sama penelitian kesehatan	Penjajakan universitas/R S	Penyusunan proposal riset bersama	Implementasi kegiatan riset	Evaluasi output	Pengembangan inovasi bersama
Peningkatan difusi inovasi	Jumlah inovasi kesehatan diadopsi	Inventarisasi inovasi	Diseminasi praktik baik	Adopsi antar fasilitas	Pendampingan implementasi	Pengukuran dampak
Peningkatan praktik baik dan	Jumlah publikasi dan seminar	Pemetaan hasil riset	Seminar/lokakarya internal	Publikasi jurnal lokal	Forum inovasi daerah	Jaringan inovator kesehatan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi						
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan kampanye inovasi	Jumlah kampanye inovasi publik	Kampanye layanan inovatif	Media sosial dan talkshow	Pameran hasil riset	Video edukasi kesehatan	Kegiatan inovasi tahunan
Apresiasi prestasi inovasi	Jumlah tenaga kesehatan penerima penghargaan	Perumusan skema penghargaan	Seleksi inovator	Penganugerahan tahunan	Dokumentasi dan publikasi	Integrasi ke sistem karier ASN
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah startup kesehatan didukung	Inkubasi ide dari fasilitas kesehatan	Pelatihan kewirausahaan	Pembuatan prototype alat kesehatan	Uji pasar dan uji coba	Komersialisasi dengan mitra industri
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan	Jumlah praktik lokal terdokumentasi	Identifikasi praktik kesehatan tradisional	Dokumentasi & validasi	Perlindungan HKI & promosi	Integrasi ke pelayanan alternatif	Kolaborasi pengobatan modern-tradisional

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
dan/atau teknologi masyarakat						
Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah riset berbasis isu lokal	Identifikasi isu kesehatan utama	Penyusunan agenda riset daerah	Pelaksanaan riset tematik	Diseminasi hasil	Kebijakan berdasarkan riset
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan	Jumlah klaster layanan kesehatan unggulan	Identifikasi layanan unggulan	Pembentukan klaster	Kolaborasi antar Puskesmas/R S	Penyusunan SOP inovasi	Duplikasi ke kecamatan lain

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
daerah						
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Indeks kesesuaian kebijakan	Review kebijakan pusat	Sinkronisasi dengan Perda	Implementasi serentak	Evaluasi dan pelaporan	Penyesuaian kebijakan berkelanjutan
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Jumlah topik global diangkat dalam riset	Sosialisasi SDGs dan WHO guidelines	Integrasi topik global ke pelatihan	Penelitian penyakit menular/global health	Kegiatan tematik Hari Kesehatan Dunia	Evaluasi implementasi standar global
Penguatan kerja sama	Jumlah mitra luar negeri	Identifikasi peluang	Forum internasional &	Pertukaran tenaga	Penelitian bersama	Pelaporan ke forum global

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
internasional		kemitraan	proposal riset	kesehatan		
Prioritas 10: Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di daerah	Kebijakan yang mendukung pembangunan sumber daya manusia	Tersusunnya kajian untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah	Pengembangan rencana kebijakan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	Implementasi program pelatihan keterampilan kerja dan pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar	Pelaksanaan program pengembangan kapasitas bagi pendidik dan pelatih untuk meningkatkan kualitas pembelajaran	Evaluasi dampak kebijakan terhadap pembangunan sumber daya manusia dan penyesuaian program untuk keberlanjutan serta relevansi
Penataan basis data riset dan inovasi	Basis data kualitas sumber daya manusia daerah	Tersusunnya rencana pengembangan basis data yang mengidentifikasi indikator	Pengumpulan data awal tentang kualitas sumber daya manusia, termasuk pendidikan,	Pengembangan sistem basis data yang terintegrasi untuk memfasilitasi akses dan	Pelaksanaan pelatihan untuk pemangku kepentingan dalam penggunaan dan	Evaluasi penggunaan basis data dalam perencanaan dan pengembangan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		dan parameter untuk mengukur kualitas sumber daya manusia di daerah	keterampilan, dan pengalaman kerja di daerah	analisis data kualitas sumber daya manusia	pemeliharaan basis data kualitas sumber daya manusia	kebijakan serta penyesuaian sistem untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kualitas sumber daya manusia
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Perencanaan pembangunan sumber daya manusia	Tersusunnya kajian awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia di daerah	Pengembangan rencana strategis yang mencakup program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	Implementasi program pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri dan pasar kerja lokal	Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap program pembangunan sumber daya manusia untuk mengukur efektivitas dan dampaknya	Revisi dan penyesuaian rencana pembangunan sumber daya manusia berdasarkan hasil evaluasi untuk keberlanjutan dan relevansi program
Penyediaan	Anggaran	Tersusunnya	Alokasi	Pelaksanaan	Pengembangan	Evaluasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
anggaran riset dan inovasi	khusus daerah untuk pembangunan sumber daya manusia	rencana anggaran khusus untuk program pembangunan sumber daya manusia yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan	anggaran untuk program pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan daerah	pengawasan dan evaluasi penggunaan anggaran dalam program pembangunan sumber daya manusia	laporan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan	dampak alokasi anggaran terhadap pembangunan sumber daya manusia dan penyesuaian anggaran untuk program yang lebih efektif dan berkelanjutan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Pemanfaatan kekayaan intelektual untuk percepatan pembangunan sumber daya manusia	Tersusunnya kajian tentang potensi pemanfaatan kekayaan intelektual dalam	Pengembangan program pelatihan dan pendidikan yang memanfaatkan kekayaan intelektual lokal	Implementasi kolaborasi antara institusi pendidikan, lembaga riset, dan pelaku industri untuk	Pelaksanaan seminar dan workshop untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya	Evaluasi dampak pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap pembangunan sumber daya

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		program pembangunan sumber daya manusia di daerah	untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat	mengembangkan kurikulum berbasis kekayaan intelektual	kekayaan intelektual dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia	manusia dan perumusan strategi untuk keberlanjutan program
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan BRIN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Tersusunnya rencana kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan BRIN untuk mengidentifikasi kebutuhan riset yang mendukung pembangunan sumber daya	Pengembangan program riset bersama yang berfokus pada inovasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja	Implementasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan mahasiswa dan peneliti dalam proyek yang relevan dengan kebutuhan lokal	Pelaksanaan pelatihan dan workshop berbasis hasil riset untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan pelatih di daerah	Evaluasi dampak kolaborasi riset terhadap pembangunan sumber daya manusia dan penyusunan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		manusia				
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Jaringan inovasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Tersusunnya kajian tentang potensi jaringan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah	Pembentukan jaringan kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk mendukung program pembangunan sumber daya manusia	Implementasi program inovasi yang melibatkan semua anggota jaringan dalam pengembangan kurikulum dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar	Pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman antara anggota jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia	Evaluasi dampak jaringan inovasi terhadap pembangunan sumber daya manusia dan perencanaan untuk pengembangan jaringan yang lebih luas dan berkelanjutan
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi yang terkait dengan pembangunan sumber daya manusia	Tersusunnya kajian tentang jenis teknologi yang relevan dan berpotensi	Pengembangan program transfer teknologi yang melibatkan pelatihan bagi tenaga pendidik	Implementasi proyek demonstrasi untuk menunjukkan manfaat dan aplikasi	Pelaksanaan workshop dan seminar untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan	Evaluasi dampak transfer teknologi terhadap pembangunan sumber daya

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah	dan pelatih dalam penerapan teknologi terbaru	teknologi dalam konteks pendidikan dan pelatihan	masyarakat dalam memanfaatkan teknologi untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia	manusia dan penyesuaian program untuk keberlanjutan dan relevansi
Peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	Sosialisasi praktik baik dan diseminasi hasil riset tentang pembangunan sumber daya manusia	Tersusunnya rencana sosialisasi yang mencakup praktik baik dan hasil riset terkait pembangunan sumber daya manusia di daerah	Pelaksanaan seminar dan lokakarya untuk membagikan praktik baik dan hasil riset kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha	Pengembangan materi diseminasi yang mencakup panduan dan rekomendasi berbasis hasil riset untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Implementasi kampanye media untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik baik dan hasil riset yang mendukung pembangunan sumber daya manusia	Evaluasi dampak sosialisasi dan diseminasi terhadap adopsi praktik baik dan pembangunan sumber daya manusia di daerah
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi kampanye pengembangan inovasi stakeholder dalam pembangunan sumber daya manusia	Tersusunnya rencana kampanye promosi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan inovasi untuk pembangunan sumber daya manusia	Pelaksanaan kegiatan promosi untuk mengedukasi pemangku kepentingan tentang pentingnya inovasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Pengembangan materi kampanye yang mencakup studi kasus inovasi sukses dan best practices yang telah meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Implementasi program kolaboratif antara pemangku kepentingan untuk mendorong inovasi dalam pendidikan dan pelatihan	Evaluasi dampak kampanye promosi terhadap keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengembangan inovasi dan pembangunan sumber daya manusia
Apresiasi prestasi inovasi	Penyelenggaraan lomba inovasi dalam rangka percepatan pembangunan sumber daya manusia	Tersusunnya rencana penyelenggaraan lomba inovasi yang berfokus pada ide dan solusi untuk meningkatkan	Pelaksanaan sosialisasi dan promosi lomba inovasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk	Pelaksanaan lomba inovasi yang mengundang peserta untuk mengajukan proposal dan ide kreatif yang dapat	Evaluasi hasil lomba dan penilaian inovasi yang diusulkan, serta pemilihan pemenang untuk mendapatkan	Implementasi dan monitoring inovasi yang dihasilkan dari lomba serta evaluasi dampaknya terhadap pembangunan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		n kualitas sumber daya manusia di daerah	mendorong partisipasi	meningkatkan kualitas sumber daya manusia	dukungan dan pendanaan	sumber daya manusia di daerah
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka pembangunan sumber daya manusia	Tersusunnya rencana untuk mendirikan perusahaan pemula berbasis riset yang fokus pada pengembangan solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Pengembangan produk atau layanan yang inovatif dari perusahaan pemula yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	Implementasi program kolaborasi antara perusahaan pemula, perguruan tinggi, dan lembaga riset untuk menciptakan peluang pelatihan dan pendidikan	Pelaksanaan pemasaran dan sosialisasi produk atau layanan kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan adopsi di sektor pendidikan dan pelatihan	Evaluasi dampak perusahaan pemula terhadap pembangunan sumber daya manusia dan perencanaan untuk pengembangan lebih lanjut dalam inovasi dan riset
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan	Inventarisasi dan kodefikasi teknologi	Tersusunnya rencana inventarisasi dan	Pelaksanaan pengumpulan data tentang teknologi	Pengembangan basis data yang terintegrasi	Pelaksanaan pelatihan bagi masyarakat tentang	Evaluasi dampak pemanfaatan teknologi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	masyarakat atau kearifan lokal yang terkait dengan percepatan pembangunan sumber daya manusia	kodefikasi teknologi masyarakat serta kearifan lokal yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia	masyarakat dan kearifan lokal yang relevan dengan pendidikan dan pengembangan keterampilan	untuk menyimpan dan mengelola informasi tentang teknologi masyarakat dan kearifan lokal	pemanfaatan teknologi dan kearifan lokal dalam konteks pembangunan sumber daya manusia	masyarakat dan kearifan lokal terhadap pembangunan sumber daya manusia serta penyusunan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut

Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Prakarsa riset dan inovasi untuk pembangunan sumber daya manusia	Tersusunnya rencana prakarsa riset yang berfokus pada identifikasi kebutuhan dan tantangan dalam pembangunan	Pengembangan program riset kolaboratif yang melibatkan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk menciptakan inovasi dalam pendidikan dan	Implementasi proyek riset dan inovasi yang menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja	Pelaksanaan seminar dan workshop untuk mempresentasikan hasil riset dan inovasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat	Evaluasi dampak prakarsa riset dan inovasi terhadap pembangunan sumber daya manusia serta perumusan strategi untuk pengembangan berkelanjutan
---	--	--	---	--	--	---

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		n sumber daya manusia	pelatihan			
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Klaster inovasi untuk pembangunan sumber daya manusia	Tersusunnya kajian tentang pembentukan klaster inovasi yang fokus pada pembangunan sumber daya manusia di daerah	Pembentukan jaringan klaster inovasi yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, pelaku usaha, dan lembaga riset untuk kolaborasi dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia	Implementasi program-program inovatif dalam klaster yang berfokus pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar	Pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman antar anggota klaster untuk meningkatkan kapasitas dan inovasi dalam pembangunan sumber daya manusia	Evaluasi dampak klaster inovasi terhadap pembangunan sumber daya manusia serta perencanaan untuk pengembangan klaster yang lebih luas dan berkelanjutan
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah	Koherensi kebijakan yang ada di daerah dengan kebijakan	Tersusunnya kajian untuk mengidentifikasi kesenjangan antara	Pengembangan rencana aksi untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan	Implementasi kebijakan yang disesuaikan untuk meningkatkan	Pelaksanaan forum koordinasi antara pemerintah daerah dan	Evaluasi dampak koherensi kebijakan terhadap pembangunan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
daerah	pusat terkait pembangunan sumber daya manusia	kebijakan daerah dan kebijakan pusat terkait pembangunan sumber daya manusia	kebijakan pusat, termasuk konsultasi dengan pemangku kepentingan	kualitas sumber daya manusia dengan memperhatikan regulasi dan arahan dari pemerintah pusat	pusat untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia	sumber daya manusia di daerah dan perumusan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Pembangunan sumber daya manusia mengikuti standar global	Tersusunnya rencana strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengacu pada standar global di bidang pendidikan	Pengembangan program pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan standar internasional untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Implementasi sistem akreditasi dan sertifikasi yang diakui secara internasional untuk lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah	Pelaksanaan kolaborasi internasional dengan institusi pendidikan dan organisasi internasional untuk berbagi praktik terbaik dalam pembangunan sumber daya manusia	Evaluasi dampak penerapan standar global terhadap kualitas sumber daya manusia di daerah serta penyesuaian program untuk keberlanjutan dan relevansi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		dan pelatihan				
Penguatan kerja sama internasional	Kerjasama internasional dalam percepatan pembangunan sumber daya manusia	Tersusunnya rencana kerjasama internasional yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia, termasuk identifikasi mitra strategis	Pengembangan program kolaborasi dengan institusi pendidikan dan lembaga internasional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pembangunan sumber daya manusia	Implementasi proyek bersama yang melibatkan pelatihan, riset, dan pengembangan program yang mendukung pembangunan sumber daya manusia	Pelaksanaan seminar dan konferensi internasional untuk membahas isu terkini dalam pembangunan sumber daya manusia dan berbagi praktik terbaik	Evaluasi dampak kerjasama internasional terhadap pembangunan sumber daya manusia dan penyusunan rekomendasi untuk pengembangan kerjasama lebih lanjut
Prioritas 11: Pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik						
Elemen 1: KEBIJAKAN DAN INFRASTRUKTUR RISET DAN INOVASI DI DAERAH						
Reformasi kebijakan riset dan inovasi di	Kebijakan yang mendukung pengoptimala	Tersusunnya kajian untuk mengidentifik asi	Pengembangan rencana kebijakan pendidikan dan	Implementasi program pelatihan keterampilan	Pelaksanaan program pengembangan kapasitas bagi	Evaluasi dampak kebijakan terhadap

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
daerah	n pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	kebutuhan dan tantangan dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di daerah	pelatihan yang berfokus pada pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	kerja dan pendidikan vokasi yang berfokus pada tata kelola pemerintahan	tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik dan penyesuaian program untuk keberlanjutan serta relevansi
Penataan basis data riset dan inovasi	Sistem informasi tata kelola pemerintah yang baik dan berdaya saing	Tersusunnya rencana pengembangan basis data yang mengidentifikasi indikator dan parameter untuk mengukur kualitas tata	Pengumpulan data awal tentang kualitas tata kelola pemerintahan termasuk pendidikan, keterampilan, dan pengalaman kerja di daerah	Pengembangan sistem basis data yang terintegrasi untuk memfasilitasi akses dan analisis data kualitas tata kelola pemerintahan	Pelaksanaan pelatihan untuk pemangku kepentingan dalam penggunaan dan pemeliharaan basis data tata kelola pemerintahan	Evaluasi penggunaan basis data dalam perencanaan dan pengembangan kebijakan serta penyesuaian sistem untuk meningkatkan efektivitas

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		kelola pemerintahan di daerah				pengelolaan tata kelola pemerintahan
Pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi	Perencanaan pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	Tersusunnya kajian awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di daerah	Pengembangan rencana strategis yang mencakup program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Implementasi program pelatihan keterampilan tata kelola pemerintahan	Pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap program peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik untuk mengukur efektivitas dan dampaknya	Revisi dan penyesuaian rencana peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi untuk keberlanjutan dan relevansi program
Penyediaan anggaran riset dan	Anggaran yang secara khusus	Tersusunnya rencana anggaran	Alokasi anggaran untuk program	Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi	Pengembangan laporan akuntabilitas	Evaluasi dampak alokasi

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
inovasi	digunakan untuk pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik yang baik dan berdaya saing	khusus untuk program peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik yang mencakup pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan	pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai kebutuhan daerah	penggunaan anggaran dalam program peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	dan transparansi penggunaan anggaran untuk meningkatkan kepercayaan publik dan pemangku kepentingan	anggaran terhadap peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik dan penyesuaian anggaran untuk program yang lebih efektif dan berkelanjutan
Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Inventaris data kekayaan intelektual tentang pengoptimalan	Tersusunnya kajian tentang potensi pemanfaatan kekayaan intelektual	Pengembangan program pelatihan dan pendidikan yang memanfaatkan kekayaan	Implementasi kolaborasi antara institusi, lembaga riset, dan perguruan tinggi untuk	Pelaksanaan seminar dan workshop untuk meningkatkan kesadaran tentang	Evaluasi dampak pemanfaatan kekayaan intelektual terhadap peningkatan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	dalam program peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di daerah	intelektual lokal untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	mengembangkan tata kelola pemerintahan berbasis kekayaan intelektual	pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan	kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik dan perumusan strategi untuk keberlanjutan program
Elemen 2: KAPASITAS KELEMBAGAAN DAN DAYA DUKUNG RISET DAN INOVASI						
Penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah dengan pemangku kepentingan	Kolaborasi riset dengan perguruan tinggi dan BRIN dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam	Tersusunnya rencana kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan BRIN untuk mengidentifikasi kebutuhan	Pengembangan program riset bersama yang berfokus pada inovasi dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Implementasi kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan mahasiswa dan peneliti dalam proyek yang relevan dengan kebutuhan	Pelaksanaan pelatihan dan workshop berbasis hasil riset untuk meningkatkan kompetensi pegawai dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di	Evaluasi dampak kolaborasi riset terhadap peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik dan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pelayanan publik	riset yang mendukung peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	yang baik	lokal	daerah	penyusunan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut
Penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah	Jaringan inovasi untuk pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	Tersusunnya kajian tentang potensi jaringan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah	Pembentukan jaringan kolaborasi antara lembaga pendidikan, dan pemerintah untuk mendukung program peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam	Implementasi program inovasi yang melibatkan semua anggota jaringan dalam pengembangan tata kelola pemerintahan yang relevan	Pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman antara anggota jaringan untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan sumber daya manusia dalam mewujudkan tata kelola	Evaluasi dampak jaringan inovasi terhadap peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik dan perencanaan untuk

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
			pelayanan publik		pemerintahan yang baik	pengembangan jaringan yang lebih luas dan berkelanjutan
Elemen 3: KEMITRAAN RISET DAN INOVASI						
Peningkatan difusi inovasi	Transfer teknologi yang terkait dengan pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	Tersusunnya kajian tentang jenis teknologi yang relevan dan berpotensi meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah	Pengembangan program transfer teknologi yang melibatkan pelatihan bagi pegawai pemerintah dalam penerapan teknologi terbaru	Implementasi proyek demonstrasi untuk menunjukkan manfaat dan aplikasi teknologi dalam konteks tata kelola pemerintahan	Pelaksanaan workshop dan seminar untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam memanfaatkan teknologi untuk pengembangan kualitas tata kelola pemerintahan	Evaluasi dampak transfer teknologi terhadap peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik dan penyesuaian program untuk keberlanjutan dan relevansi
Peningkatan praktik baik	Sosialisasi praktik baik	Tersusunnya rencana	Pelaksanaan seminar dan	Pengembangan materi	Implementasi kampanye	Evaluasi dampak

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
dan diseminasi hasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi	dan diseminasi hasil riset tentang pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	sosialisasi yang mencakup praktik baik dan hasil riset terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah	lokakarya untuk membagikan praktik baik dan hasil riset kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha	diseminasi yang mencakup panduan dan rekomendasi berbasis hasil riset untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia	media untuk meningkatkan kesadaran tentang praktik baik dan hasil riset yang mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia	sosialisasi dan diseminasi terhadap adopsi praktik baik dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah
Elemen 4: BUDAYA RISET DAN INOVASI						
Promosi dan kampanye inovasi	Promosi kampanye pengembangan inovasi stakeholder dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi	Tersusunnya rencana kampanye promosi yang melibatkan semua pemangku kepentingan dalam pengembangan	Pelaksanaan kegiatan promosi untuk mengedukasi pemangku kepentingan tentang pentingnya inovasi dalam meningkatkan	Pengembangan materi kampanye yang mencakup studi kasus inovasi sukses dan best practices yang telah	Implementasi program kolaboratif antara pemangku kepentingan untuk mendorong inovasi dalam tata kelola	Evaluasi dampak kampanye promosi terhadap tata kelola pemerintahan dalam pengembangan inovasi dan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	komunikasi dalam pelayanan publik	an inovasi untuk peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	kualitas tata kelola pemerintahan	meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	pemerintahan yang baik	peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik
Apresiasi prestasi inovasi	Penyelenggaraan lomba inovasi dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	Tersusunnya rencana penyelenggaraan lomba inovasi yang berfokus pada ide dan solusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di daerah	Pelaksanaan sosialisasi dan promosi lomba inovasi kepada masyarakat, perguruan tinggi, dan pelaku usaha untuk mendorong partisipasi	Pelaksanaan lomba inovasi yang mengundang peserta untuk mengajukan proposal dan ide kreatif yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Evaluasi hasil lomba dan penilaian inovasi yang diusulkan, serta pemilihan pemenang untuk mendapatkan dukungan dan pendanaan	Implementasi dan monitoring inovasi yang dihasilkan dari lomba serta evaluasi dampaknya terhadap peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
						ik di daerah
Pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Perusahaan pemula berbasis riset dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	Tersusunnya rencana untuk mendirikan perusahaan pemula berbasis riset yang fokus pada pengembangan solusi untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	Pengembangan produk atau layanan yang inovatif dari perusahaan pemula yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Implementasi program kolaborasi antara perusahaan pemula, perguruan tinggi, dan lembaga riset untuk menciptakan peluang tata kelola pemerintahan yang baik	Pelaksanaan pemasaran dan sosialisasi produk atau layanan kepada pemangku kepentingan untuk meningkatkan adopsi di sektor pemerintah daerah	Evaluasi dampak perusahaan pemula terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan perencanaan untuk pengembangan lebih lanjut dalam inovasi dan riset
Inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau	Inventarisasi dan kodefikasi teknologi masyarakat atau kearifan	Tersusunnya rencana inventarisasi dan kodefikasi teknologi	Pelaksanaan pengumpulan data tentang teknologi masyarakat dan kearifan lokal	Pengembangan basis data yang terintegrasi untuk menyimpan	Pelaksanaan pelatihan bagi pegawai tentang pemanfaatan teknologi dan kearifan lokal	Evaluasi dampak pemanfaatan teknologi masyarakat dan kearifan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
teknologi masyarakat	lokal yang terkait dengan pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	masyarakat serta kearifan lokal yang dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan	yang relevan dengan tata kelola pemerintahan	dan mengelola informasi tentang teknologi masyarakat dan kearifan lokal	dalam konteks peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	lokal terhadap peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik serta penyusunan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut

Elemen 5: KETERPADUAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH

Prakarsa pengembangan riset dan inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah dan/atau	Prakarsa riset dan inovasi untuk pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam	Tersusunnya rencana prakarsa riset yang berfokus pada identifikasi kebutuhan dan	Pengembangan program riset kolaboratif yang melibatkan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan untuk	Implementasi proyek riset dan inovasi yang menghasilkan solusi konkret untuk meningkatkan keterampilan	Pelaksanaan seminar dan workshop untuk mempresentasikan hasil riset dan inovasi kepada pemangku	Evaluasi dampak prakarsa riset dan inovasi terhadap peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi
---	---	--	--	--	---	--

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
mengatasi permasalahan daerah	pelayanan publik	tantangan dalam peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	menciptakan inovasi dalam tata kelola pemerintahan	dan kompetensi tenaga kerja	kepentingan dan masyarakat	komunikasi dalam pelayanan publik serta perumusan strategi untuk pengembangan berkelanjutan
Penyelenggaraan pengembangan klaster inovasi berbasis produk unggulan daerah	Klaster inovasi untuk penguatan pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	Tersusunnya kajian tentang pembentukan klaster inovasi yang fokus pada peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di	Pembentukan jaringan klasterinovasi yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga riset untuk kolaborasi dalam pengembangan kualitas tata kelola	Implementasi program-program inovatif dalam klaster yang berfokus pada pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan	Pelaksanaan kegiatan berbagi pengetahuan dan pengalaman antar anggota klaster untuk meningkatkan kapasitas dan inovasi dalam peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi	Evaluasi dampak klaster inovasi terhadap peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik serta perencanaan untuk pengembangan

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
		daerah	pemerintahan		komunikasi dalam pelayanan publik	klaster yang lebih luas dan berkelanjutan
Kesesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah	Koherensi kebijakan yang ada di daerah dengan kebijakan pusat terkait dengan pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	Tersusunnya kajian untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat terkait peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	Pengembangan rencana aksi untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat, termasuk konsultasi dengan pemangku kepentingan	Implementasi kebijakan yang disesuaikan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan memperhatikan regulasi dan arahan dari pemerintah pusat	Pelaksanaan forum koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat untuk membahas kemajuan dan tantangan dalam peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	Evaluasi dampak koherensi kebijakan terhadap peningkatan kualitas pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik di daerah dan perumusan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut
Elemen 6: PENYELARASAN DENGAN PERKEMBANGAN GLOBAL						

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah	Layanan tata kelola pemerintah berbasis lingkungan dan terstandar	Tersusunnya rencana strategis untuk pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik dengan mengacu pada standar global di bidang Tata Kelola Pemerintahan	Pengembangan program pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik sesuai dengan standar internasional untuk meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Implementasi sistem akreditasi dan sertifikasi yang diakui secara internasional untuk Tata Kelola Pemerintahan organisasi internasional untuk berbagi praktik terbaik dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	Pelaksanaan kolaborasi internasional dengan institusi pendidikan dan organisasi internasional untuk berbagi praktik terbaik dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	Evaluasi dampak penerapan standar global terhadap kualitas Tata Kelola Pemerintahan di daerah serta penyesuaian program untuk keberlanjutan dan relevansi
Penguatan kerja sama internasional	Kerjasama internasional dalam rangka	Tersusunnya rencana kerjasama	Pengembangan program kolaborasi	Implementasi proyek bersama yang	Pelaksanaan seminar dan konferensi	Evaluasi dampak kerjasama

Sub Elemen Ekosistem RID	Indikator	Tahun ke-1	Tahun ke-2	Tahun ke-3	Tahun ke-4	Tahun ke-5
	pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	internasional yang berfokus pada pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik termasuk identifikasi mitra strategis	dengan institusi pendidikan dan lembaga internasional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	melibatkan pelatihan, riset, dan pengembangan program yang mendukung pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik	internasional untuk membahas isu-terkini dalam pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik dan berbagi praktik terbaik	internasional terhadap pengoptimalan pemanfaatan teknologi komunikasi dalam pelayanan publik dan penyusunan rekomendasi untuk pengembangan kerjasama lebih lanjut

BAB VII PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Kota Banjar Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi pembangunan daerah yang berbasis pada riset dan inovasi. Dokumen ini tidak hanya menjadi pedoman dalam merancang arah kebijakan pembangunan daerah, tetapi juga sebagai kerangka kerja dalam memperkuat ekosistem riset dan inovasi yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Selama proses penyusunan, telah dilakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi eksisting Kota Banjar, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi, potensi lokal seperti produk unggulan (rambutan Sibatulawang, pepaya kalifornia, dan belimbing madu), serta kesenjangan yang masih terjadi antara harapan dan kondisi riil. Hasil analisis ini kemudian dirumuskan menjadi strategi, peta jalan, dan program-program indikatif yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara partisipatif, terukur, dan relevan dengan tantangan zaman.

Rencana ini menyusun enam elemen ekosistem riset dan inovasi daerah sebagai kerangka utama: (1) kebijakan dan infrastruktur, (2) kapasitas kelembagaan, (3) kemitraan strategis, (4) budaya riset dan inovasi, (5) keterpaduan riset dan inovasi, serta (6) penyelarasan dengan perkembangan global. Setiap elemen diberikan indikator dan sasaran tahunan yang terstruktur dan realistis guna memastikan keberlanjutan dan ketercapaian program pembangunan berbasis IPTEK hingga tahun 2029.

Keterlibatan aktif masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah daerah dalam proses penyusunan dokumen ini mencerminkan semangat kolaboratif yang kuat. Hal ini menjadi modal sosial yang penting dalam pelaksanaan RIPJPID ke depan, terutama dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan lokal dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Banjar.

Dengan hadirnya dokumen ini, Pemerintah Kota Banjar memiliki landasan strategis yang komprehensif untuk mengembangkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. RIPJPID diharapkan menjadi titik awal bagi kebangkitan riset dan inovasi daerah yang berorientasi pada kemajuan sosial ekonomi, peningkatan daya saing daerah, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dokumen ini juga menjadi komitmen bersama bahwa pembangunan daerah tidak dapat lagi hanya bersandar pada pendekatan konvensional, tetapi harus bertransformasi menjadi pembangunan berbasis pengetahuan (knowledge-based development) yang responsif terhadap dinamika zaman dan tantangan global. Pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat harus menjadi mitra sejajar dalam ekosistem riset dan inovasi daerah.

Diharapkan RIPJPID Kota Banjar Tahun 2025–2029 dapat diimplementasikan dengan penuh semangat, komitmen, dan tanggung jawab, demi terwujudnya Kota Banjar sebagai kota inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

7.2 Rekomendasi

Agar pelaksanaan RIPJPID Kota Banjar 2025–2029 dapat berjalan optimal, berikut adalah beberapa rekomendasi strategis:

- 1. Penguatan Kelembagaan dan Regulasi Daerah**
Pemerintah Kota Banjar perlu segera menetapkan regulasi daerah yang mendukung pelaksanaan RIPJPID secara

hukum, termasuk peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada). Penguatan peran Bappelitbangda sebagai simpul koordinasi riset dan inovasi daerah juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan RIPJPID.

2. **Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Pendukung**
Penyediaan laboratorium, pusat inovasi, serta sistem informasi berbasis digital perlu terus dikembangkan. Fasilitas ini akan menjadi penopang utama dalam mendukung pelaksanaan riset yang aplikatif dan berdampak langsung pada pengembangan sektor unggulan.
3. **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)**
Pemerintah daerah didorong untuk secara berkelanjutan menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan fasilitasi beasiswa kepada ASN dan pelaku riset agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan IPTEK di era globalisasi.
4. **Kolaborasi dengan Mitra Strategis**
Kerja sama yang lebih intensif dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, serta lembaga internasional perlu diperluas. Kolaborasi ini bertujuan untuk transfer pengetahuan dan teknologi, pembiayaan bersama, dan adopsi praktik terbaik dari luar daerah.
5. **Pemanfaatan Data dan Teknologi Digital**
Pengembangan basis data riset dan inovasi yang terintegrasi dan mudah diakses akan sangat membantu dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program. Teknologi digital juga perlu dioptimalkan untuk pelayanan publik berbasis riset.
6. **Monitoring dan Evaluasi Berkala**
RIPJPID perlu dijadikan dokumen hidup (living document) yang diperbarui secara berkala berdasarkan hasil evaluasi capaian, perubahan kondisi lingkungan strategis, serta perkembangan teknologi. Untuk itu, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi (monev) yang komprehensif dan berbasis bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, D. (1984). *An introduction to development planning in the third world*. Chichester: John Wiley and Sons.
- Hadiwijoyo, S. S., & Anisa, F. D. (2020). *Perencanaan pembangunan daerah berbasis SDGs*. Depok: Rajawali Press.
- Kartasasmita, G. (1997). *Administrasi pembangunan: Perkembangan pemikiran dan praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Riyadi, S., & Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Subandi. (2011). *Ekonomi pembangunan*. Jakarta: Alfabeta.
- Tjokrowinoto, M. (1993). *Politik pembangunan: Sebuah konsep, arah dan strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sumber Peraturan

- Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Kementerian Dalam Negeri. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah*.

Sumber Daring

- Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). *Luas daerah dan jumlah pulau menurut kecamatan di Kota Banjar, 2024*. <https://banjarkota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). *Jumlah penduduk Kota Banjar hasil proyeksi interim menurut jenis kelamin (jiwa), 2023–2024*. <https://banjarkota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). *Piramida penduduk Kota Banjar (ribuan), 2024. Kota Banjar dalam angka 2025*. <https://banjarkota.bps.go.id/>

- Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2025). *Penduduk usia kerja dan angkatan kerja, Agustus 2022–Agustus 2024. Keadaan ketenagakerjaan Kota Banjar Agustus 2024.* <https://banjarkota.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2025). *PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat (ribu rupiah), 2023–2024.* <https://jabar.bps.go.id/>
- Badan Pusat Statistik Kota Banjar. (2024). *Indeks pembangunan manusia Kota Banjar dan komponen pembentuknya, 2022–2024.* <https://banjarkota.bps.go.id/>
- Peta Tematik Indonesia. (2016). *Peta administrasi Kota Banjar.* <https://petatematikindo.wordpress.com/tag/kota-banjar/>

WALI KOTA BANJAR,

Ttd.

SUDARSONO